

MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA
BANJIR BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH (BPBD)
KABUPATEN SERANG

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ilmu Sosial pada Konsentrasi Manajemen Publik
Program Studi Ilmu Administrasi Negara



Oleh:
KISWANTO
NIM.6661091659

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
SERANG BANTEN 2015

LEMBAR PERSETUJUAN

Nama : KISWANTO
NIM : 6661091659
Judul : Manajemen Penanggulangan Bencana Banjir Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Serang.

Skripsi ini Telah Disetujui untuk Diujikan
Serang, 2014

Menyetujui,

Pembimbing I

Listyaningsih, S.Sos., M.Si
NIP.197603292003122001

Pembimbing II

Riny Handayani, S.Si., M.Si
NIP.197601062006042007

Mengetahui
Dekan FISIP

Dr. Agus Sjaifari, M.Si
NIP.197108242005011002

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : KISWANTO
NIM : 6661091659
JudulSkripsi : MANEJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
KABUPATEN SERANG

Telah diuji di hadapan Dewan Penguji Sidang Hasil Penelitian di Serang, Pada tanggal 11 bulan
Februari tahun 2015 dan dinyatakan **TIDAK LULUS/LULUS**.

Serang, 11 Februari 2015

Ketua Penguji

Anis Fuad, S.Sos, M.Si
NIP. 198009082006041002

Anggota I

Agus Sjafari, M.Si
NIP. 197108242005011002

Anggota II

Riny Handayani, S.Si., M.Si
NIP. 197601062006042007

Tanda Tangan



Mengetahui,

Dekan
Fisip Untirta



Dr. Agus Sjafari, M.Si
NIP. 197108242005011002

Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara



Rahmawati, M.Si
NIP. 197905252005012000

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : KISWANTO

NIM : 6661091659

Tempat Tanggal Lahir : Jakarta 09 Desember 1989

Fakultas/Program Studi : FISIP/Illmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul Manajemen Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Serang (Studi Kasus Peristiwa Bencana Banjir) adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti mengandung unsur plagiat, maka gelar kesarjanaan saya bisa dicabut sesuai dengan ketentuan.

Serang 4 Januari 2015


Kiswanto

ABSTRAK

Kiswanto, NIM. 666091659. Skripsi. Manajemen Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Serang (Studi Kasus Peristiwa Bencana Banjir) Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dosen Pembimbing I: Listyaningsih, S.Sos., M.Si, Dosen Pembimbing II: Riny Handayani, S.Si., M.Si.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya sosialisasi kebencanaan, belum baiknya antisipasi kebencanaan, kurangnya pengawasan terhadap pembangunan beresiko bencana dan kurangnya sarana dan pra sarana BPBD. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui manajemen penanggulangan bencana yang dilakukan BPBD. Penelitian ini dilandasi oleh teori *Manajemen Disaster* milik William Nick Carter (2008). Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif. Teknik yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan studi pustaka. Informan penelitian ini adalah petugas BPBD dan masyarakat (korban bencana) Kabupaten Serang. Analisis data yang digunakan adalah model Prasetya Irawan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen penanggulangan bencana BPBD Kabupaten Serang belum berjalan dengan baik karena pada dimensi-dimensi: pencegahan, pengurangan, persiapan, pemulihan dan pengembangan masih belum berjalan dengan baik hanya pada kejadian bencana dan respon yang sudah berjalan dengan baik. Hasil tersebut diperkuat dengan: belum memadainya sarana penampungan air dan drainase sungai, belum ada tindakan tegas pada pemukiman dan bangunan beresiko bencana, tidak meratanya sosialisasi dan pelatihan kebencanaan, belum meratanya dana stimulan perbaikan rumah, tidak adanya peraturan perlindungan instalasi-instalasi penting. Saran yang diberikan yaitu: membentuk desa siaga bencana, meningkatkan tindakan pemulihan, meningkatkan pelatihan kebencanaan pada masyarakat yang lebih luas, optimalisasi fungsi drainase.

Kata Kunci: Manajemen Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Serang.

ABSTRACT

Kiswanto NIM. 6661091659. *Research. Management Disaster Of Disaster Relief Agency (BPBD) Kabupaten Serang (a case study of flood event). Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Science. Sultan Ageng Tirtayasa University. 1st Advisor: Listyaningsih, S.Sos., M.Si, 2nd Advisor: Riny Handayani, S.Si., M.Si.*

This research supported by lack of disaster socialization, not yet good disaster anticipation, lack of supervision to the development disaster risky and lack of facilities and infrastructure BPBD. Research purposes to know the disaster management relief of BPBD. This research is predicated on the disaster management theory possession of William Nick Carter (2008). Methode of research that is used qualitative. The techniques used are interviews, observation and study library. Informants of this research is the BPBD officer and community (disaster victims) at Kabupaten Serang. Analysis of the data used is the model Prasetya Irawan, The Research results showed that is the disaster management has not well because in dimentions of prevention, mitigation, preparedness, recovery and development still not been runing well, just on disaster impact and respond which have been running well. Facts found that is water storage facilities and drainage river inadequate, there has been no decisive action in the residential area and building disaster risky, the disparity in socialization and disaster training, lack of rehabilitation disaster victims, not equal his funds stimulant house repair, the absence of savety codes on important installations. Purposition of this research that is curved disaster prepared community, increased of the recovery action, increased public awareness programs in the light of community, optimalization function of drainage.

Keywords: Management Disaster Of Disaster Relief Agency (BPBD) Serang District.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur *Alhamdulillah* peneliti panjatkan kehadiran ALLAH SWT, serta shalawat serta salam selalu tercurahkan untuk Nabi Muhammad SAW, sahabat beserta keluarganya, karena dengan ridho, rahmat, karunia dan kasih sayang-Nya yang berlimpah sehingga akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Manajemen Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Serang (Studi Kasus Peristiwa Bencana Banjir)".

Dengan selesainya skripsi ini tentu tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang senantiasa selalu mendukung peneliti. Maka peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Drs. Sholeh Hidayat., M.Pd sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
2. Dr. Agus Sjafari, S.Sos M.Si sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
3. Kandung Spto Nugroho, S.Sos., M.Si sebagai Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
4. Mia Dwianna M., S.Sos., M.I.Kom sebagai Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
5. Ismanto, S.Sos.,MM sebagai Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
6. Rahmawati, S.Sos., M.Si., sebagai Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
7. Ipah Ema Jumiati, S.Sos., M.Si., sebagai Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
8. Listyaningsih, S.Sos., M.Si. sebagai Pembimbing I yang membantu dan memberikan masukan yang berarti bagi peneliti dalam menyusun skripsi ini dari awal hingga akhir.

9. Riny Handayani, S.Si., M.Si. sebagai Pembimbing II yang membantu dan memberikan masukan yang berarti bagi peneliti dalam menyusun skripsi ini dari awal hingga akhir.
10. Rina Yulianti, S.IP., M.Si., sebagai pembimbing akademik peneliti terima kasih atas kesabaran dan nasehat-nasehatnya selama ini.
11. Semua Dosen dan Staf Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang membekali peneliti dengan ilmu pengetahuan selama perkuliahan.
12. Mama dan Bapak yang telah banyak berkorban untuk membiayai peneliti memperoleh gelar strata I. Maaf karena peneliti belum dapat memberikan yang terbaik untuk kalian. Sayang dan hormat terbesar peneliti pada Mama dan Bapak.
13. Saudara-saudara kandung peneliti Aris, Endar, Pratiwi dan Ragil. Terima kasih atas pengertian dan sayang kalian.
14. Para petugas lapangan dan staff Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang. Terima kasih atas waktu dan ilmunya serta bimbingannya.
15. Para petugas lapangan dan staff PUSDALOPS Kabupaten Serang. Terima kasih atas waktu dan ilmunya serta bimbingannya.
16. Para petugas dan staff KOREM 064 Maulana Yusuf. Terima kasih atas waktu dan ilmunya serta bimbingannya.
17. Para Kepala Desa dan Sekertaris Desa serta masyarakat desa. Terima kasih atas waktu dan ilmunya.
18. Para relawan bencana. Terima kasih atas waktu, ilmu, tenaga, pikiran, dan kerelaannya untuk membantu sesama para korban bencana.
19. Keluarga besar Mapala Krakatau Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasan. Terima kasih atas waktu, ilmu, semangat dan rasa kekeluargaan kalian.
20. Sahabat-sahabat seperjuangan peneliti Arif Santoso, Rizki Fani, Ikram Wahdi, Tri Tunggal Jati, Sapei Abdullah, Miftahul Fikri, Imron Rosyadi, Fauzi Wijaya, Yulianingtyas, Monika Aprilia, Hijriatul Mambruk, Astri Dwi Astuti, Jaya, Zakiah, Tb. Nasrullah, Adnan Rizki, Rendi Purnama, Septian

Gestiardi, Ian Adi Septiana, Bagus Pratama, Prila Adam, Mufrodi, Dede Faturnur, Jagis Ramadhan, Riky Faizal, Sony, Nendy, Doni Winarno, Rizki Panji, Ari Hardiawan, Deni Firmansyah, Nuga Ramadhan, Rizal Fauzul, Rizki Ilhami, Vito Septiana, Rizkar Nugraha, Resti Virda, Auditely Velasy, Daru Santos, Seliq, Ashadi Nurahman, Santoso, Nelson Sirait, Rifal Tanjung, Syamsul Bahri, Uta Akbar, Ignatius Elga, Syafrudin Indra, Dwi Rahayu, Agryan Prayoga, Haerul Umam, Reni Bandari, Novryan Arief, Fityan Anditya, Fani Mutia, Anton dan sahabat-sahabat yang lain yang tidak bisa disebutkan satu-persatu terima kasih atas kebersamaanya selama ini.

21. Sahabat-sahabat peneliti Ihsan Gifari, Rahmat Adiputra, Deni Hermawan, Alpian Yuliandi, Romdoni, dan Roy Parluhutan. Terima kasih atas kebersamaannya selama ini.
22. Keluarga Bapak Sanusi, Ibu Sanusi, Rahmat, dan Teh Reni yang telah memberikan banyak pelajaran, nasehat, dan kebersamaannya.
23. Keluarga Tri Tunggal Jati, Bapak, Ibu dan lainnya. Terima kasih atas kerelaan dan budi baik kalian.
24. Teman-teman seperjalanan peneliti, Tim Bogor, Tim Tangerang, Tim Palembang, Tim Padang, Tim Jogja, Tim Purwokerto, Tim Serang, Tim Lampung, Tim Jakarta dan Tim Bali. Terima kasih atas waktu, ilmu dan semangat kalian dalam perjalanan yang banyak memberikan pelajaran.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga dengan selesainya skripsi ini. Peneliti menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penyusunan proposal skripsi ini sehingga peneliti dengan rendah hati menerima masukan dari semua pihak agar dapat menghasilkan karya yang lebih baik lagi.

Serang, 2014

Peneliti

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	
LEMBAR PERSETUJUAN	
PERNYATAAN ORISINALITAS	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	17
1.3 Batasan Masalah	17
1.4 Rumusan Masalah	18
1.5 Tujuan Penelitian	18
1.6 Manfaat Penelitian	18
1.7 Sistematika Penulisan	19
BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN ASUMSI	
DASAR	
2.1 Landasan Teori Teori	23
2.1.1 Dasar Teori Manajemen	24
2.1.2 Fungsi-Fungsi Manajemen	33
2.1.3 Manajemen Bencana	47
2.1.4 Tujuan Manajemen Bencana	51
2.1.5 Siklus Manajemen Bencana	54
2.1.6 Bencana dan Penanggulangan Bencana	65

2.1.7 Fungsi dan Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah.....	71
2.2 Penelitian Terdahulu	72
2.3 Kerangka Pemikiran Penelitian	74
2.4 Asumsi Dasar	75

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian	77
3.2 Lokasi Penelitian	78
3.3 Instrumen Penelitian	79
3.4 Sumber Data	81
3.5 Informan Penelitian	81
3.6 Teknik Pengumpulan Data	82
3.6.1 Sumber Data Primer	82
3.6.1.1 Wawancara	83
3.6.1.1.1 Pedoman Wawancara	85
3.6.1.2 Observasi	87
3.6.2 Sumber Data Sekunder	88
3.6.2.1 Studi Pustaka	88
3.7 Teknik Analisis Data	88
3.8 Pemeriksaan Keabsahan Data	90
3.9 Jadwal Penelitian	93

BAB IV HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	94
4.1.1 Deskripsi Wilayah Kabupaten Serang.....	94
4.1.2 Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kabupaten Serang .	101
4.2 Deskripsi Data.....	105
4.2.1 Deskripsi Data Penelitian	105
4.2.2 Daftar Informan Penelitian	108
4.3 Deskripsi Hasil Penelitian	111
4.3.1 <i>Prevention</i> (Pencegahan).....	112
4.3.2 <i>Mitigation</i> (Pengurangan).....	118

4.3.3 <i>Preparedness</i> (Kesiapsiagaan)	124
4.3.4 <i>Disaster Impact</i> (Dampak Bencana).....	136
4.3.5 <i>Respond</i> (Tindakan Pertolongan)	141
4.3.6 <i>Recovery</i> (Pemulihan).....	160
4.3.7 <i>Development</i> (Pengembangan)	175
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	203
5.2 Saran	204
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIR	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Indeks Rawan Bencana	
Tabel 1.2 Daftar Kecamatan Rawan Bencana di Kabupaten Serang	3
Tabel 1.3 Rekapitulasi Laporan Bencana Kabupaten Serang.....	7
Tabel 1.4 Rincian Kerusakan Akibat Banjir.....	9
Tabel 3.1 Daftar Informan	82
Tabel 3.2 Pedoman Wawancara.....	86
Tabel 4.1 Pola Penggunaan Lahan Kabupaten Serang.....	95
Tabel 4.2 Daftar Informan Penelitian.....	110
Tabel 4.3 Rekapitulasi Temuan Lapangan.....	198

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 <i>Disaster Manajement Cycles</i> (William Nick Carter)	53
Gambar 2.2 Siklus Manajemen Bencana (Kodoatie).....	67
Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran.....	77
Gambar 3.1 Proses Analisis Data.....	93
Gambar 3.2 Jadwal Penelitian	98
Gambar 4.1 Peta Kabupaten Serang.....	102
Gambar 4.2 Struktur Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).....	108
Gambar 4.3 Alur Permintaan Bantuan Peralatan	168

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Ijin penelitian.

Lampiran 2 Laporan Bencana Bulan Januari 2011 s/d Januari 2014.

Lampiran 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007

Tentang Penanggulangan Bencana.

Lampiran 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008

Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Lampiran 5 Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 30 Tahun 2010

Tentang BPBD Provinsi Banten.

Lampiran 6 Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor 30 Tahun 2010 Tentang

Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unsur Pelaksana BPBD Provinsi
Banten.

Perka BNPB Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana

Penanggulangan Bencana (BAB X Rencana Aksi Daerah).

Perka BNPB Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Protap Tim Reaksi Cepat BNPB

(BAB III Penugasan Tim Reaksi Cepat (TRC) BNPB dan Laporan Tim Reaksi
Cepat BNPB).

Perka BNPB Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pedoman Bantuan Peralatan

Perka BNPB Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana (BAB II Tahapan Pembentukan Komando Tanggap Darurat Bencana).

Perka BNPB Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana.

Catatan Lapangan.

Daftar Pertanyaan.

Member Check.

Transkrip Data.

Koding.

Katagorisasi Data.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.

Secara geografis Indonesia terletak di daerah khatulistiwa dengan morfologi yang beragam dari daratan sampai pegunungan tinggi dan memiliki lempeng tektonik yang aktif disekitar perairannya, diantaranya adalah Lempeng Eurasia, Indo Australia dan Lempeng Dasar Samudra Pasifik. Hal ini menyebabkan terbentuknya jalur gempa bumi, rangkaian gunung api aktif serta patahan-patahan geologi yang merupakan zona rawan gempa bumi dan tanah longsor (Sumarwoto,2012). Potensi bencana lainnya yang dimiliki Indonesia adalah tsunami, banjir, kekeringan, angin topan dan kebakaran hutan yang sering terjadi di Indonesia.

Dari jenis – jenis bencana alam tersebut Indonesia menduduki peringkat pertama pada dua bencana alam yakni tsunami dan tanah longsor, peringkat ketiga pada gempa bumi dan peringkat keenam pada banjir berdasarkan data yang dimiliki UNISDR (United Nation Internasional Strategy for Disaster Reduction) dan sekaligus menyatakan Indonesia merupakan negara yang paling rawan terhadap bencana alam di dunia (Supriyadi,2012).

Tidak terkecuali Banten juga menyimpan potensi bencana alam yang tinggi. Diantaranya potensi letusan gunung api terbesar berasal dari Gunung Krakatau di Selat Sunda selain itu ada Gunung Asepun, Gunung Karang dan Gunung Pulosari yang perlu diwaspadai karena memiliki kawah. Pada wilayah Banten gempa bumi sering terjadi di daerah Banten Selatan yaitu Sumur, Ujung Kulon karena daerah tersebut sering tercatat terjadi gempa, yang harus diwaspadai juga diikuti dengan tsunami dapat terjadi di daerah Banten Selatan yaitu Ujung Kulon, Bayah hingga Pelabuhan Ratu yang merupakan jalur tumbukan Lempeng Indo Australia dengan Lempeng Eurasia, wilayah rawan tsunami lainnya ada pada seluruh Pesisir Barat Banten berdasarkan ketinggian tsunami dan pantainya yang landai berpotensi terkena tsunami secara langsung (Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten 2012).

Dengan daratan yang beragam Banten juga menyimpan bahaya longsor mencakup pergerakan tanah, runtuh batu, aliran serpih dan penurunan tanah seperti Mancak, Anyer, Cinangka, Ciomas dan Padarincang di Kabupaten Serang daerah Mandalawagi, Jiput, Munjul, Panimbang, Cikeusik, Cigeulis, Sumur, Cibaliung dan Cinanggung di Kabupaten Pandeglang daerah Cileleh, Bayah, Malimping, Bojong Manik, Leuwidamar, Muncang, Cijaku, Cigembong, Banjasari, Panggarangan,

Cilogran, Cibeber, Sajira dan daerah Cipanas di Kabupaten Lebak. (Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten 2012). Potensi lainnya yang dapat terjadi di Banten adalah banjir, kekeringan dan angin topan.

Tabel 1.1

Indeks Rawan Bencana

Provinsi Banten	Skor	Kelas Rawan	Ranking Nasional
Tangerang	87	Tinggi	63
Lebak	85	Tinggi	66
Pandeglang	74	Tinggi	131
Serang	65	Tinggi	170
Kota Tangerang	65	Tinggi	173
Kota Cilegon	60	Tinggi	208
Kota Serang	43	Tinggi	348
Kota Tangerang Selatan	15	Sedang	441

Sumber: BNPB: Indeks Rawan Bencana 2012

Berdasarkan Indeks Rawan Bencana (IRB) yang dilansir BNPB pada tahun 2012 dari 494 Kabupaten/ Kota di Indonesia, Kabupaten Serang berada pada peringkat 170 dengan kelas rawan tinggi. Pada Provinsi Banten Kabupaten Serang menduduki peringkat 4 setelah Kabupaten Tangerang, Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang. Dengan skor 65 Kabupaten Serang memiliki kelas rawan tinggi yang berarti daerah tersebut memiliki potensi rawan bencana yang tinggi.

Dalam hal ini masyarakat dituntut untuk memiliki kemampuan untuk mempersiapkan diri, menanggulangi dan mempertahankan diri sendiri serta dengan cepat memulihkan diri sendiri akibat bencana. Akan tetapi

masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa bencana itu adalah suatu takdir. Pada umumnya mereka percaya bahwa bencana itu adalah suatu kutukan atas dosa dan kesalahan yang telah diperbuat sehingga tidak perlu lagi berusaha untuk mengambil langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat akan kebencanaan baik berupa bencana alam maupun bencana yang disebabkan oleh manusia.

Masyarakat Kabupaten Serang belum dibekali pengetahuan yang baik terhadap situasi bencana. Melalui sosialisasi dan pelatihan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana masyarakat Kabupaten Serang akan dapat mengurangi resiko bencana. Pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum menyadari bahwa dirinya adalah calon korban bencana. Sehingga partisipasi masyarakat pada kegiatan seperti itu masih sangat kurang.

Melalui Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Serang telah memberikan kewenangan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk mengurus penanggulangan bencana di Kabupaten Serang. Karena sudah seharusnya BPBD rutin melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan memberikan informasi yang baik kepada masyarakat,

sehingga masyarakat tidak mendapatkan informasi yang salah tentang kebencanaan.

Dalam kegiatannya BPBD Kabupaten Serang telah melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi termasuk rekonstruksi. Sehingga BPBD merupakan lembaga yang diberikan kewenangan dan tanggungjawabnya terhadap upaya penanggulangan bencana di daerah. Dengan demikian BPBD adalah sentral dari penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terjadi di daerah.

Berikut ini daftar Kecamatan yang pernah dilanda peristiwa bencana yang berdampak luas yang didasari oleh kondisi rawan bencana yang terjadi di Kabupaten Serang bersumber pada kejadian bencana dan data kajian BPBD Kabupaten Serang:

Tabel 1.2

Daftar Kecamatan di Kabupaten Serang yang Rawan Bencana

No.	Kecamatan	Banjir	Longsor	Kekeringan	Kebakaran	Angin Kencang
1.	Kragilan	√				√
2.	Kibin	√				
3.	Cikande	√			√	√
4.	Kopo	√			√	
5.	Binuang	√				
6.	Jawilan	√				
7.	Bandung	√				
8.	Pamarayan	√				
9.	Tunjungteja	√				
10.	Carenang	√		√		
11.	Tanara	√				
12.	Lebakwangi	√				
13.	Pontang	√		√		
14.	Tirtayasa	√				√
15.	Kramatwatu	√				
16.	Waringinkurung		√			
17.	Bojonegara		√		√	
18.	Puloampel		√		√	
19.	Anyer	√				
20.	Cinangka	√				
21.	Padarincang	√	√			
22.	Ciomas		√			
23.	Pabuaran		√			
24.	Baros	√				
25.	Mancak		√			

Sumber: BPBD Kabupaten Serang

Tabel bencana diatas menunjukkan bahwa dari 29 Kecamatan ada 25 Kecamatan yang rawan terhadap kejadian bencana, dengan perincian 19 Kecamatan rawan bencana banjir, 7 Kecamatan rawan bencana longsor, 2 Kecamatan rawan bencana kekeringan, 4 Kecamatan rawan bencana kebakaran, 3 Kecamatan rawan bencana angin kencang/ puting beliung, dengan demikian hampir semua Kabupaten Serang pernah mengalami peristiwa bencana banjir yaitu 19 Kecamatan.

Berikut ini hasil rekapitulasi peristiwa bencana yang terjadi di Kabupaten Serang yang didapatkan dari laporan bencana bulanan yang dimulai pada Januari 2011 sampai dengan Januari 2014:

Tabel 1.3
Rekapitulasi Laporan Bencana Kabupaten Serang
Januari 2011 s/d Januari 2014

No	Bulan Jenis Bencana	Lokasi Kecamatan	Kerusakan
1	Januari 2011 Hujan deras/ banjir	Bojonegara	30 Rumah rusak berat, 10 rumah rusak ringan, jalan rusak, tiang listrik rubuh, gedung sekolah, kantor UPK
2	Januari 2011 angin kencang	Ciomas	1 meninggal, 1 Rumah rusak berat
3	Januari 2011 Kebakaran	Cikeusal, Tirtayasa	1 meninggal 208 rumah rusak berat
4	Januari 2011 Banjir/Tenggelam	Cinangka	2 meninggal 1 rumah rusak berat
5	Januari 2011 angin kencang ombak besar	Anyer	Bangunan POS SAR, pantai miring
6	Februari 2011 angin kencang	Ciomas	Rumah
7	Maret 2011 Banjir/Tenggelam	Anyer	1 meninggal
8	Mei 2011 Angin puting beliung	Baros	57 rumah rusak sedang, 16 rusak ringan
9	Agustus 2011 Tenggelam	Waringinkuring	3 orang luka ringan
10	September 2011 aktivitas G.A.K	Cinangka	
11	Oktober 2011 perkembangan G.A.K		
12	Maret 2012 Putting beliung	Tirtayasa	65 rumah rusak berat, 195 rumah rusak ringan
13	Januari 2014 Banjir	Tunjung,Padarincang Keragilan,Carenang Kibin,Binuang	501 Rumah rusak, 1 rumah roboh, jalan rusak
14	Januari 2014 Kebakaran	Bojonegara	

Sumber: Laporan Bencana Bulan Januari 2011 sampai dengan Januari 2014 Provinsi Banten
(arsip PUSDALOPS Provinsi Banten)

Berdasarkan data di atas pada periode laporan bencana Januari 2011 sampai dengan Januari 2014 telah terjadi 14 kasus peristiwa bencana baik yang disebabkan oleh peristiwa alam atau pun yang disebabkan oleh manusia. Dan telah menyebabkan kerusakan sarana milik pemerintah daerah dan harta benda milik masyarakat di Kabupaten Serang dan kerugian yang sangat disesalkan adalah hilangnya 5 nyawa manusia yang bermukim di Kabupaten Serang. Tidak hanya itu data tersebut juga tercatat adanya rumah milik warga Kabupaten Serang yang mengalami kerusakan berat sebanyak 305 unit 57 unit lainnya rusak sedang dan 221 rumah rusak ringan dengan total kerugian yang tercatat senilai Rp.943.375.000. Hal ini tentu saja sangatlah mengkhawatirkan jika tidak mendapatkan perhatian oleh pemerintah daerah. Dari 14 kasus peristiwa bencana ada satu bencana yang sering terjadi yaitu banjir. Terdapat 5 kasus peristiwa bencana banjir yang berdampak luas pada rentan waktu Januari 2011 sampai dengan Januari 2014

Pada laporan bencana yang berbeda mengenai dampak dari peristiwa bencana banjir juga telah menyebabkan rusaknya rumah/pemukiman penduduk, fasilitas pendidikan (SD, SMP/MTs), fasilitas ibadah (Mushola, Masjid), jembatan, rusaknya lahan dan tanaman pertanian serta sarana prasarana kelautan dan perikanan. Sebagai akibat genangan air dan karena pondasi jembatan yang tergerus air. Berdasarkan Laporan Bencana Banjir

2013 secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.4
Rincian Kerusakan Akibat Banjir Kabupaten Serang
Desember 2012 s/d Maret 2013

No.	Uraian	Jumlah	Kerugian	Keterangan
1.	Rumah/pemukiman	348 unit	5.665.000.000	29 Kecamatan 88 Desa 22389 KK 79091 Jiwa 3 Meninggal
2.	Jalan longsor	15 buah	3.000.000.000	
3.	Jembatan	-	-	
4.	Saluran irigasi	-	-	
5.	Sarana irigasi	-	-	
6.	Sawah	7975 Ha	39.725.460.000	
7.	Kebon	-	-	
8.	Tambak	2226 Ha	916.050.000	
9.	Gedung sekolah	160	500.000.000	
10.	Mesjid	2	150.000.000	
11.	puskesmas	-	-	
12.	Gedung pemerintahan	2	300.000.000	
			49.836.510.000	

Sumber: Laporan Bencana Banjir 2013 (Arsip PUSDALOPS Provinsi Banten)

Data di atas menggambarkan total kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh peristiwa banjir yang terjadi pada periode Desember 2012 sampai dengan Maret 2013 berdampak pada 29 Kecamatan dan 88 Desa dengan 22389 KK 79091 jiwa sebagai korban, 3 jiwa diantaranya sebagai korban yang meninggal dan kerusakan yang telah tercatat adalah Rp.49.836.510.000. Hal ini menunjukkan kurang baiknya penanganan banjir di Kabupaten Serang, sudah seharusnya pemerintah daerah memiliki program kerja khusus pada jenis peristiwa bencana yang sering terjadi yaitu banjir sebagai bentuk tindakan preventif PEMDA, tidak hanya bertindak pada

responsibilitas pemerintah daerah dalam menangani bencana ini. Sehingga dapat mengurangi kerusakan dan kerugian yang pasti didapatkan pada sebuah peristiwa bencana.

Belum baiknya manajemen BPBD Kabupaten Serang dapat dilihat oleh masih belum optimalnya tugas Sub Bagian Program dan Evaluasi yang masih ditempati oleh pegawai - pegawai yang rangkap jabatan, sehingga akan berakibat pada kurang fokusnya pekerjaan pada bagian ini. Hal lainnya yaitu belum adanya standarisasi dan pedoman penanganan bencana di BPBD Kabupaten Serang dan ketika dikonfirmasi Bapak Wawan Kasubag Umum dan Kepegawaian yang sebelumnya merangkap jabatan sebagai Kasubag Program dan Evaluasi selama tahun 2012 sampai dengan 2013 lalu beliau mengatakan bahwa: (3/2/2014) "mengenai pedoman dan standarisasi penanganan bencana memang belum ada, masih sedang dibahas oleh para pimpinan, mengenai rangkap jabatan untuk tahun ini posisi saya sebagai Kasubag Program dan Evaluasi pada awal tahun 2014 ini sudah diserahkan kepada bu Endang (Kasubag Program dan Evaluasi tahun 2014)."

Akibat nyata terlihat pada program kerja BPBD yang terfokus pada pendidikan dan pelatihan petugasnya, sedangkan untuk pencegahan dan pengurangan resiko masih teramat kurang. Kegiatan pendidikan dan pelatihan memang perlu untuk dilakukan karena dapat meningkatkan kesiapsiagaan

BPBD Kabupaten Serang dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan catatan pencegahan dan pengurangan resiko tetap harus diupayakan semaksimal mungkin. Karena penanggulangan bencana perlu dilakukan dengan pengurangan resiko bencana yaitu dengan aksi kerja nyata seperti pembuatan tanggul permanen, pengerukan sungai dan pembuatan waduk untuk mengurangi resiko banjir, pembuatan saluran irigasi yang terintegrasi baik untuk bencana kekeringan, dan memperkuat tanggul anti abrasi untuk bencana gelombang besar dan tsunami.

Hal tersebut tentu perlu dilakukan dengan koordinasi yang baik antar lembaga - lembaga Pemerintah Daerah Kabupaten Serang baik yang terkait langsung dan yang tidak terkait langsung. Sayangnya koordinasi yang dilakukan sampai saat ini masih hanya sekedar memfasilitasi belum pada pengintegrasian program kerja pihak-pihak yang terlibat (lembaga-lembaga Pemerintah Daerah Kabupaten Serang). Hal - hal tersebut di atas didasarkan pada hasil observasi peneliti yang dilakukan terhadap berbagai pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana seperti pegawai dinas sosial, anggota tagana, komunitas pencinta alam dan relawan (OC).

Berdasarkan Undang Undang No.24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana pasal 26 (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok - kelompok

masyarakat yang rentan bencana. Dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Serang kurang dapat memberikan perlindungan kehidupan sosial dan rasa aman yang diakibatkan oleh suatu peristiwa bencana banjir. Hal ini terlihat dari masih besarnya kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh suatu peristiwa bencana banjir masih besar. Kerusakan dan kerugian tersebut akan berakibat pada kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang harus memperbaiki kerusakan secara mandiri. Dampak lainnya adalah terganggunya aktifitas perekonomian masyarakat karena kerusakan juga terjadi pada lahan dan tanaman pertanian, dan fasilitas pelayanan publik seperti sarana dan prasarana kelautan, pasar atau pusat perdagangan lainnya yang akan menyebabkan kurangnya penghasilan masyarakat yang dapat mengurangi kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan laporan tanggap darurat bencana banjir di Provinsi Banten Bulan Desember 2012 sampai dengan Maret 2013 telah terjadi banjir yang merupakan banjir yang terbesar selama 10 (sepuluh) tahun belakangan ini, karena melanda seluruh kabupaten/kota dengan jumlah kecamatan 120 dari 154 kecamatan atau 77,92% dari jumlah kecamatan yang ada di Wilayah Provinsi Banten dan mencakup 534 desa/kelurahan dari 1.535 atau 34,79% dari desa/kelurahan yang ada di Provinsi Banten. Untuk Kabupaten Serang ada 19 kecamatan yaitu di Kecamatan Binuang, Carenang, Tanara, Tunjung

Teja, Ciruas, Cikande, Kragilan, Kibin, Padarincang, Cikeusal, Cinangka, Pamarayan, Jawilan, Bandung, Tirtayasa, Kopo, Lebakwangi, Pontang, dan Petir. Atas dasar laporan dan kejadian tersebut di atas Gubernur Provinsi Banten pada tanggal 23 Desember 2012 telah menetapkan masa tanggap darurat bencana banjir di Provinsi Banten dengan Keputusan Gubernur Nomor 366/Kep.1020-Huk/ 2012 Tanggal 23 Desember 2012 Tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Banjir di Provinsi Banten mulai tanggal 23 Desember 2012 sampai dengan tanggal 23 Januari 2013. Kemudian diperpanjang sampai dengan tanggal 24 Februari 2013 berdasarkan Keputusan Gubernur Banten Nomor 366/Kep.26-Huk/2013 dan berhubung curah hujan masih cukup tinggi serta berdasarkan Prakiraan BMKG, bahwa cuaca masih belum menentu sampai dengan akhir bulan Maret 2013, maka Gubernur Banten telah memperpanjang kembali Masa Tanggap Darurat Bencana sampai dengan tanggal 24 Maret 2013, sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 366/Kep.134-HUK/ 2013 pada Tanggal 24 Februari 2013.

Di waktu yang sama di tempat penampungan korban bencana yang berlokasi di Kodim 0602 Serang (pos komando lapangan) diperoleh keterangan dari seorang korban bencana pada saat itu ditemukan adanya kekurangan pada pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana seperti air

bersih dan sanitasi, pangan dan sandang (selimut dan alas tidur) yang seharusnya difasilitasi oleh Pemerintah Daerah. Setelah dikonfirmasi kepada KASI Penanganan Kedaruratan PUSDALOPS BPBD Bapak Dedi Hasan beliau mengatakan bahwa: (25/2/2013) "hal tersebut memang sering terjadi pada tempat penampungan korban bencana apalagi dalam situasi tanggap darurat, itu disebabkan karena kurangnya pendanaan, padahal kami telah mengupayakan semaksimal mungkin sumber-sumber pendanaan pada situasi seperti itu, tidak hanya itu kami sebenarnya juga pada saat itu kewalahan menangani karena kurangnya petugas lapangan, tetapi berkat Team Reaksi Cepat (TRC) kami telah bisa menangani dengan baik dibantu oleh Polda Banten dan Grup I KOPASUS serta relawan- relawan lain."

Berdasarkan Undang Undang No.24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana pasal 26 (2) menyatakan bahwa setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar. Adapun yang dimaksud kebutuhan dasar berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pasal 52 meliputi bantuan penyediaan: kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, pelayanan psikososial, penampungan dan tempat hunian. Dengan demikian sudah kewajiban Pemerintah Daerah untuk mencukupi semua kebutuhan dasar para korban

bencana secara adil dan merata, melihat bahwa para korban peristiwa bencana dalam kondisi sulit mendapatkan sumber penghasilan saat bencana terjadi, sehingga tidak perlu ditemukan ada korban bencana yang memohon bantuan dari orang lain melalui belas kasih yang dimiliki orang lain, karena hal tersebut menunjukkan ketidaksiapan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang dalam menangani bencana banjir.

Dilain hal ditemukan juga belum adanya Desa Siaga Bencana di Kabupaten Serang yang dapat mengurangi resiko bencana banjir dengan kesiapan masyarakat itu sendiri. Hal ini berakibat pada kurang baiknya manajemen penanggulangan bencana yang bertujuan untuk memberikan perlindungan sosial dan rasa aman secara adil dan merata terhadap para korban bencana banjir.

Disisi lain BPBD Kabupaten Serang juga kurang mengoptimalkan fungsi pengawasannya terhadap pembangunan yang berpotensi memiliki resiko bencana. Hal ini terlihat masih belum berjalannya analisis beresiko bencana terhadap hal tersebut. Ketika dikonfirmasi kepada BPBD Kabupaten Serang masih banyak yang bingung mengenai hal tersebut. Padahal Undang Undang mengamanatkan adanya analisis beresiko bencana yang ditujukan pada pembangunan yang memiliki resiko bencana. Berdasarkan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 BAB IX Pengawasan menyatakan bahwa pengawasan

sebagaimana dimaksud meliputi: (a)sumber ancaman, (b)kebijakan, (c)kegiatan eksploitasi, (d)pemanfaatan teknologi serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun, (e)kegiatan konservasi, (f)perencanaan tata ruang, (g)pengelolaan lingkungan hidup, (h)reklamasi, dan (i)keuangan yang semuanya berpotensi bencana harus mendapat pengawasan.

Dengan kondisi yang disebutkan di atas ancaman bencana banjir di Kabupaten Serang sepertinya tinggal menunggu waktu karena bencana bisa terjadi kapan pun dan dimana pun. Untuk itu perlu upaya sistematis yang dapat meminimalisir resiko bencana atau potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana berupa jatuhnya korban jiwa dan rusaknya aset serta harta benda akibat bencana.

Adapun upaya-upaya tersebut dapat berupa mitigasi bencana (pencegahan, dan peningkatan kesiapsiagaan) ataupun upaya mengurangi kerentangan (fisik, material, sosial, kelembagaan, prilaku/ sikap). Melihat luasnya kegiatan penanganan bencana maka masyarakat bersama pemerintah dan pelaku bisnis perlu mengambil peran tertentu yang disesuaikan dengan tugas, fungsi dan kemampuan masing-masing.

Berdasarkan masalah - masalah yang ditemukan di atas dan mengingat bahwa BPBD merupakan sentral dari penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah dalam hal ini Kabupaten Serang maka peneliti

beranggapan perlu untuk melakukan penelitian tentang "**bagaimana manajemen penanggulangan bencana banjir Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang**"

1.2 Identifikasi Masalah.

Identifikasi masalah bertujuan untuk mengidentifikasi masalah yang akan diteliti dan berkaitan dengan tema/ topik/ judul dan fenomena yang akan diteliti. Adapun identifikasi masalahnya dalam penelitian ini adalah:

1. Sosialisasi BPBD Kabupaten Serang terhadap masyarakat tentang daerah rawan bencana dan cara menanggulangi bencana masih kurang.
2. Koordinasi BPBD Kabupaten Serang dengan lembaga/organisasi/instansi yang terkait penanggulangan bencana banjir masih belum baik.
3. BPBD Kabupaten Serang belum melakukan upaya antisipasi yang baik terhadap peristiwa bencana banjir yang rutin terjadi.
4. Belum adanya Desa Siaga Bencana yang dapat meningkatkan kesiapan masyarakat dalam menghadapi peristiwa bencana.
5. Kurangnya pengawasan BPBD Kabupaten Serang terhadap pembangunan yang berpotensi memiliki resiko bencana.

1.3 Batasan Masalah.

Pembatasan masalah merupakan upaya memfokuskan pada masalah spesifik yang akan diajukan dalam rumusan masalah. Adapun batasan

masalahnya yaitu: **“Manajemen penanggulangan bencana banjir Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Serang”**. Dengan waktu penelitian yaitu: pada tahun 2012 sampai dengan 2014.

1.4 Rumusan Masalah.

Perumusan masalah bertujuan untuk memilih dan menetapkan masalah yang paling *urgent* yang berkaitan dengan judul penelitian. Adapun rumusan masalahnya ialah: **"bagaimana manajemen penanggulangan bencana banjir di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang"**.

1.5 Tujuan Penelitian.

Tujuan penelitian menjelaskan tentang sasaran yang ingin dicapai. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui **"manajemen penanggulangan bencana banjir Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang"**.

1.6 Manfaat Penelitian.

Manfaat Teoritis.

1. Memberikan peluang peningkatan kapasitas untuk penanggulangan bencana di Kabupaten Serang khusus nya peristiwa bencana banjir.
2. Memberikan sudut pandang lain sebagai bahan referensi dalam membuat program kerja penanggulangan bencana banjir Kabupaten Serang.

Manfaat Praktis.

1. Menambah pemahaman masyarakat untuk kebencanaan khususnya peristiwa bencana banjir.
2. Meningkatkan kewaspadaan masyarakat untuk penanggulangan bencana banjir terhadap dirinya sendiri dan lingkungan.
3. Mengurangi kerugian akibat terjadinya bencana banjir.
4. Membantu pemerintah untuk menanggulangi bencana banjir di daerah.

1.7 Sistematika Penulisan.

Pada penelitian kali ini, peneliti akan menjabarkan sistematika penulisan yang akan disusun dalam penelitian mengenai Manajemen Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Serang yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN.

Pada bab I berisi beberapa sub bab yaitu latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. Latar belakang masalah merupakan penjabaran dari keseluruhan permasalahan yang didapat dan dijabarkan secara deduktif dimana pembahasan diuraikan dari mulai pembahasan yang bersifat umum dan dikerucutkan menjadi pembahasan yang lebih khusus. Identifikasi masalah merupakan inti dari permasalahan

yang sebelumnya telah diuraikan di latar belakang masalah yang diringkas per poin yang selanjutnya dibatasi dalam satu cakupan masalah pada sub bab batasan masalah. Rumusan masalah berisi pertanyaan yang akan dicari jawabannya oleh peneliti. Sedangkan tujuan penelitian merupakan tujuan dilakukannya penelitian ini. Manfaat penelitian terbagi menjadi 2 (dua) yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis berguna memberikan kontribusi tertentu terhadap perkembangan teori dan ilmu pengetahuan serta dunia akademis. Manfaat praktis memberikan kontribusi tertentu terhadap obyek penelitian, baik individu, kelompok, maupun organisasi. Dan yang terakhir ialah sistematika penulisan yang didalamnya dijelaskan mengenai susunan penulisan penelitian yang dilakukan peneliti.

BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN ASUMSI DASAR PENELITIAN.

Landasan teori berisi beberapa sub bab yang mendeskripsikan kumpulan dari beberapa teori yang berkaitan dengan judul dan isi penelitian, kerangka berfikir yang merupakan penggambaran dari siklus atau alur penelitian yang dilakukan oleh peneliti serta asumsi dasar yang merupakan penyimpulan sementara yang dihasilkan dari pengamatan yang dilakukan oleh peneliti sebelum ditemukan hasil penelitian yang sebenarnya.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN.

Pada bab III ini mendeskripsikan mengenai metodologi yang digunakan dalam penelitian, instrumen penelitian yang menjelaskan tentang proses dan jenis alat pengumpulan data yang digunakan, informan penelitian yang menjelaskan informan penelitian yang akan memberikan berbagai macam informasi yang dibutuhkan, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data yang menjelaskan teknik analisa beserta rasionalisasinya yang sesuai dengan sifat data yang diteliti, terakhir tempat dan waktu menjelaskan tempat dan waktu penelitian dilaksanakan.

BAB IV HASIL PENELITIAN.

Pada bab ini memuat penjabaran atau penjelasan mengenai hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti itu sendiri yang menyangkut penjelasan deskripsi objek penelitian menjelaskan objek penelitian yang meliputi lokasi penelitian secara jelas, deskripsi data menjelaskan data yang telah didapatkan dari observasi di lapangan dan menjelaskan informan yang ditentukan dalam penelitian dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, penyajian data menjelaskan hasil penelitian yang telah diperoleh dari data mentah dengan mempergunakan teknik analisis data yang relevan, serta pengujian asumsi dasar dan teori yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB V PENUTUP.

Berisi penjelasan mengenai kesimpulan dan saran yang dihasilkan pada penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Dengan menyimpulkan hasil penelitian yang dibahas per poin dengan singkat dan jelas serta memberikan rekomendasi kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang sebagai kelanjutan dari hasil penelitian terhadap bidang yang diteliti secara teoritis dan praktis.

DAFTAR PUSTAKA.

Memuat daftar referensi yang dipergunakan dalam penelitian ini.

LAMPIRAN.

Menyajikan lampiran-lampiran yang dianggap perlu oleh peneliti, yang berhubungan dengan data penelitian, dan tersusun secara berurutan.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN ASUMSI DASAR

2.1 Landasan Teori.

Wiliam Wiersma (1986) dalam Sugiyono (2008:41) menyatakan bahwa: *A theory is a generalization or series of generalization by which we attempt to explain some phenomena in a systematic manner.* Teori adalah generalisasi atau kumpulan generalisasi yang dapat digunakan untuk menjelaskan berbagai fenomena. Dalam bidang administrasi Hoy dan Miskey (2001) dalam Sugiyono (2009:54) mengemukakan teori sebagai berikut. *“Theory in administration, however has the same role as theory in physics, chemistry, or biology; that is providing general axplanations and guiding research”.* Selanjutnya didefinisikan bahwa teori adalah seperangkat konsep, asumsi dan generalisasi yang dapat digunakan untuk mengungkapkan dan menjelaskan perilaku dalam berbagai organisasi. *“theory is a set of interrelated concepts, assumptions, and generalizations that systematically describes and explaints regularities in behavior in organizations”.*

2.1.1 Dasar Teori Manajemen.

Manajemen adalah ilmu pengetahuan maupun seni. Ada suatu pertumbuhan yang teratur mengenai manajemen, suatu ilmu pengetahuan yang menjelaskan manajemen dengan pengacuan kepada kebenaran-kebenaran umum (Terry,2009: 2).

Selanjutnya George Terry juga mendefinisikan manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional kepada maksud-maksud yang nyata. Manajemen adalah suatu kegiatan, pelaksanaannya adalah "managing" (pengelolaan), sedang pelaksananya disebut manager atau pengelola (Terry,2008: 1). Dengan demikian seorang manager adalah seorang pengelola kelompok orang-orang dalam organisasi untuk dapat mencapai tujuan yang diwujudkan pada pekerjaan yang nyata.

Kemudian menurut Simanjuntak (2008: 7-8) dalam bukunya menjelaskan manajemen adalah suatu proses mengkombinasikan dan mendayagunakan semua sumber-sumber secara produktif untuk mencapai tujuan perusahaan atau organisasi. Untuk itu manajemen melaksanakan fungsi-fungsi: perencanaan, pengorganisasian, perencanaan dan pembinaan pekerja, pelaksanaan dan pengawasan.

Selanjutnya beberapa pendapat yang hampir sama adalah sebagai berikut:

Stoner dan Wankel (1996: 4) dalam (Harbani,2011: 82) menjelaskan manajemen secara harafiah adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian upaya anggota organisasi dan penggunaan seluruh sumber daya organisasi lainnya demi tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Kemudian Donovan dan Jackson (1997: 11-12) dalam (Harbani,2011: 82) menyatakan bahwa manajemen sebagai proses yang dilaksanakan pada tingkat organisasi tertentu, sebagai rangkaian keterampilan (*skill*), dan sebagai serangkaian tugas.

Kemudian Simamora (2001: 3) dalam (Harbani,2011: 83) menjelaskan manajemen adalah proses pendayagunaan bahan baku dan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan. Selanjutnya manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu (Hasibuan,2007:2).

Pendapat lainya, Andrew F. Sikula dalam Hasibuan (2007: 2) mengemukakan manajemen sebagai berikut. *Management in general refers to planning, organizing, controlling, staffing, leading, motivating,*

communicating, and decision making activities performed by any organization in order to coordinate the varied resources of the enterprise so as to bring an efficient creation of some product or service.

Kemudian G.F.Terry dalam Hasibuan (2007: 2) menyatakan bahwa *manajemen is a distinct process consisting of planning, organizing, actuating and controlling performed to determine and accomplish stated objectives by the use of human being and other resources.*

Kemudian Harold Koontz dan Cyril O'Donnel dalam Hasibuan (2007: 3) menjelaskan bahwa *manajemen is getting things done through people. In bringing about this coordinating of group activity, the manager, as manager plans, organizes, staffs, direct, and control the activities other people.* Selanjutnya manajemen dalam arti luas adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian (P4) sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien (dalam arti luas). Manajemen dalam arti sempit adalah manajemen sekolah/madrasah yang meliputi: perencanaan program sekolah/madrasah, pelaksanaan program sekolah/madrasah, kepemimpinan sekolah/madrasah (Husaini, 2009: 5).

Sehingga dapat disimpulkan. Manajemen adalah proses ilmu dan seni yang mengatur, mengkombinasikan, dan mendayagunakan semua

sumber-sumber daya organisasi secara produktif dengan kerangka kerja pertumbuhan yang teratur melalui perencanaan, pengorganisasian, perencanaan dan pembinaan pekerja, pelaksanaan dan pengawasan pada tingkat organisasi tertentu untuk mencapai tujuan-tujuan organisasional dengan maksud-maksud yang nyata secara efisien dan efektif.

Membahas tentang teori-teori manajemen, maka tidak terlepas dari penjabaran mengenai prinsip-prinsip manajemen yang dimiliki oleh Henry Fayol, berikut penjelasannya. *General principles of management* menurut *Henry Fayol* dalam Hasibuan (2007: 10-12) yaitu:

1. *Division of work* (asas pembagian kerja).
2. *Authority and responsibility* (asas wewenang dan tanggung jawab).
3. *Discipline* (asas disiplin).
4. *Unity of command* (asas kesatuan perintah).
5. *Unity of direction* (asas kesatuan jurusan atau arah).
6. *Subordinating of individual interest into general interest* (asas kepentingan umum di atas kepentingan pribadi).
7. *Remuneration of personnel* (asas pembagian gaji yang wajar)
8. *Centralization* (asas pemusatan wewenang).
9. *Scalar of chain* (asas hierarki atau asas rantai berkala).
10. *Order* (asas keteraturan).

11. *Equity* (asas keadilan).
12. *Initiative* (asas inisiatif).
13. *Esprit of corps* (asas kesatuan).
14. *Stability of turn-over personel* (asas kestabilan masa jabatan).

Kemudian Manulang (2006: 26-31) menjelaskan penjabaran prinsip-prinsip manajemen Henry Fayol yaitu:

1. *Division of work*, pembagian kerja adalah menghasilkan pekerjaan yang lebih banyak dan dengan usaha yang sama. Pembagian kerja memungkinkan pengurangan sarana, terhadap mana perhatian harus diarahkan dan dikenal sebagai alat terbaik memanfaatkan individu-individu dan kelompok-kelompok orang.
2. *Authority* (wewenang) adalah hak memberi instruksi-instruksi dan kekuasaan yang meminta kepatuhan. Henry fayol membedakan *authority* atas *personal authority* dan *official authority*. *Personal authority* (kekuasaan pribadi) bersumber dari intelegensi, pengalaman, nilai moral, kesanggupan memimpin, pelayanan-pelayanan masa lalu dan lain sebagainya. Untuk menjadi seorang atasan yang baik. *Official authority* merupakan wewenang formal atau wewenang resmi, yang diterima dari instansi yang lebih tinggi. *Responsibility* atau tanggung jawab adalah tugas dan

fungsi-fungsi yang harus dilakukan oleh seorang pejabat, agar dapat melaksanakan *authority* (wewenang) yang diberikan kepadanya. Agar kepatuhan diperoleh dari bawahan, sanksi dapat diterapkan kepada mereka yang tidak memberikan kepatuhan.

3. *Dicipline*, yakni melakukan apa yang sudah disetujui bersama antara pemimpin dengan para pekerja, baik persetujuan tertulis, lisan atau berupa peraturan atau kebiasaan. Disiplin sangat penting karena suatu usaha tidak akan mengalami kemajuan tanpa adanya disiplin dari pihak atasan atau bawahan.
4. *Unity of command*, dalam setiap tindakan, seorang pegawai harus menerima intruksi dari seorang atasan saja. Bila hal ini dilanggar, berarti wewenang (*authority*) dikurangi, disiplin terancam, ketenangan terganggu dan stabilitas mengalami cobaan. Seorang tidak mungkin melaksanakan instruksi yang sifatnya dualistik.
5. *Unity of direction*, prinsip ini dapat dijabarkan sebagai *one head and plan for a group of activities having the same objective* itu merupakan persyaratan penting untuk kesatuan tindakan, koordinasi, kekuatan, memfokuskan usaha. *Unity of direction (one head one plan)* jangan dikaburkan dengan *unity of command (one employee to have orders from one superior only)*.

6. *Subordination of individual interest to general interest*, dalam sebuah perusahaan, kepentingan seorang pegawai tidak boleh di atas kepentingan perusahaan. Kepentingan rumah tangga harus lebih dahulu dari pada kepentingan anggota-anggotanya, dan kepentingan negara harus didahulukan dari kepentingan warga negara atau kepentingan kelompok masyarakat.
7. *Remuneration of personel*, harga dari layanan yang diberikannya harus adil, sejauh mungkin memberi kepuasan baik kepada pegawai maupun kepada perusahaan. Tingkat gaji dipengaruhi oleh biaya hidup, permintaan, penawaran tenaga kerja, keadaan umum perusahaan, posisi ekonomi perusahaan dan tergantung pula dari pendidikan dan pengalaman pegawai. Untuk menarik perhatian pegawai, penambahan gaji pegawai dalam bentuk bonus yang distribusikan sekali setahun yang dapat dianggap merupakan pembagian keuntungan. Di samping itu, agar perusahaan memperhatikan kesejahteraan pegawai baik dalam pekerjaan, seperti ventilasi, penerangan, kebersihan dan fasilitas kantin, maupun di luar pekerjaan, seperti perumahan, pendidikan dan latihan.
8. *Centralization*, masalah sentralisasi atau desentralisasi adalah masalah pembagian kekuasaan, pada suatu organisasi kecil

sentralisasi dapat diterapkan, akan tetapi pada organisasi besar harus diterapkan desentralisasi. Bila terlihat adanya tekanan untuk memberi peranan yang lebih besar kepada bawahan, maka desentralisasi harus diterapkan, sebaiknya sentralisasi diterapkan, atau sebagaimana yang dikatakan Henry Fayol, *everything which goes to increase the importance of the subordinate's role is decentralization everything which goes to reduce it is centralization.*

9. *Scalar chain*, adalah rantai yang bermula dari atasan, yaitu dari *authority* terakhir hingga pada tingkat terendah. Garis kekuasaan (*the line of authority*) adalah *route* (jalan) yang diikuti oleh semua komunikasi yang bermula dari dan kembali ke kekuasaan terakhir. Prinsip *scalar chain* berarti mempermudah komunikasi antara pegawai-pegawai setingkat, yang ada manfaatnya kalau-kalau mereka langsung mengadakan komunikasi dengan mengabaikan *line of authority*.

10. *Order*; untuk ketertiban manusia ada formula yang harus dipegang, yaitu suatu tempat untuk setiap orang dan setiap orang pada tempatnya masing-masing. Demikian pula ada suatu tempat bagi sesuatu, dan sesuatu itu pada tempatnya. Bila diharapkan adanya ketertiban dalam sebuah perusahaan, haruslah ada tempat yang tegas

untuk setiap pegawai, dan setiap pegawai harus pada tepatnya yang telah ditetapkan. Lebih lanjut ketentuan yang sempurna memerlukan bahwa tempat harus sesuai dengan pegawai atau sesuai peribahasa *the right man in the right place*.

11. *Equity*, untuk merangsang pegawai dalam melaksanakan tugasnya dengan kesungguhan dan kesetiaan, mereka memerlukan keramahan dan keadilan. Kombinasi keramahtamahan dan keadilan menghasilkan *equity*.

12. *Stability of turnover of personel*, seorang pegawai membutuhkan waktu agar membiasakan diri pada pekerjaan baru dan berhasil mengerjakannya dengan baik. Bila ia sudah mulai biasa atau sebelumnya dia dipindahkan, dia harus menyesuaikan diri lagi. Jika hal semacam ini terus-menerus, pekerjaan tidak akan pernah dilakukan dengan baik. Konsekuensinya tidak adanya stabilitas kondisi personalia, akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, stabilitas kondisi personalia perlu mendapat perhatian.

13. *Initiative*, memikirkan sebuah rencana dan meyakinkan keberhasilan merupakan pengalaman yang memuaskan bagi seseorang. kesanggupan untuk berpikir ini dan kemampuan untuk melaksanakan

disebut inisiatif. Sumber kekuatan perusahaan adalah adanya inisiatif di kalangan atasan maupun bawahan, khususnya pada masa sulit. Oleh karena itu, penting mengairahkan dan mengembangkan inisiatif semaksimal mungkin.

14. *Ecsprit de corps*, adalah kekuatan para pemimpin perusahaan harus berbuat banyak untuk merealisasikan pembahasan itu. Keharmonisan persatuan di kalangan personalia perusahaan merupakan kekuatan besar bagi perusahaan. Oleh karena itu, segala usaha ditempuh untuk merealisasikannya.

2.1.2 Fungsi-Fungsi Manajemen.

Untuk dapat lebih memahami manajemen peneliti juga perlu mengetahui proses yang terjadi pada manajemen yang terjabar dalam fungsi-fungsi manajemen dan berikut penjelasan mengenai itu. George Terry (1992: 9) Manajemen adalah suatu bentuk kerja. Manajer, dalam melakukan pekerjaannya, harus melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu, yang dinamakan fungsi-fungsi manajemen, yang terdiri dari:

1. *Planning*, menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai selama suatu masa yang akan datang dan apa yang harus diperbuat agar dapat mencapai tujuan-tujuan itu.

2. *Organizing*, mengelompokan dan menentukan berbagai kegiatan penting dan memberikan kekuasaan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan itu.
3. *Staffing*, menentukan keperluan-keperluan sumber daya manusia, pengerahan, penyaringan, latihan dan pengembangan tenaga kerja.
4. *Motivating*, mengarahkan atau menyalurkan perilaku manusia kearah tujuan-tujuan.
5. *Controlling*, mengukur pelaksanaan dengan tujuan-tujuan, menentukan sebab-sebab penyimpangan-penyimpangan dan mengambil tindakan-tindakan korektif dimana perlu.

Selanjutnya merinci jenis-jenis khusus kegiatan-kegiatan yang terlibat dalam masing-masing fungsi manajemen yaitu:

1. Perencanaan:

- (1) *Self audit*, menentukan keadaan organisasi sekarang.
- (2) *Survey*, lingkungan.
- (3) *Objective*, menentukan tujuan.
- (4) *Forecast*, ramalan keadaan-keadaan yang akan datang.
- (5) Melakukan tindakan-tindakan dan sumber pengerahan.
- (6) *Evaluate*, pertimbangan tindakan-tindakan yang diusulkan.

- (7) *Revise and adjust*, ubah dan sesuaikan rencana-rencana sehubungan dengan hasil-hasil pengawasan dan keadaan-keadaan yang berubah - ubah.
- (8) *Communicate*, berhubungan terus selama proses perencanaan.

2. Pengorganisasian:

- (1) *Identity*, tetapkan dengan teliti dan tentukan pekerjaan yang akan dilaksanakan.
- (2) *Break work down*, bagi-bagi pekerjaan menjadi tugas-tugas setiap orang.
- (3) Tugas-tugas kelompok menjadi posisi-posisi.
- (4) Tentukan persyaratan-persyaratan setiap porsi.
- (5) Kelompok-kelompok posisi menjadi satuan-satuan yang dapat dipimpin dan saling berhubungan dengan baik.
- (6) Bagi-bagi pekerjaan, pertanggungjawaban dan luas kekuasaan yang akan dilaksanakan.
- (7) Ubah dan sesuaikan organisasi sehubungan dengan hasil-hasil pengawasan dan kondisi-kondisi yang berubah-ubah.
- (8) Berhubungan selalu selama proses pengorganisasian.

3. Kepegawaian:

- (1) Tentukan keperluan-keperluan sumber daya manusia.
- (2) Kerahkan pegawai-pegawai sedapat mungkin.
- (3) Saringlah.
- (4) Latih dan kembangkan sumber-sumber daya manusia.
- (5) Ubah dan sesuaikan kuantitas dan kualitas sumber-sumber daya manusia sehubungan dengan hasil-hasil pengawasan dan perubahan-perubahan kondisi.
- (6) Berhubungan setelah dan selama proses pengisian pegawai.

4. Pemotivasian.

- (1) Berhubungan dengan staf dan jelaskan tujuan-tujuan kepada bawahan.
- (2) *Performance standart*, bagi-bagikan ukuran pelaksanaan.
- (3) Latih dan bimbing bawahan untuk memenuhi ukuran-ukuran pelaksanaan itu.
- (4) Beri bawahan upah berdasarkan pelaksanaan.
- (5) Puji dan tegur dengan jujur.
- (6) Adakan lingkungan yang memberikan dorongan dengan meneruskan keadaan yang berubah-ubah serta tuntutan-tuntutannya.

- (7) Ubah dan sesuaikan cara-cara memotivasikan sehubungan dengan hasil pengawasan dan kondisi yang berubah.
- (8) Berhubungan selalu selama proses pemotivasian.

5. Pengawasan:

- (1) Tetapkan ukuran-ukuran.
- (2) Monitor hasil-hasil dan bandingkan dengan ukuran-ukuran.
- (3) Perbaiki penyimpangan-penyimpangan.
- (4) Ubah dan sesuaikan cara-cara pengawasan sehubungan dengan hasil-hasil pengawasan dan perubahan kondisi-kondisi.
- (5) Berhubungan selalu selama proses pengawasan.

Dalam Husaini Usman (2009: 47-48) menjelaskan beberapa pendapat tentang fungsi-fungsi manajemen dari berbagai pendapat yaitu: Persatuan Administrator Sekolah Amerika Serikat (*American Association of School Administration*) pada tahun 1955 memperkenalkan fungsi-fungsi manajemen, yaitu *Planning, Allocating, Stimulating, Coordinating and Evaluating (PASCE)*.

Mc Farlan (1974) membagi fungsi-fungsi manajemen, yaitu *Planning, Organizing, Controlling (POC)*. Terry (1960) menyatakan bahwa fungsi-fungsi manajemen ialah *Planning, Organizing, Actualizing and Controlling (POAC)*. Dale menyatakan bahwa fungsi-fungsi manajemen

ialah *Planning, Organizing, Staffing, Directing, Innovating, Refresending and Controlling (POSDIRC)*. Oey Liang Lee menyatakan bahwa fungsi-fungsi manajemen ialah *Planning, Organizing, Coordinatting, Controlling (POCC)*. Newman (1963) menyatakan bahwa fungsi-fungsi manajemen ialah, *Planning, Organizing, Assembling of resources, Directing and Controlling (POADC)*. Mee (1963) menyatakan bahwa fungsi-fungsi manajemen ialah, *Planning, Organizing, Motivating and Controlling (POMC)*. Koonts dan O'Donnel (1968) menyatakan bahwa fungsi-fungsi manajemen ialah, *Planning, Organizing, Staffing, Direction and Controlling (POSDC)*. Mac Kenzie (1969) menyatakan bahwa fungsi-fungsi manajemen ialah, *Plan, Organize, Staff, Direct and Control (POSDiCo)*.

Stooner dan Freeman (1996) menyatakan bahwa fungsi-fungsi manajemen ialah, *Planning, Organizing, Leading and Controlling (POLC)*. Schermerhorn (1996) dan Gibson, et al. (2003) Dressler (2003) dan Casio (2003) menyatakan bahwa fungsi-fungsi manajen ialah, *Planning, Leading and Controlling*.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (1996) menyatakan bahwa fungsi-fungsi manajen ialah, 1) kesadaran akan pengaruh luar, 2) interpretasi, 3) representasi, 4) koordinasi, 5)

perencanaan, 6) petunjuk, 7) penganggaran, 8) administrasi sumber daya material, 9) manajemen kepegawaian, 10) supervisi, 11) pemantauan dan 12) evaluasi program.

Fungsi manajemen menurut Fidler (2005) adalah *Planning, Organizing, Staffing, Resource, Monitoring and Controlling, Liasing and Negotiating, Communicating*. Kemudian Manulang (2009: 7-13) menjabarkan fungsi-fungsi manajemen akan tampak jelas dengan dikemukannya pendapat beberapa penulis sebagai berikut:

1. Louis A. Allen: *Leading, Planning, Organizing, Controlling*.
2. Prajudi Atmosudirjo: *Planning, Organizing, Directing, atau Actuating, Controlling*.
3. John Robert Beishline: Perencanaan, Organisasi, Komando, Kontrol.
4. Henry Fayol: *Planning, Organizing, Commanding, Coordinating, Controlling*.
5. Luther Gullich: *Planning, Organizing, Staffing, Directing, Controlling*.
6. Koonts dan O'Donnel: *Planning, Organizing, Assembling, Resource, Directing, Controlling*.
7. William H. Newman: *Planning, Organizing, Assembling, Resource, Directing, Controlling*.

8. S. P. Siagian: *Planning, Organizing, Motivating, Controlling.*
9. William Spriegel: *Planning, Organizing, Controlling.*
10. George R. Terry: *Planning, Organizing, Actuating, Controlling.*
11. Lydack F. Urwick: *Forecasting, Planning, Organizing, Commanding, Coordinating, Controlling.*
12. Winardi: *Planning, Organizing, Coordinating, Actuating, Leading, Communication, Controlling.*
13. The Liang Gie: *Planning, Decision making, Directing Cordinating, Controlling, Improving.*

Pada hakikatnya, bila dikombinasikan pendapat ketiga belas penulis diatas, maka fungsi-fungsi manajemen adalah sebagai berikut:

1. *forecasting,*
2. *planning* termasuk *budgetting,*
3. *organizing,*
4. *staffing* termasuk *assembling resource,*
5. *direction* termasuk *commanding,*
6. *leading,*
7. *coordinating,*
8. *motivating,*
9. *controlling,*

10. *reporting*,

Berikut ini merupakan penjabaran dari fungsi-fungsi manajemen tersebut yang dihasilkan dari berbagai penjabar mengenai fungsi-fungsi manajemen yaitu:

1. *Forecasting* adalah kegiatan meramalkan, memproyeksikan atau mengadakan taksiran terhadap berbagai kemungkinan yang akan terjadi sebelum suatu rencana yang lebih pasti dapat dilakukan.
2. *Planning* termasuk *Budgeting*, Perencanaan adalah penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan. Pembatasan yang agak kompleks merumuskan perencanaan sebagai penetapan apa yang harus dicapai, bila hal itu dicapai, siapa yang bertanggungjawab dan penetapan mengapa hal itu harus dicapai. Hampir sama dengan pembatasan terakhir di mana perumusan perencanaan merupakan menetapkan jawaban kepada enam pertanyaan berikut. 1) Tindakan apa yang harus dikerjakan?, 2) Apakah sebabnya tindakan itu harus dikerjakan?, 3) Dimanakah tindakan itu dilaksanakan?, 4) Kapankah tindakan itu dilaksanakan?, 5) Siapakah yang akan mengerjakan tindakan itu?, 6) Bagaimanakah caranya melaksanakan tindakan itu?.

3. *Organizing*, dimaksudkan mengelompokkan kegiatan yang diperlukan, yakni penetapan susunan organisasi serta tugas dan fungsi-fungsi dari setiap unit yang ada dalam organisasi, serta menetapkan kedudukan dan sifat hubungan antara masing-masing unit tersebut. Organisasi atau pengorganisasian dapat pula dirumuskan sebagai keseluruhan aktivitas manajemen dalam mengelompokkan orang-orang serta penetapan tugas, fungsi, wewenang, serta tanggung jawab masing-masing dengan tujuan terciptanya aktivitas-aktivitas yang berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu.
4. *Staffing* merupakan salah satu fungsi manajemen berupa penyusunan personalia pada suatu organisasi sejak dari merekrut tenaga kerja, pengembangannya sampai dengan usaha agar setiap tenaga memberi daya guna maksimal kepada organisasi. *Organizing* dan *Staffing* merupakan dua fungsi manajemen yang sangat erat hubungannya. *Organizing* yaitu berupa penyusunan wadah legal untuk menampung berbagai kegiatan yang harus dilaksanakan pada suatu organisasi, sedangkan *staffing* berhubungan dengan penerapan orang-orang yang akan memangku masing-masing jabatan yang ada di dalam organisasi tersebut.

5. *Directing* atau *commanding* adalah fungsi manajemen yang berhubungan dengan usaha memberikan bimbingan, saran, perintah-perintah atau intruksi kepada bawahan dalam melaksanakan tugas masing-masing, agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan benar-benar tertuju pada tujuan yang telah ditetapkan semula. *Directing* atau *commanding* merupakan fungsi manajemen yang dapat berfungsi bukan saja agar pegawai melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu kegiatan, tetapi dapat pula berfungsi mengkoordinasi kegiatan berbagai unsur organisasi agar efektif tertuju kepada realisasi tujuan yang ditetapkan sebelumnya.
6. *Leading*, merupakan salah satu fungsi manajemen, dirumuskannya sebagai pekerjaan yang dilakukan oleh seorang manajer yang menyebabkan orang lain bertindak. Pekerjaan *leading*, meliputi lima macam kegiatan, yakni: mengambil keputusan, mengadakan komunikasi agar saling pengertian antara manajer dan bawahan, memberi semangat, insiprasi, dorongan kepada bawahan supaya mereka bertindak, memilih orang-orang yang menjadi anggota kelompoknya, serta memperbaiki pengetahuan dan sikap-sikap bawahan agar mereka terampil dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

7. *Coordinating* atau mengkoordinasi merupakan salah satu fungsi manajemen untuk melakukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi kekacauan, percekocokan, kekosongan kegiatan, dengan jalan menghubungkan, menyatukan dan menyelaraskan pekerjaan bawahan sehingga terdapat kerja sama yang terarah dalam usaha mencapai tujuan organisasi. Usaha yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan itu, antara lain dengan memberikan penjelasan, bimbingan atau nasihat dan mengadakan *coaching* dan bila perlu memberi teguran.
8. *Motivating* atau pemotivasian kegiatan merupakan salah satu fungsi manajemen berupa pemberian inspirasi, semangat dan dorongan kepada bawahan, agar bawahan melakukan kegiatan secara suka rela sesuai apa yang dikehendaki oleh atasan. Pemberian inspirasi, semangat dan dorongan oleh atasan kepada bawahan ditunjukkan agar bawahan bertambah kegiatannya, atau mereka lebih bersemangat melaksanakan tugas-tugas sehingga mereka lebih berdaya guna dan berhasil guna.

9. *Controlling* atau pengawasan, sering juga disebut pengendalian adalah salah satu fungsi manajemen yang berupa mengadakan penilaian, bila perlu mengadakan koreksi sehingga apa yang dilakukan bawahan dapat diarahkan ke jalan yang benar dengan maksud tercapai tujuan yang sudah digariskan semula. Dalam melaksanakan kegiatan *controlling*, atasan mengadakan pemeriksaan, mencocokkan, serta mengusahakan agar kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan serta tujuan yang ingin dicapai.
10. *Reporting* atau pelaporan adalah salah satu fungsi manajemen berupa penyampaian perkembangan atau hasil kegiatan atau pemberian keterangan mengenai segala hal yang bertalian dengan tugas dan fungsi-fungsi kepada pejabat yang lebih tinggi, baik secara lisan maupun tertulis sehingga dalam penerimaan laporan dapat memperoleh gambaran bagaimana pelaksanaan tugas orang yang memberi laporan.

Setelah membahas bagaimana dasar-dasar teori manajemen dan fungsi-fungsinya, maka pembahasan selanjutnya adalah mengenai pendekatan-pendekatan yang digunakan untuk mempelajari ilmu manajemen. Berikut ini beberapa pendekannya. Hasibuan (2007: 30-35)

Ada berbagai pendekatan (*approach*) yang dapat dilakukan dalam mempelajari ilmu manajemen, yaitu:

1. Pendekatan berdasarkan kebiasaan.
2. Pendekatan berdasarkan kelakuan antar individu.
3. Pendekatan berdasarkan kelakuan kelompok.
4. Pendekatan sistem kerja sama sosial.
5. Pendekatan sistem sosio teknik.
6. Pendekatan teori keputusan.
7. Pendekatan pusat komunikasi.
8. Pendekatan matematis.
9. Pendekatan situasional.
10. Pendekatan sumber daya manusia.
11. Pendekatan kombinasi.

Pendekatan situasional, menurut pendekatan ini, mempelajari manajemen didasarkan pada sifat situasional (sikon) internal dan eksternal organisasi pada saat tersebut. Masalah-masalah yang dihadapi diselesaikan dan diatasi berdasarkan situasional (sikon), sehingga pemecahan masalah yang berbeda-beda pula. Jadi menurut pendekatan ini tidak ada suatu sistem yang diterapkan, karena pemecahan masalah selalu dikaitkan dengan sifat situasional (sikon) saat itu.

Dari beberapa pendekatan-pendekatan tersebut, maka pendekatan yang paling dapat direalisasikan menjadi sebuah analisis penelitian pada penelitian ini adalah pendekatan situasional, melihat bahwa wilayah kerja objek penelitian yaitu Kabupaten Serang dan implementasi pada perencanaan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dilakukan secara situasional. Sehingga penjelasan dari pendekatan-pendekatan lainnya tidak dijelaskan secara rinci.

2.1.3 Manajemen Bencana

Carter, William (1990) dalam *Disaster Manajement Handbook* menyebutkan bahwa *"disaster management is essentially a dynamic process. It encompasses the classical management functions of planning, organizing, staffing, leading, and controlling. It also involves many organizations which must work together to prevent, mitigate, prepare for, respond to, and recovery from the effects of disaster. Disaster management is defined as: An applied science which seeks, by the systematic observation and analysis of disasters, to improve measures relating to prevention, mitigation, preparedness, emergency response and recovery.*

Dengan demikian dapat didefinisikan penanggulangan bencana adalah sebuah proses dinamis yang meliputi fungsi manajemen klasik

perencanaan, pengorganisasian, staffing, kepemimpinan, dan pengawasan. Dalam hal ini juga melibatkan banyak organisasi yang harus bekerja sama untuk mencegah, mengurangi, mempersiapkan, menanggapi, dan memulihkan dari dampak bencana. Manajemen bencana didefinisikan sebagai: Sebuah ilmu terapan yang berusaha berdasarkan pengamatan sistematis dan analisis bencana, untuk meningkatkan tindakan yang berkaitan dengan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan.

Dalam Djohanputro, Bramantio (2006) University of Wisconsin mendefinisikan manajemen bencana sebagai *“the range of activities designed to maintain control over disaster and emergency situation and to provide a framework for helping at-risk persons to avoid or recover from the impact of disaster. Disaster management deals with situation that occurs prior to, during, and after the disaster.”*

Sehingga dapat dapat dipahami manajemen bencana merupakan serangkaian kegiatan yang didesain untuk mengendalikan situasi bencana dan darurat dan untuk mempersiapkan kerangka untuk membantu orang yang rentan bencana untuk menghindari atau mengatasi dampak bencana tersebut. Manajemen bencana berkaitan dengan situasi yang terjadi sebelum, selama, dan setelah bencana.

Universitas British Columbia merumuskan definisi bencana (*disaster*) dengan memperhatikan tiga hal. Pertama, bencana dipertentangkan dengan darurat (*emergency*). Bencana tidak sama dengan emergensi. Istilah emergensi biasanya dikaitkan dengan bencana mini, seperti kebakaran, robohnya sebuah rumah, dan sejenisnya. Sedangkan bencana dikaitkan dengan kejadian yang tidak biasa, sulit direspon, dan dampaknya bisa sampai beberapa generasi. Kedua, bencana dikaitkan dengan kemampuan mereka yang mengalami bencana untuk mengatasinya. Sesuatu disebut bencana bila yang mengalami masalah atau masyarakat lokal tidak mampu menanganinya. Oleh karena itu, perlu keterlibatan masyarakat secara regional atau nasional, bahkan internasional. Ketiga, bencana berkaitan dengan isu yang luas, bukan saja masalah ekonomi, tetapi masalah sosial, ekologi, bahkan merambah ke wilayah politik. Ketidakmampuan menangani bencana bisa berakibat fatal terhadap kepercayaan masyarakat kepada penguasa. Dengan demikian, Universitas British Columbia mendefinisikan manajemen bencana (*disaster*) sebagai “*process of forming common objectives and common value in order to encourage participants to plan for and deal with potential and actual disaster*”. Sehingga manajemen bencana merupakan proses pembentukan atau penetapan tujuan bersama

dan nilai bersama (*common value*) untuk mendorong pihak-pihak yang terlibat (partisipan) untuk menyusun rencana dan menghadapi baik bencana potensial maupun aktual.

Menurut UU No.24 tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Bab I pasal 1 ayat 1, Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Pada ayat 2,3, dan 4 bencana dibedakan atas 3 katagori berdasarkan penyebabnya, yaitu bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial.

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Bencana sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa bencana merupakan suatu kejadian atau serangkaian peristiwa berupa gangguan atau kekacauan yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia pada pola normal kehidupan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Gangguan atau kekacauan ini biasanya hebat, terjadi tiba-tiba, tidak disangka, dan wilayah cakupan cukup luas.

2.1.4 Tujuan Manajemen Bencana

Dalam Djohanputro, Bramantio (2006) disebutkan bahwa pada prinsipnya, manajemen dilakukan sejak sebelum bencana terjadi, bukan pada saat dan setelah bencana menimpa. Tujuan manajemen bencana yang baik adalah:

1. Menghindari kerugian pada individu, masyarakat, maupun negara melalui tindakan dini (sebelum bencana terjadi). Tindakan ini termasuk pencegahan. Tindakan ini efektif sebelum bencana itu terjadi. Dalam kaitan bencana gempa bumi yang terjadi di Yogyakarta, atau tsunami di Aceh, tindakan ini sudah terlambat. Tetapi tindakan ini masih tetap efektif untuk mengantisipasi bencana yang bisa terjadi di

kemudian hari, termasuk bencana yang mungkin lebih besar akibat ulah Gunung Berapi. Tindakan penghindaran biasanya dikaitkan dengan beberapa upaya. Pertama, penghilangan kemungkinan sebab. Kalau bencana itu bisa disebabkan oleh kesalahan manusia, tindakan penghilangan sebab tentunya bisa dilakukan. Tetapi hal ini akan sulit bila penyebabnya adalah alam yang memiliki energi di luar kemampuan manusia untuk melakukan. Pergeseran lempeng bumi yang menyebabkan gempa bumi tektonik, misalnya, merupakan sebab yang sampai saat ini belum bisa diatasi oleh manusia. Belum ada satu teknologi yang mampu menghambat pergeseran lempeng bumi, atau mengatur pergeseran supaya bergerak pelan-pelan dan tidak menimbulkan getaran hebat. Oleh karena itu, tindakan penghindaran bencana alam lebih diarahkan pada menghilangkan, atau mengurangi kondisi, yang dapat mewujudkan bencana. Contoh “kondisi” yang dimaksud adalah struktur bangunan. Kondisi bangunan yang baik bisa meminimalisasi atau menghilangkan risiko bencana. Struktur bangunan yang sesuai untuk kondisi gempa menyebabkan bangunan tahan terhadap goncangan, sehingga kerugian manusia, fisik, ekonomi, dan lingkungan bisa dihindari.

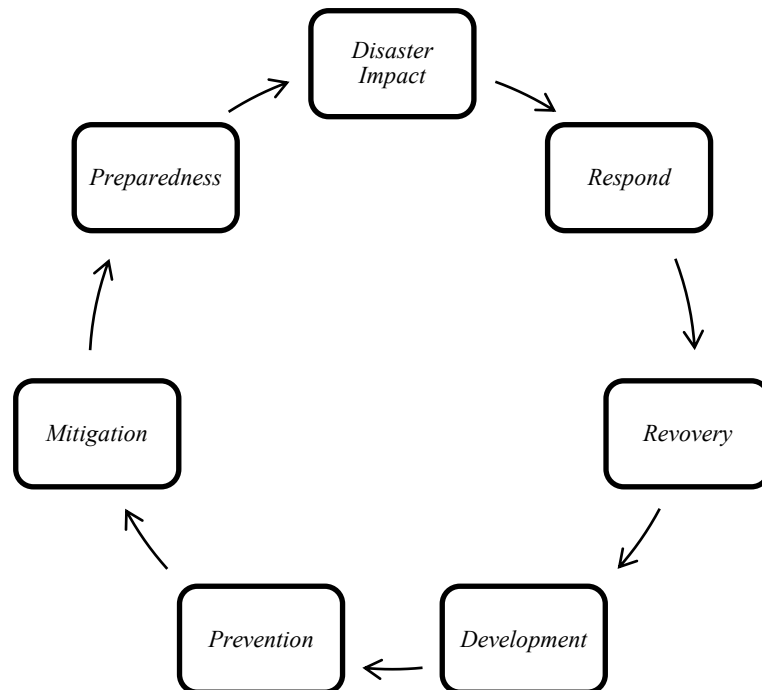
2. Meminimalisasi kerugian pada individu, masyarakat, maupun negara berupa kerugian yang berkaitan dengan orang, fisik, ekonomi, dan lingkungan bila bencana tersebut terjadi. Tindakan meminimalisasi kerugian akan efektif bila bencana itu telah terjadi. Tetapi perlu diingat, pranti tindakan meminimalisasi kerugian itu telah dilakukan jauh sebelum bencana itu sendiri terjadi. Contoh, bencana alam dengan cepat akan menimbulkan masalah pada kesehatan akibat luka parah, bahkan meninggal. Maka tindakan minimalisasi yang harus dilakukan sejak dini adalah penyebaran pusat-pusat medis ke berbagai wilayah, paling tidak sampai ke tingkat kecamatan.
3. Meminimalisasi penderitaan yang ditanggung oleh individu dan masyarakat yang terkena bencana. Ada juga yang menyebut tindakan ini sebagai pengentasan. Tujuan utamanya adalah membantu individu dan masyarakat yang terkena bencana supaya bisa bertahan hidup dengan cara melepaskan penderitaan yang langsung dialami. Bantuan tenda, pembangunan kembali perumahan yang hancur, memberi subsidi, termasuk dalam kategori ini. Tindakan yang juga termasuk kategori ini adalah pemulihan kondisi psikis individu dan masyarakat yang terkena bencana. Tujuannya adalah untuk mengembalikan optimisme dan kepercayaan diri. Dengan sikap yang positif tersebut,

- pemulihan individu dan masyarakat akan menjadi semakin cepat karena korban secara aktif membangkitkan diri sendiri.
4. Untuk memperbaiki kondisi sehingga individu dan masyarakat dapat mengatasi permasalahan akibat bencana. Perbaikan kondisi terutama diarahkan pada perbaikan infrastruktur seperti jalan, listrik, penyediaan air bersih, sarana komunikasi, dan sebagainya.
 5. Untuk mempercepat pemulihan kondisi sehingga individu dan masyarakat bangkit ke kondisi sebelum bencana, atau bahkan mengejar ketinggalan dari individu atau masyarakat lain yang tidak terkena bencana. Perbaikan infrastruktur tidaklah cukup. Itu hanya mengembalikan ke kondisi semula sehingga aktivitas ekonomi dan sosial berjalan sebagaimana layaknya sebuah wilayah. Daerah yang terkena bencana menjadi jauh tertinggal dibanding daerah lain.

2.1.4 Siklus Manajemen Bencana (The Disaster Management Cycle)

Carter, William (1990) dalam *Disaster Manajement Handbook* juga menjelaskan mengenai siklus Manajemen Bencana yang di ilustrasikan pada gambar dibawah ini:

Gambar 2.1 Siklus Manajemen Bencana



Sumber: Carter, William (2008) dalam bukunya
DisasterManajement Handbook

Pencegahan

Tindakan-tindakan di dalam fase ini dirancang untuk menghindari terjadinya sebuah bencana dan atau mencegah kejadian yang menimbulkan efek merusak terhadap komunitas atau semacamnya. Berikut hal-hal yang biasanya diklasifikasikan sebagai pertimbangan yang bersifat preventif:

1. Membangun bendungan atau tanggul untuk mengontrol air banjir sehingga sebuah kejadian bencana tidak bisa merugikan masyarakat, bangunan dan instalasi lainnya, peternakan, sarana produksi dan

penghidupan, dan sebagainya.

2. Mengendalikan banjir di daerah rawan sebelum musim banjir, pada area yang berisiko tinggi. jika tidak memulai pencegahan akan mencapai proporsi bencana yang mengancam.

Perlu dicatat bahwa beberapa negara cenderung untuk menggunakan istilah pencegahan / mitigasi sebagai sebuah tujuan gabungan untuk tindakan yang dilakukan dalam dua tahap ini.

Mitigasi/Pengurangan

Tindakan dalam tahap ini umumnya dilakukan dalam bentuk program-program khusus yang ditujukan untuk mengurangi efek dari bencana pada sebuah negara atau masyarakat. misalnya, beberapa negara menganggap pengembangan dan penerapan peraturan pembangunan dapat mengurangi kerusakan dan kerugian. Negara lainnya mungkin menganggap peraturan pembangunan seperti itu berada di dalam kategori pencegahan.

Istilah mitigasi pada umumnya lebih berarti bahwa ketika mungkin untuk mencegah beberapa efek bencana, efek lainnya akan tetap ada namun dapat diubah atau dikurangi dengan melakukan tindakan tepat. Poin di atas menunjukkan bahwa, dalam kondisi tertentu, istilah pencegahan / mitigasi mungkin lebih cocok bagi sebagian negara

dibanding menggunakan pencegahan dan mitigasi sebagai dua konsep dan kegiatan yang terpisah. Undang-undang juga dapat dianggap sebagai bentuk pengurangan (misalnya peraturan penggunaan lahan yang memastikan bahwa masyarakat tidak diizinkan untuk tinggal di tempat-tempat yang rentan terhadap bencana dari kawasan rawan banjir)

Tindakan atau program berikut ini yang umumnya dianggap sebagai langkah mitigasi (pengurangan):

1. Pelaksanaan peraturan pembangunan;
2. Regulasi penggunaan lahan;
3. Peraturan keamanan yang mengatur sistem transportasi;
4. Program-program pertanian yang ditujukan untuk mengurangi efek kerusakan pada hasil panen;
5. Sistem untuk melindungi instalasi penting seperti power supply dan alat komunikasi yang penting; dan
6. Pengembangan pada infrastruktur, seperti melakukan perutean jalan raya baru yang jauh dari kawasan rawan bencana.

Kesiagaan/ Persiapan

Kesiagaan ini biasanya dianggap sebagai langkah-langkah yang memungkinkan pemerintahan, organisasi, komunitas, maupun individu untuk merespon dengan cepat serta efektif terhadap situasi yang terkena

bencana. Contoh dari tindakan kesiagaan adalah:

1. Merumuskan dan mempertahankan perencanaan tanggap bencana yang valid dan diperbarui yang dapat diaplikasikan saat dibutuhkan
2. ketetapan khusus untuk tindakan darurat, seperti mengevakuasi penduduk atau memindahkan mereka untuk sementara ke tempat berlindung yang aman;
3. Menyediakan sistem peringatan;
4. Komunikasi gawat darurat;
5. Pendidikan dan kesadaran publik dan program pelatihan.

Salah satu aspek kesiagaan yang tidak selalu harus diutamakan adalah kesiagaan individu dan / ataupun keluarga. Dalam beberapa kondisi, di mana sumber daya pemerintah serta pelayanan darurat yang terbatas, kesiagaan individu dan keluarga tersebut mungkin penting bagi kelangsungan hidup.

Beberapa siklus penanggulangan bencana akan membagi tahap kesiagaan ini ke dalam beberapa bagian seperti:

1. Peringatan – waktu atau periode ketika bahaya telah teridentifikasi namun belum membahayakan wilayah tertentu (misalnya pemberitahuan bahwa akan ada banjir tetapi terjadinya masih jauh).
2. Ancaman – waktu atau periode ketika bahaya telah teridentifikasi

dan dinilai sebagai ancaman bagi wilayah tersebut (misalnya banjir akan sedang mengancam daerah itu).

3. Pencegahan – tindakan yang diambil setelah menerima peringatan untuk menghindari efek dari dampak bencana. Tindakan tersebut meliputi:

1. Menutup kantor, sekolah, dll;
2. Menyiapkan pembangkit listrik darurat;
3. Memotong hasil panen untuk menghindari kerugian besar dari hujan deras;
4. Membuat perahu dan kendaraan aman; serta
5. Melakukan tindakan pencegahan awal terhadap barang rumah, seperti menyimpan persediaan air darurat.

Keuntungan dengan meliputi bagian-bagian ini adalah memberikan beberapa indikasi kemungkinan urutan kejadian / tindakan yang mengarah ke dampak bencana.

Dampak Bencana

Segmen ini cukup jelas, menjadi poin yang menunjukkan bencana terjadi di siklus bencana; sebagai contoh, ketika banjir terjadi pada sebuah negara atau wilayah tertentu. Namun, hal ini berfungsi sebagai pengingat bahwa dalam hal penanggulangan bencana dampaknya dapat

bervariasi antara berbagai jenis bencana.

Respon/ Tindakan Pertolongan

Tindakan respon umumnya tindakan yang dilakukan segera sebelum dan setelah dampaknya bencana. Namun, untuk mempermudah representasi, tahap respon mengikuti alur setelah adanya dampak bencana, dan seperti inilah kebanyakan tindakan respon diterapkan.

Tindakan tersebut terutama ditujukan untuk menyelamatkan nyawa dan melindungi properti, dan untuk menangani dengan gangguan, kerusakan, dan efek langsung lainnya yang disebabkan oleh bencana tersebut. Langkah-langkah umumnya meliputi:

1. Mengimplementasikan rencana
2. Mengaktifkan sistem tanggap darurat
3. Mencari dan menyelamatkan (SAR)
4. Menyediakan makanan, tempat tinggal (posko), pengobatan darurat
5. Melakukan survei dan penilaian, serta
6. Mengevaluasi

Tahap ini kadang-kadang disebut sebagai tindakan tanggap darurat untuk menunjukkan bahwa tindakan tersebut berlaku untuk periode yang cukup singkat (yaitu, 2-3 minggu setelah dampak) ketika langkah-langkah darurat diperlukan untuk mengatasi dampak bencana

dan ketika, mungkin, keadaan darurat atau bencana telah dinyatakan oleh pemerintah.

Mungkin perlu dicatat di sini bahwa terkadang semua kegiatan yang berhubungan dengan bencana setelah dampak terjadi (termasuk langkah-langkah tanggap darurat, rehabilitasi, restorasi, dan rekonstruksi) merupakan tahap respon. Namun, untuk buku panduan pengguna, akan lebih mudah dan praktis jika respon dibedakan dengan tahap pemulihan.

Pemulihan

Pemulihan adalah proses yang mana masyarakat dan negara tersebut dibantu untuk kembali ke fungsi mereka seperti biasanya setelah terjadi sebuah bencana. Proses pemulihan dapat sangat berkepanjangan, antara 5-10 tahun, atau bahkan lebih. Tiga kegiatan utama di bawah ini biasanya muncul pada saat segmen pemulihan dilakukan. Kegiatan tersebut adalah:

1. Restorasi,
2. Rehabilitasi, dan
3. Rekonstruksi.

Kegiatan umum lainnya meliputi:

1. Memperbaiki tempat pelayanan penting;
2. Memperbaiki rumah dan gedung/bangunan lainnya;

3. Menyediakan perumahan sementara;
4. Tindakan-tindakan yang membantu rehabilitasi fisik maupun psikis bagi orang-orang yang terkena dampak bencana tersebut, serta
5. Tindakan-tindakan berjangka panjang untuk rekonstruksi, meliputi pembangunan kembali bangunan dan infrastruktur yang telah hancur oleh bencana tersebut.
6. Tinjauan pasca bencana juga seharusnya dijadikan sebagai bagian dari proses pemulihan. Tindakan tersebut harus dilakukan segera setelah bencana terjadi.

Pengembangan

Tahap pengembangan menjelaskan hubungan antara kegiatan yang berhubungan dengan bencana dan pembangunan. Dimasukkan dalam siklus bencana ini bertujuan untuk memastikan bahwa hasil dari bencana tersebut secara efektif direfleksikan dalam bentuk kebijakan masa depan dalam kepentingan kemajuan nasional. Misalnya, untuk menghasilkan manfaat terbaik mungkin dengan cara sebagai berikut:

1. Memperkenalkan sistem dan program pembangunan yang canggih dan modern;
2. Menggunakan jasa bantuan bencana internasional untuk mendapatkan hasil yang maksimal;

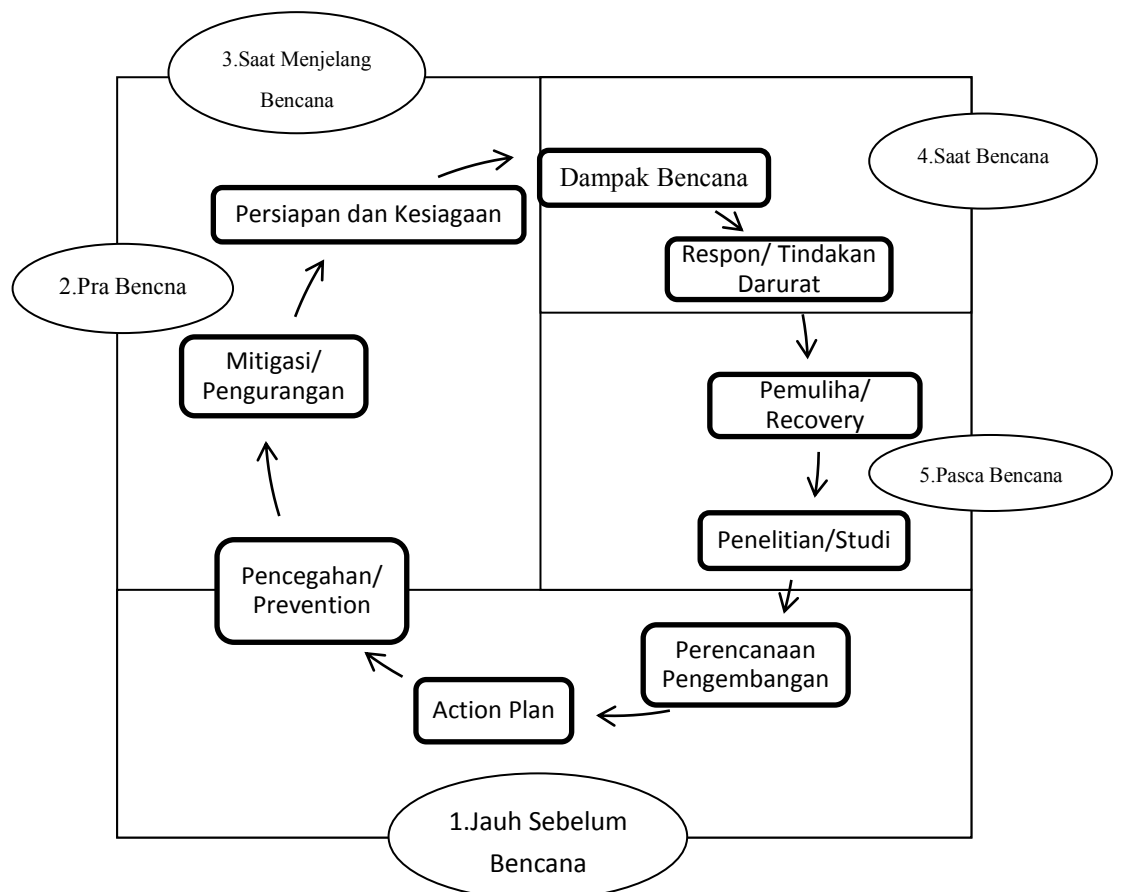
3. Menerapkan pengalaman terhadap bencana pada penelitian dan program pengembangan di masa yang akan datang; serta
4. Menggunakan cara lainnya yang tepat dalam situasi tertentu.

Pada saat yang sama, hubungan ini harus digunakan untuk memastikan bahwa pembangunan nasional tidak menciptakan masalah bencana lebih lanjut, atau memperburuk yang sudah ada. Walaupun setiap bangsa mempunyai karakteristik yang berbeda-beda namun pada hakekatnya pola pengelolaanya secara substansi hampir sama. Oleh karena itu, dari filosofi dan konsep manajemen bencana yang terpadu. Siklus ini secara umum menggambarkan proses-proses pengelolaan bencana yang pada intinya merupakan tindakan-tindakan nyata dari jauh sebelum bencana bakal terjadi, pra bencana, saat menjelang bencana dan pasca bencana. Siklus ini dapat dipakai sebagai acuan untuk mengelola hampir semua bencana.

Kejadian bencana-bencana alam seperti: banjir, longsor dan kekeringan dipengaruhi oleh kondisi dua musim sepanjang tahun, musim hujan dan musim kemarau. Pengertian pra, saat dan pasca bencana dapat didasarkan atas perubahan musim ini. Namun untuk bencana lainnya seperti tsunami saat menjelang atau kejadian bencana sulit untuk diketahui. Sehingga jenis-jenis bencana yang tidak mengikuti suatu

periode waktu lebih tepat dipakai pengertian kegiatan yaitu mulai dari perencanaan dan pengembangan, *action plan* atau implementasi dari perencanaan yang matang, pencegahan, mitigasi dan kesiagaan. Diagram Siklus Pengelolaan Bencana digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.2 Siklus Manajemen Bencana



Sumber: Robert J. Kodoatie dan Roestam Sjarif (2007) dalam bukunya Pengelolaan Bencana Terpadu.

Dalam gambar di atas dapat dilihat bahwa konsep pengelolaan bencana dimulai dari tindakan jauh sebelum bencana (meliputi perencanaan dan pengembangan, pelaksanaan dan pencegahan) kemudian pada masa pra bencana (meliputi pencegahan dan pengurangan resiko) kemudian menjelang bencana (meliputi persiapan dan kesiagaan) dan pada saat bencana (dampak bencana dan tindakan darurat) sampai pada pasca bencana (meliputi pemulihan dan penelitian).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pasal 1 (5) tertulis bahwa Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

2.1.5 Bencana dan Penanggulangan Bencana

Dalam Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana dijelaskan bahwa:

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak

psikologis.

2. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi karena alam, letusan gunung berapi, angin topan, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemi, wabah, kejadian luar biasa, dan kejadian antariksa.
3. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa kebakaran hutan/lahan yang disebabkan oleh manusia, kecelakaan transportasi, kegagalan konstruksi/teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan.
4. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi kerusuhan sosial dan konflik sosial dalam masyarakat yang sering terjadi.
5. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

6. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
7. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
8. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat pada lembaga yang berwenang.
9. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
10. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana dan prasarana.

11. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
12. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
13. Ancaman Bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
14. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapsiagaan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

15. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
16. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentangan pihak yang terancam bencana.
17. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
18. Status keadaan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
19. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
20. Korban adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.

Asas penanggulangan bencana sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana ialah: (a) kemanusiaan, (b) keadilan, (c)

kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah, (d) keseimbangan, keselarasan, dan keserasian, (e) ketertiban dan kepastian hukum, (f) kebersamaan (g) kelestarian lingkungan hidup, (h) ilmu pengetahuan dan teknologi.

Prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana ialah: (a) cepat dan tepat, (b) prioritas, (c) koordinasi dan keterpaduan, (e) berdaya guna dan berhasil guna, (f) kemitraan, (g) pemberdayaan, (h) nondiskriminasi, dan (i) nonproletisi.

Penanggulangan bencana bertujuan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana ialah:

1. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana.
2. Menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada.
3. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.
4. Menghargai budaya lokal.
5. Membangun partisipasi kemitraan publik dan swasta.
6. Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan

7. Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2.1.6 Fungsi dan Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mempunyai fungsi:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif, dan efisien.
2. Pengekoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas:

1. Menetapkan pedoman dan pengarahannya sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara.
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana.
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana.

5. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya.
6. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
7. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.
8. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran dan Belanja Daerah.
9. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.2 Penelitian Terdahulu

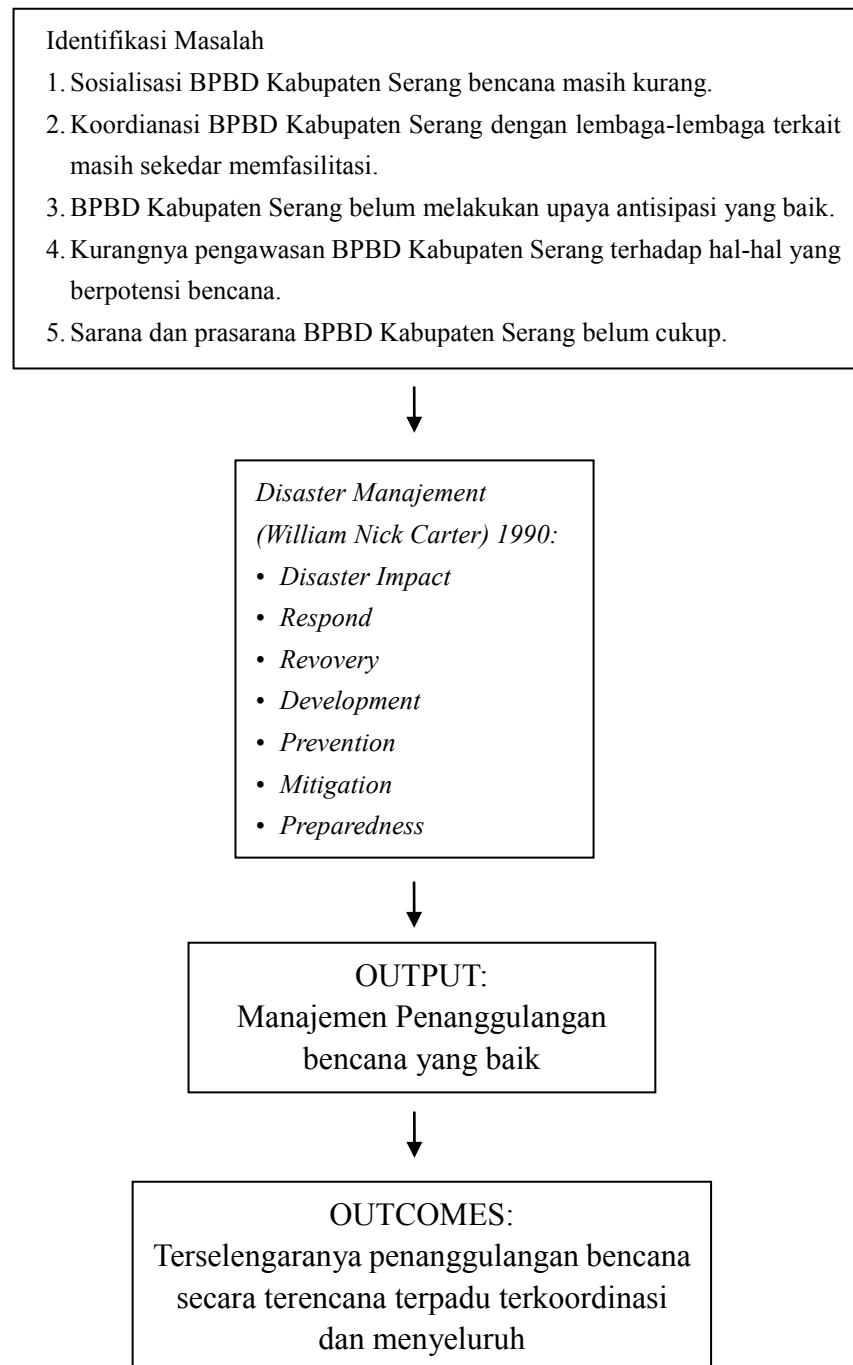
Untuk dapat membantu peneliti melakukan penelitiannya digunakan penelitian terdahulu yang disesuaikan dengan tema penelitian. Dalam penelitian terdahulu peneliti menggunakan Skripsi milik Saudari Vera Novianti dengan judul penelitian yaitu: “Peran Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Provinsi Banten Dalam Penanggulangan Bencana di Provinsi Banten” dengan demikian penelitian tersebut memiliki tema yang sama dengan apa yang akan diteliti oleh peneliti dengan temanya adalah penanggulangan bencana. Walaupun memiliki beberapa perbedaan seperti berbeda objek penelitian nya pada penelitian terdahulu objeknya adalah

TAGANA Provinsi Banten sedangkan pada penelitian ini objeknya adalah BPBD Kabupaten Serang, kemudian perbedaan lainnya adalah mengenai teori yang digunakan dalam penelitian terdahulu *main theory* nya adalah teori peran milik Stephen P. Robbins sedangkan pada penelitian ini *main theory* nya adalah Teori manajemen bencana milik Kodoatie, dkk. Kemudian perbedaan lainnya adalah mengenai lokus penelitian yaitu pada penelitian terdahulu lokus nya adalah Provinsi Banten sedangkan lokus pada penelitian ini adalah Kabupaten Serang yang juga sebagai kabupaten yang berada pada lokus penelitian terdahulu. Penelitian tersebut sangat membantu peneliti untuk memahami proses manajemen penanggulangan bencana yang tidak ditemukan dalam proses observasi awal penelitian, dilain hal peneliti juga menggunakan penelitian terdahulu untuk membuat key informan yang disesuaikan dengan teori yang peneliti gunakan, kegunaan lainnya adalah dalam proses analisis data penelitian, peneliti juga merujuk pada hasil penelitian terdahulu sehingga nantinya akan meminimalisir kesulitan dalam proses pengumpulan data di lapangan.

2.3 Kerangka Pemikiran Penelitian.

Gambar 2.3

Kerangka Pemikiran



2.4 Asumsi Dasar.

Berdasarkan pada kerangka berpikir yang telah dipaparkan di atas dan setelah peneliti melakukan observasi awal terhadap objek penelitian. Maka peneliti berasumsi bahwa kegiatan manajemen penanggulangan bencana yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Serang belum berjalan dengan baik khususnya pada peristiwa bencana yang rutin terjadi yaitu bencana banjir. Manajemen penanggulangan bencana yang belum baik terlihat oleh masih besarnya dampak kejadian suatu peristiwa bencana banjir yang ditunjukkan pada besarnya kerusakan dan kerugian dan adanya korban bencana yang di derita oleh pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Serang yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap bencana serta cara menanggulangi bencana, koordinasi antar lembaga lain yang terlibat masih hanya sekedar memfasilitasi belum pada pengintergrasian program kerja, kurangnya upaya antisipasi terhadap peristiwa bencana banjir, kurangnya pengawasan BPBD Kabupaten Serang (terhadap pengelolaan sumber daya alam, penelitian dan pengembangan teknologi, dan pembangunan) yang berpotensi memiliki resiko bencana, serta kurangnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan BPBD Kabupaten Serang, dan masih banyaknya masyarakat umum yang belum menyadari

adanya BPBD Kabupaten Serang yang bertugas dalam penanggulangan bencana di daerah yang menyebabkan kurangnya kepedulian dan partisipasi masyarakat pada penanggulangan bencana Kabupaten Serang.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian.

Metode penelitian merupakan cara dan prosedur yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki suatu masalah tertentu dengan maksud mendapatkan informasi untuk digunakan sebagai solusi atas masalah tersebut. Cara yang dimaksud dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah yang terdiri dari berbagai tahapan atau langkah-langkah. Oleh karena itu, metode merupakan keseluruhan langkah ilmiah yang digunakan untuk menemukan solusi atas suatu masalah. Dengan langkah-langkah tersebut, siapapun yang melaksanakan penelitian dengan mengulang atau menggunakan metode penelitian yang sama untuk objek dan subjek yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula (Silalahi,2010 :12).

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono,2008:2). Selanjutnya metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono 2008:1).

Penelitian kualitatif sesungguhnya merupakan suatu istilah umum yang memayungi berbagai metode yang sangat beragam dengan menggunakan label yang beragam pula, antara lain kualitatif (untuk menggambarkan sifat data), naturalistik (untuk setting penelitian), *grounded research* (sifat induktif penelitian), fenomenologis (pemaknaan realitas), *verstehen* (cara menarik inferensi), iluminatif (cara menarik inferensi), *participan observation* (cara kerja peneliti) (Alwasilah 2006:18). Kemudian Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif didasari diantaranya oleh teori-teori fenomenologi dan interaksi simbolik (Sarwono 2006:19)

Dari berbagai pemaparan di atas dapat disimpulkan, metodologi penelitian adalah cara yang sistematis yang digunakan untuk menyelidiki masalah tertentu yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang kemudian dijadikan solusi atas permasalahan tersebut dengan kondisi yang alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci yang berkerja dengan cara observasi yang mengandalkan fenomenologi dan interaksi simbolik yang terjadi selama pencarian informasi. Dengan demikian pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mendapatkan data-data penelitian, melihat bahwa metode ini adalah metode yang paling baik digunakan untuk penelitian ini.

3.2 Lokasi Penelitian.

Yang menjadi lokus penelitian adalah wilayah kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang yaitu Kabupaten Serang itu sendiri yang terbagi menjadi 29 Kecamatan dan 326 Desa.

3.3 Instrumen Penelitian.

Instrumen penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus "divalidasi" seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Validasi terhadap peneliti sebagai instrumen meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki obyek penelitian, baik secara akademik maupun logistiknya. Yang melakukan pemahaman terhadap metode kualitatif, penguasaan teori dan wawasan terhadap bidang yang diteliti, serta kesiapan dan bekal memasuki lapangan. (Sugiyono 2008:59).

Instrumen dalam penelitian kualitatif adalah yang melakukan penelitian itu sendiri yaitu peneliti. Peneliti dalam penelitian kualitatif merupakan orang yang membuka kunci, menelaah dan mengeksplorasi seluruh ruang secara cermat, tertib dan leluasa, dan bahkan ada yang menyebutnya sebagai *key instrument*. (Satori dan Komariah 2010:61).

Menurut Nasution dalam Sugiyono (2011: 307-308), peneliti sebagai instrumen penelitian serasi untuk penelitian serupa karena memiliki ciri-ciri antara lain :

1. Peneliti sebagai alat peka dan dapat bereaksi terhadap segala stimulus dari lingkungan yang harus diperkirakannya bermakna atau tidak bagi peneliti.
2. Peneliti sebagai alat dapat menyesuaikan diri terhadap semua aspek keadaan dan dapat mengumpulkan aneka ragam data sekaligus.

3. Tiap situasi merupakan keseluruhan. Tidak ada suatu instrumen berupa test atau angket yang dapat menangkap keseluruhan situasi kecuali manusia.
4. Suatu situasi yang melibatkan interaksi manusia, tidak dapat dipahami dengan pengetahuan semata. Jadi, untuk memahaminya kita perlu sering merasakannya, menyelaminya berdasarkan pengetahuan kita.
5. Peneliti sebagai instrumen dapat segera menganalisis data yang diperoleh dan ia dapat menafsirkannya.
6. Hanya manusia sebagai instrumen dapat mengambil kesimpulan berdasarkan data yang dikumpulkan pada suatu saat dan menggunakan dengan segera sebagai balikan untuk memperoleh penegasan, perubahan dan perbaikan.
7. Dalam manusia sebagai instrumen, respon yang aneh dan menyimpang diberi perhatian. Respon yang lain dari pada yang lain, bahkan yang bertentangan dipakai untuk mempertinggi tingkat kepercayaan dan tingkat pemahaman mengenai aspek yang diteliti.

Sehingga dalam penelitian kualitatif instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri yang melakukan penelitian sebagai pengekplorasi objek penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati setiap informasi yang didapat dan menyimpannya menjadi sebuah data penelitian.

3.4 Sumber Data.

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Adapun sumber data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti langsung dari sumber data baik melalui proses wawancara tatap muka antara peneliti dengan informan maupun melalui pengamatan (*observation*) di tempat yang menjadi objek penelitian. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari studi dokumentasi dan studi pustaka.

3.5 Informan Penelitian.

Informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitiannya dan yang menjadi informan kunci (*key informan*) dalam penelitian ini adalah Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang terdiri atas Kasubag Program dan Evaluasi, Kepala Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan dan Laboratorium, Kepala Bidang Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Rehabilitasi dan Rekontruksi. *Key informan* dibutuhkan untuk memulai melakukan wawancara dan observasi. Dengan demikian *key informan* ini adalah tokoh-tokoh formal dalam pemerintahan daerah yang memahami penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah dan tokoh-tokoh informal yang mengetahui kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh organisasi/ kelompoknya dan mewakilinya seperti kepala desa/ sekretaris desa yang mewakili masyarakat korban bencana diwilayah tersebut.

Sedangkan untuk secondary informan dalam penelitian ini adalah korban bencana dan masyarakat Kabupaten Serang yang di statuskan sebagai calon korban sebuah peristiwa bencana terutama pada masyarakat yang tinggal pada daerah rawan peristiwa bencana banjir.

Tabel 3.1

Daftar Informan

No.	Daftar Informan	Kode Informan	Keterangan
I	BPBD Kabupaten Serang.		
	1. Kasubag Program dan Evaluasi.		<i>Key Informan</i>
	2. Kabid Pencegahan Kesiapsiagaan dan Laboratorium.	I ₁₋₁	<i>Key Informan</i>
	3. Kabid Penanggulangan Bencana dan Kebakaran.	I ₁₋₂ I ₁₋₃	<i>Key Informan</i>
	4. Kabid Sarana Prasarana Rehabilitasi dan Rekontruksi.	I ₁₋₄ I ₁₋₅	<i>Key Informan</i>
	5. Tim Reaksi Cepat (TRC)		<i>Key Informan</i>
II.	Masyarakat.		
	1. Kepala Desa/ Sekertaris Desa	I ₂₋₁	<i>Secondary Informan</i>
	2. Tokoh Masyarakat (korban bencana).	I ₂₋₂	<i>Secondary Informan</i>

Sumber : Peneliti, 2013.

3.6 Teknik Pengumpulan Data.

3.6.1 Data Primer.

Data primer adalah data yang diambil langsung, tanpa perantara, dari sumbernya. Seseorang peneliti sosial bisa mendapatkan data primernya

dengan cara melakukan wawancara atau melakukan pengamatan langsung terhadap suatu aktivitas masyarakat Irawan (2005:5.5).

Sehingga data primer pada penelitian ini adalah hasil wawancara terhadap informan yang menginformasikan data-data yang terkait dengan penelitian ini.

3.6.1.1 Wawancara.

Berikut ini adalah beberapa teori mengenai wawancara yang menjadi dasar teori yang digunakan sebagai acuan dalam proses wawancara untuk pengumpulan data. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interview*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu Moleong (2007:186).

Dalam hal ini yang menjadi pewawancara ialah peneliti itu sendiri, sedangkan yang berlaku sebagai terwawancara yaitu objek penelitian. Proses wawancara dilakukan dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan yang menyangkut tentang tema si peneliti, kemudian si objek penelitian diharuskan menjawab pertanyaan yang telah diajukan oleh peneliti. Wawancara yang dilakukan pada penelitian ini sifatnya terbuka agar diperoleh jawaban yang lebih luas serta mendalam dan rangkaian pertanyaan tidak dilengkapi dengan pilihan jawaban. Untuk dapat mengendalikan alur wawancara peneliti membuat tujuan dari wawancara agar tidak terjebak pada data yang tidak relevan.

Moleong (2007:168) juga menjelaskan kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif cukup rumit. Ia sekaligus merupakan perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsiran data, dan pada akhirnya ia menjadi pelapor hasil penelitiannya.

Satori dan Komariyah (2010:129) berpendapat bahwa wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Selanjutnya wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk melakukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari informan yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.

Kemudian Esterberg (2002) dalam Sugiyono (2008:73) mengemukakan beberapa macam wawancara, yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Sedangkan Denzin dan Lincoln (2009:495) berpendapat wawancara adalah bentuk perbincangan, seni bertanya dan mendengar. Wawancara bukanlah sebuah perangkat netral dalam memproduksi realitas. Dalam konteks ini, berbagai jawaban diutarakan. Jadi, wawancara merupakan perangkat untuk memproduksi pemahaman situasional (*situated understandings*) yang bersumber dari episode-episode interaksional khusus. Metode ini sangat dipengaruhi oleh karakteristik personal seorang peneliti, termasuk ras, kelas sosial, kesukaan dan gender.

Esterberg (2002) dalam Sugiyono (2008:72) mendefinisikan wawancara sebagai berikut: *"a meeting of two person to exchange information and idea though question and responses, resulting in communication and joint construction of meaning about a particular topic"*. Sehingga dapat disimpulkan "Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu".

3.6.1.1.2 Pedoman Wawancara.

Dalam penelitian mengenai Manajemen Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang menggunakan teori William Nick Carter mengenai *disaster manajement* (manajemen penanggulangan bencana) yang menyebutkan bahwa penanggulangan bencana adalah sebuah proses dinamis yang meliputi fungsi manajemen klasik perencanaan, pengorganisasian, staffing, kepemimpinan, dan pengawasan. Manajemen Bencana didefinisikan sebagai: Sebuah ilmu terapan yang berusaha berdasarkan pengamatan sistematis dan analisis bencana, untuk meningkatkan tindakan yang berkaitan dengan pengembangan, pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan.yang kemudian akan dijadikan dimensi dalam pedoman wawancara. Berikut pedoman wawancaranya:

Tabel 3.2

Pedoman Wawancara.

No.	Dimensi	Informan
	<i>Disaster Manajement</i> yang dimaksud adalah sebuah proses dinamis yang meliputi fungsi manajemen klasik perencanaan, pengorganisasian, staffing, kepemimpinan, dan pengawasan yang berusaha berdasarkan pengamatan sistematis dan analisis bencana, untuk meningkatkan tindakan yang berkaitan dengan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan.	
1.	<i>Prevention</i> yang dimaksud adalah upaya menghambat terjadinya bencana dan/atau mencegah kejadian bencana yang memiliki efek merugikan pada masyarakat atau instalasi penting	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. membangun bendungan 2. bangunan instalasi lain 3. pengawasan 4. penerapan undang-undang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kabid Sarana Prasarana Rehabilitasi Rekontruksi dan masyarakat 2. Kabid Sarana Prasarana Rehabilitasi Rekontruksi dan masyarakat 3. Kasubag Program Evaluasi dan masyarakat 4. Kasubag Program Evaluasi dan masyarakat
2.	<i>Mitigation</i> yang dimaksud adalah bentuk program-program khusus yang ditujukan untuk mengurangi efek bencana	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. peraturan penggunaan lahan 2. peraturan keselamatan 3. sistem perlindungan instalasi penting 4. jalan raya baru yang jauh dari daerah rawan bencana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kabid Pencegahan Kesiapsiagaan Laboratorium dan masyarakat 2. Kabid Pencegahan Kesiapsiagaan Laboratorium dan masyarakat 3. Kabid Pencegahan Kesiapsiagaan Laboratorium dan masyarakat 4. Kabid Pencegahan Kesiapsiagaan Laboratorium dan masyarakat
3.	<i>Preparedness</i> yang dimaksud adalah langkah-langkah kesiapsiagaan yang memungkinkan pemerintah, organisasi, masyarakat, dan individu untuk merespon dengan cepat dan efektif untuk situasi bencana.	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. merumuskan dan memelihara 2. ketentuan khusus untuk tindakan darurat 3. menyediakan sistem peringatan 4. pendidikan dan kesadaran masyarakat 5. program pelatihan 6. peringatan 7. tindakan yang dilakukan setelah menerima peringatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kabid Pencegahan Kesiapsiagaan Laboratorium dan masyarakat 2. Kabid Pencegahan Kesiapsiagaan Laboratorium dan masyarakat 3. Kabid Pencegahan Kesiapsiagaan Laboratorium dan masyarakat 4. Kabid Pencegahan Kesiapsiagaan Laboratorium dan masyarakat 5. Kabid Pencegahan Kesiapsiagaan Laboratorium dan masyarakat 6. Kabid Pencegahan Kesiapsiagaan Laboratorium dan masyarakat 7. Kabid Pencegahan Kesiapsiagaan Laboratorium dan masyarakat
4.	<i>Disaster Impact</i> yang dimaksud adalah titik dalam siklus bencana setiap terjadi bencana sebagai pengingat bahwa-dalam penanggulangan bencana dampak dapat bervariasi antara berbagai jenis bencana dalam hal ini adalah dampak bencana.	
	1. kebijakan manajemen bencana banjir	Kasubag Penanggulangan Bencana Pemadam Kebakaran dan masyarakat

5.	<i>Respond</i> yang dimaksud adalah Tindakan respon biasa diambil segera sebelum dan setelah dampak bencana.	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. palaksanaan rencana 2. aktualisasi sistem kejadian bencana 3. pencarian dan penyelamatan 4. penyediaan makanan darurat, bantuan medis, penampungan, dll 5. survey dan penilaian 6. evaluasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Reaksi Cepat (TRC) dan masyarakat dan masyarakat 2. Tim Reaksi Cepat (TRC) dan masyarakat dan masyarakat 3. Tim Reaksi Cepat (TRC) dan masyarakat dan masyarakat 4. Tim Reaksi Cepat (TRC) dan masyarakat dan masyarakat 5. Tim Reaksi Cepat (TRC) dan masyarakat dan masyarakat 6. Tim Reaksi Cepat (TRC) dan masyarakat dan masyarakat
6.	<i>Recovery</i> yang dimaksud adalah langkah-langkah rekonstruksi, termasuk penggantian bangunan dan infrastruktur yang telah dihancurkan oleh bencana	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. pemulihan pelayanan penting 2. pemulihan rumah, bangunan dan instalasi lain 3. penyediaan tempat tinggal sementara 4. rehabilitas fisik dan psikologis 5. rekontruksi bangunan dan infrastruktur 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kabid Sarana Prasarana Rehabilitasi Rekontruksi dan masyarakat 2. Kabid Sarana Prasarana Rehabilitasi Rekontruksi dan masyarakat 3. Kabid Sarana Prasarana Rehabilitasi Rekontruksi dan masyarakat 4. Kabid Sarana Prasarana Rehabilitasi Rekontruksi dan masyarakat 5. Kabid Sarana Prasarana Rehabilitasi Rekontruksi dan masyarakat
7.	<i>Development</i> yang dimaksud adalah pembangunan memberikan hubungan antara kegiatan yang berhubungan dengan bencana dan pembangunan.	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. memperkenalkan sistem bangunan yang dimodernisasi dan program-program 2. menggunakan bantuan asing 3. penerapan pengalaman bencana dalam program penelitian dan pengembangan di masa depan, 4. menggunakan cara lain yang sesuai untuk situasi tertentu 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kasubag Program Evaluasi dan masyarakat 2. Kasubag Program Evaluasi dan masyarakat 3. Kasubag Program Evaluasi dan masyarakat 4. Kasubag Program Evaluasi dan masyarakat

Sumber : Peneliti 2013

3.6.1.2 Observasi.

Dalam kamus besar bahasa indonesia observasi/ pengamatan berarti melihat dengan penuh perhatian. Dalam hal ini pengamatan penuh diberikan kepada variable penelitian agar dapat menemukan data deskriptif dari hasil pengamatan tersebut.

3.6.2 Data Sekunder.

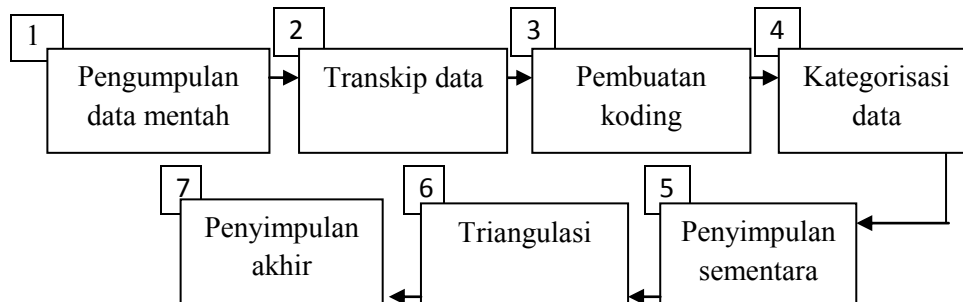
Selanjutnya untuk menambahkan penjelasan terhadap data yang sudah dikumpulkan maka perlu untuk dilakukan observasi. Data sekunder adalah data yang diambil secara tidak langsung dari sumbernya. Data sekunder biasanya diambil dari dokumen-dokumen (laporan, karya tulis orang lain, koran, majalah). Seseorang mendapatkan informasi dari “orang lain”. Orang lain inilah yang mendapatkan data primer. Bila orang lain ini bercerita kepada kita maka kita mendapatkan data sekunder Irawan (2005:5.5). Maka dalam penelitian ini data sekundernya adalah laporan-laporan, karya tulis orang lain serta media-media pemberitahuan seperti koran dan majalah yang membahas mengenai objek penelitian pada penelitian ini.

3.6.2.1 Studi Pustaka.

Studi pustaka merupakan proses pengumpulan teori-teori yang mendukung hasil penelitian dan membantu proses penelitian. Semakin banyak teori yang digunakan maka akan semakin terarah penelitian tersebut.

3.7 Teknik Analisis Data.

Penelitian ini menggunakan proses analisis data dari Prasteya Irawan yang terdiri dari pengumpulan data mentah, transkrip data, pembuatan koding, kategorisasi data, penyimpulan sementara, triangulasi, penyimpulan akhir. Seluruh proses analisis data tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 3.1**Proses Analisis Data**

Sumber: (Irawan, Prasetya 2005:5.28-5.35)

Dari gambar tersebut langkah-langkah praktis dalam proses analisis data dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengumpulan data mentah, Analisis data dimulai dengan melakukan pengumpulan data mentah dengan wawancara, observasi lapangan, kajian pustaka. Pada tahap ini dibutuhkan alat-alat pendukung seperti alat perekam suara, kamera, catatan penelitian dan lain-lain. Yang dicatat adalah data apa adanya (*verbatim*), tidak diperkenankan untuk mencampuradukan pikiran, pendapat, maupun sikap dari peneliti itu sendiri.
2. Transkrip data, Pada tahap ini catatan hasil wawancara dirubah kebentuk tertulis seperti apa adanya (*verbatim*), bukan hasil pemikiran maupun pendapat pribadi peneliti.
3. Pembuatan koding, Pada tahap ini membaca ulang seluruh data yang sudah ditranskrip. Baca pelan-pelan dengan sangat teliti, sehingga menemukan hal-hal penting yang perlu dicatat dengan mengambil kata

kuncinya dan kemudian diberi kode pada data yang sudah didapatkan kata kunci.

4. Kategorisasi data, Pada tahap ini peneliti mulai “menyederhanakan” data dengan cara “mengikat” konsep-konsep (kata-kata) kunci dalam satu besaran yang di namakan “kategori”.
5. Penyimpulan sementara, Membuat penyimpulan sementara berdasarkan data yang ada tanpa memberi penafsiran dari pikiran penuh peneliti. kesimpulan ini 100% harus berdasarkan data. Jika ingin memberi penafsiran dari pikiran sendiri maka tuliskan pada bagian akhir kesimpulan sementara yang disebut dengan Observer’s Comments (OC).
6. Triangulasi, Temuan yang dihasilkan dicek ulang derajat keshahihan dan keandalannya dengan menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memperpanjang masa penelitian dengan menggunakan teknik triangulasi. Sederhananya teknik triangulasi bertujuan untuk meperkuat temuan-temuan, adalah proses check dan recheck antara satu sumber data dengan sumber data lainnya.
7. Penyimpulan akhir, Apabila temuan yang dihasilkan dari penelitian dapat terjamin validitas dan reliabilitasnya barulah kemudian membuat penyimpulan akhir.

3.8 Pemeriksaan Keabsahan Data.

Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan, yaitu derajat kepercayaan (*credibility*),

keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*). Dalam penelitian Kualitatif dimana uji keabsahan data terhadap data yang dimiliki dilakukan dengan cara:

1. Perpanjangan pengamatan, berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Sehingga hubungan peneliti dengan narasumber akan terbentuk rapat, akrab (tidak ada jarak lagi), semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi.
2. Meningkatkan ketekunan, berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dalam hal ini peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak. Selain itu, dengan meningkatkan ketekunan maka peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati. Sebagai bekal peneliti untuk meningkatkan ketekunan adalah dengan cara membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan temuan yang diteliti
3. Triangulasi, dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dari berbagai cara atau menggabungkan beberapa teknik pengumpulan data. Terdapat berbagai macam triangulasi meliputi triangulasi sumber, triangulasi waktu, triangulasi teknik. Namun dalam hal ini peneliti lebih cenderung menggunakan triangulasi teknik, dan triangulasi sumber. Triangulasi teknik peneliti menggunakan teknik

pengumpulan data yang berbeda seperti observasi, wawancara atau teknik lainnya untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Triangulasi sumber berarti untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.

4. Menggunakan bahan referensi, adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti seperti hasil rekaman wawancara dengan menggunakan alat perekam, dokumentasi seperti foto-foto saat penelitian, catatan lapangan, dan lain sebagainya.
5. Mengadakan *memberchek*, adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan *memberchek* adalah agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan.

3.9 Jadwal Penelitian.

Gambar 3.2

Jadwal Penelitian

	WAKTU																														
	2012						2013												2014								2015				
	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1
Pengajuan Judul	█																														
Observasi Awal	█	█	█					█											█												
Penyusunan Proposal		█	█	█	█			█											█	█	█	█	█								
Seminar Proposal																															
Revisi Seminar Proposal																															
Pencarian Data Lapangan																															
Pengolaan Data																															
Sidang Hasil Penelitian																															
Revisi Sidang																															

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian.

Deskripsi objek penelitian berisi mengenai objek penelitian yang meliputi lokasi penelitian secara jelas, struktur organisasi dari informan yang telah ditentukan serta hal lain yang berhubungan dengan objek penelitian. Dengan demikian objek penelitian akan menguraikan gambaran umum mengenai Provinsi Banten, Kabupaten Serang dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Serang sebagai lokasi dilakukannya penelitian.

4.1.1 Deskripsi Wilayah Kabupaten Serang.

Luas Wilayah dan Letak Topografis Daerah.

Kabupaten Serang merupakan salah satu dari delapan kabupaten/kota di Propinsi Banten, terletak diujung barat bagian utara pulau Jawa dan merupakan pintu gerbang utama yang menghubungkan Pulau Sumatera dengan Pulau Jawa dengan jarak ± 70 km dari kota Jakarta, Ibukota Negara Indonesia.

Luas wilayah secara administratif tercatat 1.417,50 Km² yang terbagi atas 29 wilayah Kecamatan dan 326 Desa Secara Geografis wilayah Kabupaten Serang terletak pada koordinat 5°50' sampai dengan 6°21' Lintang Selatan dan 105°0' sampai dengan 106°22' Bujur Timur. Jarak terpanjang menurut garis lurus dari utara keselatan adalah sekitar 60 km dan jarak terpanjang dari Barat ke Timur adalah

sekitar 90 km, sedangkan kedudukan secara administratif berbatasan dengan :

- a. Sebelah Utara dibatasi dengan Kota Serang dan Laut Jawa
- b. Sebelah Timur dibatasi oleh Kabupaten Tangerang
- c. Sebelah barat dibatasi oleh Kota Cilegon dan Selat Sunda
- d. Sebelah Selatan dibatasi oleh Kabupaten Lebak dan Pandeglang.
- e. Sebaran Kawasan Budidaya

Tabel 4.1

Pola Penggunaan Lahan Kabupaten Serang

No.	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase
	Kawasan Lindung	41.662	29,39%
1.	Hutan Lindung	6.522	3,82%
2.	Kawasan Cagar Alam	5.529	3,24%
3.	Kawasan Danau	1.622	0,95%
4.	Lahan Kritis	25	0,01%
5.	Kawasan Hutan Bakau	0.871	5,78%
6.	Hutan Kota/ Ruang Terbuka	18.093	10,59%
	Kawasan Budidaya		
1.	Zona Perkotaan	100.088	70,61%
2.	Zona Industri	27.055	15,94%
3.	Zona Industri Kimia Logam dan Rancang Bangun	14.872	8,71%
4.	Zona Pengembangan Perkotaan, Pelabuhan, Pertanian dan Perikanan	2.366	1,39%
5.	Zona Pengelolaan Pulau Perairan	1.023	0,80%
6.	Kawasan Pariwisata	2.121	1,24%
7.	Pelabuhan	580	0,33%
8.	Pertanian Lahan Basah	21.996	12,88%
9.	Pertanian Lahan Kering	8.054	4,70%
10.	Tanaman Tahunan	11.654	6,82%
	Luas Wilayah Kabupaten Serang	141.750	100,00%

Sumber: RPJMD Kabupaten Serang 2010-2015

Kondisi lahan di Kabupaten Serang terbagi menjadi dua bagian yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan budidaya, sebagian besar penggunaan lahannya terdiri atas persawahan yaitu seluas 54.145,40 Ha yang terdiri dari sawah tadah hujan seluas 31.079 ha, sawah irigasi seluas 23.066.40 Ha, yang sebagian besar berada di Serang Bagian Utara yang membentang mulai dari Kecamatan Kramatwatu Bagian utara, Kasemen, Pontang, Tirtayasa dan Tanara. Tegalan seluas 39.912,35 Ha tersebar diseluruh Kabupaten Serang, kebun campuran seluas 39.159,10 Ha yang sebagian besar berada di Wilayah Serang bagian Selatan diantaranya Kecamatan Petir, Tunjung Teja, Baros, Curug, Pabuaran, Padarincang, Ciomas, Gunungsari, Mancak dan Kecamatan Cinangka , perkampungan seluas 20.121,97 Ha yang tersebar di seluruh Kabupaten Serang, perumahan seluas 8.680 Ha, dan jasa seluas 3.305,26 Ha sebagian besar terkonsentrasi di Wilayah Kota Serang dan Kramatwatu, sehingga luas lahan budidaya secara keseluruhan sejumlah 106.043,01 Ha.

Kabupaten Serang memiliki lahan pertanian sangat luas yang dikelola oleh masyarakat. Memberikan hasil pertanian yang beragam seperti buah-buahan pisang, mangga, rambutan dan durian untuk konsumsi lokal dan memasok kebutuhan buah kota Jakarta. Serang juga memiliki perkebunan rakyat yang menghasilkan kelapa, kacang tanah, melinjo kopi, cengkeh, lada, karet, vanili, kakao dan bumbu-

bumbu. Juga untuk memenuhi kebutuhan lokal serta lebih banyak untuk memasok kebutuhan Jakarta.

Di sektor industri, terdapat dua Zona Industri yaitu Zona Industri Serang Barat dan Zona Industri Serang Timur . Zona Industri Serang Barat terletak di Kecamatan Bojonegara, Pulo Ampel dan Kramatwatu dengan luas total 4.000 Ha berada disepanjang pantai Teluk Banten untuk pengembangan industri mesin, logam dasar, kimia, maritim dan pelabuhan.

Sedangkan Zona industri Serang Timur terletak di Kecamatan Cikande, Kibin, Kragilan dan Jawilan. Terdapat beberapa kawasan industri seperti Nikomas Gemilang, Indah Kiat dan Cikande Modern. Total perusahaan industri besar dan sedang di Kabupaten Serang sebanyak 145 perusahaan.

Sedangkan Kawasan lindung di Kabupaten Serang tersebar di seluruh wilayah, yang meliputi sempadan sungai dan sempadan pantai, sedangkan kawasan lindung selain sempadan sungai dan pantai, terdapat diwilayah Serang Selatan dan Utara yaitu diwilayah Ciomas, Padarincang, Mancak dan Kramatwatu, sedangkan diwilayah utara terdapat di Kecamatan Bojonegara dan Puloampel. Perkembangan yang terjadi terhadap keberadaan hutan lindung ini mengalami penurunan, sehingga diperkirakan telah terjadi penyusutan luas hutan lindung 4361,79 ha dari 17906,61 ha menjadi tinggal 13544,82 ha. Berikut ini peta Kabupaten Serang:

Gambar 4.1
Peta Kabupaten Serang



Topografi.

Kabupaten Serang merupakan wilayah terdiri dari dataran rendah dan pegunungan, dengan ketinggian antara 0 sampai 1.778 mdpl (meter diatas permukaan laut). Kondisi iklim wilayah Kabupaten Serang termasuk tropis dengan musim hujan antara November sampai April dan musim kemarau antara Mei sampai Oktober dan curah hujan rata-rata 3,92mm /hari. Temperatur udara rata-rata berkisar antara 25,8°C-17,6°C dengan temperature udara minimum 20,90°C dan maksimum 33,8°C. Tekanan udara dan kelembapan rata-rata

81,00mb/bulan dengan kecepatan arah angin rata-rata 2,80 knot dengan arah terbanyak adalah dari barat.

Kabupaten Serang terdiri dari daratan, perbukitan dan pegunungan, bagian utara merupakan yang datar dan tersebar luas sampai ke pantai dan dibagian selatan sampai ke barat Kabupaten Serang berbukit dan bergunung antara lain sekitar Gunung Karang, Gunung Kencana dan Gunung Gede.

Hampir seluruh daratan Kabupaten Serang merupakan daerah subur karena tanahnya sebagian besar tertutup oleh endapan alluvial dan batu vulkanis kuarter. Namun terdapat potensi terjadinya longsor atau gerakan tanah apabila terjadi hujan yang berkepanjangan. Selain itu terdapat pula sungai-sungai yang besar yang melintasi wilayah Kabupaten Serang yaitu:

1. Sungai Ciujung
2. Sungai Cidurian
3. Sungai Ciberang
4. Sungai Citanam
5. Sungai Cibanten
6. Sungai Cipasauran
7. Sungai Cipanas dan
8. Sungai Anyar

Yang mendukung kesuburan daerah-daerah pertanian di Kabupaten Serang, dilain pihak terdapat potensi banjir apabila musim hujan yang

berkepanjangan. Selain itu, dibagian barat Kabupaten Serang khususnya Kecamatan Anyar dan Kecamatan Cinangka terdapat pantai yang indah yang berhadapan langsung dengan Gunung Api Krakatau kurang lebih 32 Km dari pantai dan terdapat potensi terjadinya tsunami karena secara historis pernah terjadi letusan Gunung Krakatau disertai tsunami pada tahun 1883.

Sosial Budaya.

Masyarakat Serang dan Banten tidak bisa dilepaskan dari ekspresi kesenian bernafaskan agama islam, yang sangat mendominasi seni budaya Serang dan Banten pada umumnya. Debus merupakan salah satu atraksi kesenian kebanggaan yang tumbuh subur di wilayah Serang. Permainan Debus bernuansa magis, dan kadang dan kadang membuat miris dan ngeri yang melihatnya. Tapi permainan ini sekaligus sebagai bukti betapa manusia mampu bertahan dari ancaman apapun asalkan beriman dan bertakwa.

Potensi Pariwisata

Selain sektor industri, Kabupaten Serang juga memiliki potensi dibidang pariwisata dengan potensi yang cukup besar. Hal ini meningkat terdapat lokasi wisata berupa Pantai Anyer dan Kawasan Haeritage Banten Lama, Rawa Dano, Cagar Alam Pulau Dua, Pemandian Air Panas Batukuwung serta Air Terjun . Jumlah Hotel di Kab. Serang : 86 Hotel, Objek Wisata :74 Lokasi.

4.1.2 Gambaran Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah

(BPBD) Kabupaten Serang..

Visi dan Misi

Visi BPBD Kabupaten Serang 2012-2015: Menjadikan Masyarakat Kabupaten Serang yang Sadar dan Tahan Terhadap Berbagai Bencana. Misi BPBD Kabupaten Serang yaitu:

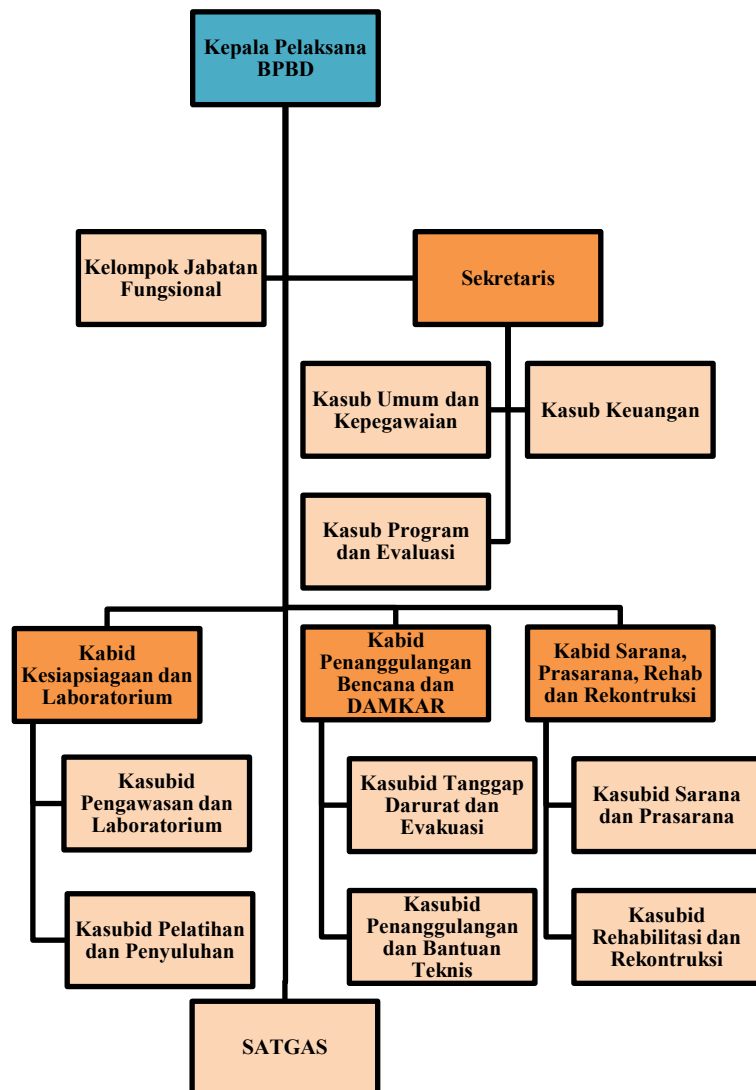
1. Meningkatkan Sumber Daya Aparatur Melalui Pendidikan dan Pelatihan Kebencanaan.
2. Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat Kabupaten Serang Terhadap Bencana Melalui Sosialisasi Pendidikan dan Pelatihan Dengan Mengutamakan Pengurangan Resiko Bencana.
3. Menyelenggarakan Penanggulangan Bencana Secara Profesional dan Terkoordinasi, Cepat dan Tepat.
4. Membangun Sistem Penanggulangan Bencana yang Efektif, Efisien dan Akuntabel.

Susunan Organisasi, Struktur Organisasi dan Tugas Pokok.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serang No.20 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Serang. Berikut ini susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Serang terdiri dari:

1. Kepala Badan.
2. Kepala Pelaksana.
3. Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub Bagian umum dan Kepegawaian.
 - b. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Sub Bagian Program dan Evaluasi.
4. Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Laboratorium, membawahi:
 - a. Sub Bidang Pengawasan dan Laboratorium.
 - b. Sub Bidang Pelatihan dan Penyuluhan.
5. Bidang Penanggulangan dan Pemadam Kebakaran membawahi:
 - a. Sub Bidang Tanggap Darurat Dan Evakuasi.
 - b. Sub Bidang Penanggulangan Dan Bantuan Teknis.
6. Bidang Sarana, Prasarana, Rehabilitasi, dan Rekontruksi.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 4.2
Struktur Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Kabupaten Serang



Tugas Pokok Kepala Badan: membantu bupati dalam hal memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kebijakan Badan dalam melaksanakan Penanggulangan Bencana.

Tugas Pokok Kepala Pelaksana: memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan sebagian tugas di Pemerintah Daerah di bidang Penanggulangan Bencana.

Tugas Pokok Sekretaris: memimpin, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas Kesekretariatan Badan, membawahi Kasubag. Umum dan Kepegawaian, Kasubag Keuangan, Kasubag Program dan Evaluasi.

Tugas Pokok Kepala Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Laboratorium: memimpin, mengatur, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan sebagian tugas Pemerintah Daerah di bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Laboratorium, membawahi Kasubag Pengawasan dan Laboratorium, Kasubag Pelatihan dan Penyuluhan.

Tugas Pokok Kepala Bidang Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran: memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan sebagian tugas Pemerintah Daerah di bidang Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran, membawahi Kasubag Tanggap Darurat dan Evakuasi, Kasubag Penanggulangan dan Bantuan Teknis.

Tugas Pokok Kepala Bidang Sarana, Prasarana, Rehabilitasi dan Rekontruksi: memimpin, mengatur, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan tugas di bidang Sarana, Prasarana, Rehabilitasi dan Rekontruksi, membawahi Kasubag Sarana dan Prasarana, Kasubid Rehabilitasi dan Rekontruksi.

Isue Strategis.

1. Perlunya peningkatan sumber daya aparatur dalam kebencanaan.
2. Perlunya mengidentifikasi daerah-daerah rawan bencana.
3. Pemetaan daerah rawan bencana.
4. Kesiapsiagaan dan pemantauan
5. Sosialisasi pengurangan resiko bencana
6. Kaji cepat dan tetap serta koordinasi terkait dalam penanganan bencana.
7. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi yang ditimpa bencana.
8. Perlunya ketersediaan sarana mobilitas, peralatan dan logistic.
9. Penanganan pasca bencana.

4.2 Deskripsi Data Penelitian.

Deskripsi data penelitian merupakan penjelasan mengenai data yang diperoleh dan didapatkan dari hasil observasi, dokumen-dokumen yang ada serta hasil wawancara di lapangan. Penelitian mengenai Manajemen Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Serang pada (studi kejadian bencana banjir), dengan menggunakan teori William Nick Carter mengenai *disaster management* (manajemen penanggulangan bencana) yang menyebutkan bahwa penanggulangan bencana adalah sebuah proses dinamis yang meliputi fungsi manajemen klasik perencanaan, pengorganisasian, staffing, kepemimpinan, dan pengawasan. Dalam hal ini juga melibatkan banyak organisasi yang harus bekerja sama untuk mencegah, mengurangi, mempersiapkan, menanggapi, dan memulihkan

dari dampak bencana. Manajemen bencana didefinisikan sebagai: Sebuah ilmu terapan yang berusaha berdasarkan pengamatan sistematis dan analisis bencana, untuk meningkatkan tindakan yang berkaitan dengan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan.

Untuk melakukan analisis dalam penelitian ini, dibutuhkan data sebagai objek analisisnya atau sebagai dasar informasi dalam menjawab perumusan masalah yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya. Data-data tersebut diperoleh dari kegiatan pencarian secara investigasi dimana peneliti mengumpulkan data-data dengan melakukan observasi dan mewawancarai sejumlah informan yang memiliki informasi tentang masalah yang sedang diteliti dan kemudian di tulis dalam catatan lapangan dan direkam dengan alat perekam serta foto. Data-data tersebut merupakan data-data yang berkaitan dengan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Serang. Data-data yang telah didapatkan kemudian dianalisa sehingga dapat menghasilkan suatu pemahaman baru dari data yang didapatkan.

Mengingat jenis dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, maka data yang diperoleh bersifat deskriptif berbentuk kata dan kalimat dari hasil wawancara, hasil observasi di lapangan serta data atau hasil studi dokumentasi lainnya. Penelitian kualitatif merupakan penelitian investigasi sehingga data yang didapatkan harus dikonfirmasi ulang tidak hanya dari satu sumber data atau informan tetapi dari sumber lain yang masih memang memiliki informasi yang sesuai dengan

fokus penelitian. Dalam penelitian kualitatif ini, kata-kata dan tindakan yang berasal dari informan yang diwawancarai merupakan sumber utama informasi. Sumber data ini kemudian oleh peneliti dicatat dengan menggunakan catatan tertulis berupa *membercheck* dan catatan lapangan. Sebelumnya peneliti sudah menjelaskan teknik analisis data yang peneliti gunakan pada Bab III yaitu dengan menggunakan teknik analisis data menurut Prasetya Irawan dimana terdapat tujuh tahapan analisis. Analisis data dilakukan oleh peneliti selama penelitian ini berlangsung, dimulai dari pengumpulan data mentah dengan bantuan catatan lapangan, kamera, dan alat perekam, lalu transkrip data merupakan kegiatan mengubah hasil wawancara berupa rekaman menjadi bentuk tertulis seperti adanya tanpa pendapat peneliti. Selanjutnya pembuatan coding yaitu peneliti membaca ulang hasil transkrip data atas data-data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan kajian pustaka dan diolah kembali dalam bentuk tertulis untuk mendapatkan pola analisis dan diberi kode-kode pada aspek-aspek tertentu berdasarkan jawaban-jawaban yang sama dan berkaitan dengan pembahasan permasalahan penelitian. Berikut merupakan kode-kode yang terdapat dalam analisis data penelitian ini yaitu:

1. Kode T menunjukkan daftar urutan pertanyaan
2. Kode J menunjukkan daftar item jawaban
3. Kode I.1, I.2, I.3 dan seterusnya menunjukkan kelompok data
4. Kode I.1-1, I.1-2, I.1-3 dan seterusnya menunjukan nomor urut
5. Kode SI menunjukkan status informan

Setelah pengkodean atas informasi yang diperoleh, kemudian dilakukan kategorisasi data yaitu menyederhanakan data dengan membaca dan menelaah jawaban-jawaban atau informasi yang ditemukan dari penelitian di lapangan yang disederhanakan menjadi konsep berupa kata-kata kunci, setelah itu peneliti mengambil kesimpulan sementara berdasarkan data yang ada tanpa adanya penafsiran peneliti, jika peneliti ingin memberi penafsiran dari pemikiran sendiri maka ditulis pada bagian akhir kesimpulan sementara tersebut, hal ini disebut dengan OC atau *Observer's Comment*. Setelah itu, temuan pada tahap analisis sebelumnya diuji dengan metode triangulasi sumber dengan mengecek data yang telah diperoleh dari lapangan yang berasal dari beberapa sumber.

4.2.1 Daftar Informan Penelitian.

Informan dalam penelitian ini adalah pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian. Adapun informan-informan yang peneliti tentukan merupakan orang-orang yang menurut peneliti memiliki informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, karena mereka senantiasa berurusan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Key informan dibutuhkan untuk memulai melakukan wawancara dan observasi. Dengan demikian *key informan* ini adalah tokoh-tokoh formal dalam pemerintahan daerah yang memahami penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah dan yang menjadi informan kunci (*key informan*) dalam penelitian ini adalah petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang terdiri atas Kepala Bidang

Pencegahan Kesiapsiagaan dan Laboratorium, Kepala Bidang Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Rehabilitasi dan Rekontruksi serta petugas Tim Reaksi Cepat (TRC). Sedangkan tokoh-tokoh informalnya adalah yang mengetahui kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh organisasi/ kelompoknya dan mewakilinya seperti kepala desa/ sekretaris desa yang mewakili masyarakat korban bencana diwilayah terjadinya bencana.

Kemudian untuk *secondary informan* dalam penelitian ini adalah korban bencana dan masyarakat Kabupaten Serang yang di statuskan sebagai calon korban sebuah peristiwa bencana terutama pada masyarakat yang tinggal pada daerah rawan peristiwa bencana banjir dan para relawan bencana yang menjadi mitra BPBD Kabupaten Serang.

Tabel 4.2

Daftar Informan Penelitian

No.	Kode Informan	Nama Informan	Keterangan
1.	I.1.1	Drs. H. Hulaeli Asyikin, MBA	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Serang
2.	I.1.2	Drs. Ashaq, M.Si.	Kepala Bagian Pencegahan Kesiapsiagaan dan Laboratorium BPBD Kab.Serang
3.	I.1.3	Imron Ruhyadi, S.STP. M.Si.	Kepala Bagian Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran BPBD Kab.Serang
4.	I.1.4	H. Rhony, Asidin Wahim SE	Kepala Bagian Sarana Prasarana Rehabilitasi dan Rekontruksi BPBD Kab.Serang
5.	I.1.5	Iwa Rahmat	Petugas Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Kabupaten Serang
6.	I.1.6	Dedi Hasan	PUSDALOPSS BPBD Kabupaten Serang
7.	I.2.1	M. Zamil	Kepala Desa Undar-Andir Kecamatan Keragilan BPBD Kab.Serang
8.	I.2.2	Sukra	Kepala Desa Koper Kecamatan Cikande Kabupaten Serang
9.	I.2.3	Buchori	Kepala Desa Kemuning Kecamatan Tunjung Kabupaten Serang
10.	I.3.1	H. Ahmad Muzni	Tokoh Masyarakat Desa Undar-Andir Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang

11.	I.3.2	Sadeli	Tokoh Masyarakat Desa Undar-Andir Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang
12.	I.3.3	Deden	Tokoh Masyarakat Desa Koper Kecamatan Cikande Kabupaten Serang
14.	I.3.4	M.Arifin	Tokoh Masyarakat Desa Kemuning Kecamatan Tunjung Kabupaten Serang
15.	I.4.1	Ukas Fahmi Fauzi	Relawan Mitra BPBD Kabupaten Serang
16.	I.4.2	Firman Abdi	Relawan Mitra BPBD Kabupaten Serang
17.	I.4.3	Lukman Hakim	Relawan Mitra BPBD Kabupaten Serang
18.	I.4.4	M.Fahri Amin	Relawan Mitra BPBD Kabupaten Serang
19.	I.4.5	Adi Pratama	Relawan Mitra BPBD Kabupaten Serang

Sumber: Peneliti (2014)

4.3 Deskripsi Hasil Penelitian.

Dalam bagian ini, peneliti berusaha untuk menyajikan dan menjabarkan data-data yang peneliti dapatkan ketika melakukan observasi di lapangan, dengan membandingkan teori dengan temuan-temuan yang ada di lapangan, serta analisis peneliti. Penelitian mengenai Manajemen Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Serang dengan menggunakan teori William Nick Carter mengenai manajemen penanggulangan bencana yang menyebutkan bahwa penanggulangan bencana adalah sebuah proses dinamis yang meliputi fungsi manajemen klasik perencanaan, pengorganisasian, staffing, kepemimpinan, dan pengawasan. Dalam hal ini juga melibatkan banyak organisasi yang harus bekerja sama

untuk mencegah, mengurangi, mempersiapkan, menanggapi, dan memulihkan dari dampak bencana. Manajemen bencana didefinisikan sebagai: Sebuah ilmu terapan yang berusaha berdasarkan pengamatan sistematis dan analisis bencana, untuk meningkatkan tindakan yang berkaitan dengan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan dengan siklus manajemen bencana nya yaitu: *prevention* (pencegahan), *mitigation* (pengurangan), *preparedness* (kesiapsiagaan), *disaster impact* (dampak bencana), *respond* (tindakan pertolongan), dan *recovery* (pemulihan), *development* (pengembangan).

4.3.1 Prevention (Pencegahan).

Pencegahan dirancang untuk menghambat terjadinya bencana dan/atau mencegah kejadian bencana yang memiliki efek merugikan pada masyarakat atau instalasi penting. Dengan demikian kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan mengurangi ancaman bencana (banjir). Berikut hal-hal yang biasanya diklasifikasikan sebagai yang bersifat preventif:

- 1) Membangun bendungan atau tanggul untuk mengontrol air banjir sehingga sebuah kejadian bencana tidak bisa merugikan masyarakat, bangunan dan instalasi lainnya, peternakan, sarana produksi dan penghidupan, dan sebagainya. Pembangunan bendungan dan tanggul akan dapat menghambat aliran air yang masuk ke Kabupaten Serang dan menampung debit air yang selama ini tidak

tertampung oleh Bendungan Pamarayan yang sudah ada, kemudian tanggul juga akan dapat memudahkan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang untuk mengontrol jalannya air yang masuk ke Kabupaten Serang sehingga nantinya air akan dapat di arahkan pada wilayah-wilayah lain yang tidak terdampak banjir.

Dalam hal ini BPBD Kabupaten Serang telah menyiapkan proyek pembangunan Waduk Barian yang nantinya akan dapat menampung debit air yang diterima oleh Kabupaten Serang sehingga nantinya akan dapat mengurangi dampak bencana atau bahkan mencegah terjadinya bencana, berikut pernyataannya:

“Proyek kita maupun provinsi, di daerah rangkas, itu akan dibuatkan Waduk Barian cuma ini berhenti kebijakannya, saya tidak tau, mungkin karena ada beberapa permasalahan, ketika waduk itu sudah *fix* dibuat inshaa allah itu untuk menampung debit air, sehingga pengaturannya bisa diatur disamping ada Bendungan Pamarayan” (wawancara dengan I.1-2)

Selama ini air yang masuk ke Kabupaten Serang berasal dari Kabupaten Serang sendiri dan wilayah di sekitarnya seperti Kabupaten Rangkasbitung, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Bogor dan tertampung di Bendungan Pamarayan, dilain hal Bendungan Pamarayan juga mengalami pendangkalan sehingga kapasitas tampungan airnya juga berkurang.

“Ya selama ini kan kita terpusat di Pamarayan (bendungan), jadi ketika di Pamarayan debit airnya sudah tidak tertampung dan alirannya tidak normal, kalau gak salah per sekian ribu itu kan mau gak mau harus dibuka, kalau gak dibuka ya jebol bendungannya, dan ketika dibuka itu debit air tinggi dan daerah aliran sungainya tidak normal, ditambah banyak rumah masyarakat yang rumahnya di daerah sepadan sungai, ya banjirlah jadinya, termasuk

normalisasi pintu-pintu airnya” (wawancara dengan I.1-2)

Seperti yang telah dialami oleh warga di Desa Undar Andir Kecamatan Kragilan, dikarenakan tanggul penahan air disana jebol (rusak) berakibat pada banyaknya air yang mengenangi desa mereka, dinyatakan bahwa:

“Pugu kan gini waktu 2012 kan ada bangunan tanggul yang jebol trus kan dengernya dibetulan pas udah tenang mah tapi denger doang kenyataan nya mah enggak” (wawancara dengan I.3-1) dan dijelaskan kembali oleh ketua RW04 Desa Undar-Andir “Jadi gini waktu banjir itu kesini, tanggul gegurungannya (pintu air) jebol jadi hanyut kesini” (wawancara dengan I.3-2) dan dibenarkan oleh Sekdes Desa Undar Andir. “Disini nih itu disitu, memang sebetulnya tanggulnya sudah lama cuma sekarang diperbaiki” (wawancara dengan I.2-1) diwaktu yang berbeda Sekdes juga menyatakan bahwa “memang sebelum ada tanggul 2001 itu parah banget, sekarang mah setelah ada tanggul tahun 2012 sampai yang terakhir tahun 2014 gak sampai masuk rumah” (wawancara dengan I.2-1)

Dilain tempat hal ini juga terjadi di Desa Koper Kecamatan Cikande, hanya saja tanggul di desa ini sudah mengalami longsor dan sedang dibuatkan tanggul yang baru namun tidak sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat desa tersebut, dinyatakan bahwa:

“Kalau tanggul ini buat mengatasi longsor, kalau banjir harusnya dia lebih tinggi dari pada tanah, itu berarti ngatasin longsor, ini udah berapa rumah yang habis” (wawancara dengan I.2-1) dan dijelaskan kembali diwaktu yang berbeda “Ya udah 2x ini sekarang tambahan dibangun ini, kalau sana mah (menunjuk sungai yang ada diwilayah Kabupaten Tangerang) udah cukup sekali, tapi bukan banjir, longsor kalau gak ada itu, habis kampung ini” (wawancara dengan I.2-1) kemudian tokoh masyarakat Desa Koper menjelaskan secara rinci terkait longsornya tanggul yang terjadi dibelakang rumahnya “kemaren tanggul yang kemaren mah sampai longsor, 2 kali ini mah tanggul udah dibikin. buktinya kemaren yang dulu tuh tahap pertama masa dari bambu (penahan tanggul) cara kerja begitu tuh, gak tau tuh malah bagus yang sekarang, yang kemaren yang dulu

mah dana 3,6 M (Miliar) lebih itu yang sekarang mah cuma 1,6 M (Miliar) tuh tuh ada dipapannya, malahan mah bagus yang sekarang sama bapak malah pernah di omelin pada kabur yang kerjanya juga” (wawancara dengan I.3-3) diwaktu yang berbeda beliau juga menyatakan pengharapannya “Pengen saya mah ini nih untuk tanggul dekat bangunan desa, kurang memuaskan seharusnya (seperti) bangunan (tanggul) di daerah Tangerang sana rapat itu batunya disini mah enggak kata mekanisnya juga” (wawancara dengan I.3-3)

Lain halnya dengan desa-desa tersebut di Desa Kemuning Kecamatan Tunjungtheja belum dibuatkan tanggul, namun warga lebih mengharapkan dilakukan normalisasi dan pelebaran sungai pada Sungai Cisangu yang telah mengalami pendangkalan.

“Udah dengar, udah dengar, tinggal di dorong aja, yang lebih didengar mah bukan dari kepala desa ya, dari mahasiswa lah yang ngedorong” (wawancara dengan I.2-3) diwaktu yang berbeda beliau juga menjelaskan “Udah banjir, setiap tahun ya, tapi kadang-kadang ada yang banjir mah akibatnya bukan karena hujan aja, karena akibatnya pendangkalan, padahal mah kalau kali nya lebar, sekalinnya pun ada mungkin juga banjirnya tidak akan lama” (wawancara dengan I.2-3)

Selain ke BPBD Kabupaten Serang Kepala Desa Kemuning juga sudah mengupayakan mengusulkan ke anggota dewan ketika menjalani reses, berikut pernyataannya:

“Saya udah beberapa kali, bahkan pernah ada sosialisasi BPBD waktu di hotel Bidakara itu saya ajukan, dan saya komentarkan, saya udah beberapa kali bahkan setiap dewan reses, saya di... di... kecamatan saya ajukan, tolong lah tolong lah itu dulu direalisasikan masalah pendangkalan kali cuma waktu itu di BPBD itu kapan ini mau direalisasi, apa jawabanya, sabar aja dulu pak, karena mungkin keterbatasan masalah anggaran, ya maklum lah wilayah Kabupaten Serang atau pun Provinsi Banten mungkin kalau masalah anggaran wajar” (wawancara dengan I.2-3)

Sehingga dapat disimpulkan bahwa BPBD Kabupaten Serang telah melakukan dan sedang melakukan pembuatan tanggul yang

nantinya dapat membantu dalam mengurangi atau bahkan mencegah bencana banjir di Kabupaten Serang. Namun untuk normalisasi dan pembuatan bendungan baru belum dilakukan BPBD Kabupaten Serang, karena nantinya ketika semua itu sudah dilakukan diharapkan akan dapat mencegah bahkan membebaskan Kabupaten Serang dari bencana banjir.

- 2) Mengendalikan banjir di daerah rawan sebelum musim banjir, pada area yang berisiko tinggi. jika tidak memulai pencegahan akan mencapai proporsi bencana yang mengancam. Pengendalian banjir dapat dilakukan dengan pengendalian air yang dilakukan dengan menggunakan pintu air sebagai pengontrol masuknya air ke pemukiman penduduk dan tanggul juga berfungsi untuk menahan aliran air untuk masuk ke pemukiman penduduk dan yang tidak kalah pentingnya adalah waduk sebagai sarana untuk menampung debit air hujan dan debit air kiriman.

“Ketika bicara kontrol air kita koordinasi sama teman-teman PU, teman-teman balai besar, bagaimana normalisasi pintu pengontrol air, bagaimana kondisi komunikasi pada saat fasenya siaga, fasenya awas, itu kana ada fase levelnya kan, bagaimana titik air pada level waspada atau siaga dan tingkatan yang paling tinggi itu awas, kalau sudah awas itu Bendungan Pamarayan sudah harus dibuka, kalau dipertahankan konsekuensinya ya jebol, makanya bendungan harus dibuka” (wawancara dengan I.1-2)

Untuk dapat melakukan pengendalian air maka dibutuhkan pengawasan terhadap situasi dan kondisi pada saat akan terjadi bencana dan saat terjadi bencana yang dilakukan oleh petugas

BPBD dibantu oleh instansi lain yang berkewenangan seperti Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Balai Besar Pengelolaan Air, dinyatakan bahwa:

“Pengawasan seperti bendungan segala macam saya pikir ada di teman-teman PU pengairan, kita koordinasikan yang jelas kalau bicara soal pengawasan bendungan segala macam, semua ada TUPOKSI (tugas pokok dan fungsi) masing-masing, kita selalu koordinasi dengan lembaga maupun dinas instansi yang punya kewenangan” (wawancara dengan I.1-2).

BPBD Kabupaten Sendiri memiliki PUSDALOPS sebagai pusat informasi kebencanaan yang terkoordinasi oleh PUSDALOPS Provinsi Banten, BMKG (sebagai penginformasi kondisi cuaca) dan anggota TAGANA sebagai mitra bekerja BPBD di lapangan (lokasi kejadian bencana banjir)

“Ya itu kan nanti yang sudah saya sampaikan ada renkon (rencana kontijensi), renkon ini di BPBD Kabupaten Serang sendiri ada PUSDALOPS (Pusat Data Informasi dan Laporan) sampai jam 8 malam, renkol itu ada informasi kebencanaan, semua di absen lewat pesawat, kalau rasionalnya ada dari pagi sampai sore, rutin itu, jadi informasi sekecil apapun dari instansi terkait, ter *cover* itu semua, kelihatan, misalkan dari BPBD Provinsi ada laporan ke BPBD Kabupaten, termasuk dari TAGANA lah apa, semua diambil oleh PUSDALOPS Banten nanti di *cover* nih semua sama BPBD Kabupaten” (wawancara dengan I.1-2)

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengawasan untuk pengontrolan air yang dilakukan BPBD Kabupaten Serang sudah berjalan dengan baik karena telah berkoordinasi dengan berbagai pihak yang berkewajiban membantu BPBD dalam penanggulangan bencana.

4.3.2 *Mitigation* (Pengurangan).

Tindakan dalam tahap ini umumnya dilakukan dalam bentuk program-program khusus yang ditujukan untuk mengurangi efek dari bencana pada sebuah negara atau masyarakat. misalnya, beberapa negara menganggap pengembangan dan penerapan peraturan pembangunan dapat mengurangi kerusakan dan kerugian. Negara lainnya mungkin menganggap peraturan pembangunan seperti itu berada di dalam kategori pencegahan.

Istilah mitigasi pada umumnya lebih berarti bahwa ketika mungkin untuk mencegah beberapa efek bencana, efek lainnya akan tetap ada namun dapat diubah atau dikurangi dengan melakukan tindakan tepat. Poin di atas menunjukkan bahwa, dalam kondisi tertentu, istilah pencegahan/mitigasi mungkin lebih cocok bagi sebagian negara dibanding menggunakan pencegahan dan mitigasi sebagai dua konsep dan kegiatan yang terpisah. Undang-undang juga dapat dianggap sebagai bentuk pengurangan (misalnya peraturan penggunaan lahan yang memastikan bahwa masyarakat tidak diizinkan untuk tinggal di tempat-tempat yang rentan terhadap bencana dari kawasan rawan banjir)

Dengan demikian mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana (banjir), baik bangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

1) Pelaksanaan peraturan pembangunan.

Dalam penanggulangan bencana banjir diperlukan peraturan-peraturan yang mengatur tentang penggunaan lahan agar pembangunan sejalan dengan penanggulangan bencana yang terjadi di Kabupaten Serang sehingga akan dapat mengurangi dampak bencana nantinya, jangan sampai peraturan tata ruang yang ada justru akan mengakibatkan bencana banjir. Seperti yang dituturkan oleh Kabid Bidang Penanggulangan Bencana BPBD Kabupaten Serang yang menyatakan bahwa:

“untuk terhindar dari banjir yang ada, pemetaan letak bangunannya, sebab letak bangunan jangan sampai ada di bantaran sungai maupun lokasi yang kondisional untuk jadi daerah aliran sungai, itu saja sebetulnya” (wawancara dengan I.2-1)

Dengan demikian sudah seharusnya tidak ada pemukiman penduduk disekitar bantaran sungai karena itu akan menyebabkan terhambatnya aliran sungai, karena sejatinya bantaran sungai juga berfungsi sebagai sumber resapan air, sehingga perlu ada pemindahan bagi pemukiman yang berada pada daerah bantaran sungai dan sepadan sungai. Seperti yang terjadi pada Sungai Ciujung disebutkan bahwa:

“Ini untuk mengamankan daerah Sungai Ciujung yang selama ini menjadi penyebab banjir karena luas (dampaknya), tanggul ini kan fungsinya menahan, konsekuensinya pemerintah harus membebaskan sepadan sungai, kalau sepadan sungai ini kan yang akan dibuatkan tanggul, plus membebaskan beberapa meter lingkungan pemukiman penduduk karena akses pembangunan tanggul tadi, tujuannya supaya debit sungai itu alirannya lancar dan memang tidak masuk kewilayah pemukiman” (wawancara dengan I.2-1)

Sedangkan yang terjadi pada Desa Koper Kecamatan Cikande terdapat bangunan pabrik yang menghalangi aliran air dan menutupi daerah resapan air disana, karena sebelumnya ditempat pabrik itu berdiri merupakan tempat penampungan air. Demikian pernyataan Kepala Desa Koper Kecamatan Cikande.

“apalagi sekarang bangunan (pabrik yang baru dibangun) kena (dampak yang lebih besar) bukan cuma koper aja, trus tempat-tempat seperti Parigi yang sekarang lagi dibangun, nah itu tempat air, otomatis kedepan kalau lagi banjir kena semua, karena tampungan air sudah pada dibangun” (wawancara dengan I.2-2) Ketika ditanya apakah hal ini sempat di sosialisasikan ke warga beliau berkata: “Belum, belum, tapi bakal lebih tuh, ya itu tempat-tempat tampungan air itu udah dibangun pabrik, itu kan tadinya tempat air” (wawancara dengan I.2-2) diwaktu yang berbeda beliau juga menyatakan “Belum pernah, tapi udah dibicarakan itu di Kecamatan, sekarang mungkin kalau udah banjir mungkin banyak yang kena, karena sawah itu udah kaya lautan” (wawancara dengan I.2-2)

Kemudian ketika ditanya apa yang diharapkan warga, tampaknya warga pesimisis kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Serang untuk menangani hal ini, berikut pernyataanya:

“Susah ya, apalagi sekarang mah tampungan airnya dibangun, harapan saya ya itu gak mungkin lah, harapan saya jangan dibangun lah pabrik disitu gak mungkin kan” (wawancara dengan I.2-2) Hal yang sama ditanyakan juga dengan tokoh masyarakat Desa Koper Kecamatan Cikande yang juga merupakan taruna senior di desa tersebut, berikut pernyataanya: “Jalur air itu disana noh dihadang pabrik-pabrik, biasanya banjir 1 meter nanti mah bisa 1 meter lebih lagi, mungkin iya ini seharusnya bangunannya, pabrik gak ada nutupin jalur air yakin bapak mah bakal karam (banjir makin parah dari sebelumnya)” (wawancara dengan I.3.3)

Penegakan peraturan tata ruang memang sulit dilakukan tanpa koordinasi yang baik antar lembaga yang berkewenangan, dalam hal

ini BPBD Kabupaten Serang memiliki tugas pengkoordinasian antar instansi, kedinasan, SKPD bahkan lembaga lain untuk melakukan kewajibannya dalam penanggulangan bencana di daerah, dan ketika itu tidak sejalan dengan apa yang diharapkan BPBD maka hasil baik dari sebuah upaya penanggulangan bencana akan sulit dicapai.

2) Regulasi penggunaan lahan.

Ketika peraturan tata ruang sudah sejalan dengan penanggulangan bencana yang dilakukan BPBD Kabupaten Serang, selanjutnya untuk mempertegas dan acuan tindakan bagi BPBD Kabupaten Serang kepada hal-hal yang berdampak pada resiko bencana, maka diperlukan aturan penggunaan lahan agar nantinya tidak ada bangunan pemukiman maupun pabrik yang berpotensi terjadinya bencana dapat ditindak melalui peraturan tersebut.

Hal tersebut tercermin pada banyaknya pemukiman warga yang berada pada bantaran sungai dan banyak beraktivitas di sungai yang juga berakibat cepatnya proses pendangkalan yang terjadi di sungai tersebut. Demikian pernyataannya Kabid Penanggulangan Bencana dan DAMKAR BPBD Kabupaten Serang:

“banyak aktivitas masyarakat di sungai sebetulnya, kamu bisa lihat kanan kiri itu kan bangunan semua, itu sebetulnya tanah sepadan dan itu tidak diperbolehkan, di Sungai Ciujung ya! yang saya maksud kegiatan di tahun 2015 termasuk *mapping* nya area itu, kita akan bersihkan *plus* nanti untuk pembebasan 12 meter kanan kiri nya (Sungai Ciujung), nanti kewenangannya ada di balai besar” (wawancara dengan I.1-2) Kemudian ketika ditanya apakah hal tersebut sudah disosialisasikan kepada warga, beliau mengatakan bahwa: “Oh sudah! itu kondisinya kalau daerah Ciujung (sungai) yang jadi primadona kita kewenangannya ada pada balai besar”

(wawancara dengan 1.1-2) diwaktu yang berbeda beliau juga menjelaskan “Ketika bicara upaya apa, sosialisasi sudah jelas, tidak diperbolehkan mendirikan bangunan dibantaran sungai, yang kedua masyarakat harus memiliki rasa memiliki terhadap pintu-pintu aliran air, karena selama ini kita dapatkan, termasuk laporan dari teman-teman pengelola, ada pintu air yang putarannya itu ada yang nyuri, itu kan tembaga, ada yang di maling! mereka tidak sadar ketika itu dilakukan, musim hujan, imbasnya kemana-mana gitu, jadi *sence of belonging* masyarakat juga penting, jadi upaya itu sebenarnya, sosialisasi sudah, menginformasikan sudah” (wawancara dengan 1.2-2) Kemudian di benarkan oleh Kabid Kesiapsiagaan dan Laboratorium “Ya dikasih, disosialisasikan juga” (wawancara dengan I.1-1)

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peraturan penggunaan lahan memang sudah ada dan sudah disosialisasikan kepada masyarakat yang ada pada bantaran sungai, namun untuk penindakan belum pada ketegasan untuk melarang atau bahkan memindahkannya.

3) Peraturan keamanan yang mengatur sistem transportasi.

BPBD Kabupaten Serang dalam hal ini belum memiliki peraturan terkait pengamanan sistem transportasi darat yang terdampak oleh kejadian bencana banjir, namun yang sudah dilakukan BPBD adalah berkoordinasi kepada pihak kepolisian untuk mengatur lalu lintas darat yang terdampak banjir, karena seringkali ketika terjadi bencana banjir lalu lintas terganggu yang berakibat terjadi kemacetan yang berdampak luas (OC).

4) Program-program pertanian yang ditujukan untuk mengurangi efek

kerusakan pada hasil panen. Bantuan pada sektor pertanian dilakukan dalam bentuk pemberian bibit dan pupuk pasca bencana

banjir. Demikian pernyataan Kepala Desa Undar Andir Kecamatan Kragilan:

“Memang banyak dampaknya kaya lahan pertanian itu sampai habis, ya pada ikhlas lah mau bagaimana lagi” (wawancara dengan I.2-1) diwaktu yang berbeda beliau juga menjelaskan “Kemarin itu ada bantuan bibit pasca banjir, biasanya dari kelompok tani dari PNPM juga pernah” (wawancara dengan I.2-1) kemudian dijelaskan kembali “Pernah lah sekali dapat pupuk sama itu (bibit) memang sebelum banjir juga dapat bantuan pupuk berapa tuh, malah langsung pak menteri yang kesini” (wawancara dengan I.2-1) dan dibenarkan oleh Kepala Desa Tunjungtheja “yang paling besar kalau padi yang mau di panen lagi gede kerugian tuh disini ya dari pihak pertanian, udah aja ya gak ada bantuan lagi, paling yang lagi ada juga kemarin sekedar bantuan bibit, masyarakat, kalau udah ada teguran dari masyarakat yang dateng cuma bibit, jaro deui bae, kudunya karunya ka jaro” (wawancara dengan I.2-3)

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, bantuan pasca banjir terhadap sektor pertanian sudah dilakukan, namun baru pada pemberian bibit dan pupuk saja itu pun dilakukan oleh kelompok taninya masing-masing, karena hal tersebut akan dimungkinkan diberikan kepada petani lainnya yang tidak terdampak banjir.

- 5) Sistem untuk melindungi instalasi penting seperti power suplai dan alat komunikasi yang penting

Dalam hal ini BPBD belum melakukan perlindungan khusus instalasi-instalasi penting seperti listrik dan jaringan komunikasi telephone, hal tersebut dilakukan oleh instansi yang berkewenangan dengan kesadaran untuk melindungi asset nya sendiri. BPBD disini bertugas menginformasikan untuk dilakukan pemutusan suplai listrik agar tidak terjadi hal-hal yang membahayakan masyarakat di lokasi kejadian bencana banjir.

6) Pengembangan pada infrastruktur, seperti melakukan perutean jalan raya baru yang jauh dari kawasan rawan bencana.

Terkait dengan penggunaan jalan alternatif yang dilakukan pada saat terjadi bencana banjir sudah ada jalan Provinsi yang menghubungkan Kabupaten Serang dengan Kabupaten Tangerang menuju Jakarta yang berada pada Utara Kabupaten Serang, digunakan ketika jalan toll Jakarta – Merak tidak bisa dilewati karena banjir (OC).

4.3.3 Preparedness (Kesiagaan/ Persiapan).

Kesiagaan ini dianggap sebagai langkah-langkah yang memungkinkan pemerintahan, organisasi, komunitas, maupun individu untuk merespon dengan cepat serta efektif terhadap situasi yang terkena bencana. Dengan demikian kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.

1) Merumuskan dan mempertahankan perencanaan tanggap bencana yang valid dan diperbarui yang dapat diaplikasikan saat dibutuhkan.

BPBD Kabupaten Serang memiliki Bidang Kesiapsiagaan dan Laboratorium yang bertugas untuk melaksanakan kesiapsiagaan pra bencana, untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan kebencanaan, meningkatkan pengetahuan masyarakat Kabupaten Serang terhadap bencana

melalui sosialisasi pendidikan dan pelatihan dengan mengutamakan pengurangan terhadap resiko bencana. Berikut ini pernyataan terkait hal tersebut:

“Ini namanya bidang kesiapsiagaan dan laboratorium dibantu oleh kepala sub bidang pengawasan dan laboratorium, kebetulan bidang laboratorium baru dibangun tuh, ini khusus industri-industri dan tempat pelayanan masyarakat yang berpotensi terjadi bencana-bencana” (wawancara dengan I.1-1) diwaktu yang berbeda beliau juga menjelaskan “kemudian kasubid penyuluhan dan pelatihan, itu setiap tahun kita adakan sosialisasi tentang bencana-bencana diantaranya bencana banjir, gempa bumi, bencana non alam, bencana alam kita sosialisasikan kepada masyarakat” (wawancara dengan I.1-1) kemudian dijelaskan kembali “Desa siaga bencana kita rencanakan tahun depan, disini udah ada desa siaga bencana tapi yang bentuk provinsi” (wawancara dengan I.1-1)

Pada masa kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Serang dibantu oleh BPBD Provinsi membentuk Desa Siaga Bencana yang berfungsi sebagai garis depan pendeteksian bencana dan penanganan awal sederhana kondisi bencana, berikut pernyataannya:

“Walaupun udah ada (Desa Siaga Bencana), orang petugas sini tuh kalau ada bencana udah siap” (wawancara dengan I.2-1) diwaktu yang berbeda beliau juga menjelaskan “(kepala urusan desa siaga bencana) langsung kepala desa kalau yang di RT sama RW nya langsung” (wawancara dengan I.2-1)

Namun demikian pembentukan Desa Siaga Bencana belum dilakukan sendiri oleh BPBD Kabupaten Serang sehingga tidak semua desa yang berada pada daerah rawan bencana (banjir) di Kabupaten Serang memiliki Desa Siaga Bencana, untuk itu warga menanganinya secara mandiri dan lebih mengharapkan adanya ketersediaan perahu karet di desanya sebagai sarana dalam melakukan evakuasi ketika banjir secara tiba-tiba terjadi.

“Ya memang setiap rapat juga minta bantuan perahu sama tenda cuma belum ada yang dikasih” (wawancara dengan I.2-1) diwaktu yang berdeba beliau menjelaskan “Masyarakat disini mah pakai apa aja sih karena kan gini, perahu itu kan kalau banjirnya tinggi paling yang ketinggalan aja, gak mau di evakuasi” (wawancara dengan I.2-1) Kemudian dibenarkan oleh Kepala Desa Tunjungtheja “Belum ada saya (desa siaga bencana). (wawancara dengan I.2-3) yang kemudian dijelaskan kembali “dibanyakin lah petugasnya, kalau lagi pengajuan juga kaya perahu karet, gak usah banyak-banyak kalau gak 2, 1 aja juga cukup, Kemuning 1, Cigombong 1, Ujungpandang 1 udah itu aja dan itu yang paling diharapkan oleh masyarakat masalah pendangkalan itu dikeruk aja tuh Cisangu, udah itu aja” (wawancara dengan I.2-3) diwaktu yang berbeda beliau juga menjelaskan “cuma dari BPBD yang paling ini (kurang) mah dari perahu karet segala macem dan lagi saya sering ajukan itu kalau perahu karet itu untuk Desa Kemuning, Catang dan Ujungpandang itu yang udah musiman itu kami minta malah mah, minta tolong lah kalau bisa perahu karet itu tolong di standbykan disini, jadi gak usah... tolong lah kesini, trus dari pihak tentara dari pihak polisi pada sibuk kan, karena itu muter! Kadang-kadang kesini semua, karena yang menjadi besarnya air itu air kiriman” (wawancara dengan I.2-3)

Dalam hal ini aparat desa tersebut sebagai penanggungjawab memiliki kesiapan dalam menghadapi bencana banjir, walaupun tidak tersedia perahu karet karena hal tersebut sudah biasa dilakukan oleh warga setiap banjir datang.

“anu ngaran na mah bencana dari gusti Allah siap aja kalau lagi dicoba mah” (wawancara dengan I.2-3) kemudian diwaktu yang berbeda dijelaskan kembali “(desa siaga bencana) Siap, tapi belum ada pembicaraan ke BPBD nya, kalau cuma ngomong-ngomong doang mah udah” (wawancara dengan I.2-3) sedangkan Kepala Desa lainya menjelaskan “Sigap bahkan pasca banjir juga masih sigap (aparat desa)” (wawancara dengan I.2-1)

Dengan demikian dalam perumusan kebijakan terkait bencana sudah dilakukan karena produk hasil perumusan tersebut sudah ada dan sudah berjalan, dalam bentuk pedoman penanggulangan bencana dan tanggap darurat, mencangkup semua kejadian bencana

yang berpotensi terjadi pada Kabupaten Serang, namun untuk pembentukan Desa Siaga Bencana belum dilakukan.

- 2) ketentuan khusus untuk tindakan darurat, seperti mengevakuasi penduduk atau memindahkan mereka untuk sementara ke tempat berlindung yang aman.

penanganannya klasifikasinya ya dilihat dulu kalau memang masuk klasifikasi tanggap darurat, bentuk komando segala macam, untuk penanganan SOPnya, kaitan dengan SOP penanganan banjir itu ada di pak adhaq (kabid kesiapsiagaan dan laboratorium) yang punya kewenangan, kalau yang kita tau sedang disusun” (wawancara dengan I.1-2) diwaktu yang berbeda beliau juga menjelaskan “Oiya renkol itu bentuk pedoman rencana kontijensi, untuk mitigasi penanganan banjir, apa yang menjadi SIADIBIBA, siapa yang bertindak, apa yang harus dilakukan, dimana kejadiannya, bagaimana kondisi yang ideal untuk dilakukan, kalau penanganan banjir dan korbannya SOP di kami sudah jelas, ada Kasubid Evakuasi dan Tanggap Darurat, ketika terjadi banjir ada korban terkapar yang jelas SOP nya kita evakuasi dan kita ungsikan, dimana diungsikannya? ditempat evakuasi, dimana itu? ditempat yang oleh bidang pak adhaq sudah ditunjuk titik-titiknya apa yang mau dipersiapkan, tenda pengungsinya, dapur umumnya, pakaian layak pakainya, kan gitu kan, terus obat-obatan medisnya, itu sudah baku tinggal pak adhaq yang mengeluarkan produk, kita yang melakukan” (wawancara dengan I.1-2) kemudian dijelaskan kembali “pembentukan posko, penggunaan dana siap pakai, penggunaan dana renkol bantuan, termasuk kebijakan-kebijakan lain yang jelas kebencanaan itu harus cepat, tanggap dan menganut prinsip kemanusiaan gitu” (wawancara dengan I.1-2)

Dengan demikian ketentuan khusus untuk tindakan darurat dan evakuasi sudah ada dalam bentuk pedoman penanggulangan bencana dan tanggap darurat dan itu sudah berjalan.

- 3) Menyediakan sistem peringatan.

Peringatan dini merupakan serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang

kemungkinan terjadinya bencana pada lokasi bencana dan dilakukan oleh BPBD Kabupaten Serang

Dalam hal ini BPBD Kabupaten Serang melakukan pendeteksian kejadian bencana dengan cara melakukan piket kesiapsiagaan bencana banjir yang dilakukan 24 jam 7x seminggu, dengan demikian nantinya jika ada informasi kebencanaan dari masyarakat atau pun dari pihak lain, BPBD akan dapat mengambil tindakan kedaruratan.

“Ya kita harus antara lain piket selama 24jam, ya di... apa kesiapsiagaan bencana alam termasuk banjir dan tanah longsor termasuk juga kebakaran, jadi bencana apa pun yang ada informasi laporan dari masyarakat” (wawancara dengan I.1-1) dan lainnya menjelaskan juga demikian “makanya sekarang kan BPBD ada piket kesiapsiagaan, ada piket DAMKAR, itu setiap hari setiap malam sampai desember bahkan february 24jam akses informasi kita selalu terima dan sekecil apa pun informasi masuk (wawancara dengan I.1-2)

Nantinya tindakan yang dilakukan ketika sudah mendapatkan laporan kebencanaan BPBD Kabupaten Serang Mengirim Tim Reaksi Cepat (TRC) yang bertugas untuk mengumpulkan informasi terhadap bencana yang sudah dilaporkan dengan mendatangi lokasi kejadian bencana, berikut pernyataannya:

“misalkan ada informasi dari masyarakat yang terjun melihat kesana dulu anggota TRC, ada namanya tim reaksi cepat bencana alam” (wawancara dengan I.1-1) diwaktu yang berbeda beliau juga menjelaskan “Iya TRC dulu melihat, apakah benar, sambil disitu mendata berapa masyarakat yang harus di evakuasi, di daerah ,mana, sejak berapa, pukul berapa terjadinya, berapa orang, nah harus ada laporan” (wawancara dengan I.1-1)

Senada dengan pernyataan tersebut, Kabid Penanggulangan

Bencana dan DAMKAR juga menyatakan hal yang sama terkait

TRC (Tim Reaksi Cepat) Kebencanaan, berikut pernyataannya:

“sebelum ada BPBD kita kan ada bantuan tim TRC, kalau benar terjadi bencana kita baru berangkat” (wawancara dengan I.1-2) diwaktu yang berbeda beliau juga menjelaskan lebih rinci “cuma kadang-kadang kan masyarakat latah, latahnya apa, kaya model kemarin pak lapor ada yang kena bencana, ada masyarakat kesetrum gara-gara benerin antena, kita bukanya tidak mau terima cuma temen-temen kadang tidak bisa membedakan mana yang kategori bencana mana yang bukan, kalau ada orang benerin antena, kesetrum trus meninggal bukan bencana itu mah, kelalaian namanya, kalau bencana kana da indikatornya 14 titik tadi cuma kadang-kadang bencana atau bukan lapor aja, orang kesetrum lapor, mobil terperosok lapor, lapor ke kita, bukan bencana itu, yang masuk klasifikasi bencana itu kana da 14 tadi indikator” (wawancara dengan I.1-2)

Kemudian ketika ditanya mengenai piket rutin ke lokasi rawan banjir yang berguna sebagai pemantauan situasi dan kondisi pra bencana, beliau menyatakan:

“Pengawasan rutin, pengawasan rutin ya ada, seperti DAMKAR itu pengawasan setiap saat bergantian selama 24 jam mah ada, jadi kalau piket kesiapsiagaan bencana alam cuma masa-masa penghujan, jadi mulai dari oktober sampai maret setelah itu gak lagi, tetapi kalau piket DAMKAR tetap” (wawancara dengan I.1-1)

Namun demikian piket hanya dilakukan pada BPBD Kabupaten Serang menunggu laporan dari masyarakat, belum pada pemantauan ke lokasi-lokasi rawan terjadi bencana banjir.

Gak ada (piket ke lokasi rawan banjir) tergantung informasi laporan masyarakat, kecuali ada penyuluhan bisa, (wawancara dengan I.1-1)

Selain BPBD Kabupaten Serang, para aparat desa bersama masyarakat juga memiliki *warning system* pemantauan kondisi air pada saat hujan dan musim penghujan yang didasarkan atas

kesadaran dan keinginan masyarakat sendiri agar terhindar dari bencana banjir yang sewaktu-waktu dapat terjadi, berikut pernyataan Kepala Desa Undar Andir Kecamatan Kragilan:

“Banjir kan datang nya gak tentu jadi kita pantau dari atas jalan toll kalau air diperkirakan udah masuk ke wilayah kampung baru kita evakuasi” (wawancara dengan I.2-1) diwaktu yang berbeda beliau juga menjelaskan “Kan ada yang rumahnya di tingkat, diatas tingkat gitu tapi kalau yang udah terendam 2 meter mah ya harus di angkut, petugas bareng pemuda sini terutama buat orang yang udah tua, orang sakit” (wawancara dengan I.2-1)

Senada dengan hal tersebut Sekertaris Desa Koper Kecamatan Cikande juga menyatakan:

“Petugas selagi ada banjir juga udah kontek” (wawancara dengan I.2-2) kemudian dijelaskan kembali “Ya dipantau, kita aja ngebell dulu kan, waspada, waspada banjir, saya bilang liat aja tuh di Parigi, kalau Parigi udah lewat dijalan udah ketutup baru Koper kena, kalau di Parigi udah dijalan baru Koper kena, kalau Parigi belum dijalan Koper belum ya terutama yang di Parigi itu, paling rawan” (wawancara dengan I.2-2) diwaktu yang berbeda beliau juga menjelaskan “Ya saya ngeri tuh (terhadap dampak bangunan pabrik yang ada pada daerah resapan air), persiapan mah terus, setiap suasana banjir juga udah persiapan” (wawancara dengan I.2-2) selanjutnya beliau juga mengatakan “Ya masyarakat lah (melakukan persiapan sendiri) kita terutama itu RT dikumpulin, tolong waspada kontrol air, kerahkan semua RT” (wawancara dengan I.2-2)

Sedangkan Kepala Desa Kemuning Kecamatan Tunjungtheja menyatakan dan bercerita mengenai korban banjir yang ada di desanya, berikut pernyataannya:

“Iya itu repotnya, kalau belum jaronya ieu... cuma kalau dari kecil lah dan pernah waktu banjir surut pernah ada korban jiwa, ada orang cuma orang gila” (wawancara dengan I.2-3) diwaktu yang berbeda beliau juga menjelaskan “Tahun kemaren (2013) anak siapa, yoh kumpulin, siapa yoh dihitung masing-masingarganya, ya takutnya warga kita, ya trus ya minta lagi lah dari pihak TAGANA saya minta, pas ketemu ternyata orang gila, biasa itu mah ada yang lewat minta makan lah, jadi kelaparan, nyari makan dia

memaksakan diri turun ke air gak bisa renang trus kami kirim langsung ke RSUD” (wawancara dengan I.2-3) kemudian dijelaskan kembali “Iya Polsek (yang mengurus korban)” (wawancara dengan I.2-3)

Ketika ditanya perihal waktu kedatangan petugas dalam hal ini petugas TRC BPBD Kabupaten Serang, beliau menyatakan kekaguman dan keluhannya terkait *warning system* yang dilakukan warga agar lebih cepat bertindak dengan ketersediaan perahu karet yang seharusnya ada di desa rawan banjir, berikut pernyataannya:

“Paling cepet alhamdulillah BPBD siap, ketika di kontek siap, kadang-kadang jugaantisipasi sebelum banjir gede udah saya kontek, paling perahu, pokonya kalau ada perahu 2 ini, mungkin ditarik kesini ke wilayah saya, ditarik lagi kewilayah Ujungpandang” (wawancara dengan I.2-3) Sedangkan warga Desa Koper Kecamatan Cikande bertutur kalau informasi kewaspadaan bencana tidak sampai kepadanya berikut pernyataannya: “Pengumuman gak ada tau-tau air naik baru dah dateng bantuan” (wawancara dengan I.3-3)

4) Komunikasi gawat darurat.

Sebagai dampak terjadinya bencana banjir, seringkali komunikasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bertugas pada lokasi kejadian bencana banjir mengalami kesulitan, sehingga dalam tugasnya petugas penanggulangan bencana BPBD selalu melengkapi dirinya dengan alat-alat komunikasi darurat seperti handy talky, HP satelit, HP GSM dan HP CDMA, kemudian untuk melakukan komunikasi antar posko bencana ketika terjadi status tanggap darurat bencana banjir posko dilengkapi dengan alat komunikasi radio (radio HF/SSB, base station VHF/UHF FM dan radio handy talky)

5) Pendidikan dan kesadaran publik dan program pelatihan.

Sosialisasi bencana akan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan resiko bencana dan dampaknya sehingga dapat meningkatkan kewaspadaan masyarakat itu sendiri dan akan berdampak juga pada kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana ditambah dengan pelatihan kebencanaan yang nantinya akan dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi suatu kejadian bencana.

Seperti yang telah dilakukan BPBD kepada aparat-aparat desa, organisasi-organisasi kemasyarakatan dan siswa sekolah (PRAMUKA dan PMR) dilakukan sosialisasi mengenai kebencanaan dan resikonya, sosialisasi mengenai dampak bencana dan tata cara penanggulangan sederhana bagi warga, dan pelatihan-pelatihan SAR sederhana seperti cara menandu dan menangani korban bencana, pelatihan evakuasi seperti tata cara penggunaan perahu, pelatihan pemadaman api dengan cara sederhana yaitu dengan menggunakan karung basah dan sebagainya.

Dengan demikian nantinya BPBD Kabupaten Serang dapat berharap peserta pelatihan nantinya akan dapat melakukan penanganan awal kebencanaan untuk dirinya sendiri dan lingkungannya agar dapat mengurangi dampak dari sebuah kejadian bencana. Seperti yang dinyatakan oleh Kabid Kesiapsiagaan dan Laboratorium, menyatakan bahwa:

“pada tahun 2012 kita adakan sosialisasi khusus kades-kades kemudian yang selanjutnya kita adakan untuk sekdes-sekdes,

kemudian kita adakan simulasi tata cara, apa tata cara pasang tenda, tata cara simulasi, tata cara pemadaman api dengan cara sederhana, jadi mulai dari yang kecil dulu nanti setelah bisa menanggulangi itu kemungkinan tidak besar, nanti kalau sudah besar harus telephone kesini” (wawancara dengan I.1-1) diwaktu yang berbeda beliau juga menjelaskan “kalo dari kecil dulu bisa ditanggulangi dulu oleh masyarakat disitu atau punya kita sendiri gak bakalan jadi besar, tapi kalau besar ya udah terpaksa minta tolong” (wawancara dengan I.1-1) Senada dengan itu Kabid Sarana Prasarana Rehabilitasi dan Rekontruksi menyatakan bahwa: “ya mitigasi bagaimana itu... ya pencegahan, mitigasi bagaimana menghadapi banjir, bagaimana menghadapi tsunami, ya itu artinya mengenalkan bencana dan untuk mengurangi resiko bencana itu sendiri” (wawancara dengan I.1-3)

Sementara itu Sekertaris Desa Undar Andir Kecamatan Kragilan juga menyatakan bahwa:

“Memang yang dapat pelatihan itu aparat desa seperti saya kan Sekdes yang sudah dilantik, pelatihan rawan banjir kan kadang ada di Kabupaten itu setiap tahun selalu ada pelatihan” (wawancara dengan I.2-1) kemudian dijelaskan kembali “Dari BPBD sebelumnya juga ada, saya kan anggota TAGANA” (wawancara dengan I.2-1) diwaktu yang berbeda beliau juga menyatakan “sosialisasi, praktek cara bongkar pasang tenda, cara pakai perahu karena kan kalau lagi banjir pelatihan itu tidak khusus buat banjir kan, kaya kebakaran juga kan sekaligus” (wawancara dengan I.2-1) kemudian dijelaskan kembali “Memang kemarin 1 tahun berapa kali ya kaya tata cara penanggulangan bencana” (wawancara dengan I.2-1) dan dipertegas kembali “Ya sudah siap kalau sewaktu-waktu ada banjir” (wawancara dengan I.2-1)

Senada dengan hal tersebut Kepala Desa Kemuning Kecamatan Tunjungtheja juga menyatakan:

“Kemaren itu ada cuma yang ikut itu biasanya aparat desa aja” (wawancara dengan I.2-3) kemudian beliau juga menyatakan “huuh pelatihan aja” (wawancara dengan I.2-3) kemudian dijelaskan kembali “Ada 2, tergantung dibutuhkannya aja, kalau 3 ya 3, tapi untuk tahun ini cuma dari pihak Karang Taruna nya aja” (wawancara dengan I.2-3)

Sedangkan Sekretaris Desa Koper Kecamatan Cikande meyakini bahwa pelatihan di dapat dari TAGANA bukan dari

BPBD, berikut pernyataannya:

“Kalau pelatihan ada, dari anggota TAGANA, ya Taruna Siaga Bencana, di Provinsi ada di Kabupaten juga ada” (wawancara dengan I.2-2) kemudian dijelaskan kembali “Karang Taruna kemaren ada ikut, dari anggota Karang Taruna juga saya utus, ada 2 (anggota TAGANA provinsi) disini mah belum ada pelatihan dari BPBD” (wawancara dengan I.2-2)

Namun ketika ditanya kenapa warga tidak di ikut-sertakan, berikut pernyataannya Sekertaris Desa Undar Andir Kecamatan Kragilan:

“Ya kadang Sekdes, harus bawa RT, RW, Kepala Desa” (wawancara dengan I.2-1) kemudian dijelaskan kembali “yang mewakili warganya kan RT”(wawancara dengan I.2-1) diwaktu yang berbeda beliau juga menyatakan “Gak sih kan udah ada RT sama RW” (wawancara dengan I.2-1) Senada dengan itu Kepala Desa Kemuning Kecamatan Tunjungtheja juga menyatakan: “Ini sih kalau udah dikasih pelatihan udah aja” (wawancara dengan I.2-3) dan dijelaskan kembali “Warga dikasih pelatihan gak mau, gak ada artinya kalau dari perangkat desa, taruna kan ada tanggungjawabnya” (wawancara dengan I.2-3)

Sementara itu warga Desa Undar Andir Kecamatan Kragilan menuturkan pengalamannya dalam mengikuti pelatihan, berikut pernyataannya:

“Ya banyak melalui..., kan ada ini yah dari tentara tuh ya sekoci tuh apa ya, perahu karet ya, saya juga gak tau ya kan pak Kades nya pelatihan juga tuh ya” (wawancara dengan I.3-1) diwaktu yang berbeda beliau menjelaskan “(tempat diadakan pelatihan) Disini (kantor Desa Undar-Andir) trus waktu itu yang mimpin itu, waktu tahun kemaren ya 2012 sama 2013 ya pas ada banjir dari KORAMIL” (wawancara dengan I.3-1) dan dipertegas kembali “Belum (dari BPBD) dari tentara kemaren mah” (wawancara dengan I.3-1) selanjutnya beliau juga menyatakan “Gak setiap tahun, setelah itu kan gak ada pelatihan lagi malah ada penanaman, sekarang-sekarang enggak” (wawancara dengan I.3-1) dan dipertegas kembali “Ya pokonya mah nolongin orang-orang yang sakit, walaupun orang-orang sini mah sudah biasa ya, tapi kan bagus ya diadakan pelatihan seperti itu” (wawancara dengan I.3-1) ketua

RW04 Desa tersebut juga menyatakan “atuh kumplit. Atuh milu. Ya ada KORAMIL nya 2 regu juga dari balai besar berikut cara pengobatan segala” (wawancara dengan I.3-2) kemudian dijelaskan kembali “ya atuh itu kan latihan, ana perahu karet nya segala ya” (wawancara dengan I.3-1) dan dipertegas “ya perahu karet di desa-desa doang” (wawancara dengan I.3-2)

Namun pernyataan berbeda dituturkan oleh Taruna Senior warga Desa Koper Kecamatan Cikande, berikut pernyataannya:

“Gak tau bapak mah gak pernah dapet pelatihan” (wawancara dengan I.3-3) dan dijelaskan kembali “Aktif, tapi bukan taruna didesa (kecamatan) loh taruna disini (Desa Koper) yang aktif mah kalau bapak kan motor penggerak, pemuda disini mah terlalu pada diem cuma kegiatannya banyak yang positif” (wawancara dengan I.3-3) dan dipertegas “Gak ada disini mah, ya biasanya kan di desa ya di desa” (wawancara dengan I.3-3) Kemudian Taruna Desa Kemuning Kecamatan Tunjungtheja juga menyatakan hal yang sama, berikut pernyataannya: “Gak, gak pernah” (wawancara dengan I.3-4)

Selain dari pada para aparat desa yang mendapatkan pelatihan BPBD Kabupaten Serang juga telah melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada organisasi-organisasi kemasyarakatan dan organisasi sekolah, demikian pernyataannya:

“kemudian kita melaksanakan simulasi kepada organisasi masyarakat FKPI, karang taruna setiap desa, tahun kita laksanakan tuh simulasi bagi ORSOS (Orgaisasi Kemasyarakatan) yang ada di Kabupaten Serang” (wawancara dengan I.1-1) kemudian dijelaskan kembali “Ya FKKPI, karang taruna, e... apa sih namanya FKKPI, karang taruna, RAPI, KORARI, aduh apa sih namanya, kampung siaga bencana, forum siaga bencana, jadi tidak lupa juga ORARI” (wawancara dengan I.1-1) diwaktu yang berbeda beliau juga menyatakan “Iya termasuk PRAMUKA juga dilatih, ya kita juga kan tahun depan nanti akan kesekolah-sekolah SD, SMP, SMA” (wawancara dengan I.1-1)

BPBD Kabupaten Serang telah melakukan sosialisasi dan pelatihan kebencanaan terhadap aparat desa dan organisasi

masyarakat, namun tidak pada masyarakat yang tinggal pada daerah rawan bencana (banjir), sehingga *warning systems* yang dilakukan oleh warga masih pada pengharapan pada baiknya tanggungjawab aparat desa yang telah mendapatkan sosialisasi dan pelatihan kebencanaan, karena organisasi masyarakat akan bertindak pada masa pasca bencana karena organisasi masyarakat menghimpun anggotanya tidak dikhususkan pada masyarakat calon korban bencana.

4.3.4 *Disaster Impact (Dampak Bencana)*

Dampak bencana menjadi titik dalam siklus bencana setiap terjadi bencana, namun berfungsi juga sebagai pengingat bahwa dalam penanggulangan bencana istilah dampak dapat bervariasi antara berbagai jenis bencana.

Aparatur Desa Undar Andir, Desa Koper dan Desa Tunjungtheja menuturkan pengalamannya terkait bencana banjir yang dialami di desanya, berikut pernyataannya:

“cuma kadang gak semua masyarakat mau (dievakuasi) karena kan masyarakat susah” (wawancara dengan I.2-1) diwaktu yang berbeda beliau juga menyatakan “Kan ada yang rumahnya di tingkat, diatas tingkat gitu tapi kalau yang udah terendam 2 meter mah ya harus di angkut, petugas bareng pemuda sini terutama buat orang yang udah tua, orang sakit” (wawancara dengan I.2-1) dan dipertegas kembali “Ya dari TAGANA, BPBD, sama dari kecamatan karena sebelum datangnya banjir juga udah standby termasuk dari tim SAR nya” (wawancara dengan I.2-1) Kemudian Sekdes Desa Koper Kecamatan Cikande juga menuturkan pengalamannya terkait kejadian bencana banjir: “Ya dari TAGANA dari KORAMIL dari POLSEK adalah semua, kadang-kadang sehari semalem, camat juga nongkrong sehari semalem, kalau lagi banjir semua kena, bukan cuma koper aja, Pasonggong, Kramat” (wawancara dengan I.2-2) kemudian dijelaskan

lagi “dari angkatan kadang-kadang turun langsung, lagi banjir turun dia berapa kompi dari KOREM, KORAMIL kemaren berapa, 3 tenda kalau gak salah, fokus utama itu di Koper Eretan, itu semua warganya kena, karena paling rendah, paling tinggi lagi kalau disini $\frac{1}{2}$ meter disana udah 1 meter, kalau disini semeter disana semeter $\frac{1}{2}$ ” (wawancara dengan I.2-2) dan dipertegas kembali diwaktu yang berbeda “Kalau lagi banjir ya keliling cuma 2 orang kok, pokonya kalau TAGANA 2 orang itu gak tinggal dirumah semuanya, siang malam harus itu, kalau gak kuat baru hubungi komandan, nanti turun tuh di Koper, kalau sini udah banjir tinggi gak mungkin ada yang bisa masuk, daerah Songgom itu udah gak bisa lewat, mau lewat mana udah di Kramat mobil juga gak bisa lewat, motor juga gak bisa, makanya juga udah tunggu surut aja, kalau ada bantuan juga gak diambil, datangnya juga agak lama sih, 2 hari 3 hari kan banjir, jadi belum sempat lah masyarakat untuk ngambil cuma kan bantuan tetep ada” (wawancara dengan I.2-2) Kepala Desa Kemuning Kecamatan Tunjungtheja juga menuturkan pengalamannya terkait bencana banjir didesanya: “Sampai kesana ke jembatan juga kalau kesini kan ketemu sungai Cigobang lagi, gak bisa itu harus muter, mau lewat pasir mangu gak bisa sampai kesekolahan itu, rumah-rumah yang dipinggiran sawah sampai jalan itu juga kerendam, kalau dulu mah banjir itu gak lama kiriman dari Rangkas, kalau sekarang Cisangu gak ada airnya kering, Sungai Cisangu kan nyambungnya ke Ciujung juga yang dari Pamarayan airnya lari kesini juga, sampai rel kereta juga dari Ciujung” (wawancara dengan I.2-3) kemudian dijelaskan kembali “Dari saya sebelum menjadi Kepala Desa juga sudah, alhamdulillah dari pihak BPBD maupun dari pihak TAGANA memang cukup membantu lah ke kami” (wawancara dengan I.2-3) dan dipertegas “iya gabungan BPBD, POLSEK, TAGANA” (wawancara dengan I.2-3) selanjutnya beliau juga menyatakan “TAGANA nya dari Taruna Kecamatan yang disini” (wawancara dengan I.2-3)

Kemudian tokoh masyarakat Desa Undar Andir, Desa Koper dan Desa Tunjungtheja juga berbagi pengalamannya:

“tahun kemaren 2013, jadi waktu 2012 saya itu paling tinggi segini (menunjuk pinggang) kalau anak-anak kan disana ya di toll” (wawancara dengan I.3-1) kemudian dijelaskan kembali “Ya ada juga petugas ya saya kan ada anak-anak bahkan saya pernah masak di atas springbed (yang mengapung) trus dibikin (menunjuk ke loteng) pelanggon” (wawancara dengan I.3-1) diwaktu yang berbeda beliau juga menyatakan “Gak, gak ada, pertolongan yang paling besar itu toll jadi kalau ada banjir langsung kesana kebetulan tahun 2012 toll nya kena air” (wawancara dengan I.3-1) dan dibenarkan oleh tokoh

masyarakat lainnya “Tapi yang gering-gering mah banyak” (wawancara dengan I.3-2) dan dijelaskan kembali “Baguslah malah waktu pada makan mah pada ngeliwet pake drum, ada 3 drumnya bareng masyarakat, KORAMIL bareng petugas bareng-bareng makannya bahkan terakhir saat udah gak banjir masih standby itu KORAMIL” (wawancara dengan I.3-1) selanjutnya beliau juga menyatakan “Gak, gak pernah telat bahkan sebelum banjir mah udah dateng, sebab sebelum datangnya air kan di adakan pelatihan” (wawancara dengan I.3-1) dan dipertegas kembali “Gak, gak ikutan bantu-bantu” (wawancara dengan I.3-1) Kemudian Warga Desa Kemuning Kecamatan Tunjungtheja juga menyatakan: “kan datangnya musiman makannya spontanitas aja gitu, maksudnya dadakan waktu musim hujan itu terus-terusan volume airnya juga banyak jadi banjir itu kena sawah dulu baru kena pemukiman warganya” (wawancara dengan I.3-4) dan dipertegas kembali “Iya kalinya dangkal jadi gampang naik” (wawancara dengan I.3-4) selanjutnya beliau juga menyatakan “Sekitar 2 mingguan lah itu kan tergantung banjirnya ya yang namanya bencana kita kan gak tau juga” (wawancara dengan I.3-4) diwaktu yang berbeda beliau juga menyatakan “Kalau petugasnya pas banjir aja kalau sebelum banjir paling dari warga-warganya aja paling yang rumahnya kebanjiran saling tolong menolong kalau lagi kebanjiran” (wawancara dengan I.3-4) kemudian dijelaskan kembali “Udah 2 hari paling mereka baru pada datang” (wawancara dengan (wawancara dengan I.3-4)

Dengan demikian petugas penanggulangan banjir di Kabupaten Serang memang telah melakukan tugasnya dengan baik dan loyalitas akan pekerjaannya yang besar dalam menolong para korban bencana, dari sebagian besar pengalaman korban banjir menuturkan hal yang positif pada petugas-petugas penanggulangan bencana banjir yang terdiri dari BPBD Kabupaten Serang dibantu oleh instansi/lembaga diantaranya: TAGANA Dinas Sosial, KOREM, KORAMIL, POLSEK dan aparaturnya bersama warga.

Tim Reaksi Cepat (TRC)

BPBD Kabupaten Serang dalam tugasnya melaksanakan penanggulangan bencana memiliki Tim Reaksi Cepat sebagai

penanganan awal laporan kejadian bencana juga sebagai pengumpul informasi kebencanaan di lokasi kejadian banjir dan dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan selanjutnya yang melaksanakan tugas dengan tahapan-tahapan penugasan meliputi: Tahap Persiapan, Tahap Pelaksanaan dan Tahap Pengakhiran dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan.

- a. Informasi awal bencana: informasi diterima oleh PUSDALOPS BPBD kemudian Kabid Penanggulangan Bencana dan DAMKAR memberikan informasi kepada seluruh personil TRC.
- b. Penugasan TRC: anggota TRC BPBD pada kesempatan pertama melaporkan kepada Kabid Penanggulangan Bencana dan DAMKAR tentang kesiapan untuk melaksanakan tugas, kemudian Kabid Penanggulangan Bencana memberikan jawaban atas kesiapan anggota TRC, selanjutnya setelah mendapatkan surat penugasan TRC segera membalas dan memberikan jawaban pada waktu yang telah ditentukan pada informasi awal bencana.
- c. Penetapan penugasa: memilih dan menyusun komposisi anggota TRC BPBD yang disesuaikan dengan jenis bencana dan keahliannya yang dituangkan dalam Surat Perintah Kepala Pelaksana BPBD terdiri dari: ketua tim, anggota dan petugas administrasi.

d. Mobilisasi awal: TRC menyelesaikan kelengkapan administrasi, keuangan dan perlengkapan yang diperlukan tim, kemudian BPBD menyampaikan informasi penugasan TRC kepada pejabat yang berwenang di Kecamatan/Kelurahan.

2. Tahap Pelaksanaan.

a. Pemberangkatan TRC: menuju lokasi kejadian bencana dengan sarana transportasi yang telah ditentukan.

b. Tiba di lokasi bencana: TRC memperkenalkan personil tim dan menyampaikan maksud, tujuan dan tugas, kemudian tim menghimpun informasi mutakhir tentang kejadian bencana, korban, kerusakan, dampak bencana dan upaya yang telah dilakukan serta kebutuhan mendesak, setelahnya tim menyampaikan permintaan personil pendampingan dari perangkat desa.

c. Peninjauan lapangan di lokasi bencana: pengidentifikasian kebutuhan yang mendesak untuk pencarian dan penyelamatan korban bencana dan evakuasi korban bencana, pemenuhan kebutuhan dasar (pangan, sandang, air bersih, sanitasi, pelayanan kesehatan dan penampungan sementara (tenda, tikar, genset, MCK dan dapur umum) serta perlindungan terhadap kelompok rentan (balita, ibu hamil, lansia, cacat)

d. Mengirim laporan tim tentang perkembangan bencana dan upaya yang telah dilakukan serta kebutuhan yang mendesak kepada

Kepala BPBD

- e. Melanjutkan peninjauan lapangan pada daerah yang belum sempat ditinjau.
3. Pengakhiran tugas TRC berdasarkan perintah dari Kepala Pelaksana BPBD.

4.3.5 Respond (Tindakan Pertolongan)

Tindakan respon biasa diambil segera sebelum dan setelah dampak bencana. Tindakan tersebut terutama diarahkan untuk menyelamatkan nyawa dan melindungi properti, dan untuk berurusan dengan gangguan langsung, kerusakan, dan efek lain yang disebabkan oleh bencana.

Dengan demikian tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang menyelimuti kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan sarana dan prasarana.

- 1) Mengimplementasikan rencana.

Dalam bencana banjir BPBD Kabupaten Serang mengklasifikasikan bencana banjir menjadi 2 jenis, pertama adalah banjir kiriman yang memiliki waktu kejadian yang singkat dan yang kedua banjir musiman dan masuk dalam masa tanggap darurat yang memiliki waktu yang lebih panjang dan berdampak luas, demikian pernyataan Kabid Penanggulangan Bencana dan DAMKAR:

“penanganannya klasifikasinya ya dilihat dulu kalau memang masuk klasifikasi tanggap darurat, bentuk komando segala macam, untuk penanganan SOPnya, kaitan dengan SOP penanganan banjir itu ada di pak adhaq (kabid kesiapsiagaan dan laboratorium) yang punya kewenangan, kalau yang kita tau sedang disusun. (wawancara dengan I.1-2) diwaktu yang berbeda beliau menjelaskan kembali “Jadi gini banjir ini kan ada klasifikasinya yang pertama ada bencana banjir yang tidak masuk tanggap darurat, contoh yang gak masuk tanggap darurat banjir yang sifatnya tidak permanen, tempolery, 1 jam banjir, iya banjir tapi kiriman gito loh, sejam kemudian surut, nah BPBD punya kewajiban tetap menangani itu tapi perlakuannya tidak seperti banjir yang tanggap darurat, bantuan kita kasih, kita cek kelapangan” (wawancara dengan I.1-2) selanjutnya disebutkan bahwa: “tapi ketika bicara yang sifatnya permanen ya, model di Kragilan ya, itu di klasifikasikan banjir yang masuk kategori tanggap darurat, ketika itu terjadi kami mempunyai kewajiban lapor ke bupati untuk menentukan situasi tanggap darurat namanya, ketika tanggap darurat sudah oke, *prove*, bupati mengeluarkan surat keputusan, bahwa tanggal sekian sampai dengan selesai masuk masa tanggap darurat banjir, misalkan, nah disitu bupati nanti, kewajiban BPBD sebagai koordinator kebencanaan, membentuk namanya TKTD (Tim Komando Tanggap Darurat) bupati nanti menunjuk, entah kapolres, entah pak kodim, entah kepala BPBD untuk komandan tanggap daruratnya disesuaikan dengan Perka (Peraturan Kepala), TKTD ada strukturnya, kepala-kepala bidangnya nah ini” (wawancara dengan I.1-2) yang kemudian dijelaskan kembali “bicara khusus termasuk penggunaan dana darurat yang sifatnya model DSP, usulkan ke pusat nanti kita sampaikan ke pusat dan pusat kan renkol, nah kebijakan khusus itu dalam bentuk pembentukan komando tanggap darurat tadi, disitu nanti SKPD sesuai dengan rencana kontijensi dan SOP banjir, tidak perlu bertanya lagi tugasnya apa, karena sudah terploting gitu, sehingga memudahkan, oh tugas dirjen anda siapkan posko medis, dinsos bentuk dapur umum, oh tugas kami SAR dengan TRC, dengan tagana evakuasi korban misalkan ya, itu sudah langsung berjalan, jadi gak perlu orang bingung lagi tugas saya apa, akhirnya kan tidak terkoordinasi dengan baik penanganannya” (wawancara dengan I.1-2)

Ketika ditanya terkait koordinasi pelaksanaan tanggap darurat yang melibatkan banyak pihak, berikut pernyataannya:

“Inshaa allah selama ini sudah berjalan, dari pengalaman yang sudah, ya kita tidak berharap banjir, tapi kan Kabupaten Serang langganannya kan banjir. (wawancara dengan I.1-2) kemudian

dijelaskan kembali “Ya kalau banjir kiriman setiap bencana masuk laporan, kita survey hari itu juga, TRC dengan bidang penanggulangan personil semua, biasanya kita bawa peralatan, evakuasi perahu karet ya seperti itu lah, kalau memang debit airnya terlalu tinggi ya berarti evakuasi ke tempat terdekat, sambil nunggu surat pimpinan, minta dikirim bantuan, dikirim bantuan, didistribusikan selesai, sambil kita lihat, penyebab banjir kirimannya apa, tergantung, dataran tinggi juga bisa banjir kok, kenapa dia banjir, ya pertanyaannya jangan kesiapa-siapa, jadi kalau orang bilang alam sudah tidak rama ke alam, kan itu area resapan dijadikan pemukiman ya banjir, padahal itu kan dataran tinggi, tidak semestinya kena banjir, Padarincang kok banjir ya, banjir jelas, sudah itu daerah resapan air diuruk dibikin rumah, ya kebanjiran rumahnya, jadi kembali lagi bukan alam yang tidak ramah, tapi kitanya yang sudah tidak ramah ke alam, jadi saya pikir sama lah mau banjir yang permanen mau yang non permanen, perlakuannya sama hanya tanggap darurat aja yang berbeda. (wawancara dengan I.1-2)

Penanggulangan kejadian bencana yang berdampak luas akan membutuhkan banyak sumber daya manusia dalam tugas membantu BPBD Kabupaten Serang mengatasi kejadian bencana banjir, sehingga diperlukan hubungan yang baik antara Instansi/Lembaga yang berkewenangan, berikut pernyataannya:

Saya yakin kalau persosnil bukan tanggungjawab BPBD aja, tanggungjawab semua pihak, kenapa di BPBD lambangnya begini (menunjuk logo BPBD) ini artinya ada maksud, kenapa segitiga begini, ini mewakili 3 unsur komponen pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, jadi tidak perlu ada kekhawatiran kekurangan personil, kalau pun pemerintah nanti kekurangan personil kita masih punya lini relawan dari masyarakat, ada TAGANA, ada BALAKA, ada PMI, ada PRAMUKA, inshaa allah kalau personil mah semua siap, bagaimana meraka berperan, sesuai dengan rujukan komando tanggap darurat tadi” (wawancara dengan I.1-2) selanjutnya dinyatakan juga “sudah, sudah berjalan, TAGANA dinsos sudah berjalan, BALAKA sudah berjalan, PRAMUKA apalagi” (wawancara dengan I.1-2) kemudian dijelaskan kembali “Kan PRAMUKA melibatkan siswa-siswa sekolah biasanya, ada PMI sudah berjalan, jadi relawan-relawan di kita ini sudah siap pakai lah semuanya, jadi gak perlu ada kekhawatiran kekurangan personil, justru kadang-kadang ribet kekurangan personil haa haa haa

(tertawa riang) tapi itu lah kebencanaan ya, sesuai dengan lambang segitiga tadi, sekali lagi bencana ini kan bukan hanya tanggungjawab pemerintah tapi juga tanggungjawab semua pihak, kenapa ada bencana pasti ada sebabnya, kalau pun toh terjadi bencana kita punya penanganan, pra, ketika dan sesudah seperti itu, jadi inshaa allah, saya tidak berharap banjir, tapi kalau memang terjadi untung tidak bisa didapat petaka tidak bisa ditolak, tapi minimal kita sudah menyiapkan” (wawancara dengan I.1-2)

2) Mengaktifkan sistem tanggap darurat

Ketika terjadi bencana dan dampaknya terlalu luas maka akan ada peningkatan status bencana menjadi tanggap darurat yang didasari atas informasi-informasi yang diterima ke BPBD Kabupaten Serang. Berikut pernyataan terkait hal tersebut:

“informasi ke pak kalaksa tadi, pakalaksa kalau memungkinkan dibantu bisa kita dibantu, tetapi kalau sudah melebar terpaksa pak kepala pelaksana melapor ke sekda untuk membuat status masa tanggap darurat, ditambah dari dinas sosial, TAGANA, jadi antara instansi yang terlibat itu, misalkan terima laporan dari apa, kecamatan, bahwa ada begini kemudian dikirim lah TRC, mengatakan sudah terlalu melebar sudah semakin gawat ini pak, jadi akhirnya pak kalaksa ini kalau masih sempat melapor ke instansi terkait kalau masih sempat nantinya pak kalaksa langsung melapor ke pak sekda, melapor ke bupati segera dibuatkan konsepnya kita buat disini, suratnya kita bawa buat ke pak bupati, disamping itu pak kalaksa sudah membuatkan bahwa kita harus masuk masa tanggap darurat, kemudian kita membuatkan struktur organisasi yang sifatnya adhock ya sementara, jadi struktur organisasi komando yang komando itu yang punya pangkat yang tinggi atau yang punya pengalaman atau di instansinya sendiri bisa, misalkan disini pak kalaksa ditunjuk atau pak KODAM KODIM bisa, misalkan pak bupati bilang pak komandonya pak KODIM aja, ya komandan KODIM, nanti kemudian KODIM setelah itu kemudian membentuk rapat darurat untuk membuat anggota-anggotanya untuk ke lapangan, untuk posko utama, posko pembantu, posko lapangan” (wawancara dengan I.1-1)

Komando Tanggap Darurat Bencana

Tim Koordinasi Tingkat Daerah (TKTD)

Kemudian untuk mengatasi kejadian bencana yang berdampak luas dan didasari oleh informasi awal kejadian bencana yang diperoleh dari berbagai sumber dan melalui berbagai sumber lainnya seperti: pelaporan, media masa, instansi/lembaga terkait, masyarakat, internet dan informasi lain yang dapat dipercaya, BPBD melakukan klarifikasi kepada instansi/lembaga/masyarakat di lokasi bencana dan informasi yang diperoleh menggunakan rumusan pertanyaan terkait bencana yang terjadi diantaranya:

1. Apa : jenis bencana
2. Bilamana : hari, tanggal, bulan, tahun, jam, waktu setempat
3. Dimana : tempat/lokasi/daerah bencana
4. Berapa : jumlah korban, kerusakan sarana dan prasarana
5. Penyebab : penyebab terjadinya bencana
6. Bagaimana : upaya yang telah dilakukan

Maka dilakukan lah penetapan status bencana yang didasarkan dari berbagai masukan yang dapat dipertanggung jawabkan dalam forum rapat dengan instansi/lembaga terkait, kemudian Kepala Pelaksana BPBD memberikan usulan kepada Sekertaris Daerah dan dilanjutkan kepada Bupati Kabupaten Serang.

Tindak lanjut dari penetapan status bencana sebagai masa tanggap darurat, maka dibentukalah organisasi adhoc Komando

Tanggap Darurat Bencana berdasarkan SK Bupati yang dilandasi oleh status bencana dan usulan Kepala Pelaksana BPBD, dengan demikian sesuai kewenangannya Bupati menunjuk seorang pejabat sebagai komandan penanganan tanggap darurat bencana.

Komando Tanggap Darurat Bencana merupakan organisasi satu komando dengan mata rantai dan garis komando serta tanggungjawab yang jelas. Instansi/Lembaga dapat dikoordinasikan dalam satu organisasi berdasarkan satu komando. Struktur organisasi Komando Tanggap Darurat Bencana terdiri atas:

1. Komandan Tanggap Darurat Bencana
2. Wakil Komandan Tanggap Darurat Bencana
3. Staf Komando:
 - a. Sekretariat
 - b. Hubungan Masyarakat
 - c. Keselamatan dan Keamanan
 - d. Perwakilan Instansi/Lembaga
4. Staf Umum:
 - a. Bidang Operasi
 - b. Bidang Perencanaan
 - c. Bidang Logistik dan Peralatan
 - d. Bidang Administrasi Keuangan

Tugas pokok Komandan Tanggap Darurat Bencana: merencanakan operasi tanggap darurat bencana, mengajukan

permintaan kebutuhan bantuan, melaksanakan dan mengkoordinasi pengerahan sumberdaya secara tepat, efisien dan efektif, dan menyebarkan informasi mengenai kejadian bencana dan penanganannya kepada media masa dan masyarakat luas.

Tugas pokok Wakil Komandan Tanggap Darurat: membantu Komandan Tanggap Darurat Bencana dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan komando tanggap darurat bencana.

Tugas pokok Sekretariat Komando Tanggap Darurat Bencana: menyelenggarakan administrasi umum dan pelaporan, pelayanan akomodasi dan konsumsi bagi personil Komando Tanggap Darurat.

Tugas pokok Hubungan Masyarakat: menghimpun data dan informasi penanganan bencana, membentuk jaringan informasi dan komunikasi serta menyebarkan informasi tentang bencana tersebut ke media masa dan masyarakat luas.

Tugas pokok Keselamatan dan Keamanan: menjamin kesehatan dan keselamatan seluruh personil Komando Tanggap Darurat Bencana dalam menjalankan tugasnya, menjaga keamanan penanganan tanggap darurat bencana serta mengantisipasi hal-hal yang berbahaya.

Tugas pokok Perwakilan Instansi/Lembaga: membantu Komandan Tanggap Darurat Bencana berkaitan dengan permintaan dan pengerahan sumberdaya yang dibutuhkan.

Tugas pokok Bidang Operasi: pelaksanaan operasi penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi serta pemulihan prasarana dan sarana dengan cepat, tepat, efisien dan efektif.

Tugas pokok Perencanaan: pengumpulan, evaluasi, analisis data dan informasi yang berhubungan dengan penanganan tanggap darurat bencana serta menyiapkan dokumen rencana tindakan operasi tanggap darurat.

Tugas pokok Logistik dan Peralatan: menyediakan fasilitas jasa dan bahan-bahan serta perlengkapan tanggap darurat, melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pendistribusian dan transportasi bantuan logistic dan peralatan, melaksanakan penyelenggaraan dukungan dapur umum, air bersih dan sanitasi umum.

Tugas pokok Administrasi Keuangan: melaksanakan semua administrasi keuangan, menganalisis kebutuhan dana dalam rangka penanganan tanggap darurat bencana dan mendukung keuangan yang dibutuhkan dalam rangka komando tanggap darurat bencana.

3) *search and rescue*, (pencarian dan penyelamatan)

Penanganan kejadian bencana banjir dibutuhkan teknik khusus terkait evakuasi yaitu dengan teknik SAR (*Search and Rescue*) sebagai kemampuan dasar yang harus dimiliki petugas lapangan BPBD Kabupaten Serang, dalam evakuasi korban juga dibutuhkan kecepatan waktu karena bencana sewaktu-waktu dapat berubah

menjadi lebih buruk dan kecermatan menganalisis situasi dan kondisi bencana sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang menuntut untuk segera dilaksanakan pada lokasi kejadian bencana.

Dalam evakuasi petugas TRC BPBD Kabupaten Serang dalam penugasannya menangani kejadian bencana banjir membawa peralatan-peralatan yang nantinya dapat digunakan pada penanganan awal korban bencana, saat evakuasi terjadi, korban bencana dibawa ke tempat-tempat yang memungkinkan untuk tempat berkumpulnya warga dan dinilai aman dari kemungkinan terkena dampak bencana, berikut pernyataannya:

“Evakuasi kita laksanakan ketika kita sampai ke masyarakat untuk menuju tempat evakuasi sementara dahulu, tempat evakuasi sementara ini, tempat-tempat yang ditunjuk dari sisi ketinggian dari sisi safety dan punya kemungkinan untuk tempat berkumpul warga sampai ketempat evakuasi akhir, ya seperti yang tadi saya sampaikan, berapa titik yang ditentukan, tendanya berapa unit yang sudah disiapkan dari proses itu tim kita bergerak melakukan proses mobilisasi di giring dari tempat evakuasi sementara ke tempat evakuasi akhir ini kaitan evakuasi, kaitan tanggap daruratnya pembentukan posko tadi” (wawancara dengan I.1-2) diwaktu yang berbeda beliau juga menjelaskan “jadi sebetulnya masih standar lah kalau untuk bencana banjir, tidak ada yang spesial masih begitu-begitu juga, yang jelas resiko korban terminimalisirkan, termasuk kondisi yang paling penting adalah urusan nyawa dulu barang-barang tidak kita prioritaskan, yang kita prioritaskan jiwa masyarakat dulu” (wawancara dengan I.1-2) kemudian dijelaskan kembali “orang kadang-kadang nanti aja pak, barang-barang saya belum di angkut, tinggalin aja dulu pak, barang rusak ada uang bisa dibeli ditoko, nyawa ilang gak ada ditoko kan, itu terjadi ketika banjir 2012 dulu di Ciomas, pak udah biasa begitu banjir sampai ketinggian baru teriak-teriak, pak tolong-tolong pak angkut, padahal tadi kan udah mau diangkut, mereka gak nyangka kalau banjir itu bisa lebih tinggi dari kejadian sebelumnya” (wawancara dengan I.1-2)

Namun masih terdapat kekurangan dalam kecepatan petugas mendatangi lokasi banjir, sehingga warga lebih mengandalkan kesadaran sendiri untuk menyelamatkan diri tanpa dibantu oleh petugas di awal kejadian bencana. Berikut pernyataan Sekdes Desa Undar Andir Kecamatan Kragilan:

“Masyarakat disini mah pakai apa aja sih karena kan gini, perahu itu kan kalau banjirnya tinggi paling yang ketinggalan aja, gak mau di evakuasi” (wawancara dengan 1.2-1) kemudian beliau juga menyatakan Paling itu mah satu dua sih. (wawancara dengan 1.2-1) selanjutnya beliau juga menjelaskan “Paling yang bisa dibawa aja sih karena kan dirumah udah dibikin tempat buat naro barang-barang, biasanya kan dari Bendungan Pamarayan kan udah ada laporan kita disini udah persiapan buat evakuasi” (wawancara dengan 1.2-1)

Pernyataan Sekdes Desa Koper Kecamatan Cikande juga menuturkan pengalamannya terkait evakuasi:

“sesudah banjir dan selagi banjir, makanya kadang-kadang bantuan kalau emang banjir itu besar, koper sudah, susah dijangkau sama kendaraan, kecuali perahu karet pun harus lewat kali, tertutup di Rengget, tertutup di Kramat, kalau di Parigi sudah kejalan (genangan banjir) udah gak bisa lewat banjir otomatis bantuan juga gak bisa lewat” (wawancara dengan 1.2-2) kemudian beliau juga menjelaskan “Lah iya masing-masing sendiri kalau koper itu udah pasti di toll” (wawancara dengan 1.2-2) diwaktu yang berbeda beliau juga menyatakan “Cukup (perahu karet), pokoknya kalau lagi banjir udah gak bisa berangkat kerja, mau lewat mana, Parigi tuh kalau gak bisa dilewati, udah banjir tinggi, udah motor itu gak bisa lewat, kecuali disana ada perahu karet, baru bisa” (wawancara dengan 1.2-2) kemudian dijelaskan kembali “sedikit-sedikit masyarakat ngungsi, dimana ini tempatnya, tahun berapa ya, kalau disini banjir udah merata gak bisa kemana-mana, saya aja gak bisa keluar makanya pakai kedebong (batang) pisang, dari sini sampai kesana jalan” (wawancara dengan 1.2-2)

Kemudian Desa Kemuning Kecamatan Tunjungtheja juga menuturkan pengalamannya terkait evakuasi:

“di (ci)gombong kalau dari kampung kejalan emang dekat cuma kan banjir itu sampai kejembatan (jalan juga kerendam banjir) kadang-kadang juga yang bawa perahunya udah dilatih semua cuma ada yang pakai mesin kan (butuh orang yang bisa pakai perahu mesin)” (wawancara dengan 1.2-3) beliau juga menjelaskan “Mau di evakuasi juga, bertahan, bertahan, kenapa bertahan itu karena khawatir ada ayam, kambing, segala macam, bertahan disitu doang, pas tengah malem airnya guede, baru yeuh kamana jaroronya” (wawancara dengan 1.2-3) kemudian beliau juga menyatakan “atuh semua (banyak warga yang dievakuasi), paling yang bertahan penjaga kampung doang” (wawancara dengan 1.2-3)

Bagi warga yang bukan merupakan aparat desa dan belum mendapatkan sosialisasi dan pelatihan kebencanaan akan memiliki kerentangan yang lebih besar terhadap resiko kejadian bencana banjir, karena hanya berdasarkan pengalaman dan intuisinya masing-masing dan resiko tersebut akan memiliki kemungkinan yang lebih besar ketika petugas telat dalam melakukan penanganan di lokasi kejadian bencana, berikut pernyataan warga Desa Undar Andir Kecamatan Kragilan atas pengalamannya terkait evakuasi:

“Ya bantu-bantunya, masyarakat disuruh naik kesini semua jadi pake perahu karet laju macem-macem lah pake kedebong juga” (wawancara dengan I.3-1) kemudian beliau juga menyatakan “Kalau saya disini bikin pelangongan (kayu yang disusun di bagian plafon rumah sehingga dapat menjadi pijakan)” (wawancara dengan I.3-2)

Berikut pernyataan Warga Desa Koper Kecamatan Cikande atas pengalamannya terkait evakuasi:

“Ya ngungsi sendiri, tendanya tuh disana dijalan deket balai desa seharusnya ini mah tanahnya dikeruk ini mah dibiarin aja longsorannya” (wawancara dengan I.3-3) diwaktu yang berbeda

beliau juga menyatakan “kalau banjir mah masing-masing aja yang pada jago berenang ya berenang aja lah” (wawancara dengan I.3-3) selanjutnya beliau juga menjelaskan kembali “Iya lah cuma kalau gede mah suka ada ABRI kesini, Banyak polisi juga ada” (wawancara dengan I.3-3) Kemudian warga Desa Kemuning Kecamatan Tunjungtheja atas pengalamannya terkait evakuasi: “Evakuasi sendiri soalnya kan belum ada bantuan jadi warga-warga yang gak kena banjir nolongin paling gitu aja sih” (wawancara dengan I.3-4)

Dengan demikian BPBD belum cepat dalam melakukan evakuasi korban bencana banjir, hal ini terlihat dari pernyataan-pernyataan tersebut yang merasa bahwa evakuasi yang terjadi dilakukan sendiri tanpa bantuan dari petugas BPBD.

4) Menyediakan makanan, tempat tinggal (posko), pengobatan darurat

Posko bencana berfungsi sebagai tempat tinggal sementara untuk korban bencana dalam sebuah kejadian bencana banjir, dengan rumah yang terendam otomatis warga kehilangan sementara aktifitasnya termasuk aktifitas ekonominya, sehingga BPBD Kabupaten Serang berkewajiban menyediakana makanan bagi warga yang terdampak banjir, tidak hanya itu korban bencana banjir juga akan rentan dengan berbagai macam penyakit dikarenakan cuaca yang tidak menentu dan kondisi posko yang seadanya sehingga BPBD juga berkewajiban menyediakan obat-obatan dan dokter yang siaga melayani dan menjamin kesehatan korban bencana, berikut pernyataannya:

“Posko itu yang jelas ketika terjadi tanggap darurat, semua perlengkapan komunikasi dan perlengkapan komando itu harus ada, termasuk personil yang paling penting, ketika bicara posko pengungsi semua sudah harus siap tenda pengungsinya, tenda

regunya, tenda familynya semua sudah harus berdiri termasuk Dana Siap Pakai (DSP) nah ini yang berkaitan dengan posko, alat penunjang perincian posko ini kan banyak, ketika berbicara posko harus ada tenda poskonya, ketika berbicara tenda posko harus ada alat komunikasinya, ketika alat komunikasinya ada harus ada personil yang mengoperasikannya, termasuk sarana dan prasarana kelengkapan, seperti itu” (wawancara dengan I.1-2)

Food (makanan)

“(makanan) gak lah, memang awalnya masih kaget kan dari keluarga sendiri yang jauh kan suka ngirim, bingung kalau masalah itu sih karena memang kan disini udah dikasih tapi gak sih ya (gak kekurangan makanan) namanya juga manusia” (wawancara dengan I.2-1) kemudian beliau juga menyatakan “Di pak lurah, dari pak lurah nanti kita masukin kantong kresek, ya yang namanya bantuan, namanya aja bantuan tetep aja masyarakat tuh merasa kurang aja, tetep aja kurang-kurang, berapa sih kadang mie 5 (bungkus) beras 2 liter, tapi gak kurang lah, kalau disana tuh yang dekat toll disana banyak yang memperhatikan” (wawancara dengan I.2-2) selanjutnya dijelaskan kembali “Ya gak ada (bantuan) dari mana kecuali kalau dibutuhkan, ya datang, soalnya kalau disini banjir, nyebrang kewilayah Tangerang juga banjir, gak bisa dilewat motor, mobil gak bisa, kerja kalau banjir seminggu ya seminggu gak kerja tetep gak kerja, gimana cara lewatnya (bantuan gak bisa masuk) mobil aja gak bisa” (wawancara dengan I.2-2) Kepala Desa lainya juga menyatakan “Kebetulan mah kemaren karena menjelang ada politik legislatif, alhamdulillah ini ngasih itu ngasih, yang paling banyak mah ini nih Bapak Mihad, diperintahkan nu bapak, jaro ulah nungguan BPBD ataupun dari pihak laen, ambil bantuan itu, udah saya ambil tapi alhamdulillah saya tidak mengecewakan dia kan, orang parpol duluan yang ngasih kan, jadi hasilnya juga banyak, kalo sekarang mah banjir repot saya, sebab gak ada politiknya ini, tau pemilihan bupati sekarang masih ikut rakyat atau gak, kalau bicara kurang mah pasti kurang gak ada cukup-cukupnya, akhirnya kan mereka juga sadari kalau memang itu musibah ya udah aja, sebenarnya mah kalau udah tau musibah harus pindah kenapa gak pindah, memang rencana nanti saya mau buat posko banjir dibelakang posko desa, memang terlalu jauh sih ya gak ada angkutannya” (wawancara dengan I.2-3) kemudian dijelaskan kembali “Semacam makanan, obat-obatan ada sedikit ada yang nyumbang pakaian cuma pakaiannya pakaian bekas” (wawancara dengan I.2-3) selanjutnya tokoh masyarakat Undar-Andir juga menyatakan “Alhamdulillah lantas ada sumbangan dari lain-lainya gitu, dari yang kerja di Indah Kiat gak kekurangan lah termasuk dari Pesantren H.Nurdhin, ya berupa beras mana nih yang orang RW ini

RT ini langsung dikasih kalau makan mah cukup sama obat-obatan, memang disamping dari Pemda dari swasta juga ada bahkan banyak” (wawancara dengan I.3-1) dan dipertegas oleh tokoh masyarakat Desa Koper “Ya ada cuma kan bantuan dateng nya gak cuma dari Pemda, Instansi lain juga ada malahan banyak yang dari partai lah, ada dari pemerintah mah cuma katanya mah ada yang disekap cuma ke bapak mah gak ada, bapak mah kalau dikasih ya syukur kalau gak ada mah gak minta-minta. Di anterin cuma kurang banyak yang brengsek didesanya mah” (wawancara dengan I.3-3) yang kemudian dibenarkan oleh tokoh masyarakat Desa Tunjungtheja “Ya keliling nganterin bantuan makanan, air bersih, ya lumayan lah cuma kan paling lauk pauk nya aja yang jadi masalah buat yang lainnya mah gak jadi masalah” (wawancara dengan I.3-4)

Pemenuhan kebutuhan dasar seperti sandang untuk para korban bencana memang menjadi kewajiban BPBD Kabupaten Serang sebagai penanggungjawab dari penanggulangan bencana di daerah Kabupaten Serang, karena dalam kondisi bencana banjir, masyarakat sebagai korban bencana tidak bisa menjalankan aktifitasnya secara normal, bagi korban yang rumahnya terendam banjir akan sulit menjalankan aktifitas perekonomiannya apalagi diperparah dengan akses jalan yang terputus akibat banjir, oleh sebab itu pemenuhan kebutuhan untuk sandang harus menjadi kewajiban BPBD untuk korban bencana.

Shelter (tenda posko)

Tenda posko berfungsi sebagai tempat tinggal sementara untuk para korban bencana dan merupakan hal yang harus disediakan setiap kali bencana banjir melanda karena korban bencana tidak bisa menempati rumahnya akibat terendam air banjir.

BPBD mempunyai kewenangan untuk mendirikan posko pada tempat-tempat yang dianggap aman dan tidak terdampak bencana banjir, dalam hal ini masyarakat harus memahami resiko yang timbul akibat banjir sehingga harus tinggal untuk sementara di posko tidak bertahan dirumah tanpa alasan apa pun, sehingga yang terjadi adalah banyak warga yang tidak ingin tinggal di posko bencana banjir dikarenakan minimnya fasilitas posko, berikut pernyataannya:

“Ya itu tadi BPBD itu tidak melaksanakan hanya koordinir seluruh dinas untuk penanggulangan bencana, seperti dinas sosial bagaimana melaksanakan dapur umum, dinas kesehatan ya kita koordinatornya bagaimana menyiapkan pos kesehatan” (wawancara dengan I.1-3) Sekdes Desa Undar-Andir juga menyatakan “Kita mah di jalan toll kalau ke posko KORAMIL kan kejauhan, di KORAMIL itu biasanya dari Kampung Picon, di jalan toll soalnya ngungsinya kan ke jalan toll, Undar-Andir disini kan ada 3 kampung yang kena, Undar-Andir, Mean sama Picon kalau Undar-Andir sama Mean itu di jalan toll kalau Picon itu di Kecamatan evakuasinya” (wawancara dengan I.2-1) yang kemudian dijelaskan kembali “Ya, ada tenda posko juga tapi kan kadang-kadang gimana ya karena masyarakatnya kebanyakan jadi gak muat” (wawancara dengan I.2-1) dan dipertegas oleh Sekdes Desa Koper “Ada disini (posko bencana), yang ngurusin gabungan lah dari TNI dari manalah ya tetep masyarakat dilibatkan, gak kadang-kadang itu dari angkatan” (wawancara dengan I.2-2) dan dibenarkan oleh Kepala Desa Tunjungtheja “Ini kan di evakuasinya di sekolah kadang kan yang udah di evakuasi kesini gak ada saudaranya kalau ada saudaranya ikut nginep, tendanya kan gede kalau gak cukup kan ada sekolahan, diruangan (kelas) banyak ada 2 kampung mah cuma yang parah (pengungsi) mah di Cigobang” (wawancara dengan I.2-3) Kemudian tokoh masyarakat Desa Undar-Andir juga menyatakan “di kasih selimut segala macam lengkap lah, tapi yang masih bungkus mah diatur sama staf-staf (petugas posko) alhamdulillah stok gak kurang lah malah sampai 5 bulan dari saya tanam padi sampai panen mah masih ada, atuh sempit mah sempit tapi biasa beh lah namanya juga lagi musibah” (wawancara dengan I.3-1) Kemudian dibenarkan oleh tokoh masyarakat Desa Koper “Disini aja noh disana noh ada itu juga kalau ada yang mau., ada aja

(bantuan), cuma tenda ada kalau udah banjir sebenarnya mah bantuanya ada dari Pemda, cuma dari desanya yang disekep sendiri” (wawancara dengan I.3-3) dan dipertegas oleh tokoh masyarakat Desa Tunjungtheja “Kerumah saudaranya paling ya yang ke posko paling yang saudaranya jauh aja, ya paling buat anak-anak kecilnya aja paling ya (selimut) kalau buat orang dewasanya gak paling ya karena kekebalan tubuhnya udah bagus kali ya, paling 40 orang lah yang nginep disana, paling saya kasihan sama anak kecilnya aja buat yang mau ke pasar juga kasihan harus nungguin perahu dulu soalnya kan perahunya cuma 1, kalau pasar mah gak disini (tempat banjir) kan adanya pasar desa paling dihari-hari tertentu aja bukanya gitu” (wawancara dengan (wawancara dengan I.3-4) beliau juga menjelaskan “Ada SD,SMP karena disini SD nya agak tinggi jadi gak kena bahkan itu dijadikan posko paling yang parah banget itu di Kampung Cigobang” (wawancara dengan I.3-4) dan beliau juga menyatakan “Sekitar 2-3 hari lah setelah banjir (tenda posko), ya gimana ya gak terlalu sulit juga kali ya karena yang ngungsi ini gak terlalu banyak juga kaya di Jakarta, jadi bisalah ngaturnya” (wawancara dengan I.3-4)

Fungsi lain dari posko bencana banjir adalah sebagai tempat pengumpulan logistik dan perlengkapan penanggulangan banjir dan korbannya, sebagai kebutuhan untuk para korban dan personil yang mengurus penanggulangan di desa tersebut, sehingga dibutuhkan manajemen yang baik pada bantuan-bantuan yang masuk melalui BPBD maupun masyarakat, bantuan yang masuk di check dan didistribusikan oleh petugas bersama dengan aparatur desa terdampak bencana banjir.

“Langsung ke posko, saya check bareng petugasnya, kalau yang check saya aja nanti takut diumpetin” (wawancara dengan I.2-3) kemudian dibenarkan oleh Sekdes Desa Undar Andir “(bantuan) Ya ditampung dulu di posko, (bantuan) ada disini yang ngurusin gabungan lah dari TNI dari manalah ya tetep masyarakat dilibatkan” (wawancara dengan I.2-1) dan dipertegas oleh Kepala Desa Tunjungtheja “Standbay, bantu-bantu paling juga Kecamatan ke Balai Desa” (wawancara dengan I.2-3)

Medical Assistance (layanan kesehatan)

Korban bencana banjir sangat rentan terkena penyakit dikarenakan kondisi cuaca yang tidak menentu dan kondisi posko yang kurang baik, sehingga dibutuhkan petugas medis yang membantu para korban banjir menjaga kesehatannya, agar dampak kejadian bencana banjir bagi korban tidak semakin parah, berikut pernyataannya:

“Ya ada (dokter) sampai rumah di bongkar ya ada aja dari mana-mana, gitu mah ada banyak yang peduli datang” (wawancara dengan I.2-1) kemudian dinyatakan juga oleh Sekdes Desa Koper “Gak kurang kalau obat-obatan gak kurang, rapih kontrolnya rajin lagi, perawat-perawatnya trus keliling” (wawancara dengan I.2-2) dan dibenarkan oleh Kepala Desa Tunjungtheja “Ada selimut, obat-obatan tapi kalau obat-obatan kan dari pihak kesehatan” (wawancara dengan I.2-3) dan tokoh masyarakat Desa Undar Andir juga menyatakan “Masih ada makanya yang saya lihat tuh 2 hari 3 hari setelah banjir masih ada” (wawancara dengan I.3-1) selanjutnya dinyatakan juga oleh “Ya lumayan lah paling 2 orang 3 orang” (wawancara dengan I.3-4)

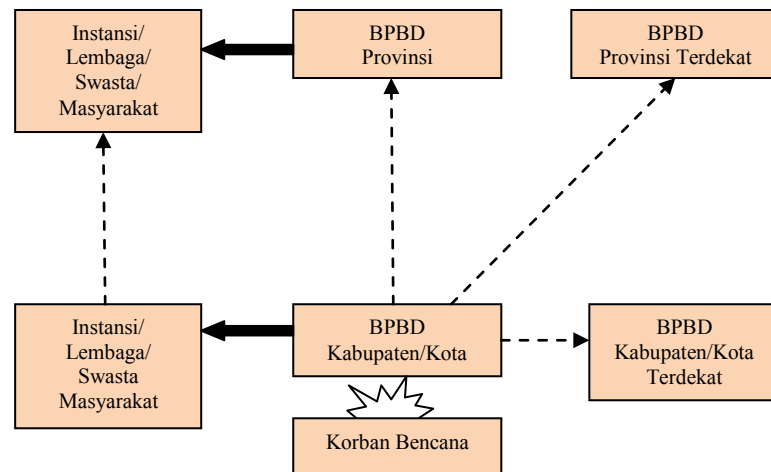
Dalam pelaksanaan penanggulangan bencana, senantiasa BPBD Kabupaten Serang membutuhkan bantuan dalam pemenuhan kebutuhan kebencanaan sehingga pemerintah daerah berkewajiban memberikan bantuan untuk meringankan penderitaan korban bencana. Bantuan dapat dihimpun dan dikerahkan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang berasal dari APBN dan APBD, bantuan dunia usaha serta masyarakat dalam dan luar negeri berupa logistik dan peralatan untuk penanggulangan bencana.

Bantuan peralatan dibutuhkan untuk penanggulangan bencana khususnya pada saat terjadi bencana. Dukungan bantuan peralatan

harus tepat waktu, lokasi, sasaran, kualitas, kuantitas dan kebutuhan.

Pengerahan bantuan dan peralatan di Kabupaten/ Kota dilaksanakan dengan pola sebagai berikut:

- a. Dalam hal bencana Kabupaten/Kota, BPBD Kabupaten/Kota yang terkena bencana mengerahkan sumberdaya peralatan dari instansi/lembaga, dunia usaha dan masyarakat sesuai kebutuhan lokasi bencana.
- b. Apabila tersebut tidak tersedia/ tidak mencukupi, maka pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dapat meminta bantuan peralatan kepada pemerintah Kabupaten/Kota terdekat baik dalam satu wilayah Provinsi maupun Provinsi lain.
- c. Apabila pemerintah Kabupaten/Kota tidak memiliki ketersediaan sumberdaya/ tidak mencukupi, maka pemerintah Kabupaten/Kota yang terkena bencana dapat meminta bantuan peralatan kepada pemerintah Provinsi yang bersangkutan.
- d. Biaya yang timbul akibat pengerahan bantuan peralatan ini ditanggung oleh pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- e. Pelaksanaan pengerahan bantuan dari asal sampai lokasi bencana dilaksanakan dibawah kendali Kepala BPBD Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Bagi pemerintah daerah yang tidak memiliki BPBD dikoordinasikan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berkaitan dengan penanggulangan bencana.

Gambar 4.3**Alur Permintaan Bantuan Peralatan**

Sumber: Perka BNPB Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pedoman Bantuan Peralatan

5) Melakukan survei dan penilaian

Dalam pelaksanaan penanggulangan bencana banjir di lokasi, survey dan penilaian bencana dilakukan oleh Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Kabupaten Serang di awal kejadian bencana dan pada saat penanganan bencana berlangsung dilakukan oleh petugas posko bencana, sebagai dasar dalam pengambilan keputusan tentang kebutuhan korban bencana dan penanganannya di lapangan (OC).

6) Mengevaluasi

Saat dan setelah bencana di Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Banjir dalam kondisi tanggap darurat bencana juga dilakukan pengevaluasian bencana yang sedang terjadi dan penanganannya secara luas, BPBD bersama Iinstansi/Lembaga yang terkait melakukan evaluasi tersebut sebagai dasar dalam

pengambilan keputusan yang lebih luas, berikut pernyataannya:

“Ada namanya rapat evaluasi kebencanaan, apa nih kira-kira dari pengalaman bencana yang sudah-sudah, untuk meminimalisir kerugian meminimalisir kejadian ditahun berikutnya, ada!, ada dibidang 3 untuk mengevaluasi kebencanaan, pembuatan tanggul-tanggul itu dari hasil evaluasi, oh ternyata Ciujung ini akan bisa terminimalisir bencana banjir ketika tanggulnya sudah diperbaiki, sodetanya sudah dilakukan, sedimentasinya sudah dilakukan proses pengerukan, seperti itu” (wawancara dengan I.1-2) diwaktu yang berbeda beliau juga menjelaskan “Evaluasi itu tidak dilakukan di lokasi bencana banjir, karena hakekatnya ketika kita berbicara monev, monitoring evaluasi, ketika bencana sudah tertangani biasanya, apa nih? seperti yang tadi saya sudah sampaikan di awal tadi dan itu dalam forum rapat biasanya, semua instansi yang terkait kita kumpulkan sharing disitu, kekurangan yang kemarin tuh apa, bicara yang kaitanya komando tanggap darurat, apa nih yang kurang, oh pak komunikasinya sulit, mau komunikasi aja tidak ada alat komunikasi, mau perahu karet tidak ada, tenda ternyata tidak sesuai dengan jumlah pengungsi, sehingga kedepan, saya tidak berharap bencana sekali lagi, tetapi ketika itu terjadi kita sudah berphare gitu. (wawancara dengan I.1-2)

4.3.6 Recovery (Pemulihan)

Recovery is the process by which communities and the nation are assisted in returning to their proper level of functioning following a disaster. Merupakan serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan rehabilitasi dan rekontruksi

a. Restorasi,

Restorasi merupakan serangkaian upaya yang dilakukan untuk pemulihan fungsi pelayanan dan instalasi yang penting yang berdampak pada kepentingan masyarakat yang lebih luas (bukan

korban bencana), sehingga restorasi akan fokus dalam pemulihan fungsi pelayanan publik seperti listrik, saluran komunikasi, akses jalan, sarana perekonomian dan sarana pendidikan yang sering sekali terdampak pada saat bencana banjir terjadi.

Dalam hal ini BPBD Kabupaten Serang belum memprioritaskan penanganannya pada restorasi, sehingga penanganannya disamakan dengan masa rehabilitasi dengan menggunakan skala prioritas. (OC)

b. Rehabilitasi,

Rehabilitasi merupakan perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik dan masyarakat sampai pada tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk menormalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Berikut pernyataan Kabid Sarana Prasarana Rehabilitasi dan Rekonstruksi:

Bencana banjir untuk rehabnya ya itu kepada masalah bangunan, kalau manusianya ya itu dipulihkan nanti setelah selesai bencana, seperti banjir kalau ada yang roboh difungsikan kembali, kalau rehab (rehabilitasi) itu kan bagaimana memfungsikan kembali seadanya, (wawancara dengan I.1-3) kemudian beliau juga menyatakan “rehabilitasi itu bagaimana difungsikan dahulu jadi belum dikatakan permanen atau bagus gitu, (wawancara dengan I.1-3)

c. Rekonstruksi.

Rekonstruksi merupakan pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosialisasi dan

budaya, tegaknya hukum dan ketertiban dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana. Berikut pernyataan Kabid Sarana Prasarana Rehabilitasi dan Rekontruksi:

“nantu setelah rehab diusahakan untuk direkontruksi, kalau direkontruksi itu diusahakan untuk dibangun kembali” (wawancara dengan I.1-3) selanjutnya dijelaskan kembali diwaktu yang berbeda “jadi setelah itu direncanakan untuk direkontruksi untuk dibangun kembali” (wawancara dengan I.1-3)

Typical activities include:

a. Memperbaiki tempat pelayanan penting

Berikut pernyataan Kabid Sarana Prasarana Rehabilitasi dan Rekontruksi:

“saya kira itu kalau di rehab rekon, jadi intinya rehab itu melakukan perbaikan dan pemulihan pelayanan publik, sampai kepada tingkat sebagaimana fungsinya, bagaimana menormalisasi berjalannya kegiatan masyarakat, rekontruksi itu pembangunan kembali kelembagaan dan pelayanan masyarakat, ya tergantung pada ininya, kalau misalkan dibencana banjir ya mungkin itu ada langganan trus ya itu kan kajian dari dinas tata ruang” (wawancara dengan I.1-3)

Dalam hal ini fasilitas pendidikan merupakan prioritas pada masa rehabilitasi, dikarenakan bencana banjir yang terjadi tidak dapat dipastikan jangka waktu terjadinya, namun demikian aktifitas sekolah bagi anak-anak tetap dilakukan dalam kondisi banjir sekali pun, akan tetapi pada saat resiko banjir semakin besar maka BPBD berkoordinasi kepada sekolah untuk menghentikan sementara aktifitasnya. Berikut pernyataan Sekdes Undar Andir, Kepala Desa Kemuning dan masyarakat Undar

Andir terkait hal tersebut:

“Ya memang kalau bangunan sekolah langsung dibenerin” (wawancara dengan I.2-1) dan dipertegas oleh Sekdes Desa Koper “Di kasih ya dikasih, cuma gak seberapa” (wawancara dengan I.2-2) dan selanjutnya dibenarkan oleh tokoh masyarakat Desa Undar Andir “Bahkan waktu itu mah ada yang pernah datang kesekolah situ (SD) langsung dibenerin karena parah dari Sekdes juga ngebantu” (wawancara dengan I.3-1)

Pada fasilitas publik seperti jalan yang rusak akibat kejadian bencana banjir atau bahkan terputus, tidak ada perbaikan pada masa rehabilitasi, namun akan disegerakan pada rekonstruksi disesuaikan dengan rencana pembangunan yang sudah direncanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang.

“Kalau masalah itu mungkin intern masalah desa, waktu itu kan mereka (rombongan Gubernur) dibawa lewat toll jadi tuh gak tau jalan yang rusak, kalau sama saya mah kan saya bawa ke jalan-jalan yang rusak” (wawancara dengan I.3-1)

- b. Memperbaiki rumah dan gedung/bangunan lainnya, berikut pernyataan Kabid Sarana Prasarana Rehabilitasi dan Rekonstruksi:

“disposinya ada di PU di situ ada bagian tata ruang atau sumber daya air, sesuai kewenangan masing-masing kita tuh hanya mengkoordinir kepada dinas terkait untuk melakukan perbaikan” (wawancara dengan I.1-3) kemudian dijelaskan kembali “Ya kita mengkoordinir tuh hanya mengkoordinir, kemudian kita lapor ke pak bupati nanti sama pak bupati langsung mengintruksikan kepada yang wewenangnya tergantung tupoksinya” (wawancara dengan I.1-3) selanjutnya beliau juga menyatakan “Pasti skala prioritas dan kesediaan dana, misalkan dananya ada ketersediaan maka nanti kita membangunnya ada skala prioritasnya” (wawancara dengan I.1-3) dan dipertegas dengan pernyataan “Tapi biasanya jarang, dilihat dana trus langsung kan, dari setiap instansi kan akan merekap semua yang di Kabupaten Serang tuh apa aja yang akan menjadi program dan dilakukan, direkap semua, ditentukan pada

anggaran murni atau kah nanti masuk ke perubahan” (wawancara dengan I.1-3) yang kemudian dijelaskan kembali diwaktu yang berbeda “SOP nya kita belum ada, karena dari sini aja udah ada (tunjuk buku pedoman rehab rekon) kalau banjir ya belum karena selama ini kita begini aja, kalau ada kejadian baru kita melakukan rehab rekon” (wawancara dengan I.1-3)

Dengan demikian pelaksanaan rehabilitasi terhadap instalasi penting dilakukan setelah Tim Lintas antara BPBD dan Instansi/Lembaga yang terkait melakukan perhitungan terhadap kerusakan dan kerugian dari dampak kejadian bencana, sehingga pelaksanaan rehabilitasi akan membutuhkan waktu yang tidak sedikit untuk mengembalikan fisik bangunan. Hal ini terkait prosedur penggunaan dana yang tidak mudah prosedurnya dan bersumber dari berbagai sumber.

c. Menyediakan perumahan sementara,

penyediaan rumah sementara untuk kejadian bencana banjir tidak dilakukan oleh BPBD Kabupaten Serang pada masa rehabilitasi, sehingga warga hanya menggunakan posko bencana saat bencana terjadi dalam waktu yang tidak ditentukan, setelahnya warga kembali ke rumah masing-masing walaupun dalam kondisi rumah rusak berat. (OC)

d. Tindakan yang membantu rehabilitasi fisik maupun psikis bagi orang-orang yang terkena dampak bencana tersebut, berikut pernyataan Kabid Sarana Prasarana Rehabilitasi dan Rekontruksi:

“ya kalau korban bencana (banjir) ya selama ini hanaya melakukan..., belum sampai seperti pada kejadian di tsunami, kalau di tsunami kana da tuh apa ya.., ada bagaimana memulihkan mental masyarakat setelah terjadi bencana, kalau untuk kejadian banjir ya gak ada di pelaksanaan juga” (wawancara dengan I.1-3) Kemudian beliau juga menyatakan “Kalau ini kayanya belum ada dilakukan kaya tv, kulkas, perabotanya, belum ada, paling ya itu tadi kebanyakan ya setelah ini meraka kembali kerumah masing-masing, mudah-mudahan adanya proyek normalisasi Kali Ciujung ya kedepan gak terjadi banjir lagi” (wawancara dengan I.1-3) dan kemudian dijelaskan kembali “Ya sosialisasi, setelah itu mengasih tau mereka bagaimana terjadi bencana yang jelas kita tuh harus berperan baik itu bantuan sembakonya maupun yang lainnya, kadang-kadang kan tempat tinggal itu kan gak, gak rusak, gak terbawa hanyut, mereka setelah melihat itu kering dibersihkan kembali, mungkin mereka melihat dijakarta begitu, setelah melihat surut kembali ya mereka langsung kesana (kembali kerumah) (wawancara dengan I.1-3) dan dibenarkan oleh pernyataan Sekdes Undar Andir Kecamatan Kragilan: “Ya yang trauma mah ada, memang ketika air surut masyarakat itu langsung bersih-bersih yang laki-laki pada pulang bersihin rumah yang cwe di posko karena kalau udah kering kan susah ngeberesinnya makanya masyarakat gak mau yang jauh-jauh” (wawancara dengan I.2-1)

Untuk rehabilitasi psikis korban bencana banjir belum dilakukan oleh BPBD, sekalipun ada warga yang mengalami trauma terhadap bencana banjir, karena korban banjir di Kabupaten Serang belum berakibat pada trauma berat yang membutuhkan penanganan lebih lanjut kepada dokter psikologis, sehingga pemenuhan tenaga dokter di dominasi oleh perawat dan dokter umum yang difasilitasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Serang.

- e. Tindakan berjangka panjang untuk rekonstruksi, meliputi pembangunan kembali bangunan dan infrastruktur yang telah

hancur oleh bencana tersebut.

Dalam melakukan penilaian kerusakan akibat bencana banjir BPBD dibantu oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk menentukan pengkategorian kerusakan, seperti pada bangunan rumah ada 3 kategori yaitu: rusak ringan, rusak sedang dan rusak berat, sedangkan untuk bangunan lain seperti kantor pemerintahan, jembatan, fasilitas pendidikan dan instalasi pelayanan masyarakat lainnya dikategorikan berbeda, nantinya hasil kajian tentang total kerusakan dan kerugian dilaporkan oleh Bupati Kabupaten Serang untuk diberikan tindakan yang lebih lanjut, berikut pernyataannya:

“Ya bencana itu pasti nanti akan ada survey hasil kajiannya, bagaimana ya kalau ada banjir, kita pakai motor tapi nanti akan ada survey rutin kita, karena tim itu ada 2, nanti kita datang kesana, dilihat ada longsor oh longsor, pasti kita kan akan lihat, oiya betul ada kejadian ini, nanti setelah itu baru data internal kita, tapi kalau emang ada ini... ada SK Bupatinya yang terlibat masalah ini seluruh dinas dan instansi ya kita akan melakukan survey, karena masalah rumah masalah longsor nanti kan orang PU yang tau tekniknya menghitung kerugian, oh rumah masing-masing ada yang rusak ringan ada yang rusak berat, yang rusak berat berapa, yang rusak sedang berapa, total ditemukan berapa itu pun belum tentu dibantu semua, kemungkinan dibantu sifatnya stimulan ya mungkin ada yang berasa beruntung ada yang rumahnya dibangun pemerintah, tapi yang rumahnya bagus yang permanen yang dibangun pemerintah kan disamakan dengan yang rumahnya biasa” (wawancara dengan I.1-3) diwaktu yang berbeda beliau juga menyatakan “ya setelah banjir, setelah banjir terjadi bencana kita kumpulkan instansi-instansi terkait termasuk PU, tata ruang, dinas social, jadi setelah kita turun nanti dikaji dilihat dihitung, PU nanti diturunkan dari tata ruang, kalau nanti tidak memungkinkan untuk tidak bisa ditempati lagi pemerintah punya dana untuk melakukan pemindahan kita berhak melakukan pemindahan” (wawancara dengan I.1-3)

Dalam hal ini BPBD Kabupaten Serang berfungsi sebagai koordinator pelaksanaan rekontruksi sehingga tidak memiliki tanggungjawab yang besar terhadap proses rehabilitasi dan rekontruksi.

“lembaga BPBD ini hanya sebagai koordinatornya saja, ya itu dinas kesehatan, tenaga kerja, tadi seperti ambil data, ada PU, ada tata ruang, artinya sesuai dengan fungsi dari BPBD sendiri sebagai koordinator tentang kebencanaan dan pembuat kebijakan, jadi pada waktu ini dinas terkait yang melaksanakan jika perlu dipindahkan nanti dinas tata ruang yang melakukan pemindahan, menyusun biaya nanti hasilnya dari yang tadi (pendataan) dilaporkan kepada bupati, pak bupati ini perlu dipindahkan, disposisinya nanti diberikan kepada dinas tata ruang, kalau tadi bukan dipindahkan hanya perlu diperbaiki, karena banjir nanti surut” (wawancara dengan I.1-3) kemudian beliau juga menyatakan “Ya begitu gak ada itu di Kragilan dilakukan, ya paling diberikan sembako masyarakatnya, setelah kering dia kembali kerumahnya masing-masing, kalau masalah ini kemarin, sebenarnya kalau kita ada dana ADB itu ya mungkin ada kajian atau dipindahkan masyarakatnya cuma kita kan gak pernah tau, tinggal bagaimana kita berusaha, ya bergotong royong membersihkan sampah-sampahnya, ya tetep aja kalau sudah musimnya, ya gak tau ya, mungkin sudah dinormalisasi, sudah tidak buang air di kali lagi, kemungkinan tangga turunnya bisa diangkat” (wawancara dengan I.1-3) selanjutnya dipertegas dengan pernyataan: “Wah memang nanti tata ruang yang mengkaji itu, untuk ditindak ya tata ruang, kalau nanti jalan desa kena banjir ya PU nya, ya selama ini kan bajir cuma genangan aja kan bukan karena sungai yang deras sehingga rumahnya hanyut, banjir genangan aja kan ya emang air genangan cuma beberapa hari, nanti setelah kering kan lain halnya, rumah yang dibantaran sungai yang kena air yang deras ya beda lagi nanti dibangkanya” (wawancara dengan I.1-3)

Sedangkan Sekdes Undar Andir Kecamatan Kragilan menyatakan:

“memang yang terakhir mah sampai sekarang belum ada bahkan yang pendataan dan pemotoan lah data lah mana belum itu gak ada, itu pun yang dari Pemda datangnya ke Kecamatan kan jadi

orang kecamatan yang mengurusin” (wawancara dengan I.2-1) beliau juga menyatakan “Ya, iyalah” (memperbaiki rumah sendiri) (wawancara dengan I.2-1) dan dipertegas dengan pernyataan “Ya paling dibenerin sendiri, ada sih dibelakang (rumah roboh) tahun 2012 itu” (wawancara dengan I.2-1)

Kemudian Sekdes Koper Kecamatan Cikande juga menyatakan:

“Di data, kemaren didata, yang kena banjir aja didata, kemaren dapet lah bantuan nya” (wawancara dengan I.2-2) kemudian dijelaskan kembali “warga aja dikasih bantuan cuma gak seberapa, kemaren doang kejadian rumah roboh, rumah tua karena banjir, belum dibikin lagi, tapi sekarang mah belum dibangun sama warga, tetep lah yang utama mah desa tanggungjawab kan ada” (wawancara dengan I.2-2) Kepala Desa Kemuning Kecamatan Tunjungtheja juga menuturkan hal yang sama, berikut pernyataanya: “Nah itu... itu... saya kan yang ikut mendata udah pendataan masuk karena gak ada realisasi juga, sementara masyarakat, jaro mah mana ini pasti ini mah duitnya ka jaro, kesaya lagi aja curiganya ke saya” (wawancara dengan I.2-3) Kemudian dijelaskan kembali “Belum ada juga sampai saat ini cuma data-data aja, itu dulu tuh pendangkalan Sungai Cisangu data-data aja, tetep aja dari pihak BPBD, KORAMIL minta data-data aja, Belum pernah dari pihak kecamatannya, KORAMIL, Polsek, pernah ada yang parah sampai jebol” (wawancara dengan I.2-3) dan dipertegas dengan pernyataan: “Gak ada pasca banjir mah mana gak ada yang dating” (wawancara dengan I.3-3) dan selanjutnya dibenarkan oleh tokoh masyarakat Desa Tunjungtheja “Mungkin ada kali ya beberapa yang di data paling yang parah banget rusaknya baru didata” (wawancara dengan I.3-4)

Sedangkan warga Desa Undar-Andir menuturkan hal yang berbeda terkait dana rekontruksi:

“Gak, sama Pemda? ya betulin mah betulin itu cuma dari sumbangan aja itu mah, memang waktu itu ada Gubernur tuh turun semua (uang perbaikan) dari Bu Atut (Gubernur Banten pada waktu itu) bahkan yang luas (banyak memberi uang) wakilnya. Malah kemaren sebelum banjir di sms tuh semua masyarakat kalau mau ada datang Gubernur (Gubernur yang sekarang), tapi barang banjir mah enggak, gak seperti 2012 itu” (wawancara dengan I.3-1) Selanjutnya beliau juga menyatakan

“Kemaren itu waktu 2012 dia itu turun sampai ke desa waktu jadi wakil juga tahun 2001 turun juga ada sedikit bantuan buat kehancuran itu” (wawancara dengan I.3-1) dan dijelaskan kembali “udah gak banjir juga dikasih tuh buat bantuan yang rusak-rusak, jebol-jebol langsung dikasih amplop dibelajain sendiri bahan bangunannya” (wawancara dengan I.3-1) dipertegas dengan pernyataan “ya alhamdulillah lah Pemerintah setempat mah baiklah” (wawancara dengan I.3-1) tokoh masyarakat Undar Andir juga menyatakan “Bukan ningkatkan Bu Atut yah, memang sebetulnya sedikit lah kesini, udah jadinya (terpilih jadi Gubernur kembali) mah alhamdulillah karena sendirinya turun ke bawah nanya-nanyain mana yang jebol-mana yang jebol langsung dikasih bahkan Ibu Atutnya mah ditegor sama Pak Lurah bu yang itu mah jangan dikasih “enggak ini yang kenyataan” malah katanya” (wawancara dengan I.3-2) kemudian dijelaskan kembali “Dipinggir mah ada dilingkungan saya ada 3 yang di foto” (wawancara dengan I.3-2) dan dibenarkan oleh tokoh lainya “Ya namanya ini kalau kurang mah gak ada batasnya, boleh dikatakan kurang sebenarnya saya juga kan ini pada rusak tapi kan gak minta jadi ya gak dikasih” (wawancara dengan I.3-1) kemudian dipertegas kembali “Ya ini mah bahkan petugas BPBD yang masukin, langsung staf (petugas kantor desa) dipinggirkan langsung dikasih (ke masyarakat) uang itu seperak pun gak turun kemana-mana langsung dikasih ke orangnya langsung” (wawancara dengan I.3-2)

Setelah kajian dilakukan dan Surat Keputusan Bupati dikeluarkan, proses selanjutnya adalah memberikan langsung dana bantuan rekonstruksi yang besarnya didasarkan atas SK Bupati, namun demikian tidak semua kerusakan dapat diberikan bantuan pada saat itu juga, karena harus disesuaikan dengan rencana pembangunan yang ada di Kabupaten Serang, dalam penggantian kerugian BPBD Kabupaten Serang tidak membiayai semua kerusakan yang terjadi hanya diberikan sebagian sebagai dana stimulan untuk pembangunan kembali rumah warga yang rusak.

- f. Tinjauan pasca bencana juga seharusnya dijadikan sebagai bagian dari proses pemulihan. Tindakan tersebut harus dilakukan segera setelah bencana terjadi.

“Ya kalau yang tadi untuk sementara ya kita memfungsikan untuk sementara saja cuma nanti kalau ada kajian dari lapangan dilaporkan kepada bupati, nanti kalau tidak tersedia anggaran dana pada anggaran tahun 2015 yang murni, nanti akan dicoba pada anggaran perubahan, karena kita belum bisa merencanakan tahun depan terjadinya apa, makanya biasanya kalau tidak ada di anggaran murni, nanti akan dibahas diusulkan pada anggaran perubahan, misalkan terjadinya di awal atau dipertengahan tahun untuk merencanakan (rehab dan rekon) ya dilihat perencanaan (APBD) maka akan diusulkan diperubahan” (wawancara dengan I.1-3) beliau juga menyatakan “Ya saya kira kami juga gak paham, artinya bagaimana teknik untuk normalisasi Sungai Ciujung tuh apakah bagaimana ya, anak-anak (petugas BPBD) juga tadinya sudah disini cuma ya itu tadi sudah dilakukan dinas dan kecamatan-kecamatan yang terkena banjir” (wawancara dengan I.1-3) kemudian dijelaskan kembali “nanti setelah itu BPBD juga mengkoordinir bagaimana merehabnya, bagaimana merekonstruksinya lagi setelah dilaporkan ke pak bupati nanti akan didisposisikan lagi sesuai dengan tupoksi masing-masing, ada dinas tata ruang, dinas PU sumber daya air ke instansinya” (wawancara dengan I.1-3) dan diertegas dengan pernyataan: “Ya kalau itu kayanya ada juga kan dari bendungan itu, aliran-alirannya yang di..., termasuk membersihkan eceng gondok, kita bersama PRAMUKA, KORAMIL membersihkan eceng gondok itu supaya airnya ya lancar lah, lebih banyak yang ketampung, kalau untuk melakukan itu, apa... di Bendungan Pamarayan supaya itu diperbaiki kayanya belum ada program pemerintah, ya kalau terbawa (eceng gondok) dari hulu ke hilir kan mendangkal bendungan itu” (wawancara dengan I.1-3)

Pada masa pasca bencana BPBD memiliki kewenangan untuk merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan tindakan pemidahan bagi bangunan-bangunan yang beresiko terhadap terjadinya bencana banjir, sehingga perlu dilakukan tindakan pembongkaran atau pemidahan agar resiko banjir dapat

dicegah, berikut pernyataannya:

“berarti kalau setiap tahun jadi langganan (banjir) gak mau dipindahkan walaupun di upayakan dari pemerintah, gimana kalau di alihkan, tapi tetep masyarakat gak mau dipindahkan, ya karena alasan masyarakat gak mau dipindahkan karena dia kerjanya dekat sekitar situ kalau dia pindah lagi jauh dimana, masyarakat kalau menempati itu susah kali untuk meninggalkan tempat” (wawancara dengan I.1-3) kemudian beliau juga menyatakan “ya padahal... contoh saja di daerah... itu setiap tahun kena puting beliung cuma kenapa mereka itu tetap, misalkan kalau pindah agak kemana gitu cuma gak mau kan gitu, udah biasa dekat kegiatan dan aktifitasnya disitu, jadi tetap itu disitu, jadi pemerintah juga sekarang juga tidak tersedia anggaran juga” (wawancara dengan I.1-3)

Nantinya penormalisasian Sungai Ciujung dan pembuatan tanggul akan beresiko terhadap warga yang bermukim pada daerah rawan banjir, karena akan dilakukan pemindahan sehingga BPBD sampai pada saat ini masih merekomendasikan untuk dipindahkan pemukiman tersebut, namun hal ini akan sulit diterima warga, berikut pernyataannya:

“Ya kalau saran mah pasti ada Cuma masyarakat sini kan susah gitu disuruh pindah ke lokasi yang gak banjir, emang dari kecilnya juga udah disini” (wawancara dengan I.2-1) kemudian dijelaskan kembali “Ya memang gak boleh kan, dari desa pun juga gak boleh cuma masyarakat kan susah, ya cuma susahnya gitu padahal kan kita udah melarang” (wawancara dengan I.2-1) selanjutnya dinyatakan juga “Kayanya gak mau ya memang masyarakatnya dari kecil disini, memang pada tahun 2012 yang terbesar itu disarankan tapi gak mau lah” (wawancara dengan I.2-1)

Berdasarkan Peraturan Kepala BNPB Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana, penyelenggaraan rehabilitasi dan rekontruksi di daerah memiliki beberapa tahapan pelaksanaan, diantaranya:

perencanaan, pendanaan, kelembagaan pelaksana, pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi.

1. Perencanaan.

Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekontruksi memerlukan dokumen perencanaan yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekontruksi (RENAKSI) untuk jangka waktu paling lama 3 tahun.

Penyusunan dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekontruksi (RENAKSI) dilaksanakan pada akhir masa tanggap darurat dan masa pemulihan awal dengan memperhatikan:

- a. Hasil pengkajian kebutuhan pasca bencana.
- b. Penentuan prioritas.
- c. Pengalokasian sumberdaya dan waktu pelaksanaan.
- d. Dokumen rencana kerja pemerintah baik pusat maupun daerah dan
- e. Dokumen perencanaan pembangunan terkait lainnya.

2. Pendanaan.

Sumber pendanaan utama penyelenggaraan rehabilitasi dan rekontruksi adalah:

- a. APBD Kabupaten/Kota untuk bencana skala Kabupaten/Kota.
- b. APBD Provinsi untuk bencana skala Provinsi.

c. APBN untuk bencana skala nasional.

Sumber dana lain yang dapat digunakan diantaranya:

- a. Asuransi.
- b. Dana dari peran serta internasional melalui kerjasama bilateral maupun multilateral.
- c. Dana perwalian yang dibentuk untuk keperluan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat pasca bencana
- d. Dana bantuan masyarakat lain.

Pemerintah Kabupaten/Kota dapat meminta bantuan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk pendanaan rehabilitasi dan rekontruksi.

3. Kelembagaan Pelaksanaan

Kelembagaan penanggungjawab pelaksanaan rehabilitasi dan rekontruksi adalah BNPB ditingkat nasional atau BPBD di Provinsi/Kabupaten/Kota.

Lembaga yang dimaksud adalah lembaga fungsional/ struktural yang ada di dalam struktur BNPB atau BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota yang sesuai dengan tugas pokok fungsi dan kewenangan.

Apabila dipandang perlu dapat dibentuk lembaga koordinatif yang bersifat adhoc atau bersifat sementara yang fungsinya membantu BNPB/BPBD dan ditetapkan dengan

keputusan Kepala BNPB/BPBD atas nama Presiden/ Gubernur/ Bupati/ Walikota untuk jangka waktu maksimal 3 tahun.

4. Pelaksanaan

Pelaksanaan teknis substansial dilakukan oleh perangkat Kementrian/Lembaga atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Provinsi/Kabupaten/Kota.

Semua pelaksanaan teknis dari aspek-aspek rehabilitasi dan rekontruksi harus mengacu pada standar teknis yang ditetapkan peraturan perundangan.

Tenaga pelaksana teknis rehabilitasi dan Rekontruksi diutamakan tenaga profesional Kementrian/Lembaga SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota atau organisasi/lembaga yang berada di daerah bencana dengan pertimbangan:

- a. Menguasai kondisi social budaya masyarakat dan karakteristik.
- b. Memahami dan menguasai kapasitas sumberdaya lokal.

Apabila ketentuan tersebut tidak terpenuhi maka BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota dapat meminta bantuan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota lain dengan status penugasan kepada SKPD Kabupaten/Kota yang diberi mandate penuh untuk pelaksanaan teknis rencana rehabilitasi dan rekontruksi.

Lembaga international atau lembaga asing non pemerintah

atau lembaga non pemerintah yang terlibat dalam rehabilitasi dan rekontruksi wajib berkoordinasi dengan BNPB/BPBD bersama Kementrian/Lembaga/SKPD.

5. Pemantauan dan Evaluasi.

BNPB/BPBD mengkoordinasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi melibatkan Kementrian/Lembaga/SKPD teknis/masyarakat.

Kepala BNPB/BPBD menyusun laporan evaluasi bersama lembaga perencanaan berdasarkan hasil kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan Kementrian/Lembaga/Kepala SKPD.

4.3.7 Development (Pengembangan)

Pengembangan memberikan hubungan antara kegiatan yang berhubungan dengan bencana dan pembangunan. Dimasukan dalam siklus bencana ini untuk memastikan bahwa hasil dari bencana secara efektif tercermin dalam kebijakan masa depan dalam kepentingan kemajuan.

- a. Memperkenalkan sistem dan program pembangunan yang canggih dan modern.

Dalam penanggulangan bencana banjir yang dimaksud hal tersebut adalah program penormalisasian Sungai Ciujung dan pembuatan tanggul. Hal ini akan dilakukan BPBD Kabupaten Serang pada tahun 2015 bersama dengan Pemerintah Daerah

Kabupaten Serang, Provinsi Banten dan Pemerintah Pusat, berikut pernyataannya:

“Sugai Ciujung kan sudah tidak bisa menampung debit airnya, artinya perlu ada sodetan Sungai Ciujung plus pembuatan tanggul gitu, termasuk juga revitalisasi pemukiman yang ada pada bantaran sungai, kuncinya berbicara teknologi bangunan, tidak ada teknologi khusus” (wawancara dengan I.1-2) kemudian dijelaskan kembali “ya 2015 mungkin kita akan lakukan proses pembangunan tanggul dan itu akan dibebaskan 12 meter (dibantaran sungai) dari APBN, BPBD sendiri akan menyiapkan dana pendampingan \pm 10%-12% dan itu akan dilakukan di 2015, apa nih normalisasi plus pembangunan tanggul, 2015 kita mulai tanggulnya, jadi berbicara teknologi bangunan kalau memang berbicara banjir tidak ada teknologi khusus, yang jelas hindari bangunan berdiri pada area-area yang dilarang dan dianjurkan menghindar, contoh sepadan sungai, tanggul sungai dibangun bangunan permanen, padahal itu kan daerah sepadan, gak boleh!” (wawancara dengan I.1-2) beliau juga menyatakan “kalau bicara teknologi sebenarnya itu saja ditempuh, tidak bicara teknologi, *safety* aman semua dari banjir” (wawancara dengan I.1-2) selanjutnya beliau juga menyatakan “jadi ketika berbicara teknologi bangunan sebenarnya tidak ada yang spesialis kalau urusan banjir, tetapi kalau gempa kan berbeda struktur bangunannya, segala macam! kalau banjir selama bangunannya tidak berada di aliran sungai, saya kira aman dan aliran sekundernya harus lancar juga, karena selama ini kan yang menjadi penyebab banjir primadonanya kan Ciujung (sungai) sementara Ciujung punya beberapa anak sungai, ada Cisangu, ada Cigambon, segala macam, nah itu! perlu direvitalisasi lagi karena banyak pendangkalan” (wawancara dengan I.1-2) kemudian dijelaskan kembali “seperti yang saya sampaikan di awal kan ada cabang-cabang anak sungai, seperti itu! kuncinya itu gak perlu pakai teknologi inshaa allah bebas banjir” (wawancara dengan I.1-2) dan dipertegas dengan pernyataan: “yang pertama jangan sampai ada bangunan disepanjang aliran sungai yang kedua mau tidak mau suka atau tidak suka harus ada proses normalisasi aliran, mau bentuk sodetan, maupun pengangkatan endapan, sedimennya diangkat dan mau tidak mau harus ada normalisasi di saluran sekundernya juga, pintu-pintu saluran yang mengairi anak-anak Sungai Cijung, kaya Cisangu (sungai), Cigambon (sungai), segala macam, kuncinya itu (normalisasi)” (wawancara dengan I.1-2)

Dengan demikian program-program tersebut nantinya akan dapat membebaskan Kabupaten Serang dari bencana banjir, sehingga nantinya kejadian bencana banjir tidak memiliki dampak yang besar, untuk itu Pemerintah Pusat yang juga berkepentingan bersama Provinsi Banten dan Kabupaten Serang akan memulai program-program tersebut pada tahun 2015.

- b. *using international disaster assistance to optimum effect*,
(menggunakan bantuan bencana internasional untuk efek yang optimal)

Luasnya dampak dari sebuah kejadian bencana banjir di Kabupaten Serang menuntut untuk diikuti sertakanya Pemerintah Pusat bersama Asia Development Bank dalam membantu pendanaan normalisasi sungai dan pembuatan tanggul, sehingga nantinya proyek tersebut yang membutuhkan pendanaan yang besar dapat dilakukan dengan segera, berikut pernyataanya:

“Ya tapi mudah-mudahan sekarang ini kan mudah-mudahan ada dana ADB (Asia Development Bank) nanti kalau memang sesuai dengan kajian setelah direalisasi akan terhindar dari banjir tadi, ya itu kan nanti bukti kan, sekarang ini sudah dimulai tahapan-tahapannya sampai 2015 ini normalisasinya ada 6 kecamatan yang kebanjiran sampai ke Tanara itu” (wawancara dengan I.1-3) diwaktu yang berbeda beliau juga menyatakan “Ya makanya dengan adanya kejadian tersebut (akses Jakarta-Merak via Toll Terputus) Pemerintah Pusat berkepentingan jangan sampai nanti toll itu terjadi seperti dulu lagi makanya dilakukan, punya program, dengan Pemprov dan Kabupaten dengan dana-dana bantuan dari luar negeri ADB itu, karena terganggu kan kalau transportasi udah ini, ekonomi terganggu, jalur sembako terganggu, aktifitas masyarakat terganggu, jadi bagaimana supaya tidak terjadi lagi, kalau toll itu terendam banjir melihat segala prioritasnya disitu pemerintah pusat kita, kita melihat, waduh berapa hari itu jalan Jakarta Merak terputus, sampai

berapa hari itu terendam, sampai muter ke Mauk itu kan, tapi bagaimana pun gak bisa ininya, kalau jalan tuh lewat sana semua, jadi harus dinormalisasi dataran ataupun Ciujung ini” (wawancara dengan I.1-3) kemudian dibenarkan oleh Kabid Penanggulangan Bencana “Kalau kaitan peraturan perundang-undangan segala macam itu kan ada di PU ya, tapi kalau di kita nanti mau disosialisasikan, produk yang terbaru di kita itu Perda Nomor 44 Tentang Penanggulangan Bencana, di produk itu memuat ketentuan, termasuk DSP namanya yaitu Dana Siap Pakai, dari APBD Kabupaten (Serang) untuk dipakai penanggulangan bencana” (wawancara dengan I.1-2) kemudian beliau juga menjelaskan “Jadi gini, sumber pendanaan bencana ini kan ada pengecualian, ketika terjadi bencana tanggap darurat, silahkan dipergunakan dahulu, karena bencana ini kan gak nunggu ada kajiannya dulu ya, masa nanti orang mau makan, pengungsi kita tegur, oh nanti dulu, gak bias! jadi pendanaan itu ada dari pusat renkol namanya, ada dana darurat, kalau dari kita nanti inshaa allah tahun 2015 ada dana siap pakai tadi, intinya nanti bisa dipakai untuk dana kedaruratan, baik untuk personil, maupun masyarakat para korban, dapur umum segala macam dari situ, ini baru sekarang, karena sesungguhnya penanganan bencana itu bukan hanya tanggungjawab pusat tapi juga tanggungjawab daerah, kalau di Banten cuma Kabupaten Serang yang sudah ready, ada dana DSP(dana siap pakai), dana DSP ini penggunaannya tidak mudah, khusus pemberian bantuan-bantuan yang sifatnya kebencanaan, tapi alokasinya khusus bantuan korban, mulai dari rumah ambruk dan itu pun mekanismenya harus melalui tim lintas, jadi bukan cuma BPBD yang nentuin, oh kamu dapet nih, itu enggak, termasuk dari PU semua ada disitu, misalnya longsor, rumah rusak, pemberian itu disesuaikan dengan surat keputusan bupati tadi besarannya, tapi nanti dari PU dihitung berapa kebutuhan, berapa rusaknya, berapa kerugiannya dan itu pun tidak mudah, sampai kapan? Itu tidak mudah, kadang-kadang kan masyarakat gak sabar, masyarakat udah sekian hari (menunggu), kalau metafisik ya, kalau yang berkaitan dengan fisik ya yang tadi dikatakan itu, misalkan sembako, entah apa lah, dapur umum bisa dipakai dari DSP, renkol tadi, mekanismenya agak lama karena butuh jadwal, butuh survey, karena dana penanggulangan bencana ini kan dana pusat juga, dan penggunaannya sensitif, tidak boleh digunakan untuk item lain selain kebencanaan” (wawancara dengan I.1-2) dan beliau juga menyatakan “ada di SK (surat keputusan) bupatinya, biasanya kalau sudah di survey dan diberikan dana gitu ya, misalkan rumah rusak berat klasifikasinya cuma dapet sekian juta, ya kita kasih bantuan itu, tapi untuk proses pengecekan surveynya, sidak, berbeda tidak, apakah rusak karena bencana, kan perlu itu! ada berita acaranya, gak boleh salah karena 1 sen pun harus dipertanggungjawabkan” (wawancara dengan I.1-2)

Sumber pendanaan utama penyelenggaraan rehabilitasi dan rekontruksi adalah:

1. APBD Kabupaten untuk bencana skala Kabupaten.
2. APBD Provinsi untuk bencana skala Provinsi.
3. APBN untuk bencana skala Nasional.

Sumber dana lain yang dapat digunakan:

1. Asuransi.
2. Dana dari peran serta internasional melalui kerjasama bilateral maupun multilateral.
3. Dana perwalian untuk keperluan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana.
4. Dana bantuan masyarakat.

Dengan demikian penggunaan dana internasional memang dianjurkan dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekontruksi melihat bahwa besarnya beban penyelenggaraan rehabilitasi dan rekontruksi karena hal ini terkait dengan pemulihan fungsi dan pembangunan kembali fisik bangunan dan pengembangan pembangunan yang dapat mencegah terjadinya bencana kembali.

- c. *applying disaster experience in future research and development programs*, (menerapkan pengalaman bencana dalam program penelitian dan pengembangan di masa depan)

Berdasarkan pengalaman bencana banjir yang sudah-sudah BPBD bersama dengan Instansi/Lembaga yang berkewenangan dan

berkewajiban melakukan rekontruksi berdasarkan Surat Keputusan Bupati yang dikeluarkan pasca terjadinya tanggap darurat banjir, merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Serang untuk melakukan program-program seperti: normalisasi Sungai Ciujung dan pembuatan tanggulnya serta pembuatan Waduk Barian. Diharapkan setelah selesai dilakukan nanti program tersebut dapat mengurangi bahkan mencegah bencana banjir terjadi lagi di Kabupaten Serang.

“Ya itu, pembuatan tanggul, pemerintah daerah juga sudah menyiapkan dana pendampingan puluhan miliar, memang proyeknya juga mulai hulu ke hilir, semua itu termasuk pemindahan masyarakat” (wawancara dengan I.1-2) kemudian beliau juga menyatakan “Itu balai besar yang punya kewenangan, pemerintah daerah hanya menyiapkan dana pendampingan, karena pemerintah daerah harus menyiapkan itu, karena ketika pemerintah pusat menurunkan dana untuk sebuah kebijakan, aturanya daerah wajib menyiapkan dana pendampingan” (wawancara dengan I.1-2) dan selanjutnya dijelaskan kembali “Ya kita kan tugasnya koordinator kebencanaan, jadi tidak bekerja sendiri, tidak pernah mungkin se Kabupaten Serang sendiri, nah fungsinya itu koordinator lintas SKPD, lintas instansi, lintas kabupaten, kita komunikasikan, kira-kira arahnya mau kemana ini, oh larinya PU (pekerjaan umum) ya kita ke PU, oh kiranya ke dishub (dinas perhubungan) ya kita ke dishub” (wawancara dengan I.1-2)

Untuk itu diperlukan koordinasi yang baik antara Instansi/Lembaga terkait melihat luasnya penanganan penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Serang dengan demikian koordinasi menjadi hal yang penting untuk dillakukan, berikut pernyataannya:

“alhamdulillah tidak ada, karena kita kan belajar dari pengalaman kebencanaan yang sudah-sudah, komunikasi sudah baik, termasuk instansi vertikal ya korem, kodim semua dilakukan” (wawancara

dengan I.1-2) kemudian beliau juga menyatakan “saya pikir bicara pengembangan korelasinya masih ada” (wawancara dengan I.1-2)

- d. *using any other means appropriate to a particular situation*,
(menggunakan cara lain yang sesuai dengan situasi tertentu.)

Selain normalisasi sungai dan pembuatan tanggul, BPBD Kabupaten Serang bersama dengan Provinsi Banten juga akan membuat waduk baru yaitu Waduk Barian, sehingga nantinya debit air yang diterima oleh Kabupaten Serang tidak terpusat pada Waduk Pamarayan yang sudah ada, berikut pernyataannya:

“Proyek kita maupun provinsi, di daerah rangkas, itu akan dibuatkan Waduk Barian cuma ini berhenti kebijakannya, saya tidak tau, mungkin karena ada beberapa permasalahan, ketika waduk itu sudah *fix* dibuat inshaa allah itu untuk menampung debit air, sehingga pengaturannya bias diatur disamping ada Bendungan Pamarayan” (wawancara dengan I.1-2) beliau juga menjelaskan “Ya selama ini kan kita terpusat di Pamarayan (bendungan), jadi ketika di Pamarayan debit airnya sudah tidak tertampung dan alirannya tidak normal, kalau gak salah per sekian ribu itu kan mau gak mau harus dibuka, kalau gak dibuka ya jebol bendungannya, dan ketika dibuka itu debit air tinggi dan daerah aliran sungainya tidak normal, ditambah banyak rumah masyarakat yang rumahnya di daerah sepadan sungai, ya banjirlah jadinya, termasuk normalisasi pintu-pintu airnya” (wawancara dengan I.1-2) dan selanjutnya beliau juga menyatakan “2015 kita mulai dengan proses pembentukan tanggul, proyek nasional yang waduk itu, mungkin sudah jalan cuman berhenti karena masalah petinggi kita (kasus korupsi gubernur banten), seperti yang saya sampaikan di awal kan ada cabang-cabang anak sungai, seperti itu! kuncinya itu gak perlu pakai teknologi inshaa allah bebas banjir” (wawancara dengan I.1-2)

Dengan demikian BPBD Kabupaten Serang telah melakukan upaya pengembangan sebagai hasil dari evaluasi kejadian bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Serang.

4.4 Pembahasan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan lembaga yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan penanggulangan bencana di daerah dengan tujuan melindungi masyarakat dan asset-aset daerah terhadap resiko bencana yang muncul akibat kejadian bencana, dalam hal penanganan bencana banjir sebagai salah satu bencana yang sering terjadi di Kabupaten Serang, BPBD senantiasa melakukan tugasnya dengan loyalitas dan kepeduliannya terhadap para korban bencana dan melaksanakan penanggulangan bencana mulai dari pra bencana sampai pasca bencana kemudian dalam tugasnya menanggulangi bencana di daerah BPBD melakukan fungsinya sebagai koordinator penanggulangan bencana yang dibantu oleh berbagai lembaga/instansi/SKPD melihat bahwa upaya penanggulangan bencana tidak akan dapat dilaksanakan oleh satu lembaga saja dibutuhkan kesinerjian untuk sama-sama melakukan penanggulangan bencana melihat bahwa luasnya dampak dari sebuah kejadian bencana. Dengan demikian pelaksanaan penanggulangan bencana BPBD membutuhkan sistem manajemen yang baik sehingga mendapatkan hasil yang baik yaitu meminimalisir resiko/dampak bencana atau bahkan dapat mencegah kejadian bencana.

Dalam penelitian ini peneliti akan membahas tentang bagaimana Manajemen Penanggulangan Bencana yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Serang pada studi kasus kejadian bencana banjir yang merupakan serangkaian kegiatan yang dinamis yang berusaha berdasarkan pengamatan sistematis dan analisis bencana yang

bertujuan untuk mencegah, mengurangi, mempersiapkan, menanggapi dan memulihkan dari sebuah kejadian bencana.

Pada pembahasan ini peneliti membahas tentang fokus penelitian, dimana berdasarkan *Manajemen Disaster* yang di rumuskan oleh William Nick Carter disebutkan bahwa *Manajemen Disaster* memiliki *cycles* (siklus) yang menjabarkan proses manajemen penanggulangan bencana dalam beberapa variable yaitu pencegahan (*prevention*), mitigasi (*mitigation*), kesiapsiagaan (*preparedness*), menanggapi bencana (*disaster impact*), tindakan pertolongan (*respond*), pemulihan (*recovery*) dan pengembangan (*development*).

Pertama, *prevention* (pencegahan) dirancang untuk menghambat terjadinya bencana dan mencegah kejadian bencana yang memiliki efek merugikan pada masyarakat (korban bencana) dan instalasi yang dianggap penting.

Counstructing a dam or levee to control floodwater, dalam hal ini BPBD Kabupaten Serang bersama Pemerintah Daerah Provinsi Banten menyiapkan proyek Waduk Barian dengan pengharapan nantinya waduk tersebut dapat menampung debit air yang diterima oleh Kabupaten Serang karena selama ini debit air yang diterima oleh Kabupaten Serang pada saat musim penghujan tidak dapat di tampung sepenuhnya oleh Waduk Pamarayan dan sungai-sungai yang melintasi Kabupaten Serang seperti: Sungai Ciujung, Sungai Cidurian, Sungai Ciberang, Sungai Citanam, Sungai Cibanten, Sungai Cipasauran, Sungai Cipanas dan Sungai Anyar, sedangkan sungai-sungai tersebut mengalami pendangkalan yang disebabkan oleh sedimentasi

(pendangkalan sungai). Namun untuk pembuatan Waduk Barian belum dilakukan BPBD Kabupaten Serang hal tersebut terjadi karena adanya kasus korupsi yang dilakukan oleh Gubernur Provinsi Banten sebelumnya sehingga untuk sementara diberhentikan dahulu prosesnya.

Sehingga untuk saat ini BPBD hanya sedang dan akan melakukan proyek normalisasi Sungai Ciujung dan penguatan tanggulnya sebagai upaya untuk pencegahan bencana banjir, karena nantinya proyek ini akan dapat membantu BPBD dalam mengurangi dampak dari bencana banjir di Kabupaten Serang melihat bahwa Sungai Ciujung merupakan sungai utama yang ada di Kabupaten Serang.

Controlled floodwater, kemudian untuk pengontrolan air terhadap instalasi pengontrolan air yang sudah ada yaitu Waduk Pamarayan dilakukan BPBD sebagai upaya pengendalian air banjir untuk pengontrolan air sungai dari hulu sampai hilir dilakukan oleh masyarakat yang bermukim di daerah tersebut atas kesadarannya sendiri, dalam hal ini BPBD menghimpun informasi dari berbagai sumber dengan menyediakan PUSDALOPS (Pusat Data dan Informasi) BPBD Kabupaten Serang sebagai media dalam pelaporan kejadian bencana yang berpotensi akan terjadi atau sedang terjadi.

Kedua, *mitigation* (pengurangan) BPBD ditujukan untuk mengurangi efek bencana, mitigasi lebih umum dilakukan untuk mencegah beberapa efek bencana agar dapat diubah atau dikurangi dengan ketersediaan tindakan yang tepat, dengan demikian pada tahapan ini diperlukan aturan-aturan yang mengatur tentang pembangunan yang beresiko terjadi bencana.

Enforcement of building and land use regulations, dalam penanggulangan bencana khususnya bencana banjir diperlukan peraturan-peraturan yang mengatur tentang tata ruang dan penggunaan lahan agar pembangunan yang terjadi di daerah sejalan dengan upaya penanggulangan bencana, untuk saat ini BPBD belum melakukan tindakan tegas terhadap pemukiman penduduk yang berada di bantaran sungai dan bangunan pabrik yang memiliki potensi menyebabkan bencana banjir, padahal BPBD memiliki kewenangan untuk memindahkannya karena beresiko pada terjadinya bencana banjir.

Safety codes transport systems, kemudian untuk peraturan tentang transportasi sebagai sarana untuk mengatur sistem transportasi ketika terjadi bencana banjir BPBD belum melakukan hal tersebut, ketika banjir terjadi dan mengganggu transportasi khususnya pada transportasi darat BPBD melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian untuk mengatur lalu lintas darat yang terganggu dan berdampak luas akibat terjadinya bencana banjir.

Agricultural programs, kemudian untuk program pertanian yang bertujuan untuk mengurangi dampak banjir terhadap sektor pertanian BPBD juga belum melakukannya, karena belum ada program khusus pada sektor pertanian maupun pada pekerja pada sektor tersebut yaitu petani, subsidi pupuk dan bibit dilakukan sebagaimana mestinya ada atau pun tidak adanya bencana banjir, hanya saja pemberian bantuan disesuaikan waktunya oleh kelompok taninya masing-masing petani, sehingga setelah terjadi kejadian bencana banjir ada pupuk dan bibit yang dapat diberikan oleh kelompok tani tersebut.

Systems to protect key installation, sementara itu terkait sistem yang digunakan untuk melindungi instalasi penting seperti listrik, jaringan komunikasi, sarana dan prasarana pemerintahan daerah sebagai tempat pelayanan publik bagi masyarakat, BPBD juga belum melakukan program khusus untuk hal tersebut. *Routing of new highways*, pengembangan infrastruktur jalan yang terhindar dari kejadian bencana banjir BPBD juga belum mengupayakannya.

Ketiga, *Preparedness* (kesiapsiagaan) terdiri dari langkah-langkah yang memungkinkan pemerintah daerah, organisasi/instansi/lembaga/SKPD, masyarakat dan individu untuk merespon dengan cepat sebuah situasi bencana.

Maintaining valid and update counter disaster plans, dalam hal ini BPBD memiliki Bidang Kesiapsiagaan dan Laboratorium untuk melakukan kegiatan kesiapsiagaan dan telah memiliki pedoman penanggulangan bencana pada masa pra bencana dan pedoman tanggap darurat pada masa kejadian bencana dan tanggap darurat.

Sementara itu untuk pembentukan Desa Siaga Bencana sebagai upaya kesiapsiagaan masyarakat (calon korban bencana) BPBD belum melakukannya sendiri kepada desa-desa yang rawan terjadi bencana, desa siaga bencana yang sudah ada di beberapa desa merupakan bentukan BPBD Provinsi Banten sehingga kesiapsiagaan desa yang diwujudkan dalam bentuk Desa Siaga Bencana belum terjadi pada semua desa yang rawan terhadap kejadian bencana, karena selama ini respon warga terhadap bencana banjir

yang terjadi dilakukan atas dasar pengalaman bencana yang sudah terjadi terhadap nya tanpa dibekali dengan cara merespon kejadian bencana yang tepat dan benar yang seharusnya diberikan kepada masyarakat khususnya pada masyarakat calon korban bencana.

Special provisions for emergency action, kemudian untuk pedoman tanggap darurat sebagai acuan petugas pelaksana (BPBD, TAGANA, PMI, Dinas Kesehatan, KORAMIL dan KODIM) penanggulangan bencana dalam melakukan kegiatan tanggap darurat BPBD telah memiliki JUTLAK (Petunjuk Pelaksanaan) yang diwujudkan dalam pedoman penanggulangan bencana dan tanggap darurat, karena memang sudah seharusnya JUTLAK (petunjuk pelaksanaan) penanggulangan bencana itu ada, agar nantinya instansi/lembaga/SKPD lain yang terlibat dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Serang memiliki tugas dan fungsi yang jelas bagaimana seharusnya mereka dalam sebuah kelompok bersama-sama melakukan penanggulangan yang disesuaikan oleh keahlian masing-masing instansi/lembaga/SKPD tersebut. Melihat bahwa penanggulangan bencana tidak dapat dibebankan kepada satu lembaga saja yaitu BPBD karena luasnya upaya yang harus dilakukan dalam menghadapi sebuah kejadian bencana dan dampaknya.

Providing warning systems, merupakan serangkaian kegiatan peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada lokasi bencana yang dilakukan oleh BPBD, dalam hal ini BPBD untuk pendeteksian kejadian bencana banjir BPBD telah melakukan

piket 24 jam 7x seminggu pada masa rawan terjadi bencana banjir yang dimulai pada bulan November sampai Februari namun hanya berdasarkan laporan tidak pada kesiapsiagaan pendeteksian awal kejadian bencana banjir ke lokasi rawan kejadian banjir, sedangkan warga atas kesadaran dan pengalaman bencana banjir yang sudah-sudah juga melakukan pendeteksian awal kejadian banjir dengan melakukan pemantauan air ketika sungai yang berada dekat pemukiman mereka meluap. Nantinya tindakan yang dilakukan oleh BPBD setelah mendapatkan laporan kebencanaan yaitu BPBD mengirim Tim Reaksi Cepat yang bertugas mengumpulkan informasi terhadap bencana yang sudah dilaporkan tersebut.

Emergency communications, seringkali komunikasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bertugas pada lokasi kejadian bencana banjir mengalami kesulitan, sehingga dalam tugasnya petugas penanggulangan bencana BPBD selalu melengkapi dirinya dengan alat-alat komunikasi darurat seperti handy talky, HP satelit, HP GSM dan HP CDMA kemudian untuk melakukan komunikasi antar posko bencana ketika terjadi status tanggap darurat bencana banjir posko dilengkapi dengan alat komunikasi radio (radio HF/SSB, base station VHF/UHF FM dan radio handy talky).

Public education and awareness untuk sosialisasi dan pelatihan kebencanaan BPBD telah melakukannya terhadap aparatur desa dan organisasi kemasyarakatan dan organisasi sekolah, namun belum kepada masyarakat yang tinggal pada daerah rawan kejadian bencana sehingga *warning systems* yang dilakukan oleh warga masih pada pengharapan pada

baiknya tanggungjawab aparaturnya yang telah mendapatkan sosialisasi dan pelatihan kebencanaan.

Keempat *disaster impact* (dampak bencana) petugas penanggulangan banjir di Kabupaten Serang telah melakukan tugasnya dengan baik dengan loyalitas akan pekerjaannya yang besar dalam menolong para korban bencana, kemudian BPBD juga memiliki Tim Reaksi Cepat (TRC) untuk melakukan penanganan awal kejadian bencana, dalam pelaksanaan penanggulangan bencana BPBD Kabupaten Serang dibantu oleh TAGANA (dinas social), KOREM (Komando Resort Militer), KORAMIL (Komando Rayon Militer), POLRES (Kepolisian Resort) dan POLSEK (Kepolisian Sektor). Dalam pelaksanaan penanggulangan bencana BPBD Kabupaten Serang juga memiliki Tim Reaksi Cepat (TRC) yang berfungsi sebagai penanganan awal laporan kebencanaan dan berfungsi juga sebagai pengumpul informasi kebencanaan di lokasi kejadian bencana banjir yang dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan selanjutnya terhadap kejadian bencana.

Kelima *Respond* (tindakan pertolongan) diambil sesegera mungkin setelah terjadi bencana, tindakan tersebut terutama bertujuan untuk menyelamatkan nyawa dan melindungi properti dan berurusan dengan gangguan langsung (bencana susulan), kerusakan dan efek lain yang disebabkan oleh sebuah kejadian bencana banjir, karena tanggap darurat merupakan kegiatan yang dilakukan dengan segera saat kejadian bencana yang menyelimuti kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan

dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan sarana dan prasarana.

Implementing plant, pada kejadian bencana banjir BPBD mengklasifikasikan bencana banjir menjadi 2 yaitu: pertama adalah banjir kiriman yang memiliki waktu kejadian yang singkat dan tidak berdampak luas, kedua banjir musiman yang memiliki waktu kejadian yang lebih panjang dan berdampak luas, untuk menanggulangi hal tersebut BPBD memiliki pedoman penanggulangan bencana dan tanggap darurat sebagai acuan melakukan tindakan pertolongan pada saat bencana banjir terjadi, sehingga saat pelaksanaan penanggulangan bencana dapat berjalan dengan baik, dalam hal ini BPBD dibantu oleh berbagai pihak seperti: KOREM, KORAMIL, POLSEK, TAGANA, Dinas Kesehatan dan para relawan bencana dalam hal pemenuhan perlengkapan dan peralatan penanggulangan bencana dan korbanya seperti makanan, tenda posko dan pelayanan kesehatan.

Activating the counter disaster system, ketika dampak bencana semakin meluas dan ada peningkatan status bencana menjadi tanggap darurat yang didasari atas informasi-informasi yang diterima, maka BPBD akan membentuk Tim Koordinasi Tingkat Daerah (TKTD) atau Komando Tanggap Darurat Bencana Banjir sebagai tindakan yang lebih besar dan melibatkan lebih banyak instansi/lembaga/SKPD.

SAR (search and rescue) dalam hal ini dibutuhkan keahlian khusus untuk pencarian dan penyelamatan korban bencana banjir yang baik, dibutuhkan kecepatan waktu karena bencana sewaktu-waktu dapat berubah menjadi lebih buruk dan kecermatan menganalisis situasi dan kondisi bencana sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang menuntut untuk segera dilaksanakan pada lokasi kejadian bencana, saat penanganan awal kejadian bencana banjir BPBD mengirim tim TRC yang dalam penugasannya membawa peralatan-peralatan yang nantinya dapat digunakan pada saat evakuasi, proses evakuasi diawali dengan pencarian korban yang terjebak banjir disaat yang sama pula korban yang sudah mendapatkan keselamatan dimobilisasi ke tempat berkumpulnya warga yang dinilai aman dari kemungkinan terkena dampak bencana, untuk hal tersebut BPBD belum melakukannya dengan baik karena lambatnya proses evakuasi yang disebabkan oleh kurangnya peralatan dan sedikitnya petugas TRC yang dimobilisasi ke lokasi kejadian bencana banjir sehingga warga mengevakuasi dirinya sendiri.

Providing emergency food, shelter and medical assistance, posko bencana berfungsi sebagai tempat tinggal sementara untuk korban bencana dalam sebuah kejadian bencana banjir dengan rumah yang terendam otomatis warga kehilangan sementara aktifitas nya termasuk aktifitas ekonominya, sehingga BPBD berkewajiban menyediakan makanan bagi warga yang terdampak, korban bencana banjir juga akan rentan dengan berbagai macam penyakit yang disebabkan oleh cuaca yang tidak menentu dan kondisi posko yang

seadanya sehingga BPBD dalam hal ini harus menyediakan obat-obatan dan dokter yang siaga melayani dan menjaga kesehatan para korban bencana.

Surveying and assessing, dalam pelaksanaan penanggulangan bencana banjir survei dan penilaian bencana dilakukan oleh TRC di awal kejadian bencana dan pada saat penanganan bencana berlangsung dilakukan oleh petugas posko bencana, sebagai dasar dalam pengambilan keputusan tentang kebutuhan korban bencana dan penanganannya dilapangan.

Evacuating, untuk kejadian bencana banjir yang tidak berdampak luas BPBD melakukan evaluasi internal struktural dengan melibatkan petugas TRC yang menangani kejadian bencana dan pegawai BPBD dari berbagai bidang yaitu: bidang kesiapsiagaan dan laboratorium, bidang penanggulangan bencana dan damkar serta bidang sarana, prasarana, rehabilitasi dan rekontruksi, sedangkan untuk bencana yang berdampak luas dan berstatus tanggap darurat BPBD melakukan pengevaluasian kegiatan penanggulangan bencana bersama dengan instansi/lembaga/SKPD yang terlibat dalam TKTD (Tim Komando Tanggap Darurat) sebagai dasar dalam pengambilan tindakan dan keputusan yang lebih luas.

Keenam *Recovery* merupakan serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan yang terkena dampak bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana publik dengan melakukan tindakan rehabilitasi dan rekontruksi. BPBD melakukan dua tahapan yaitu rehabilitasi untuk memfungsikan kembali dan rekontruksi untuk membangun kembali

Restoring essential services, dalam hal ini fasilitas pendidikan merupakan prioritas pada masa rehabilitasi, pada fasilitas publik seperti jalan yang rusak atau bahkan terputus akibat bencana banjir tidak dilakukan pengembalian fungsi dan fisik pada masa rehabilitasi, namun akan disegerakan pada rekonstruksi disesuaikan dengan rencana pembangunan yang sudah direncanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang.

Repairable homes and providing temporary housing, perbaikan rumah yang rusak akibat banjir tidak dilakukan BPBD saat kejadian banjir masih dalam penanganan, sehingga untuk perbaikan rumah dan instalasi penting hanya dilakukan pendataan kerusakan dan kerugian yang kemudian akan dijadikan referensi dalam upaya rekonstruksi yang dilaksanakan jauh setelah kejadian bencana banjir. Kemudian untuk penyediaan tempat tinggal sementara bagi korban yang rumahnya mengalami kerusakan berat sehingga tidak dapat dihuni sampai rumah tersebut diperbaiki, BPBD juga tidak menyediakannya, karena selama ini ketika hal tersebut terjadi korban meminta bantuan kepada masyarakat untuk menampungnya atau dibantu oleh aparat desa untuk penanganannya.

Psychological rehabilitation, untuk rehabilitasi psikis korban bencana banjir BPBD bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Serang belum menyediakannya, sekalipun nantinya ada warga yang mengalami trauma terhadap kejadian banjir, karena korban bencana banjir di Kabupaten Serang yang sudah-sudah belum berakibat pada trauma berat yang membutuhkan penanganan lebih lanjut

Long-term measures of reconstruction, rekontruksi dilakukan dalam jangka panjang pada saat rekontruksi BPBD akan memberikan dana stimulan perbaikan rumah yang rusak akibat bencana banjir, BPBD juga telah melakukan ulasan terhadap kejadian bencana banjir dengan cara menghitung kerusakan dan kerugian yang kemudian digunakan untuk merencanakan program rehabilitasi dan rekontruksi melalui Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekontruksi (RENAKSI). Dalam melakukan penilaian kerusakan akibat bencana banjir BPBD dibantu oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk menentukan pengkategorian kerusakan yaitu: rusak ringan, rusak sedang dan rusak berat sedangkan untuk bangunan lain seperti kantor pemerintahan, jalan, jembatan, fasilitas pendidikan dan instalasi pelayanan masyarakat lainnya dikategorikan berbeda. Nantinya hasil kajian total kerugian dan kerusakan dilaporkan oleh Bupati Kabupaten Serang untuk diberikan tindakan lebih lanjut, dalam hal ini BPBD berfungsi sebagai koordinator pelaksanaan rekontruksi sehingga tidak memiliki tugas yang besar terhadap proses rehabilitasi dan rekontruksi. Setelah kajian dilakukan dan Surat Keputusan Bupati dikeluarkan, proses selanjutnya adalah memberikan secara langsung dana bantuan rekontruksi yang besarnya didasarkan atas SK Bupati, namun demikian tidak semua kerusakan dapat diberikan bantuan pada saat itu juga, karena harus disesuaikan dengan rencana pembangunan yang ada di Kabupaten Serang, dalam penggantian kerugian BPBD tidak membiayai semua kerusakan yang terjadi hanya diberikan sebagian sebagai

dana stimulan untuk membangun kembali rumah/bangunan yang rusak akibat kejadian bencana banjir.

Post disaster review, merupakan ulasan pasca bencana yang harus dilakukan sesegera mungkin, dalam hal ini BPBD setelah melakukan kajian pada masa pasca bencana berdasarkan pada kajian mengenai kerusakan dan kerugian serta SK Bupati yang sudah dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Serang, BPBD setelahnya merekomendasikan tindakan RENAKSI (Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekontruksi) untuk dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang yang beban pendanaannya dibebankan pada APBD sehingga dengan demikian jika anggaran tidak tersedia pada APBD murni tahun tersebut maka Pemerintah Daerah akan melakukannya di APBD perubahan, penyelenggaraan rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana di daerah memiliki beberapa tahapan pelaksanaan yaitu: perencanaan, pendanaan, kelembagaan pelaksana, pelaksana serta pemantauan dan evaluasi.

Ketujuh *Development*, merupakan hubungan antara kegiatan yang berhubungan dengan bencana dan pembangunan, dimasukkan dalam siklus bencana ini untuk memastikan bahwa hasil dari bencana secara efektif tercermin dalam kebijakan masa depan dalam kepentingan kemajuan penanggulangan bencana.

Introducing improved and modernized building system and programs, dalam hal ini BPBD telah memperkenalkan program normalisasi Sungai Ciujung dan pembuatan tanggulnya serta rencana pembuatan Waduk Barian

sebagai upaya untuk mencegah kejadian bencana banjir.

Using international disaster assistance, dengan demikian program-program tersebut diatas nantinya akan dapat membebaskan Kabupaten Serang dari bencana banjir yang pendanaannya dilakukan oleh berbagai pihak seperti Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Banten, Pemerintah Daerah Kabupaten Serang dan bantuan international *Asia Development Bank (ADB)*, melihat bahwa luasnya dampak dari sebuah bencana banjir menuntut untuk diikut-sertakannya pihak-pihak lain karena program-program tersebut membutuhkan pendanaan yang besar.

Applying disaster experience in future research and development programs, berdasarkan pengalaman banjir yang sudah-sudah dalam hal ini BPBD bersama dengan instansi/lembaga/SKPD yang berkewenangan dan berkewajiban melakukan rekontruksi yang dalam pelaksanaannya pemerintah daerah bersama BPBD melakukan program normalisasi Sungai Ciujung dari hulu sampai ke hilir serta pembuatan tanggulnya yang mau tidak mau suka atau tidak suka berdasarkan Surat Keputusan Bupati dan peraturan daerah tentang tata ruang dan penggunaan lahan mengharuskan pemerintah daerah melakukan pemindahan pemukiman penduduk dan pembongkaran bangunan yang beresiko bencana pada daerah-daerah bantaran sungai dan sepadan sungai yang masuk dalam wilayah proyek normalisasi sungai dan pembuatan tanggul di Kabupaten Serang.

Using any other means appropriate, selain normalisasi sungai dan pembuatan tanggulnya BPBD dalam hal ini menyiapkan program pembuatan

Waduk Barian sebagai tempat penampungan debit air yang berlebih yang selama ini menjadi penyebab terjadinya kejadian bencana banjir sehingga dengan demikian debit air yang diterima oleh Kabupaten Serang dan Provinsi Banten tidak terpusat pada Waduk Pamarayan yang sudah ada.

Tabel 4.3

Rekapitulasi Temuan Lapangan

Dimensi 1			Hasil
Pencegahan			Belum Baik
No.	Temuan Lapangan		Kategori
1.	Bendungan dan tanggul	a. Sudah tersedia Waduk Pamarayan, namun kapasitasnya masih belum cukup. b. Direncanakan akan ada proyek Waduk Barian sebagai tempat penampungan air. c. Kondisi drainase sungai banyak yang mengalami sedimentasi (pendangkalan). d. Terjadi longsor yang merusak sepadan sungai di Desa Koper Kec.Cikande.	Belum Baik
2.	Pengawasan	a. Dilakukan oleh PUSDALOPS BPBD Kabupaten Serang berkoordinasi dengan instansi/lembaga/SKPD yang berkewajiban. b. Pengawasan tidak dilakukan secara berkala pada waktu tertentu, tetapi dilakukan dengan menerima laporan dari pengelola Sumber Daya Air (PU) di Waduk Pamarayan.	Sudah Baik
Dimensi 2			Hasil
Pengurangan			Belum Baik
No.	Temuan Lapangan		Kategori
1.	Peraturan tata ruang dan penggunaan lahan	Belum dilakukan tindakan tegas pada bangunan yang beresiko menyebabkan banjir.	Belum Baik
2.	Sistem transportasi	a. Belum ada peraturan maupun SOP penanganan masalah transportasi yang disebabkan oleh kejadian bencana banjir. b. Pengembangan jalan alternatif yang dilakukan untuk menghindari dampak dari kejadian bencana banjir belum dilakukan.	Belum Baik

3.	Program pada sektor pertanian	Belum ada program khusus untuk mengurangi dampak kejadian bencana banjir terhadap lahan pertanian dan petaninya.	Belum Baik
4.	Perlindungan instalasi penting	a. Belum dilakukan tindakan perlindungan terhadap instalasi-instalasi penting seperti jaringan komunikasi dan listrik. b. Pengamanan aset dilakukan oleh masing-masing instansi yang berkewajiban, c. Belum ada kerjasama yang baik dalam perlindungan instalasi-instalasi penting daerah lainya.	Belum Baik
Dimensi 3			Hasil
Persiapan			Belum Baik
No.	Temuan Lapangan		Kategori
1.	Merumuskan dan mempertahankan rencana kejadian bencana	a. Bidang Kesiapsiagaan dan Laboratorium bertugas merumuskan dan mempertahankan rencana penanggulangan bencana. b. Belum dilakukan pembentukan desa siaga bencana sebagai bentuk kesiapsiagaan masyarakat khusus bagi para warga yang bermukim di daerah rawan kejadian bencana banjir.	Belum Baik
2.	Ketentuan khusus untuk tindakan darurat	Sudah ada pedoman penanggulangan bencana dan pedoman tanggap darurat.	Sudah Baik
3.	Sistem peringatan dini	a. Dilakukan piket kesiapsiagaan bencana banjir pada bulan oktober sampai februari selama 24jam 7x seminggu. b. Kesiapsiagaan warga didasari atas kesadaran sendiri untuk menyelamatkan dirinya dari kejadian bencana dilakukan dengan cara memantau ketinggian air di wilayahnya sendiri.	Belum Baik
4.	Komunikasi Darurat	Petugas TRC maupun posko bencana dilengkapi komunikasi khusus yang dapat berfungsi saat terjadi masalah komunikasi akibat kejadian bencana banjir.	Sudah Baik
5.	Pendidikan dan pelatihan	Sudah dilakukan kepada para aparat desa dan organisasi kemasyarakatan. a. Masyarakat yang bermukim pada daerah rawan bencana banjir belum mendapatkan sosialisasi dan pelatihan kebencanaan.	Belum Baik

Dimensi 4			Hasil
Kejadian Bencana			Sudah Baik
No.	Temuan Lapangan		Kategori
1.	Tindakan pertolongan	<p>a. Petugas penanggulangan bencana telah melakukan tugasnya dengan baik dan loyalitas akan pekerjaannya yang besar dalam menolong para korban bencana.</p> <p>b. Tim Reaksi Cepat BPBD Kabupaten Serang bertugas melakukan penanganan awal laporan kejadian bencana.</p>	Sudah Baik
Dimensi 5			Hasil
Respon			Sudah Baik
No.	Temuan Lapangan		Kategori
1.	Melaksanakan rencana	Bencana banjir yang berjangka pendek dan tidak berdampak luas dilakukan dengan pedoman penanggulangan bencana.	Sudah Baik
2.	Pengaktifan sistem	<p>a. Bencana banjir yang berjangka panjang dan berdampak luas dilakukan dengan pedoman tanggap darurat.</p> <p>b. Ketika status bencana dinyatakan sebagai tanggap darurat dibentuklah Tim Koordinasi Tingkat Daerah/ Komando Tanggap Darurat Bencana Banjir</p>	Sudah Baik
3.	<i>SAR (search and rescue)</i>	<p>a. Warga melakukan sendiri upaya penyelamatan diri dari kejadian bencana banjir.</p> <p>b. TRC datang kelokasi kejadian bencana atas dasar laporan.</p>	Belum Baik
4.	Makanan, Posko dan pelayanan kesehatan.	<p>Makanan: Kebutuhan akan sandang para korban bencana banjir sudah cukup dalam kondisi kedaruratan kejadian bencana banjir.</p> <p>Posko: Kondisi posko bencana sudah mampu menampung korban bencana banjir dengan fasilitas yang cukup dalam kondisi kejadian bencana.</p> <p>Pelayanan kesehatan: Petugas medis dan obat-obatan sudah cukup dalam melakukan pelayanan kesehatan untuk masyarakat korban bencana banjir.</p>	Sudah Baik

5.	Survey dan menilai	a. survey dan penilaian bencana dilakukan oleh Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Kabupaten Serang di awal kejadian bencana b. pada saat penanganan bencana berlangsung dilakukan oleh petugas posko bencana	Sudah Baik
Dimensi 6			Hasil
Pemulihan			Belum Baik
No.	Temuan Lapangan		Kategori
1.	Pemulihan layanan penting	a. jalan yang rusak akibat kejadian bencana banjir atau bahkan terputus, tidak dilakukan perbaikan dalam jangka pendek.. b. fasilitas pendidikan merupakan prioritas pada masa rehabilitasi.	Sudah Baik
2.	pemulihan rumah	a. Tidak dilakukan pengembalian fungsi bangunan rumah korban bencana banjir b. pelaksanaan rehabilitasi akan membutuhkan waktu yang tidak sedikit untuk mengembalikan fisik bangunan.	Belum baik
3.	menyediakan perumahan sementara	a. penyediaan rumah sementara untuk kejadian bencana banjir tidak dilakukan oleh BPBD Kabupaten Serang pada masa rehabilitasi. b. warga hanya menggunakan posko bencana saat bencana terjadi dalam waktu yang tidak ditentukan.	Belum Baik
4	rehabilitasi fisik dan psikologis korban	rehabilitasi psikis korban bencana banjir belum dilakukan oleh BPBD, sekalipun ada warga yang mengalami trauma terhadap bencana banjir.	Belum Baik
5.	langkah jangka panjang rekonstruksi	a. penilaian kerusakan akibat bencana banjir BPBD dibantu oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk menentukan pengkategorian kerusakan. b. ada 3 kategori yaitu: rusak ringan, rusak sedang dan rusak berat, sedangkan untuk bangunan lain seperti kantor pemerintahan, jembatan, fasilitas pendidikan dan instalasi pelayanan masyarakat lainnya dikategorikan berbeda. c. BPBD Kabupaten Serang berfungsi sebagai koordinator pelaksanaan rekontruksi sehingga tidak memiliki tanggungjawab yang besar terhadap proses rehabilitasi dan rekontruksi. d. dana bantuan rekontruksi yang besarnya didasarkan atas SK Bupati	Belum Baik

6.	Ulasan pasca bencana	<p>a. BPBD memiliki kewenangan untuk merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan tindakan pemindahan bagi bangunan-bangunan yang beresiko terhadap terjadinya bencana banjir.</p> <p>b. penormalisasian Sungai Ciujung dan pembuatan tanggul akan beresiko terhadap warga yang bermukim pada daerah rawan banjir, karena akan dilakukan pemindahan.</p> <p>c. Peraturan Kepala BNPB Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana, penyelenggaraan rehabilitasi dan rekontruksi di daerah memiliki beberapa tahapan pelaksanaan, diantaranya: perencanaan, pendanaan, kelembagaan pelaksana, pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi.</p>	Sudah Baik
Dimensi 7			Hasil
Pengembangan			Belum Baik
No.	Temuan Lapangan		Kategori
1.	memperkenalkan peningkatan sistem dan program	<p>a. BPBD sedang melaksanakan Program penormalisasian Sungai Ciujung dan pembuatan tanggul di Sungai Ciujung.</p> <p>b. Baru akan dilakukan BPBD Kabupaten Serang pada tahun 2015 bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang, Provinsi Banten dan Pemerintah Pusat</p>	Belum Baik
2.	menggunakan bantuan bencana internasional	<p>a. Direncanakan Pemerintah Pusat bersama Asia Development Bank berkerjasama dalam membantu pendanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Serang dan Provinsi Banten.</p> <p>b. Belum dapat direalisasikan akibat proses hukum yang terjadi pada Gubernur sebelumnya</p>	Belum Baik
3.	menerapkan pengalaman bencana	BPBD bersama dengan Instansi/Lembaga yang berkewenangan dan berkewajiban melakukan rekontruksi berdasarkan Surat Keputusan Bupati merekomendasikan normalisasi Sungai Ciujung dan pembuatan tanggulnya serta pembuatan Waduk Barian.	Sudah Baik
4.	menggunakan cara lain	<p>a. Selain normalisasi sungai dan pembuatan tanggul, BPBD Kabupaten Serang bersama dengan Provinsi Banten juga akan membuat waduk baru yaitu Waduk Barian.</p> <p>b. Belum dapat direalisasikan akibat proses hukum yang terjadi pada Gubernur sebelumnya.</p>	Belum Baik

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan perumusan masalah penelitian, maka peneliti melakukan penyimpulan terhadap hasil penelitian dan temuan di lapangan. Peneliti menyimpulkan bahwa Manajemen Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Serang pada studi kasus peristiwa bencana banjir masih belum berjalan dengan baik, karena pada dimensi pencegahan, pengurangan, kesiap-siagaan, pemulihan dan pengembangan manajemen BPBD masih ditemukan banyak kekurangan, sedangkan pada dimensi dampak bencana dan tindakan pertolongan manajemen BPBD sudah berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh: belum adanya proyek normalisasi sungai dari hulu sampai ke hilir serta penguatan tanggulnya dan belum adanya bendungan/waduk baru, BPBD juga belum melakukan tindakan tegas terhadap pemukiman penduduk dan bangunan yang beresiko bencana, untuk program pertanian yang bertujuan mengurangi dampak banjir serta sistem perlindungan instalasi penting seperti listrik, komunikasi dan asset daerah lainnya serta pengembangan infrastruktur jalan yang terhindar dari banjir BPBD juga belum mengupayakannya, kemudian untuk pembentukan Desa Siaga Bencana BPBD juga belum membentuknya, kemudian untuk sosialisasi dan pelatihan kebencanaan

BPBD telah melakukannya terhadap aparaturnya desa dan organisasi kemasyarakatan namun belum kepada masyarakat yang tinggal pada daerah rawan kejadian bencana, Terkait SAR (*search and rescue*) BPBD belum melakukannya dengan baik karena lambatnya proses evakuasi yang disebabkan oleh kurangnya peralatan dan sedikitnya petugas TRC yang dimobilisasi ke lokasi kejadian bencana banjir sehingga warga mengevakuasi dirinya sendiri, BPBD juga belum melakukan pengembalian fungsi layanan-layanan penting dengan baik, pengembalian fungsi bangunan dan instalasi penting.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian diatas maka peneliti memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan masukan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Serang khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Serang, yaitu:

1. Untuk dapat mencegah kejadian bencana banjir, BPBD Kabupaten Serang bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang segera mengupayakan normalisasi sungai-sungai yang melintasi Kabupaten Serang dari hulu sungai sampai ke hilir dan pembuatan bendungan/waduk baru (Waduk Barian).
2. Untuk mengoptimalkan fungsi sungai dan daerah resapan air BPBD perlu melakukan tindakan tegas pada pemukiman dan bangunan yang

beresiko bencana, melihat bahwa ada kepentingan yang lebih luas jika hal tersebut dilakukan.

3. BPBD Kabupaten Serang segera membentuk desa siaga bencana berserta dengan perlengkapan dan kesiapan aparatur desa bersama masyarakat desa dalam menghadapi bencana.
4. Untuk lebih meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat BPBD Kabupaten Serang harus lebih memperluas lagi kegiatan sosialisasi dan pelatihan kebencanaan terutama bagi warga desa yang masuk dalam area rawan banjir.
5. Sebagai upaya rehabilitasi BPBD perlu melakukan lebih banyak tindakan yang sifatnya meringankan beban korban bencana banjir seperti pemenuhan kebutuhan dasar dan hak-hak dasar masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yaitu sarana dan pra sarana jalan, pusat kegiatan ekonomi dan pendidikan.
6. Pengembalian fungsi wilayah secara fisik maupun kelembagaan perlu segera dilakukan setelah kejadian bencana, dalam hal ini BPBD perlu melakukan upaya yang lebih besar lagi dari yang sudah dilakukan melihat bahwa perkembangan daerah sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan akan dapat mengalami kemandekan bahkan dapat terjadi kemunduran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Alwasilah, A. Chaedar. 2006. *Pokoknya Kualitatif Dasar-Dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Denvin, Norman K. dan Yvonna S. Lincoln. 2009. *Handbook Of Qualitative Research*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Irawan, Prasetya. 2005. *Metodologi Penelitian Administrasi*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Silalahi, Ulber. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Revika Aditama.
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Subagyo, Joko. 2006. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka.
- Sugiyono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- _____.2007. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Usman, Husaini. 2009. *Manajemen Teori, Pratik, dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wibowo. 2011. *Manajemen Kinerja*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Manulang. 2006. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Terry, dan Leslie Rue. 2008. *Principles of Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Simanjuntak, Payaman. 2008. *Manajemen dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Pasolong, Harbani. 2011. *Teori Administrasi Publik*. Jakarta: Alfabeta.
- Handoyo, Tani. 2003. *Manajemen*.Yogyakarta: BPFE.

Hasibuan, Malayu. 2007. *Manajemen Dasar, Penelitian dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.

Carter, William; 2008. *Disaster management: a disaster manager's handbook*. Mandaluyong: *Asian Development Bank*

Kodoatie, Robert J dan Roestam Sjarief. 2006. *Pengelolaan Bencana Terpadu*. Jakarta: Yarsif Watampone.

Jurnal:

Djohanputro, Bramantio. 2006. *PMM Manajemen: One Stop Manajemen in Indonesia: Manajemen Disaster Review*. Juni, 2014

Dokumen :

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten.

Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2010 Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten.

Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Serang.

Perka BNPB Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana.

Perka BNPB Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pedoman Bantuan Peralatan.

Perka BNPB Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Protap Tim Reaksi Cepat BNPB

Perka BNPB Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana.

Perka BNPB Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencan.

Daftar Pertanyaan

Dimensi – Dimensi:

1. Prevention

1. Instalasi pengontrol air seperti bendungan, danau/ situ, saluran irigasi dan sungai adalah bagian penting dalam penanggulangan banjir, upaya apa yang dilakukan BPBD Kabupaten Serang untuk mengurangi resiko banjir terkait instalasi tersebut?
2. Pengawasan seperti apa yang dilakukan BPBD Kabupaten Serang terhadap instalasi-instalasi tersebut dalam kaitannya pengurangan resiko banjir?
3. Adakah peraturan perundangan-undangan atau kebijakan khusus untuk hal tersebut?

2. Mitigation

1. Bagaimana aturan penggunaan lahan yang berpotensi mengakibatkan banjir?
2. Bagaimana peraturan keselamatan bagi masyarakat Kabupaten Serang agar terhindar dari resiko banjir?
3. Bagaimana pengawasan dan penanganan BPBD Kabupaten Serang terhadap instalasi-instalasi yang dianggap penting dalam kaitannya penanggulangan bencana banjir?

4. Seperti apa jalur evakuasi yang disiapkan BPBD Kabupaten Serang untuk warga desa yang rumahnya terendam banjir terlalu lama?

3. Preparedness

1. Bagaimana cara BPBD Kabupaten Serang mempersiapkan diri terhadap bencana banjir yang sudah diprediksi akan terjadi.
2. Tindakan darurat apa yang dilakukan BPBD Kabupaten Serang pada saat bencana banjir akan datang?
3. Bagaimana BPBD kabupaten Serang memberikan peringatan dini kepada masyarakat terhadap bencana yang akan terjadi?
4. Upaya seperti apa yang dilakukan BPBD Kabupaten Serang dalam mempersiapkan masyarakat untuk menghadapi banjir?
5. Bagaimana pelatihan yang diberikan BPBD Kabupaten Serang kepada masyarakat?
6. Tindakan apa yang dilakukan BPBD Kabupaten Serang setelah memberikan peringatan bencana banjir?

4. Disaster Impact

1. Adakah kebijakan khusus yang dilakukan BPBD Kabupaten Serang untuk menangani peristiwa bencana banjir?
2. Jika ada seperti apa kebijakan tersebut?

5. Respond

1. Bagaimana penanganan BPBD Kabupaten Serang pada saat terjadi banjir?
Adakah SOP penanganan banjir dan korban nya?
2. Bagaimana pelaksanaan penanggulangan bencana banjir di lapangan?
3. Bagaimana BPBD Kabupaten Serang melakukan pencarian dan penyelamatan korban bencana banjir?
4. Mengenai posko bencana BPBD Kabupaten Serang, apa saja yang disiapkan dan disediakan posko bencana BPBD Kabupaten Serang?
5. Setelah menyelesaikan penanganan awal korban bencana banjir, adakah pengkajian lebih lanjut mengenai situasi dan kondisi bencana pada saat itu?
6. Evaluasi seperti apa yang dilakukan BPBD Kabupaten Serang di lokasi kejadian bencana banjir?

6. Revovery

1. Bagaimana proses pemulihan pelayanan publik seperti pasar, sekoah, kantor pemerintahan dan akses jalan yang terputus setelah terjadi banjir?
2. Korban bencana banjir yang mengalami kerusakan rumah, bagaimana BPBD Kabupaten Serang menanganinya?
3. Bagi korban bencana yang mengalami trauma setelah mengalami peristiwa bencana banjir, bagaimana BPBD Kabupaten Serang menanganinya?
4. Bagaimana Rekontruksi dan Rehabilitasi yang dilakukan BPBD Kabupaten Serang Setelah terjadi banjir?

7. Development

1. Teknologi bangunan seperti apa yang direkomendasikan BPBD Kabupaten Serang kepada masyarakat agar terhindar dari bencana banjir?
2. Upaya apa yang akan dilakukan BPBD Kabupaten Serang untuk memperkenalkan teknologi tersebut?
3. Berdasarkan pengalaman bencana yang sudah dilakukan bagaimana cara BPBD Kabupaten Serang kedepannya membebaskan banjir di Kabupaten Serang?
4. Adakah cara lain yang dilakukan selain yang telah dan akan dilakukan BPBD Kabupaten Serang?

DOKUMENTASI



Banjir Desa Kibin (Sungai Ciujung) 2013



Banjir Desa Kibin 2013



Banjir Desa Undar-Andir 2013



Bendungan Pamarayan Pada Level Awas



Banjir Desa Koper 2013



Banjir Desa Koper (Sungai Cidahu)



Kondisi Jalan TOLL Pada Banjir 2013



Pengungsi Desa Koper Pada Banjir 2013



Kondisi Pertanian Desa Undar-Andir Pada Banjir 2013



Kondisi Pengungsian Posko Darurat Warga Desa Koper



Struktur Desa Siaga Bencana Desa Undar Andir



Longsoran Tanggul Lama Desa Koper



Proyek Pembuatan Tanggul Baru Desa Koper



Wawancara Bapak H.Mamat dan Bapak Sadeli Desa Koper

TRANSKRIP DATA DAN KODING

T I	Pertanyaan dan Jawaban	Koding Jawaban
	Teknologi seperti apa yang direkomendasikan BPBD agar dapat terhindar dari bencana banjir?	
I.1-2	Sugai Ciujung kan sudah tidak bisa menampung debit airnya, artinya perlu ada sodetan Sungai Ciujung plus pembuatan tanggul gitu, termasuk juga revitalisasi pemukiman yang ada pada bantaran sungai, kuncinya berbicara teknologi bangunan, tidak ada teknologi khusus untuk terhindar dari banjir, yang ada pemetaan letak bangunannya, sebab letak bangunan jangan sampai ada di bantaran sungai maupun lokasi yang kondisional untuk jadi daerah aliran sungai, itu saja sebetulnya.	1
	Selain itu ada lagi pak?	
I.1-2	ya 2015 mungkin kita akan lakukan proses pembangunan tanggul dan itu akan dibebaskan 12 meter (dibantaran sungai) dari APBN, BPBD sendiri akan menyiapkan dana pendampingan ± 10% - 12% dan itu akan dilakukan di 2015, apa nih normalisasi plus pembangunan tanggul? ini untuk mengamankan daerah Sungai Ciujung yang selama ini menjadi penyebab banjir karena luas(dampaknya), tanggul ini kan fungsinya menahan, konsekuensinya pemerintah harus membebaskan sepadan sungai, kalau sepadan sungai ini kan yang akan dibuatkan tanggul, plus membebaskan beberapa meter lingkungan pemukiman penduduk karena akses pembangunan tanggul tadi, tujuannya supaya debit sungai itu alirannya lancar dan memang tidak masuk kewilayah pemukiman, 2015 kita mulai tanggulnya, jadi berbicara teknologi bangunan kalau memang berbicara banjir tidak ada teknologi khusus, yang jelas hindari bangunan berdiri pada area-area yang dilarang dan dianjurkan menghindar, contoh sepadan sungai, tanggul sungai dibangun bangunan permanen, padahal itu kan daerah sepadan, gak boleh!	2
	Teguran-teguran ke masyarakat sudah dilakukan pak?	
I.1-2	Oh sudah! itu kondisinya kalau daerah Ciujung (sungai) yang jadi primadona kita kewenangannya ada pada bali besar, kalau bicara teknologi	3

	sebenarnya itu saja ditempuh, tidak bicara teknologi, <i>savety</i> aman semua dari banjir.	
	Strategi untuk menghindari banyaknya masyarakat yang beraktivitas di bantaran sungai pak?	
I.1-2	Yang dimaksud banyak aktivitas masyarakat di sungai sebetulnya, kamu bias lihat kanan kiri itu kan bangunan semua, itu sebetulnya tanah sepadan dan itu tidak diperbolehkan, di Sungai Ciujung ya! yang saya maksud kegiatan di tahun 2015 termasuk <i>mapping</i> nya area itu, kita akan bersihkan plus nanti untuk pembebasan 12 meter kanan kiri nya (Sungai Ciujung), nanti kewenangan nya ada di balai besar, jadi ketika berbicara teknologi bangunan sebenarnya tidak ada yang spesialis kalau urusan banjir, tetapi kalau gempa kan berbeda struktur bangunan nya, segala macam! kalau banjir selama bangunan nya tidak berada di aliran sungai, saya kira aman dan aliran sekundernya harus lancar juga, karena selama ini kan yang menjadi penyebab banjir primadonanya kan Ciujung (sungai) sementara Ciujung punya beberapa anak sungai, ada Cisangu, ada Cigambon, segala macam, nah itu! perlu direvitalisasi lagi karena banyak pendangkalan.	4
	Untuk dihilirnya pak seperti apa?	
I.1-2	Proyek kita maupun provinsi, di daerah rangkas, itu akan dibuatkan Waduk Barian Cuma ini berhenti kebijakannya, saya tidak tau, mungkin karena ada beberapa permasalahan, ketika waduk itu sudah <i>fix</i> dibuat inshaa allah itu untuk menampung debit air, sehingga pengaturannya bias diatur disamping ada Bendungan Pamarayan.	5
	Jadi nanti air tampungan tidak terpusat di Pamarayan ya pak?	
I.1-2	Ya selama ini kan kita terpusat di Pamarayan (bendungan), jadi ketika di Pamarayan debit airnya sudah tidak tertampung dan alirannya tidak normal, kalau gak salah per sekian ribu itu kan mau gak mau harus dibuka, kalau gak dibuka ya jebol bendungannya, dan ketika dibuka itu debit air tinggi dan daerah aliran sungainya tidak normal, ditambah banyak rumah masyarakat yang rumahnya di daerah sepadan sungai, ya banjirlah jadinya, termasuk normalisasi pintu-pintu airnya, seperti yang saya sampaikan di awal kan ada cabang-cabang anak sungai, seperti itu! kuncinya itu gak perlu pakai	6

	teknologi inshaa allah bebas banjir.	
	Jadi nantinya normalisasi sungai itu akan melancarkan aliran airnya ya pak?	
I.1-2	Ya seperti yang saya sudah sampaikan yang pertama jangan sampai ada bangunan disepanjang aliran sungai yang kedua mau tidak mau suka atau tidak suka harus ada proses normalisasi aliran, mau bentuk sodetan, maupun pengangkatan endapan, sedimennya diangkat dan mau tidak mau harus ada normalisasi di saluran sekundernya juga, pintu-pintu saluran yang mengairi anak-anak Sungai Cijung, kaya Cisangu (sungai), Cigambon (sungai), segala macam, kuncinya itu (normalisasi), 2015 kita mulai dengan proses pembentukan tanggul, proyek nasional yang waduk itu, mungkin sudah jalan cuman berhenti karena masalah petinggi kita (kasus korupsi gubernur banten)	7
	Upaya apa yang dilakukan BPBD untuk memperkenalkan teknologi tersebut pak?	
I.1-2	Ketika bicara upaya apa, sosialisasi sudah jelas, tidak diperbolehkan mendirikan bangunan dibantaran sungai, yang kedua masyarakat harus memiliki rasa memiliki terhadap pintu-pintu aliran air, karena selama ini kita dapatkan, termasuk laporan dari teman-teman pengelola, ada pintu air yang putarannya itu ada yang nyuri, itu kan tembaga, ada yang di maling! mereka tidak sadar ketika itu dilakukan, musim hujan, imbasnya kemana-mana gitu, jadi <i>sence of belonging</i> masyarakat juga penting, jadi upaya itu sebenarnya, sosialisasi sudah, menginformasikan sudah, ketika berbicara upaya seperti yang saya sampaikan di <i>point</i> awal.	8
	Berdasarkan pengalaman bencana banjir yang sudah terjadi. Bagaimana BPBD kedepannya membebaskan Kabupaten Serang dari bencana banjir?	
I.1-2	Ya itu, pembuatan tanggul, pemerintah daerah juga sudah menyiapkan dana pendampingan puluhan miliar, memang proyeknya juga mulai hulu ke hilir, semua itu termasuk pemindahan masyarakat.	9
	Teknisnya nanti seperti apa pak?	
I.1-2	Itu balai besar yang punya kewenangan, pemerintah daerah hanya menyiapkan dana pendampingan, karena pemerintah daerah harus menyiapkan itu, karena ketika pemerintah pusat menurunkan dana untuk sebuah kebijakan, aturanya daerah wajib	10

	menyiapkan dana pendampingan.	
	Tugas BPBD sendiri nantinya hanya melakukan pengawasan pak?	
I.1-2	Ya kita kan tugasnya koordinator kebencanaan, jadi tidak bekerja sendiri, tidak pernah mungkin se Kabupaten Serang sendiri, nah fungsinya itu koordinator lintas SKPD, lintas instansi, lintas kabupaten, kita komunikasikan, kira-kira arahnya mau kemana ini, oh larinya PU (pekerjaan umum) ya kita ke PU, oh kiranya ke dishub (dinas perhubungan) ya kita ke dishub.	11
	Selama ini ada kesulitan pak dalam koordinasi?	
I.1-2	alhamdulillah tidak ada, karena kita kan belajar dari pengalaman kebencanaan yang sudah-sudah, komunikasi sudah baik, termasuk instansi vertikal ya korem, kodim semua dilakukan, inshaa allah, kalau tidak minggu ini atau minggu depan kita mau apel kesiapsiagaan bencana di alun-alun barat, semua personil, semua instansi.	12
4.	Adakah cara lainnya selain yang sudah dilakukan agar Kabupaten Serang terhindar dari bencana banjir?	
I.1-2	saya pikir bicara pengembangan korelasinya masih ada.	13
5	Terkait instalasi pengontrol air seperti pintu air, bendungan, waduk/situ, saluran irigasi dan sungai, upaya yang dilakukan BPBD untuk mengurangi resiko banjir terkait instalansi tersebut?	
I.1-2	Ketika bicara kontrol air kita koordinasi sama teman-teman PU, teman-teman balai besar,, bagaimana normalisasi pintu pengontrol air, bagaimana kondisi komunikasi pada saat fasenya siaga, fasenya awas, itu kana da fase levelnya kan, bagaimana titik air pada level waspada atau siaga dan tingkatan yang paling tinggi itu awas, kalau sudah awas itu bendungan pamarayan sudah harus dibuka, kalau dipertahankan konsekuensinya ya jebol, makanya bendungan harus dibuka.	14
	Pada saat level awas semua petugas siaga pak?	
I.1-2	Ya itu kan nanti yang sudah saya sampaikan ada renkol, renkol ini di BPBD Kabupaten sendiri ada PUSDALOPS sampai jam8 malam, renkol itu ada informasi kebencanaan, semua di absen lewat pesawat, kalau rasionalnya ada dari pagi sampai sore, rutin itu, jadi informasi sekecil apapun dari instansi	15

	terkait ter <i>cover</i> itu semua, kelihatan, misalkan dari BPBD provinsi ada laporan ke BPBD Kabupaten, termasuk dari TAGANA lah apa, semua diambil oleh PUSDALOPS Banten nanti di <i>cover</i> nih semua sama BPBD Kabupaten.	
	Pengawasannya nanti seperti apa?	
I.1-2	Pengawasan seperti bendungan segala macam saya piker ada di teman-teman PU pengairan, kita koordinasikan yang jelas kalau bicara soal pengawasan bendungan segala macam, semua ada TUPOKSI (tugas pokok dan fungsi) masing-masing, kita selalu koordinasi dengan lembaga maupun dinas instansi yang punya kewenangan.	16
	Peraturan Perundang-undangan nya ada pak?	
I.1-2	Kalau kaitan peraturan perundang-undangan segala macam itu kana da di PU ya, tapi kalau di kita nanti mau disosialisasikan, produk yang terbaru di kita itu Perda Nomor 44 Tentang Penanggulangan Bencana, di produk itu memuat ketentuan, termasuk DSP namanya yaitu Dana Siap Pakai, dari APBD Kabupaten untuk dipakai penanggulangan bencana.	17
	Berbeda sama dana darurat pak?	
I.1-2	Jadi gini, sumber pendanaan bencana ini kan ada pengecualian, ketika terjadi bencana tanggap darurat, silahkan dipergunakan dahulu, karena bencana ini kan gak nunggu ada kajian nya dulu ya, masa nanti orang mau makan, pengungsi kita tegur, oh nanti dulu, gak bias! jadi pendanaan itu ada dari pusat renkol namanya, ada dana darurat, kalau dari kita nanti inshaa allah tahun 2015 ada dana siap pakai tadi, intinya nanti bias dipakai untuk dana kedaruratan, baik untuk personil, maupun masyarakat para korban, dapur umum segala macam dari situ, ini baru sekarang, karena sesungguhnya penanganan bencana itu bukan hanya tanggungjawab pusat tapi juga tanggungjawab daerah, kalau di Banten cuma Kabupaten Serang yang sudah ready, ada dana DSP(dana siap pakai), dana DSP ini penggunaannya tidak mudah, khusus pemberian bantuan-bantuan yang sifatnya kebencanaan, tapi alokasinya khusus bantuan korban, mulai dari rumah ambruk dan itu pun mekanismenya harus melalui tim lintas, jadi bukan cuma BPBD yang nentuin, oh kamu dapet nih, itu enggak, termasuk dari PU semua ada disitu, misalnya longsor, rumah rusak, pemberian itu disesuaikan dengan surat keputusan bupati tadi	18

	<p>besarannya, tapi nanti dari PU dihitung berapa kebutuhan, berapa rusaknya, berapa kerugiannya dan itu pun tidak mudah, sampai kapan? Itu tidak mudah, kadang-kadang kan masyarakat gak sabar, masyarakat udah sekian hari (menunggu), kalau metafisik ya, kalau yang berkaitan dengan fisik ya yang tadi dikatakan itu, misalkan sembako, entah apa lah, dapur umum bisa dipakai dari DSP, renkol tadi, mekanismenya agak lama karena butuh jadwal, butuh survey, karena dana penanggulangan bencana ini kan dana pusat juga, dan penggunaannya sensitif, tidak boleh digunakan untuk item lain selain kebencanaan.</p>	
	Itu sifatnya stimulan pak?	
I.1-2	<p>ada di SK(surat keputusan) bupatinya, biasanya kalau sudah di survey dan diberikan dana gitu ya, misalkan rumah rusak berat klasifikasinya cuma dapet sekian juta, ya kita kasih bantuan itu, tapi untuk proses pengecekan surveynya, sidak, berbeda tidak, apakah rusak karena bencana, kan perlu itu! ada berita acaranya, gak boleh salah karena 1 sen pun harus dipertanggungjawabkan.</p>	19
18	Adakah kebijakan khusus terkait penanganan bencana banjir pak?	
I.1-2	<p>Jadi gini banjir ini kana da klasifikasinya yang pertama ada bencana banjir yang tidak masuk tanggap darurat, contoh yang gak masuk tanggap darurat banjir yang sifatnya tidak permanen, tempolery, 1 jam banjir, iya banjir tapi kiriman gito loh, sejam kemudian surut, nah BPBD punya kewajiban tetap menangani itu tapi perlakuannya tidak seperti banjir yang tanggap darurat, bantuan kita kasih, kita cek kelapangan, tapi ketika bicara yang sifatnya permanen ya, model di Kragilan (kecamatan) ya, itu di klasifikasikan banjir yang masuk kategori tanggap darurat, ketika itu terjadi kami mempunyai kewajiban lapor ke bupati untuk menentukan situasi tanggap darurat namanya, ketika tanggap darurat sudah oke, <i>prove</i>, bupati mengeluarkan surat keputusan, bahwa tanggal sekian sampai dengan selesai masuk masa tanggap darurat banjir, misalkan, nah disitu bupati nanti, kewajiban BPBD sebagai koordinator kebencanaan, membentuk namanya TKTD (Tim Komando Tanggap Darurat) bupati nanti menunjuk, entah kapolres, entah pak kodim, entah kepala BPBD untuk komandan tanggap</p>	20

	daruratnya disesuaikan dengan Perka (Peraturan Kepala), TKTD ada strukturnya, kepala-kepala bidangnya nah ini bicara khusus termasuk penggunaan dana darurat yang sidatnya model DSP, usulkan ke pusat nanti kita sampaikan ke pusat dan pusat kan renkol, nah kebijakan khusus itu dalam bentuk pembentukan komando tanggap darurat tadi, disitu nanti SKPD sesuai dengan rencana konjijensi dan SOP banjir, tidak perlu bertanya lagi tugasnya apa, karena sudah terploting gitu, sehingga memudahkan, oh tugas dirjen anda siapkan posko medis, dinsos bentuk dapur umum, oh tugas kami SAR dengan TRC, dengan tagana evakuasi korban misalkan ya, itu sudah langsung berjalan, jadi gak perlu orang bingung lagi tugas saya apa, akhirnya kan tidak terkoordinasi dengan baik penanganannya.	
	Sebelum-sebelumnya pernah kejadian tidak terkoordinasi dengan baik pak?	
I.1-2	Inshaa allah selama ini sudah berjalan, dari pengalaman yang sudah, ya kita tidak berharap banjir, tapi kan Kabupaten Serang langganannya kan banjir.	21
19	Seperti apa kebijakan tersebut pak?	
I.1-2	pembentukan posko, penggunaan dana siap pakai, penggunaan dana renkol bantuan, termasuk kebijakan-kebijakan lain yang jelas kebencanaan itu harus cepat, tanggap dan menganut prinsip kemanusiaan gitu	22
20	Bagaimana penanganan BPBD pada saat terjadi banjir, adakah SOP penanganan banjir dan korbannya pak?	
I.1-2	penanganannya klasifikasinya ya dilihat dulu kalau memang masuk klasifikasi tanggap darurat, bentuk komando segala macam, untuk penanganan SOPnya, kaitan dengan SOP penanganan banjir itu ada di pak adhaq (kabid kesiapsiagaan dan laboratorium) yang punya kewenangan, kalau yang kita tau sedang disusun.	23
	Itu bentuknya pedoman pak?	
I.1-2	Oiya renkol itu bentuk pedoman rencana kontijensi, untuk mitigasi penanganan banjir, apa yang menjadi SIADIBIBA, siapa yang bertindak, apa yang harus dilakukan, dimana kejadiannya, bagaimana kondisi yang ideal untuk dilakukan, kalau penanganan banjir dan korbannya SOP di kami sudah jelas, ada Kasubid Evakuasi dan Tanggap Darurat, ketika terjadi banjir	24

	ada korban terkapar yang jelas SOP nya kita evakuasi dan kita ungsikan, dimana diungsikannya? Ditempat evakuasi, dimana itu? ditempat yang oleh bidang pak adhaq sudah ditunjuk titik-titiknya apa yang mau dipersiapkan, tenda pengungsinya, dapur umumnya, pakaian layak pakainya, kan gitu kan, terus obat-obatan medisnya, itu sudah baku tinggal pak adhaq yang mengeluarkan produk, kita yang melakukan.	
	Untuk banjir kirimannya seperti apa pak?	
I.1-2	Ya kalau banjir kiriman setiap bencana masuk laporan, kita survey hari itu juga, TRC dengan bidang penanggulangan personil semua, biasanya kita bawa peralatan, evakuasi perahu karet ya seperti itu lah, kalau memang debit airnya terlalu tinggi ya berarti evakuasi ke tempat terdekat, sambil nunggu surat pimpinan, minta dikirim bantuan, dikirim bantuan, didistribusikan selesai, sambil kita lihat, penyebab banjir kirimannya apa, tergantung, dataran tinggi juga bisa banjir kok, kenapa dia banjir, ya pertanyaannya jangan kesiapa-siapa, jadi kalau orang bilang alam sudah tidak rama ke alam, kan itu area resapan dijadikan pemukiman ya banjir, padahal itu kan dataran tinggi, tidak semestinya kena banjir, Padarincang kok banjir ya, banjir jelas, sudah itu daerah resapan air diuruk dibikin rumah, ya kebanjiran rumahnya, jadi kembali lagi bukan alam yang tidak ramah, tapi kitanya yang sudah tidak ramah ke alam, jadi saya piker sama lah mau banjir yang permanen mau yang non permanen, perlakuanya sama hanya tanggap darurat aja yang berbeda.	25
21	Bagaimana pelaksanaannya dilapangan pak?	
I.1-2	Ya nanti pak adhaq yang punya.	26
22	Bagaimana BPBD melakukan pencarian dan penyelamatan korban?	
I.1-2	Evakuasi kita laksanakan ketika kita sampai ke masyarakat untuk menuju tempat evakuasi sementara dahulu, tempat evakuasi sementara ini, tempat-tempat yang ditunjuk dari sisi ketinggian dari sisi savety dan punya kemungkinan untuk tempat berkumpul warga sampai ketempat evakuasi akhir, ya seperti yang tadi saya sampaikan, berapa titik yang ditentukan, tendanya berapa unit yang sudah disiapkan dari proses itu tim kita bergerak melakukan proses mobilisasi di giring dari tempat	27

	<p>evakuasi sementara ke tempat evakuasi akhir ini kaitan evakuasi, kaitan tanggap daruratnya pembentukan posko tadi, jadi sebetulnya masih standar lah kalau untuk bencana banjir, tidak ada yang special masih begitu-begitu juga, yang jelas resiko korban terminimalisirkan, termasuk kondisi yang paling penting adalah urusan nyawa dulu barang-barang tidak kita prioritaskan, yang kita prioritaskan jiwa masyarakat dulu, orang kadang-kadang nanti aja pak, barang-barang saya belum di angkut, tinggalin aja dulu pak barang rusak ada uang bisa dibeli ditoko, nyawa ilang gak ada ditoko kan, itu terjadi ketika banjir 2012 dulu di Ciomas, pak udah biasa begitu banjir sampai ketinggian baru teriak-teriak, pak tolong-tolong pak angkut, padahal tadi kan udah mau diangkut, mereka gak nyangka kalau banjir itu bisa lebih tinggi dari kejadian sebelumnya.</p>	
23	<p>Terkait posko bencana BPBD pak, apa saja yang disiapkan dan disediakan posko bencana BPBD?</p>	
I.1-2	<p>Posko itu yang jelas ketika terjadi tanggap darurat, semua perlengkapan komunikasi dan perlengkapan komando itu harus ada, termasuk personil yang paling penting, ketika bicara posko pengungsi semua sudah harus siap tenda pengungsinya, tenda regunya, tenda familynya semua sudah harus berdiri termasuk Dana Siap Pakai (DSP) nah ini yang berkaitan dengan posko, alat penunjang perincian posko ini kan banyak, ketika berbicara posko harus ada tenda poskonya, ketika berbicara tenda posko harus ada alat komunikasinya, ketika alat komunikasinya ada harus ada personil yang mengoperasikannya, termasuk sarana dan prasarana kelengkapan, seperti itu.</p>	28
24	<p>Setelah melakukan penanganan awal bencana banjir, adakah pengkajian lebih lanjut mengenai situasi dan kondisi pada saat itu?</p>	
I.1-2	<p>Ada namanya rapat evaluasi kebencanaan, apa nih kira-kira dari pengalaman bencana yang sudah-sudah, untuk meminimalisir kerugian meminimalisir kejadian ditahun berikutnya, ada, ada dibidang 3 untuk mengevaluasi kebencanaan, pembuatan tanggul-tanggul itu dari hasil evaluasi, oh ternyata Ciujung ini akan bisa terminimalisir bencana banjir ketika tanggulnya sudah diperbaiki, sodetanya sudah dilakukan, sedimentasinya sudah dilakukan proses</p>	29

	pengerukan, seperti itu.	
25	Evaluasi seperti apa yang dilakukan BPBD di lokasi kejadian bencana?	
I.1-2	Evaluasi itu tidak dilakukan di lokasi bencana banjir, karena hakekatnya ketika kita berbicara monev, monitoring evaluasi, ketika bencana sudah tertangani biasanya, apa nih? seperti yang tadi saya sudah sampaikan di awal tadi dan itu dalam forum rapat biasanya, semua instansi yang terkait kita kumpulkan sharing disitu, kekurnagan yang kemarin tuh apa, bicara yang kaitanya komando tanggap darurat, apa nih yang kurang, oh pak komunikasinya sulit, mau komunikasi aja tidak ada alat komunikasi, mau peragu karet tidak ada, tenda ternyata tidak sesuai dengan jumlah pengungsi, sehingga kedepan, saya tidak berharap bencana sekali lagi, tetapi ketika itu terjadi kita sudah prephare gitu.	30
	Kalau bencananya terlalu luas pak, kemudian jumlah personilnya tidak cukup, untuk meng cover itu seperti apa pak?	
I.1-2	Saya yakin kalau persosnil bukan tanggungjawab BPBD aja, tanggungjawab semua pihak, kenapa di BPBD lambangnya begini (menunjuk logo BPBD) ini artinya ada maksud, kenapa segitiga begini, ini mewakili 3 unsur komponen pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, jadi tidak perlu ada kekhawatiran kekurangan personil, kalau pun pemerintah nanti kekurangan personil kita masih punya lini relawan dari masyarakat, ada TAGANA, ada BALAKA, ada PMI, ada PRAMUKA, inshaa allah kalau personil mah semua siap, bagaimana meraka berperan, sesuai dengan rujukan komando tanggap darurat tadi.	31
	Relawan berbasis masyarakat kan perlu ada pelatihannya pak, seperti apa itu pak?	
I.1-2	sudah, sudah berjalan, TAGANA dinsos sudah berjalan, BALAKA sudah berjalan, PRAMUKA apalagi.	32
	Siswa sekolah dilatih juga pak?	
I.1-2	Kan PRAMUKA melibatkan siswa-siswa sekolah biasanya, ada PMI sudah berjalan, jadi relawan-relawan di kita ini sudah siap pakai lah semuanya, jadi gak perlu ada kekhawatiran kekurangan personil, justru kadang-kadang ribet kekurangan personil haa haa haa (tertawa riang) tapi itu lah kebencanaan ya, sesuai dengan lambing segitiga tadi, sekali lagi bencana ini kan bukan hanya tanggungjawab	33

	<p>pemerintah tapi juga tanggungjawab semua pihak, kenapa ada bencana pasti ada sebabnya, kalau pun toh terjadi bencana kita punya penanganan, pra, ketika dan sesudah seperti itu, jadi inshaa allah, saya tidak berharap banjir, tapi kalau memang terjadi untung tidak bisa didapat petaka tidak bisa ditolak, tapi minimal kita sudah menyiapkan, makanya sekarang kan BPBD ada piket kesiapsiagaan, ada piket DAMKAR itu setiap hari setiap malem sampai desember bahkan february 24jam akses informasi kita selalu terima dan sekecil apa pun informasi masuk cuma kadang-kadang kan masyarakat latah, latahanya apa, kaya model kemarin pak lapor ada yang kena bencana, ada masyarakat kesetrum gara-gara benerin antena, kita bukanya tidak mau terima cuma temen-temen kadang tidak bisa membedakan mana yang kategori bencana mana yang bukan, kalau ada orang benerin antena, kesetrum trus meninggal bukan bencana itu mah, kelalaian namanya, kalau bencana kana da indikatornya 14 titik tadi cuma kadang-kadang bencana atau bukan lapor aja, orang kesetrum lapor, mobil terperosok lapor, lapor ke kita, bukan bencana itu, yang masuk klasifikasi bencana itu kana da 14 tadi indikator.</p>	
26	<p>Bagaimana proses pemulihan pelayanan publik seperti pasar, sekolah, kantor pemerintahan dan akses jalan yang terputus akibat banjir pak?</p>	
1.1-3	<p>Bencana banjir untuk reahnya ya itu kepada masalah bangunan, kalau manusianya ya itu dipulihkan nanti setelah selesai bencana, seperti banjir kalau ada yang roboh difungsikan kembali, kalau rebah itu kan bagaimana memfungsikan kembali seadanya, nanti setelah rehab diusahakan untuk direkonstruksi, kalau direkonstruksi itu diusahakan untuk dibangun kembali, rehabilitasi itu bagaimana difungsikan dahulu jadi belum dikatakan permanen atau bagus gitu, jadi setelah itu direncanakan untuk direkonstruksi untuk dibangun kembali.</p>	34
27	<p>Bagi korban bencana banjir yang mengalami kerusakan rumah bagaimana BPBD menanganinya pak?</p>	
1.1-3	<p>ya setelah banjir, setelah banjir terjadi bencana kita kumpulkan instansi-instansi terkait termasuk PU, tata ruang, dinas social, jadi setelah kita turun nanti dikaji dilihat dihitung, PU nanti diturunkan dari tata ruang,</p>	35

	<p>kalau nanti tidak memungkinkan untuk tidak bisa ditempati lagi pemerintah punya dana untuk melakukan pemindahan kita berhak melakukan pemindahan, lembaga BPBD ini hanya sebagai koordinatornya saja, ya itu dinas kesehatan, tenaga kerja, tadi seperti ambil data, ada PU, ada tata ruang, artinya sesuai dengan fungsi dari BPBD sendiri sebagai koordinator tentang kebencanaan dan pembuat kebijakan, jadi pada waktu ini dinas terkait yang melaksanakan jika perlu dipindahkan nanti dinas tata ruang yang melakukan pemindahan, menyusun biaya nanti hasilnya dari yang tadi (pendataan) dilaporkan kepada bupati, pak bupati ini perlu dipindahkan, disposisinya nanti diberikan kepada dinas tata ruang, kalau tadi bukan dipindahkan hanya perlu diperbaiki, karena banjir nanti surut, disposisinya ada di PU di situ ada bagian tata ruang atau sumber daya air, sesuai kewenangan masing-masing kita tuh hanya mengkoordinir kepada dinas terkait untuk melakukan perbaikan</p>	
	Jadi tergantung instansi masing-masing ya pak?	
1.1-3	Ya kita mengkoordinir tuh hanya mengkoordinir, kemudian kita lapor ke pak bupati nanti sama pak bupati langsung mengintruksikan kepada yang wewenangnya tergantung tupoksinya	36
	Ada skala prioritasnya pak terhadap fasilitas publik tadi?	
1.1-3	Pasti skala prioritas dan kesediaan dana, misalkan dananya ada ketersediaan maka nanti kita membangunnya ada skala prioritasnya.	37
28	Rehabilitasi untuk korban bencana banjirnya pak, seperti apa?	
1.1-3	ya kalau korban bencana ya selama ini hanaya melakukan..., belum sampai seperti pada kejadian di tsunami, kalau di tsunami kana da tuh apa ya..., ada bagaimana meemulihkan mental masyarakat setelah terjadi bencana, kalau untuk kejadian banjir ya gak ada di pelaksanaan juga, ya mitigasi bagaimana itu... ya pencegahan, mitigasi bagaimana menghadapi banjir, bagaimana menghadapi tsunami, ya itu artinya mengenalkan bencana dan untuk mengurangi resiko bencana itu sendiri, saya kira itu kalau di rehab rekon, jadi intinya rehab itu melakukan perbaikan dan pemulihan pelayanan publik, sampai kepada tingkat sebagaimana fungsinya, bagaimana menormalisasi berjalannya kegiatan masyarakat,	38

	rekontruksi itu pembangunan kembali kelembagaan dan pelayanan masyarakat, ya tergantung pada ininya, kalau misalkan dibencana banjir ya mungkin itu ada langganan trus ya itu kan kajian dari dinas tata ruang, berarti kalau setiap tahun jadi langganan (banjir) gak mau dipindahkan walaupun di upayakan dari pemerintah, gimana kalau di alihkan, tapi tetep masyarakat gak mau dipindahkan, ya karena alasan masyarakat gak mau dipindahkan karena dia kerjanya dekat sekitar situ kalau dia pindah lagi jauh dimana, masyarakat kalau menempati itu susah kali untuk meninggalkan tempat.	
	Walaupun itu punya resiko yang besar ya pak?	
1.1-3	ya padahal... contoh saja di daerah... itu setiap tahun kena puting beliung cuma kenapa mereka itu tetap, misalkan kalau pindah agak kemana gitu cuma gak mau kan gitu, udah biasa dekat kegiatan dan aktifitasnya disitu, jadi tetap itu disitu, jadi pemerintah juga sekarang juga tidak tersedia anggaran juga.	39
	Ada masyarakat yang minta diganti peralatan rumahnya yang rusak akibat banjir pak?	
1.1-3	Kalau ini kayanya belum ada dilakukan kaya tv, kulkas, perabotanya, belum ada, paling ya itu tadi kebanyakan ya setelah ini meraka kembali kerumah masing-masing, mudah-mudahan adanya proyek normalisasi Kali Ciujung ya kedepan gak terjadi banjir lagi,	40
	Untuk bencana banjir yang rutin setiap tahun, seperti apa pak?	
1.1-3	Ya tapi mudah-mudahan sekarang ini kan mudah-mudahan ada dana ADB (Asia Development Bank) nanti kalau memang sesuai dengan kajian setelah direalisasi akan terhindar dari banjir tadi, ya itu kan nanti bukti kan, sekarang ini sudah dimulai tahapan-tahapannya sampai 2015 ini normalisasinya ada 6 kecamatan yang kenjiran sampai ke Tanara itu.	41
29	Bagaimana rekontruksi yang dilakukan BPBD setelah terjadi bencana banjir?	
1.1-3	Ya kalau yang tadi untuk sementara ya kita memfungsikan untuk sementara saja cuma nanti kalau ada kajian dari lapangan dilaporkan kepada bupati, nanti kalau tidak tersedia anggaran dana pada anggaran tahun 2015 yang murni, nanti akan dicoba pada anggaran perubahan, karena kita belum bisa merencanakan tahun depan terjadinya apa, makanya	42

	<p>biasanya kalau tidak ada di anggaran murni, nanti akan dibahas diusulkan pada anggaran perubahan, misalkan terjadinya di awal atau dipertengahan tahun untuk merencanakan (rehab dan rekon) ya dilihat perencanaan (APBD) maka akan diusulkan diperubahan.</p>	
	<p>Berarti upaya-upaya yang dilakukan BPBD untuk Kabupaten Serang agar terhindar dari banjir sudah banyak yang dilakukan ya pak?</p>	
1.1-3	<p>Ya sosialisasi, setelah itu mengasih tau mereka bagaimana terjadi bencana yang jelas kita tuh harus berperan baik itu bantuan sembakonya maupun yang lainnya, kadang-kadang kan tempat tinggal itu kan gak, gak rusak, gak terbawa hanyut, mereka setelah melihat itu kering dibersihkan kembali, mungkin mereka melihat dijakarta begitu, setelah melihat surut kembali ya mereka langsung kesana (kembali kerumah)</p>	43
	<p>Untuk Bendungan Pamarayan kedepannya ada program khususnya pak?</p>	
1.1-3	<p>Ya kalau itu kayanya ada juga kan dari bendungan itu, aliran-alirannya yang di..., termasuk membersihkan eceng gondok, kita bersama PRAMUKA, KORAMIL membersihkan eceng gondok itu supaya airnya ya lancar lah, lebih banyak yang ketampung, kalau untuk melakukan itu, apa... di Bendungan Pamarayan supaya itu diperbaiki kayanya belum ada program pemerintah, ya kalau terbawa (eceng gondok) dari hulu ke hilir kan mendangkal bendungan itu.</p>	44
	<p>Pada 2012 lalu, pernah ada banjir terbesar pak, seperti apa Rehab dan Rekon pada saat itu pak?</p>	
1.1-3	<p>Ya makanya dengan adanya kejadian tersebut Pemerintah Pusat berkepentingan jangan sampai nanti toll itu terjadi seperti dulu lagi makanya dilakukan, punya program, dengan Pemprov dan Kabupaten dengan dana-dana bantuan dari luar negeri ADB itu, karena terganggu kan kalau transportasi udah ini, ekonomi terganggu, jalur sembako terganggu, aktifitas masyarakat terganggu, jadi bagaimana supaya tidak terjadi lagi, kalau toll itu terendam banjir melihat segala prioritasnya disitu pemerintah pusat kita, kita melihat, waduh berapa hari itu jalan Jakarta Merak terputus, sampai berapa hari itu terendam, sampai muter ke Mauk itu kan, tapi bagaimana pun gak bisa ininya, kalau jalan tuh</p>	45

	lewat sana semua, jadi harus dinormalisasi dataran ataupun Ciujung ini.	
	Rehabilitasinya sendiri pak, pada saat itu seperti apa pak?	
1.1-3	Ya begitu gak ada itu di Kragilan dilakukan, ya paling diberikan sembako masyarakatnya, setelah kering dia kembali kerumahnya masing-masing, kalau masalah ini kemarin, sebenarnya kalau kita ada dana ADB itu ya mungkin ada kajian atau dipindahkan masyarakatnya cuma kita kan gak pernah tau, tinggal bagaimana kita berusaha, ya bergotong royong membersihkan sampah-sampahnya, ya tetep aja kalau sudah musimnya, ya gak tau ya, mungkin sudah dinormalisasi, sudah tidak buang air di kali lagi, kemungkinan tangga turunnya bisa diangkat	46
	Terkait Sungai Ciujung pak, kan banyak hilir-hilirnya pak, kedepannya ada program khusus pak terkait hal tersebut?	
1.1-3	Ya saya kira kami juga gak paham, artinya bagaimana teknik untuk normalisasi Sungai Ciujung tuh apakah bagaimana ya, anak-anak (petugas BPBD) juga tadinya sudah disini cuma ya itu tadi sudah dilakukan dinas dan kecamatan-kecamatan yang terkena banjir.	47
	Upaya itu kewenangannya ada di PU pak?	
1.1-3	Ya itu tadi BPBD itu tidak melaksanakan hanya koordinir seluruh dinas untuk penanggulangan bencana, seperti dinas sosial bagaimana melaksanakan dapur umum, dinas kesehatan ya kita koordinatorkannya bagaimana menyiapkan pos kesehatan, nanti setelah itu BPBD juga mengkoordinir bagaimana merehabnya, bagaimana merekonstruksinya lagi setelah dilaporkan ke pak bupati nanti akan didisposisikan lagi sesuai dengan tupoksi masing-masing, ada dinas tata ruang, dinas PU sumber daya air ke instansinya.	48
	Setelah bencana banjir dampak banjirnya kan total kerugiannya besar sekali pak, uangnya juga besar untuk ditangani satu bidang disini, ada kesulitan pak?	
1.1-3	Wah memang nanti tata ruang yang mengkaji itu, untuk ditindak ya tata ruang, kalau nanti jalan desa kena banjir ya PU nya, ya selama ini kan bajir cuma genangan aja kan bukan karena sungai yang deras sehingga rumahnya hanyut, banjir genangan aja kan	49

	ya emang air genangan cuma beberapa hari, nanti setelah kering kan lain halnya, rumah yang dibantaran sungai yang kena air yang deras ya beda lagi nanti dibangunkanya.	
	Itu kan dananya besar pak, seperti apa BPBD menanganinya?	
1.1-3	Tapi biasanya jarang, dilihat dana trus langsung kan, dari setiap instansi kan akan merekap semua yang di Kabupaten Serang tuh apa aja yang akan menjadi program dan dilakukan, direkap semua bari ditentukan pada anggaran murni atau kah nanti masuk ke perubahan.	50
	SOP nya sudah ada pak?	
1.1-3	SOP nya kita belum ada, karena dari sini aja udah ada (tunjuk buku pedoman rehab rekon) kalau banjir ya belum karena selama inni kita begini aja, kalau ada kejadian baru kita melakukan rehab rekon.	51
	Rehab dan Rekon dilakukan menunggu hasil evaluasi dari bencana ya pak?	
1.1-3	Ya bencana itu pasti nanti akan ada survey hasil kajiannya, bagaimana ya kalau ada banjir, kita pakai motor tapi nanti akan ada survey rutin kita, karena tim itu ada 2, nanti kita datang kesana, dilihat ada longsor oh longsor, pasti kita kan akan lihat, oiya betul ada kejadian ini, anti setelah itu baru data internal kita, tapi kalau emang ada ini... ada SK Bupatinya yang terlibat masalah ini seluruh dinas dan instansi ya kita akan melakukan survey, karena masalah rumah maslah longsor nanti kan orang PU yang tau tekniknya menghitung kerugian, oh rumah masing-masing ada yang rusak ringan ada yang rusak berat, yang rusak berat berapa, yang rusak sedang berapanya berapa, total ditemukan berapa itu pun belum tentu dibantu semua, kemungkinan dibantu sifatnya stimulan ya mungkin ada yang berasa beruntuk ada yang rumahnya dibangun pemerintah, tapi yang rumahnya bagus yang permanen yang dibangun pemerintah kan disamakan dengan yang rumahnya biasa.	52
12	Bagaimana cara BPBD mempersiapkan diri terhadap bencana banjir pak?	
I.1-1	Ini namanya bidang kesiapsiagaan dan laboratorium dibantu oleh kepala sub bidang pengawasan dan laboratorium, kebetulan bidang laboratorium baru dibangun tuh, ini khusus industri-industri dan tempat pelayanan masyarakat yang berpotensi terjadi	53

	bencana-bencana, termasuk kebakaran, jadi contoh kecilnya di pabrik-pabrik ada gak potensi kebakaran, apakah tabung ada isinya atau tidak, walaupun ada isinya kalau digantung 3 tahun, tetep harus diganti, kemudian kasubid penyuluhan dan pelatihan, itu setiap tahun kita adakan sosialisasi tentang bencana-bencana diantaranya bencana banjir, gempa bumi, bencana non alam, bencana alam kita sosialisasikan kepada masyarakat.	
15	Bagaimana BPBD mempersiapkan masyarakat untuk menghadapi bencana banjir, adakah desa siaga bencananya pak?	
I.1-1	Desa siaga bencana kita rencanakan tahun depan, disini udah ada desa siaga bencana tapi yang bentuk provinsi, itu Desa Sindang Laya, Cinangka dan Pasauran, Cinangka itu desa siaga bencana yang dikhususkan tsunami.	54
	Untuk banjirnya pak?	
I.1-1	Bukan di desa-desa, jadi di kecamatan-kecamatan, misalkan pada tahun 2012 kita adakan sosialisasi khusus kades-kades kemudian yang selanjutnya kita adakan untuk sekdes-sekdes, kemudian kita adakan simulasi tata cara, apa tata cara pasang tenda, tata cara simulasi, tata cara pemadaman api dengan cara sederhana yaitu dengan karung basah, jadi mulai dari yang kecil dulu nanti setelah bisa menanggulangi itu kemungkinan tidak besar, nanti kalau sudah besar harus telephone kesini, ke pemadam kebakaran, kalo dari kecil dulu bisa ditanggulangi dulu oleh masyarakat disitu atau punya kita sendiri gak bakalan jadi besar, tapi kalau besar ya udah terpaksa minta tolong, kemudian kita melaksanakan simulasi kepada organisasi masyarakat FKPI, karang taruna setiap desa, tahun kita laksanakan tuh simulasi bagi ORSOS (Orgaisasi Kemasyarakatan) yang ada di Kabupaten Serang.	55
	Organisasi yang ikut pelatihan apa aja pak?	
I.1-1	Ya FKKPI, karang taruna, e... apa sih namanya FKKPI, karang taruna, RAPI, KORARI, aduh apa sih namanya, kampung siaga bencana, forum siaga bencana, jadi tidak lupa juga ORARI.	56
	Bagi relawan yang ingin mendaftarkan diri, tata caranya seperti apa pak?	
I.1-1	Ya asal ada struktur organisasi jangan sampai namanya aja, misalkan ada tuh di Petir ada organisasi	57

	itu, pas ditanya orang Petirnya gak tau, organisasi apa pak?	
	Untuk organisasi yang ada dilingkungan pendidikan pak, seperti PRAMUKA?	
I.1-1	Iya termasuk PRAMUKA juga dilatih, ya kita juga kan tahun depan nanti akan kesekolah-sekolah SD, SMP, SMA	58
12	Ini nanti akan mendekati musim hujan pak, kesiapsiagaan BPBD seperti apa pak?	
I.1-1	Ya kita harus antara lain piket selama 24jam, ya di... apa kesiapsiagaan bencana alam termasuk banjir dan tanah longsor termasuk juga kebakaran, jadi bencana apa pun yang ada informasi laporan dari masyarakat.	59
	Untuk pemantauan banjir dilakukan disini pak?	
I.1-1	Ya yang piket pada saat itu, jadi kan begini misalkan ada informasi dari masyarakat yang terjun melihat kesana dulu anggota TRC, ada namanya tim reaksi cepat bencana alam.	60
	TRC itu tugasnya seperti apa pak?	
I.1-1	Iya TRC dulu melihat, apakah benar, sambil disitu mendata berapa masyarakat yang harus di evakuasi, di daerah ,mana, sejak berapa, pukul berapa terjadinya, berapa orang, nah harus ada laporan, informasi ke pak kalaksa tadi, pakalaksa kalau memungkinkan dibantu bisa kita dibantu, tetapi kalau sudah melebar terpaksa pak kepala pelaksana melapor ke sekda untuk membuat status masa tanggap darurat, ditambah dari dinas sosial, TAGANA, jadi antara instansi yang terlibat itu, misalkan terima laporan dari apa, kecamatan, bahwa ada begini kemudian dikirim lah TRC, mengatakan sudah terlalu melebar sudah semakin gawat ini pak, jadi akhirnya pak kalaksa ini kalau masih sempat melapor ke instansi terkait kalau masih sempat nantinya pak kalaksa langsung melapor ke pak sekda, melapor ke bupati segera dibuatkan konsepnya kita buat disini, suratnya kita bawa buat ke pak bupati, disamping itu pak kalaksa sudah membuatkan bahwa kita harus masuk masa tanggap darurat, kemudian kita membuatkan struktur organisasi yang sifatnya adhoc ya sementara, jadi struktur organisasi komando yang komando itu yang punya pangkat yang tinggi atau yang punya pengalaman atau di instansinya sendiri bisa, misalkan disini pak kalaksa ditunjuk atau pak KODAM KODIM bisa, misalkan pak bupati bilang pak komandonya pak	61

	KODIM aja, ya komandan KODIM, nanti kemudian KODIM setelah itu kemudian membentuk rapat darurat untuk membuat anggota-anggotanya untuk ke lapangan, untuk posko utama, posko pembantu, posko lapangan.	
	Untuk pengawasan rutinnya ada pak?	
I.1-1	Pengawasan rutin, pengawasan rutin ya ada, seperti DAMKAR itu pengawasan setiap saat bergantian selama 24 jam mah ada, jadi kalau piket kesiapsiagaan bencana alam Cuma masa-masa penghujan, jadi mulai dari oktober sampai maret setelah itu gak lagi, tetapi kalau piket DAMKAR tetap.	62
	Kalau piket ke lapangannya (lokasi rawan banjir) pak?	
I.1-1	Gak ada tergantung informasi laporan masyarakat, kecuali ada penyuluhan bisa, sebelum ada BPBD kita kan ada bantuan tim TRC, kalau benar terjadi bencana kita baru berangkat.	63
	Untuk bangunan yang berada di lokasi rawan banjir pak, diberikan peringatan pak?	
I.1-1	Ya dikasih, disosialisasikan juga.	64
	Saat sedang banjir, petugas Pemda disini siapa aja pak?	
1.2-1	Ya dari TAGANA, BPBD, sama dari kecamatan karena sebelum datangnya banjir juga udah standby termasuk dari tim SAR nya.	65
	Posko banjirnya disini ada dimana pak?	
1.2-1	Dijalan toll soalnya ngungsinya kan kejalan toll, Undar-Andir disini kan ada 3 kampung yang kena, Undar-Andir, Mean sama Picon kalau Undar-Andir sama Mean itu dijalan toll kalau Picon itu di Kecamatan evakuasinya.	66
	Setelah petugas datang kemari warga langsung diungsikan pak?	
1.2-1	Banjir kan datang nya gak tentu jadi kita pantau dari atas jalan toll kalau air diperkirakan udah masuk ke wilayah kampung baru kita evakuasi cuma kadang gak semua masyarakat mau karena kan masyarakat susah.	67
	Bagi masyarakat yang gak mau dipindahkan, seperti apa itu pak?	
1.2-1	Kan ada yang rumahnya di tingkat, diatas tingkat gitu tapi kalau yang udah terendam 2 meter mah ya harus di angkut, petugas bareng pemuda sini terutama buat orang yang udah tua, orang sakit.	68

	Disini ada Taruna Siaga Bencana nya pak?	
1.2-1	Walaupun udah ada, orang petugas sini tuh kalau ada bencana udah siap	69
	Sebelum udah dapet pelatihan pak?	
1.2-1	Memang yang dapat perhatian itu aparat desa seperti saya kan Sekdes yang sudah dilantik, pelatihan rawan banjir kan kadang ada di Kabupaten itu setiao tahun selalu ada pelatihan.	70
	Dari TAGANA atau dari BPBD pak?	
1.2-1	Dari BPBD sebelum juga ada, saya kan anggota TAGANA.	71
	Dari pelatihan itu apa saja pak dipelajari?	
1.2-1	Memang sosialisasi, praktek cara bongkar pasang tenda, cara pakai perahu karena kan kalau lagi banjir pelatihan itu tidak khusus buat banjir kan, kaya kebakaran juga kan sekaligus.	72
	Siapa aja pak ikut pelatihan biasanya?	
1.2-1	Ya kadang Sekdes, harus bawa RT, RW, Kepala Desa.	73
	Warga ada yang ikut pak?	
1.2-1	yang mewakili warganya kan RT.	74
	Berapa orang pak yang ikut biasanya?	
1.2-1	Memang kemarin 1 tahun berapa kali ya kaya tata cara penanggulangan bencana.	75
	Berarti kalau disini mah warganya sudah siap ya pak?	
1.2-1	Ya sudah siap kalau sewaktu-waktu ada banjir, memang sebelum ada tanggul 2001 itu parah banget, sekarang mah setelah ada tanggul tahun 2012 sampai yang terakhir tahun 2014 gak sampai masuk rumah.	76
	Dampak banjir besar kemarin disini apa pak?	
1.2-1	Memang banyak dampaknya kaya lahan pertanian itu sampai habis.	77
	Setelah banjir perbaiki sendiri pak kerusakan nya?	
1.2-1	Ya, iyalah	78
	Ada bantuan bibit sama pupuk pak untuk lahan yang rusak?	
1.2-1	Kemarin itu ada bantuan bibit pasca banjir.	79
	Tanggul yang baru ada dimana pak?	
1.2-1	Dsini nih itu disitu, memang sebetulnya tanggulnya sudah lama cuma sekarang diperbaiki.	80
	Disini posko pengungsiannya dimana pak?	
1.2-1	Kita mah di jalan toll kalau ke posko KORAMIL kan kejauhan, di KORAMIL itu biasanya dari Kampung	81

	Picon.	
	Tendanya bikin sendiri pak?	
1.2-1	Ya, ada tenda posko juga tapi kan kadang-kadang gimana ya karena masyarakatnya kebanyakan jadi gak muat.	82
	Makanan di posko cukup pak?	
1.2-1	gak lah, memang awalnya masih kaget kan dari keluarga sendiri yang jauh kan suka ngirim.	83
	Bantuan yang masuk di kasih langsung atau ditampung dulu pak di posko?	
1.2-1	Ya ditampung dulu di posko	84
	Yang ngurusin bantuan pak?	
1.2-1	Ada disini yang ngurusin gabungan lah dari TNI dari manalah ya tetep masyarakat dilibatkan.	85
	Pasca banjir ada rumah yang rusak parah pak?	
1.2-1	memang yang terakhir mah sampai sekarang belum ada bahkan yang pendataan dan pemotoan lah data lah mana belum itu gak ada, itu pun yang dari Pemda datangnya ke Kecamatan kan jadi orang kecamatan yang ngurusin.	86
	Yang rusak parah ditinggal aja itu pak?	
1.2-1	Ya paling dibenerin sendiri.	87
	Ada warga yang trauma banjir gak pak?	
1.2-1	Ya yang trauma mah ada.	88
	Dokternya ada pak?	
1.2-1	Ya ada sampai rumah di bongkar ya ada aja dari mana-mana, gitu mah ada banyak yang peduli datang.	89
	Petugas BPBD nya sigap gak pak?	
1.2-1	Sigap bahkan pasca banjir juga masih sigap.	90
	Disarankan sama BPBD gak pak untuk pindah?	
1.2-1	Ya kalau saran mah pasti ada Cuma masyarakat sini kan susah gitu disuruh pindah ke lokasi yang gak banjir, emang dari kecilnya juga udah disini.	91
	Masyarakat suka banyak yang minta sumbangan pak kalau lagi banjir, kenapa itu pak?	
1.2-1	Ya memang gak boleh kan, dari desa pun juga gak boleh cuma masyarakat kan susah, ya cuma susahnya gitu padahal kan kita udah melarang.	92
	Apa karena makanan di posko kurang pak, jadi masyarakat minta sumbangan?	
1.2-1	Bingung kalau masalah itu sih karena memang kan disini udah dikasih tapi gak sih ya (gak kekurangan makanan) namanya juga manusia.	93
	Petani-petani bagaimana pak kalau lagi banjir?	

1.2-1	Ya pada ikhlas lah mau bagaimana lagi.	94
	Ada bantuan yang masuk pak khusus untuk petani?	
1.2-1	Biasanya dari kelompok tani dari PNPM juga pernah.	95
	Bantuan pupuk dan bibitnya pak?	
1.2-1	Pernah lah sekali dapat pupuk sama itu (bibit) memang sebelum banjir juga dapat bantuan pupuk berapa tuh, malah langsung pak menteri yang kesini.	96
	Pernah minta bantuan perahu sama tenda pak?	
1.2-1	Ya memang setiap rapat juga minta bantuan perahu sama tenda cuma belum ada yang dikasih paling juga di Kecamatan.	97
	Perahu yang dibawa kesini kurang gak pak untuk evakuasi?	
1.2-1	Masyarakat disini mah pakai apa aja sih karena kan gini, perahu itu kan kalau banjirnya tinggi paling yang ketinggalan aja, gak mau di evakuasi.	98
	Berapa orang pak yang gak mau di evakuasi?	
1.2-1	Paling itu mah satu dua sih.	99
	Barang-barang yang dibawa warga biasanya apa pak?	
1.2-1	Paling yang bisa dibawa aja sih karena kan dirumah udah dibikin tempat buat narong barang-barang, biasanya kan dari Bendungan Pamarayan kan udah ada laporan kita disini udah persiapan buat evakuasi.	100
	Bangunan sekolah ada yang rusak pak?	
1.2-1	Ya memang kalau bangunan sekolah langsung dibenerin.	101
	Kalau disarankan buat pindah bagaimana pak?	
1.2-1	Kayanya gak mau ya memang masyarakatnya dari kecil disini, memang pada tahun 2012 yang terbesar itu disarankan tapi gak mau lah.	102
	Saat banjir besar ada rumah yang roboh pak?	
1.2-1	Ada sih dibelakang tahun 2012 itu.	103
	Pasca banjir ada yang bantu-bantu mebereskan pak?	
1.2-1	Memang ketika air surut masyarakat itu langsung bersih-bersih yang laki-laki pada pulang bersihin rumah yang cwe di posko karena kalau udah kering kan susah ngeberesinnya makanya masyarakat gak mau yang jauh-jauh.	104
	Berapa orang yang ngungsi kemarin pak?	
1.2-1	2300 orang yang ngungsi yang gak kena cuma 500 orang.	105
	Kalau dapat pelatihan suka disampaikan gak pak	

	ke masyarakat?	
1.2-1	Gak sih kan udah ada RT sama RW.	106
	Desa Siaga Bencana disini siapa pak kepala urusannya?	
1.2-1	Langsung kepala desa kalau yang di RT ma RW nya langsung.	107
	BPBD datang sesudah atau sebelum banjir pak?	
1.2-2	sesudah banjir dan selagi banjir, makanya kadang-kadang bantuan kalau emang banjir itu besar, koper sudah, susah dijangkau sama kendaraan, kecuali perahu karet pun harus lewat kali, tertutup di Rengget, tertutup di Kramat, kalau di Parigi sudah kejalan (genangan banjir) udah gak bisa lewat banjir otomatis bantuan juga gak bisa lewat.	108
	Petugasnya datang kesini perlu di telephone dulu sama bapak?	
1.2-2	Petugas selagi ada banjir juga udah kontek	109
	Petugas gabungan ya pak?	
1.2-2	Ya dari TAGANA dari KORAMIL dari POLSEK adalah semua, kadang-kadang sehari semalem, camat juga nongkrong sehari semalem, kalau lagi banjir semua kena, bukan cuma koper aja, Pasonggong, Kramat, apalagi sekarang bangunan (pabrik yang baru dibangun) kena (dampak yang lebih besar) bukan cuma koper aja, trus tempat-tempat seperti Parigi yang sekarang lagi dibangun, nah itu tempat air, otomatis kedepan kalau lagi banjir kena semua, karena tampungan air sudah pada dibangun.	110
	Petugas datang ketika banjir, warga disini evakuasi sendiri pak?	
1.2-2	Lah iya masing-masing sendiri kalau koper itu udah pasti di toll	111
	Tendanya buat sendiri atau petugas yang buat pak?	
1.2-2	Gak kadang-kadang itu dari angkatan	112
	Perahunya cukup gak pak buat evakuasi?	
1.2-2	Cukup, pokoknya kalau lagi banjir udah gak bisa berangkat kerja, mau lewat mana, Parigi tuh kalau gak bisa dilewati, udah banjir tinggi, udah motor itu gak bisa lewat, kecuali disana ada perahu karet, baru bisa.	113
	Selama ini belum ada pak?	
1.2-2	Ya gak ada dari mana kecuali kalau dibutuhkan, ya	114

	datang, soalnya kalau disini banjir, nyebrang kewilayah Tangerang juga banjir, gak bisa dilewatin motor, mobil gak bisa, kerja kalau banjir seminggu ya seminggu gak kerja tetep gak kerja, gimana cara lewatnya mobil aja gak bisa	
	Tanggul ini pak (menunjuk proyek pembuatan tanggul) untuk menormalisasi banjir pak?	
1.2-2	Kalau tanggul ini buat mengatasi longsor, kalau banjir harusnya dia lebih tinggi dari pada tanah, itu berarti ngatasin longsor, ini udah berapa rumah yang habis	115
	Tanggul ini hasil perbaikan atau pembuatan baru pak?	
1.2-2	Ya udah 2x ini sekarang tambahan dibangun ini, kalau sana mah (menunjuk sungai yang ada diwilayah Kabupaten Tangerang) udah cukup sekali, tapi bukan banjir, longsor kalau gak ada itu, habis kampung ini.	116
	Disini pernah ada korban pak?	
1.2-2	Alhamdulillah belum ada, gak kaya tsunami kan, karena kan sedikit-sedikit masyarakat ngungsi, dimana ini tempatnya.	117
	Pernah ikut pelatihan dari BPBD pak?	
1.2-2	Kalau pelatihan ada, dari anggota TAGANA, ya Taruna Siaga Bencana, di Provinsi ada di Kabupaten juga ada.	118
	Taruna disini yang ikut pelatihan dari BPBD ada pak?	
1.2-2	ada 2 (anggota TAGANA provinsi) disini mah belum adda pelatihan dari BPBD.	119
	Disini bantuannya dikumpulkan di posko atau di kantor desa pak?	
1.2-2	Di pak lurah, dari pak lurah nanti kita masukin kantong kresek	120
	Cukup pak bantuannya?	
1.2-2	Ya yang namanya bantuan, namanya aja bantuan tetep aja masyarakat tuh merasa kurang aja, tetep aja kurang-kurang, berapa sih kadang mie 5 (bungkus) beras 2 liter, tapi gak kurang lah, kkalau disana tuh yang dekat toll disana banyak yang memperhatikan, dari angkatan kadang-kadang turun langsung, lagi banjir turun dia berapa kompi dari KOREM, KORAMIL kemaren berapa, 3 tenda kalau gak salah, fokus utama itu di Koper Eretan, itu semua warganya kena, karena paling rendah, paling tinggi lagi kalau disini ½ meter disana udah 1 meter, Kalau disini	121

	semeter disana semeter ½	
	Obat-obatannya bagaimana pak?	
1.2-2	Gak kurang kalau obat-obatan gak kurang, rapih kontrolnya rajin lagi, perawat-perawatnya trus keliling.	122
	Pasca banjir petugasnya datang kesini gak pak untuk mendata kerusakan?	
1.2-2	Di data, kemaren didata, yang kena banjir aja didata, kemaren dapet lah bantuan nya, langsung kalau banjir tuh langsung diperhatikan benar-benar kalau banjir, jadi gak ada istilah terlantar sekarang kalau kita bell aja langsung datang, sebelumnya orang kecamatan juga ngebell aja, buat mantau, ya kita mah gak bisa diem, siang malam gak bisa diem, rumah aja ditinggal karena rumah saya tuh tinggi gak khawatir itu ya, khawatirnya justru warga, ngungsinya ya dijalan aja, di daerah tinggi lah.	123
	Petugasnya nginep pak di posko?	
1.2-2	Nginep pada nginep ya sampai banjir surut.	124
	Bangunan sekolah sama pasar direnovasi gak pak?	
1.2-2	Di kasih ya dikasih, warga aja dikasih bantuan cuma gak seberapa, kemaren doang kejadian rumah roboh, rumah tua karena banjir, belum dibikin lagi, tapi sekarang mah belum dibangun sama warga, tetep lah yang utama mah desa tanggungjawab kan ada.	125
	TAGANA disini seperti apa pak kalau lagi banjir?	
1.2-2	Kalau lagi banjir ya keliling cuma 2 orang kok, pokonya kalau TAGAN 2 orang itu gak tinggal dirumah semuanya, siang malam harus itu, kalau gak kuat baru hubungi komandan, nanti turun tuh di Koper, kalau sini udah banjir tinggi gak mungkin ada yang bisa masuk, daerah Songgom itu udah gak bisa lewat, mau lewat mana udah di Kramat mobil juga gak bisa lewat, motor juga gak bisa, makanya juga udah tunggu surut aja, kalau ada bantuan juga gak diambil, datangnya juga agak lama sih, 2 hari 3 hari kan banjir, jadi belum sempat lah masyarakat untuk ngambil cuma kan bantuan tetep ada.	126
	paling parah banjir disini tahun berapa pak?	
1.2-2	Tahun berapa ya, kalau disini banjir udah merata gak bisa kemana-mana, saya aja gak bisa keluar makanya pakai kedebong (batang) pisang, dari sini sampai kesana jalan.	127
	Sebelum banjir ada pemantauan pak?	

1.2-2	Ya dipantau, kita aja ngebell dulu kan, waspada, waspada banjir, saya bilang liat aja tuh di Parigi, kalau Parigi udah lewat dijalan udah ketutup baru Koper kena, kalau di Parigi udah dijalan baru Koper kena, kalau Parigi belum dijalan Koper belum ya terutama yang di Parigi itu, paling rawan.	128
	Sungai disini nantinya bakal dinormalisasi pak?	
1.2-2	Belum, belum, tapi bakal lebih tuh, ya itu tempat-tempat tampungan air itu udah dibangun pabrik, itu kan tadinya tempat air.	129
	Harapan bapak bagaimana pak, biar nantinya air banjirnya tidak terlalu tinggi?	
1.2-2	Susah ya, apalagi sekarang mah tampungan airnya dibangun, harapan saya ya itu gak mungkin lah, harapan saya jangan dibangun lah pabrik disitu gak mungkin kan.	130
	Upaya untuk bicara ke Pemda sudah dilakukan pak?	
1.2-2	Belum pernah, tapi udah dibicarakan itu di Kecamatan, sekarang mungkin kalau udah banjir mungkin banyak yang kena, karena sawah itu udah kaya lautan.	131
	Sebentar lagi sudah masuk musim hujan pak, bagaimana persiapannya?	
1.2-2	Ya saya ngeri tuh, perisapan mah terus, setiap suasana banjir juga udah persiapan.	132
	Kalau lagi persiapan apa saja yang dilakukan pak?	
1.2-2	Ya masyarakat lah (melakukan persiapan sendiri) kita terutama itu RT dikumpulin, tolong waspada kontrol air, kerahkan semua RT.	133
	Pak disini kalau banjir rutin setiap tahun atau malah lebih pak?	
1.2-3	Udah kebanjiran, setiap tahun ya, tapi kadang-kadang ada yang banjir mah akibatnya bukan karena hujan aja, karena akibatnya pendangkalan, padahal mah kalau kali nya lebar, sekalnya pun ada mungkin juga banjirnya tidak akan lama	134
	Sebelumnya udah ada upaya bicarakan ke Pemda pak?	
1.2-3	Saya udah beberapa kali, bahkan pernah ada sosialisasi BPBD waktu di hotel Bidakara itu saya ajukan, dan saya komentarkan, saya udah beberapa kali bahkan setiap dewan reses, saya di... di... kecamatan saya ajukan, tolong lah tolong lah itu dulu	135

	direalisasikan masalah pendangkalan kali cuma waktu itu di BPBD itu kapan ini mau direalisasi, apa jawabanya, sabar aja dulu pak, karena mungkin keterbatasan masalah anggaran, ya maklum lah wilayah Kabupaten Serang atau pun Provinsi Banten mungkin kalau masalah anggaran wajar.	
	Di Cigombong itu udah hampir setiap tahun pak? itu mulai tahun berapa pak petugas sama poskonya kesini?	
1.2-3	Dari saya sebelum menjadi Kepala Desa juga sudah, alhamdulillah dari pihak BPBD maupun dari pihak TAGANA memang cukup membantu lah ke kami cuma dari BPBD yang paling ini (kurang) mah dari perahu karet segala macam dan lagi saya sering ajukan itu kalau perahu karet itu untuk Desa Kemuning, Catang dan Ujungpandang itu yang udah musiman itu kami minta malah mah, minta tolong lah kalau bisa perahu karet itu tolong di standbaykan disini, jadi gak usah... tolong lah kesini, trus dari pihak tentara dari pihak polisi pada sibuk kan, karena itu muter! Kadang-kadang kesini semua, karena yang menjadi besarnya air itu air kiriman.	136
	BPBD kesini tunggu laporan dulu pak?	
1.2-3	Iya itu repotnya, kalau belum jaronya ieu... cuma kalau dari kecil lah dan pernah waktu banjir surut pernah ada korban jiwa, ada orang cuma orang gila.	137
	Tahun berapa itu pak?	
1.2-3	Tahun kemaren. Anak siapa, yoh kumpulin, siapa yoh dihitung masing-masing warganya, ya takutnya warga kita, ya trus ya minta lagi lah dari pihak TAGANA saya minta, pas tetemu ternyata orang gila, biasa itu mah ada yang lewat minta makan lah, jadi kelaparan, nyari makan dia memaksakan diri turun ke air gak bisa renang trus kami kirim langsung ke RSUD.	138
	Jadi yang ngurusin Polsek itu pak?	
1.2-3	Iya Polsek	139
	Kalau disini dapet pelatihan gak pak dari BPBD nya?	
1.2-3	Kemaren itu ada cuma yang ikut itu biasanya aparat desa aja.	140
	Karang Taruna nya pak?	
1.2-3	Karang Taruna kemaren ada ikut, dari anggota Karang Taruna juga saya utus.	141
	Disini poskonya berdiri sebelum atau sesudah pak?	

1.2-3	Kebetulan mah kemaren karena menjelang ada politik legislatif, alhamdulillah ini ngasih itu ngasih, yang paling banyak mah ini nih Bapak Mihad, diperitahkan nu bapak, jaro ulah nungguan BPBD ataupun dari pihak laen, ambil bantuan itu, udah saya ambil tapi alhamdulillah saya tidak mengecewakan dia kan, orang Parpol duluan yang ngasih kan, orang parpol duluan yang ngasih kan, jadi hasilnya juga banyak, kalo sekarang mah banjir repot saya, sebab gak ada politiknya ini, tau pemilihan bupati sekarang masih ikut rakyat atau gak.	142
	BPBD datang setelah berapa hari banjir pak?	
1.2-3	Paling cepet alhamdulillah BPBD siap, ketika di kontak siap, kadang-kadang juga antisipasi sebelum banjir gede udah saya kontak, paling perahu, pokonya kalau ada perahu 2 ini, mungkin ditarik kesini ke wilayah saya, ditarik lagi ke wilayah Ujungpandang.	143
	Bantuannya apa aja pak yang ada diposko?	
1.2-3	Semacam makanan, obat-obatan ada sedikit ada yang nyumbang pakaian cuma pakaiannya pakaian bekas.	144
	Bantuannya disimpan di kantor desa atau ke posko pak?	
1.2-3	Langsung ke posko, saya check bareng petugasnya, kalau yang check saya aja nanti tkut diumpetin.	145
	Kurang gak pak?	
1.2-3	Kalau bicara kurang mah pasti kurang gak ada cukup-cukupnya.	146
	Warga bagaimana pak kalau kurang?	
1.2-3	Akhirnya kan mereka juga sadari kalau memang itu musibah ya udah aja, sebenarnya mah kalau udah tau musibah harus pindah kenapagak pindah, memang rencana nanti saya mau buat posko banjir dibelakang posko desa, memang terlalu jauh sih ya gak ada angkutannya.	147
	Kalau di Cigombong pak?	
1.2-3	di (ci)gombong kalau dari kampung kejalan emang dekat cuma kan banjir itu sampai kejembatan (jalan juga kerendam banjir) kadang-kadang juga yang bawa perahunya udah dilatih semua cuma ada yang pakai mesin kan (butuh orang yang bisa pakai perahu mesin)	148
	Untuk selimut dan obat-obatannya cukup pak?	

1.2-3	Ada selimut, obat-obatan tapi kalau obat-obatan kan dari pihak kesehatan.	149
	Evakuasi warganya seperti apa pak?	
1.2-3	Mau di evakuasi juga, bertahan, bertahan, kenapa bertahan itu karena khawatir ada ayam, kambing, segala macam, bertahan disitu doang, pas tengah malem airnya guede, baru yeuh kamana jaroronya.	150
	Itu warga banyak yang di evakuasi malam itu pak? petugasnya pak?	
1.2-3	atuh semua (banyak), paling yang bertahan penjaga kampung doang.	151
	Setelah banjir pak, ada pendataan gak pak untuk rumah yang rusak?	
1.2-3	Nah itu... itu... saya kan yang ikut mendata udah pendataan masuk karena gak ada realisasi juga, sementara masyarakat, jaro mah mana ini pasti ini mah duitnya ka jaro, kesaya lagi aja curiganya ke saya.	152
	Upaya buat nyicil biaya kerusakannya juga gak ada pak?	
1.2-3	Belum ada juga sampai saat ini cuma data-data aja, itu dulu tuh pendangkalan Sungai Cisangu data-data aja, tetep aja dari pihak BPBD, KORAMIL minta data-data aja.	153
	Seperti di Undar-Andir pak pendataan selesai ada dana yang turun, disini belum ada pak?	
1.2-3	Belum pernah dari pihak kecamatannya, KORAMIL, Polsek.	154
	Sudah ada siaga bencana pak disini?	
1.2-3	Belum ada saya.	155
	dari BPBD dikasih pelatihannya aja pak?	
1.2-3	huuh pelatihan aja.	156
	Perangkat desa yang ikut pelatihan berapa orang pak kemarin?	
1.2-3	Ada 2, tergantung dibutuhkannya aja, kalau 3 ya 3, tapi untuk tahun ini cuma dari pihak Karang Tarunya aja.	157
	Pelatihan disini pernah pak?	
1.2-3	Ini sih kalau udah dikasih pelatihan udah aja, yang paling besar kalau padi yang mau di panen lagi gede kerugian tuh disini ya dari pihak pertanian, udah aja ya gak ada bantuan lagi, paling yang lagi ada juga kemarin sekedar bantuan bibit, masyarakat kalau udah ada teguran dari masyarakat yang dateng cuma bibit, jaro deui bae kudunya karunya ka jaro.	158

	Harapannya buat BPBD apa pak?	
1.2-3	Harapan saya mah kalau dari pihak BPBD harus dibanyakin lah petugasnya, kalau lagi pengajuan juga kaya perahu karet, gak usah banyak-banyak kalau gak 2, 1 aja juga cukup, Kemuning 1, Cigombong 1, Ujungpandang 1 udah itu aja dan itu yang paling diharapkan oleh masyarakat masalah pendangkalan itu dikeruk aja tuh Cisangu, udah itu aja.	159
	Udah ada informasi kapan akan dikeruk pak sungainya?	
1.2-3	Udah dengar, udah dengar, tinggal di dorong aja, yang lebih didengar mah bukan dari kepala desa ya, dari mahasiswa lah yang ngedorong.	160
	Disini petugas yang datang, gabungan pak tim nya?	
1.2-3	iya gabungan BPBD, POLSEK, TAGANA	161
	TAGANA nya dari mana pak kalau disini?	
1.2-3	TAGANA nya dari Taruna Kecamatan yang disini.	162
	Pasca banjir petugasnya masih standby yang disini pak?	
1.2-3	Standbay, bantu-bantu paling juga Kecamatan ke Balai Desa.	163
	Ada yang rusak parah disini rumahnya pak?	
1.2-3	Pernah ada yang parah sampai jebol.	164
	Anak sekolahnya bagaimana pak belajarnya kalau lagi banjir? Sekolahnya kan dipakai untuk posko bencana tuh pak?	
1.2-3	Ini kan di evakuasinya di sekolah kadang kan yang udah di evakuasi kesini gak ada saudaranya kalau ada saudaranya ikut nginep, tendanya kan gede kalau gak cukup kan ada sekolahan, diruangan (kelas) banyak ada 2 kampung mah Cuma yang parah mah di Cigobang.	165
	Warganya dikasih pelatihan pak di Cigobang?	
1.2-3	Warga dikasih pelatihan gak mau, gak ada artinya kalau dari perangkat desa, taruna kan ada tanggungjawabnya.	166
	dampak banjirnya dari jembatan sampai rell kereta yang disana itu ya pak?	
1.2-3	Sampai kesana ke jembatan juga kalau kesini kan ketemu sungai Cigobang lagi, gak bisa itu harus muter, mau lewat pasir mangu gakbisa sampai kesekolahan itu, rumah-rumah yang dipinggiran sawah sampai jalan itu juga kerendam, kalau dulu mah banjir itu gak lama kiriman dari Rangkas, kalau	167

	sekarang Cisangu gak ada airnya kering, Sungai Cisangu kan nyambungnya ke Ciujung juga yang dari Pamarayan airnya lari kesini juga, sampai rel kereta juga dari Ciujung.	
	Warga disini selalu siap ya pak kalau lagi banjir?	
1.2-3	Anu ngaran na mah bencana dari gusti allah siap aja kalau lagi dicoba mah.	168
	Ada rencana pembentukan desa siaga bencana pak?	
1.2-3	Siap, tapi belum ada pembicaraan ke BPBD nya, kalau Cuma ngomong-ngomong doang mah udah.	169
	Kalau sedang banjir bantu-bantu pak?	
I.3-1	Ya bantu-bantunya, masyarakat disuruh naik kesini semua jadi pake perahu karet laju macem-macem lah pake kedebong juga.	170
I.3-2	Kalau saya disini bikin pelangongan (kayu yang disusun di bagian plafon rumah sehingga dapat menjadi pijakan)	171
	Masakan di posko kurang gak pak?	
I.3-1	Alhamdulillah lantas ada sumbangan dari lain-lainnya gitu, dari yang kerja di Indah Kiat gak kekurangan lah termasuk dari Pesantren H.Nurdhin.	172
	Setelah banjir ada rumah yang rusak, petugas ada yang perbaiki gak pak?	
I.3-1	Gak, sama Pemda? ya betulin mah betulin itu Cuma dari sumbangan aja itu mah, memang waktu itu ada Gubernur tuh turun semua (uang perbaikan) dari Bu Atut (Gubernur Banten pada waktu itu) bahkan yang luas (banyak memberi uang) wakilnya. Malah kemaren sebelum banjir di sms tuh semua masyarakat kalau mau ada datang Gubernur (Gubernur yang sekarang), tapi barang banjir mah enggak, gak seperti 2012 itu.	173
I.3-2	Malah kemaren mah ada yang hanyut.	174
	Memang yang kemaren seperti apa pak?	
I.3-1	Kemaren itu waktu 2012 dia itu turun sampai ke desa waktu jadi wakil juga tahun 2001 turun juga ada sedikit bantuan buat kehancuran itu.	175
	Bantuannya berupa uang atau makanan pak?	
I.3-2	Ya berupa beras udah gak banjir juga dikasih tuh buat bantuan yang rusak-rusak, jebol-jebol langsung dikasih amplop dibenjain sendiri bahan bangunannya, mana nih yang orang RW ini RT ini langsung dikasih kalau makan mah cukup sama obat-obatan.	176
	dari yang lain juga ada pak?	

I.3-2	Memang disamping dari Pemda dari swasta juga ada bahkan banyak.	177
	di Posko selimutnya cukup gak pak?	
I.3-2	di kasih selimut segala macam lengkap lah, tapi yang masih bungkus mah diatur sama staf-staf (petugas posko) alhamdulillah stok gak kurang lah malah sampai 5 bulan dari saya tanam padi sampai panen mah masih ada.	178
	Jalan yang rusak setelah banjir diperbaiki gak pa?	
I.3-1	Kalau masalah itu mungkin intern masalah desa, waktu itu kan mereka (rombongan Gubernur) dibawa lewat toll jadi tuh gak tau jalan yang rusak, kalau sama saya mah kan saya bawa ke jalan-jalan yang rusak.	179
I.3-2	Memang kalau dari Undar-Andir mah dari yang 3 orang (tokoh masyarakat) itu mah banyak tapi kalau orang itu gak keluar waduh.	180
	Pernah ikut pelatihan pak?	
I.3-1	Ya banyak melalui..., kan ada ini yah dari tentara tuh ya sekoci tuh apa ya, perahu karet ya, saya juga gak tau ya kan pak Kades nya pelatihan juga tuh ya.	181
	Pelatihan nya dimana pak?	
I.3-1	Disini (kantor Desa Undar-Andir) trus waktu itu yang mimpin itu, waktu tahun kemaren ya 2012 sama 2013 ya pas ada banjir dari KORAMIL.	182
	dari BPBD nya pak?	
I.3-1	Belum dari tentara kemaran mah.	183
	Saat pelatihan dikasih pelatihan apa aja pak?	
I.3-1	Ya pokonya mah nolongin orang-orang yang sakit, walaupun orang-orang sini mah sudah biasa ya, tapi kan bagus ya diadakan pelatihan seperti itu, tahun kemaren 2013, jadi waktu 2012 saya itu paling tinggi segini (menunjuk pinggang) kalau anak-anak kan disana ya di toll.	184
	Untuk yang bertahan di rumah makanan nya di antar pak?	
I.3-1	Ya ada juga petugas ya saya kan ada anak-anak bahkan saya pernah masak di atas springbed (yang mengapung) trus dibikin (menunjuk ke loteng) pelanggon	185
	Kalau warga yang lain bagaimana pak?	
I.3-1	Warga yang lain disana (posko) ada juga yang di	186

	atap. Waktu banjir kan dikasih pealatihan segala ya? milu ya? waktu itu sing tentara doang ya?	
I.3-2	atuh kumplit. Atuh milu. Ya ada KORAMIL nya 2 regu juga dari balai besar berikut cara pengobatan segala.	187
	Perahu karet ada pak?	
I.3-1	ya atuh itu kan latihan, na perahu karetnya segala ya?	188
I.3-2	ya perahu karet di desa-desa doang.	189
	Tanggulnya jebol ya pak kemarin?	
I.3-1	Pugu kan gini waktu 2012 kan ada bangunan tanggul yang jebol trus kan dengernya dibetulin pas udah tenang mah tapi denger doang kenyataan nya mah enggak.	190
I.3-2	Jadi gini waktu banjir itu kesini, tanggul gegurungannya (pintu air) jebol jadi hanyut kesini.	191
	Petugas nya bagaimana pak kerjanya disini?	
I.3-1	ya alhamdulillah lah Pemerintah setempat mah baiklah.	192
I.3-2	Bukan ningkatkan Bu Atut yah, memang sebetulnya sedikit lah kesini, udah jadinya (terpilih jadi Gubernur kembali) mah alhamdulillah karena sendirinya turun ke bawah nanya-nanyain mana yang jebol-mana yang jebol langsung dikasih bahkan Ibu Atutnya mah ditegor sama Pak Lurah bu yang itu mah jangan dikasih “enggak ini yang kenyataan” malah katanya.	193
	Disini ada korban yang meninggal pak?	
I.3-1	Gak, gak ada. Pertolongan yang paling besar itu toll jadi kalau ada banjir langsung kesana kebetulan tahun 2012 toll nya kena air.	194
I.3-2	Tapi yang gering-gering mah banyak.	195
	Petugas yang mengurus banjir udah baik belum pak kerjanya?	
I.3-1	Baguslah malah waktu pada makan mah pada ngeliwet pake drum, ada 3 drumnya bareng masyarakat, KORAMIL bareng petugas bareng-bareng makannya bahkan terakhir saat udah gak banjir masih standby itu KORAMIL.	196
	Pernah telat gak pak penangananya, bajir datang petugas nya belum?	
I.3-1	Gak, gak pernah telat bahkan sebelum banjir mah udah dateng, sebab sebelum datangnya air kan di adakan pelatihan.	197
	Pelatihan banjirnya setiap tahun pak?	
I.3-1	Gak setiap tahun, setelah itu kan gak ada pelatihan	198

	lagi malah ada penanaman, sekarang-sekarang enggak.	
	Pasca banjir, petugasnya ikut bantu-bantu juga pak?	
I.3-1	Gak, gak ikutan bantu-bantu.	199
	Setelah surut poskonya masih ada pak?	
I.3-1	Masih ada makanya yang saya lihat tuh 2 hari 3 hari setelah banjir masih ada.	200
	Tenda poskonya cukup gak pak untuk menampung pengungsi?	
I.3-1	Atuh sempit mah sempit tapi biasa beh lah namanya juga lagi musibah.	201
	Petugas ada pendataan kerusakan pak setelah banjir?	
I.3-2	Dipinggir mah ada dilingkungan saya ada 3 yang di foto.	202
I.3-1	Bahkan waktu itu mah ada yang pernah datang kesekolah situ (SD) langsung dibenerin karena parah dari Sekdes juga ngebantu.	203
	Harapannya apa pak ke BPBD untuk kekurangannya?	
I.3-1	Ya namanya ini kalau kurang mah gak ada batasnya, boleh dikatakan kurang sebenarnya saya juga kan ini pada rusak tapi kan gak minta jadi ya gak dikasih.	204
I.3-2	Ya ini mah bahkan petugas BPBD yang masukin, langsung staf (petugas kantor desa) dipinggirkan langsung dikasih (ke masyarakat) uang itu seperak pun gak turun kemana-mana langsung dikasih ke orangnya langsung.	205
	Disini kalau banjir seperti apa pak?	
I.3-3	Jalur air itu disana noh dihadang pabrik-pabrik, biasanya banjir 1 meter nanti mah bisa 1 meter lebih lagi, kemaren tanggul yang kemaren mah sampai longsor, 2 kali ini mah tanggul udah dibikin.	206
	Petugas sering datang kesini mah kalau lagi banjir?	
I.3-3	Gak tau saya mah dari dinas apa entah apa gitu, buktinya kemaren yang dulu tuh tahap pertama masa dari bambu (penahan tanggul) cara kerja begitu tuh, gak tau tuh malah bagus, yang sekarang, yang kemaren yang dulu mah dana 3,6 M (Miliyar) lebih itu yang sekarang mah cuma 1,6 M (Miliyar) tuh tuh ada dipapannya, malahan mah bagus yang sekarang sama bapak malah pernah di omelin pada kabur yang kerjanya juga.	207

	Kalau lagi banjir ada petugas yang bantu ngungsi in warga pak?	
I.3-3	Ya ngungsi sendiri, tendanya tuh disana dijalan dekat balai desa seharusnya ini mah tanahnya dikeruk ini mah dibiarin aja longsorannya.	208
	Diposko banyak pak warga yang ngungsi?	
I.3-3	Ada aja, Cuma tenda ada kalau udah banjir sebenarnya mah bantuanya ada dari Pemda Cuma dari desanya yang disekep sendiri.	209
	Dianterin atau diambil sendiri pak?	
I.3-3	Di anterin cuma kurang banyak yang brengsek didesanya mah.	210
	Pasca banjir rumah yang rusak di perbaiki pak?	
I.3-3	Gak ada pasca banjir mah mana gak ada yang dateng.	211
	Di Balai Desa posko nya untuk nampung bantuan pak?	
I.3-3	Ya ada cuma kan bantuan dateng nya gak cuma dari Pemda, Instansi lain juga ada malahan banyak yang dari partai lah, ada dari pemerintah mah cuma katanya mah ada yang disekap cuma ke bapak mah gak ada, bapak mah kalau dikasih ya syukur kalau gak ada mah gak minta-minta.	212
	Pernah dikasih pelatihan bencana pak?	
I.3-3	Gak tau bapak mah gak pernah dapet pelatihan.	213
	Taruna disini aktif pak?	
I.3-3	Aktif, tapi bukan taruna didesa (kecamatan) loh taruna disini (Desa Koper) yang aktif mah kalau bapak kan motor penggerak, pemuda disini mah terlalu pada diem cuma kegiatannya banyak yang positif.	214
	Sebelum banjir ada pengumuman pak untuk persiapan kalau mau ada datang banjir?	
I.3-3	Pengumuman gak ada tau-tau air naik baru dah dateng bantuan.	215
	Pelatihan di Balai Desa pernah ada pak?	
I.3-3	Gak ada disini mah kalau banjir mah masing-masing aja yang pada jago berenang ya berenang aja lah.	216
	Inisiatif sendiri dong pak?	
I.3-3	Iya lah Cuma kalau gede mah suka ada ABRI kesini.	217
	Berapa orang pak?	
I.3-3	Banyak polisi juga ada.	218
	Untuk bantuan selimut dan makanannya pak?	
I.3-3	Gak ada disini mah gak ada.	219
	Harapannya apa pak ke BPBD?	

I.3-3	Pengen saya mah ini nih untuk tanggul dekat bangunan desa, kurang memuaskan seharusnya bangunan di daerah Tangerang sana rapat itu batunya (tanggul) disini mah enggak kata mekanisnya.	220
	Kalau dikasih pelatihan mau pak?	
I.3-3	Ya biasanya kan di desa ya di desa, mungkin iya ini seharusnya bangunannya, pabrik gak ada nutupin jalur air yakin bapak mah bakal karam (banjir makin parah dari sebelumnya)	221
	BPBD kalau kesini bantu apa pak?	
I.3-3	Bantu bagi sembako, keliling.	222
	Di ungsiin kemana pak warga?	
I.3-3	Disini aja noh disana noh ada itu juga kalau ada yang mau.	223
	Kondisi banjir disini seperti apa bang?	
I.3-4	kan datangnya musiman makannya spontanitas aja gitu, maksudnya dadakan waktu musim hujan itu terus-terusan volume airnya juga banyak jadi banjir itu kena sawah dulu baru kena pemukiman warganya?	224
	Sungainya dangkal bang?	
I.3-4	Iya kalinya dangkal jadi gampang naik	225
	Petugas datang kesini sebelum banjir atau sesudah banjir bang?	
I.3-4	Kalau petugasnya pas banjir aja kalau sebelum banjir paling dari warga-warganya aja paling yang rumahnya kebanjiran saling tolong menolong kalau lagi kebanjiran.	226
	Petugas BPBD biasanya datang berapa hari setelah banjir bang?	
I.3-4	Udah 2 hari paling mereka baru pada datang.	227
	Warganya evakuasi sendiri ya bang kalau lagi banjir?	
I.3-4	Evakuasi sendiri soalnya kan belum ada bantuan jadi warga-warga yang gak kena banjir nolongin paling gitu aja sih.	228
	Perahu karetnya keliling bang kalau lagi banjir?	
I.3-4	Ya keliling nganterin bantuan makanan, air bersih	229
	Petugas Poskonya bang ada berapa yang standby?	
I.3-4	Ya lumayan lah paling 2 orang 3 orang.	230
	Kerepotan gak bang bantu warga yang mengungsi dan minta makanan?	
I.3-4	ya gimana ya gak terlalu sulit juga kali ya karena yang ngungsi ini gak terlalu banyak juga kaya di	231

	Jakarta, jadi bisalah nagturnya.	
	Biasanya warga kalau lagi banjir di rumah saudaranya atau di posko bang?	
I.3-4	Kerumah saudaranya paling ya yang ke posko paling yang saudaranya jauh aja.	232
	Untuk makanan nya cukup gak bang di posko?	
I.3-4	Ya lumayan lah cuma kan paling lauk pauk nya aja yang jadi masalah buat yang lainnya mah gak jadi masalah.	233
	Petugasnya suka datang kesini untuk mendata rumah-rumah yang rusak disini gak bang?	
I.3-4	Mungkin ada kali ya beberapa yang di data paling yang parah banget rusaknya baru didata.	234
	Untuk selimut sama obat-obatannya cukup bang?	
I.3-4	ya paling buat anak-anak kecilnya aja paling ya kalau buat orang dewasanya gak paling ya karena kekebalan tubuhnya udah bagus kali ya.	235
	Biasanya ada berapa warga yang ngep di posko?	
I.3-4	Ya paling 40 orang lah yang ngep disana, paling saya kasihan sama anak kecilnya aja buat yang mau ke pasar juga kasihan harus nungguin perahu dulu soalnya kan perahunya cuma 1, kalau pasar mah gak disini (tempat banjir) kan adanya pasar desa paling dihari-hari tertentu aja bukannya gitu.	236
	Ada sekolah yang kena banjir disini bang?	
I.3-4	Ada SD,SMP karena disini SD nya agak tinggi jadi gak kena bahkan itu dijadikan posko paling yang parah banget itu di Kampung Cigobang.	237
	Warga pernah dapat pelatihan bang disini?	
I.3-4	Gak, gak pernah	238
	Kalau banjir disini sampai berapa hari bang?	
I.3-4	Sekitar 2 mingguan lah itu kan tergantung banjirnya ya yang namanya bencana kita kan gak tau juga.	239
	Poskonya sampai kapan bang berdirinya, apakah setelah banjir masih ada?	
I.3-4	Sekitar 2-3 hari lah setelah banjir.	240

KATEGORISASI DATA

No.	Kategori	Informan
	<p style="text-align: center;"><i>Prevention</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. membangun bendungan 2. pengawasan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sedang disiapkan proyek Pembangunan Waduk Barian sebagai tempat penampungan air lainya selain Waduk Pamarayan yang sudah ada. 2. Dilakukan oleh PUSDALOPS BPBD Kabupaten Serang sebagai pengumpul informasi kebencanaan.
	<p style="text-align: center;"><i>Mitigation</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. peraturan tata ruang 2. peraturan penggunaan lahan 3. sistem perlindungan instalasi penting 4. jalan raya baru yang jauh dari 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah ada larangan bagi pemukiman dan bangunan yang berdiri di daerah rawan banjir. 2. Belum ada ketegasan dalam pelaksanaan peraturan baru bertindak pada teguran. 3. Tidak ada program pencegahan pada sektor pertanian.

	daerah rawan bencana	4. Pengalihan arus lalu lintas yang terganggu akibat banjir dilakukan sepenuhnya oleh pihak kepolisian.
	<p><i>Preparedness</i></p> <p>1. merumuskan dan mempertahankan rencana</p> <p>2. ketentuan khusus untuk tindakan darurat</p> <p>3. menyediakan sistem peringatan</p> <p>4. komunikasi darurat</p> <p>5. pendidikan dan kesadaran masyarakat serta program pelatihan</p>	<p>1. Sudah ada pedoman penanggulangan bencana dan tanggap darurat</p> <p>2. Dalam pelaksanaan digunakan Perka BNPB No. 4 Tahun 2008 dan Perka BNPB No. 14 Tahun 2008.</p> <p>3. Sudah ada PUSDALOPS sebagai tempat pelaporan kejadian bencana</p> <p>4. Sudah ada alat komunikasi yang digunakan ketika kejadian bencana banjir.</p> <p>5. Sosialisasi sudah dilakukan kepada perangkat desa dan organisasi kemasyarakatan.</p>
	<p><i>Disaster Impact</i></p> <p>1. kebijakan manajemen bencana</p>	<p>1. Ada Tim Reaksi Cepat BPBD</p>

	banjir	Kabupaten yang melakukan penanganan awal kebencanaan
	<p><i>Respond</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pelaksanaan rencana 2. aktualisasi sistem kejadian bencana 3. pencarian dan penyelamatan 4. penyediaan makanan, bantuan medis, dan penampungan, 5. survey dan penilaian 6. evaluasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. dilaksanakan oleh TRC dan BPBD saat dampak bencana tidak luas dan saat berdampak luas dilaksanakan melalui tim lintas instansi/lembaga/SKPD dan organisasi kemasyarakatan. 2. Saat tanggap darurat dibentuk Tim Koordinasi Tingkat Daerah (TKTD) / Komando Tanggap Darurat Bencana. 3. Kurang tanggap saat melakukan SAR karena bertugas berdasarkan laporan. 4. Masih kurang dalam pemenuhan kebutuhan dasar bagi pengungsi. 5. Dilakukan oleh TRC pada penanganan awal dan dilanjutkan oleh petugas posko. 6. Dilakukan oleh TKTD saat tanggap darurat berlangsung dan

		pasca bencana,
	<p><i>Recovery</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pemulihan pelayanan penting 2. pemulihan rumah, bangunan dan instalasi lain 3. penyediaan tempat tinggal sementara 4. rehabilitasi fisik dan psikologis 5. rekonstruksi bangunan dan infrastruktur 6. Ulasan pasca bencana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. dilakukan perhatian khusus pada sekolah yang terdampak banjir. 2. Belum dilakukan 3. Belum tersedia rumah sementara untuk korban yang rumahnya rusak berat. 4. Belum disediakan dokter khusus 5. Berkoordinasi dengan pemerintah daerah. 6. Dilakukan oleh BPBD ketika berdampak tidak luas dan saat berdampak luas dilakukan oleh TKTD (Tim Koordinasi Tingkat Daerah) melalui program RENAKSI (Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi)

	<p><i>Development</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. memperkenalkan sistem bangunan yang dimodernisasi dan program-program 2. menggunakan bantuan asing 3. penerapan pengalaman bencana dalam program penelitian dan pengembangan di masa depan, 4. menggunakan cara lain yang sesuai untuk situasi tertentu 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah ada program normalisasi sungai Ciujung dan tanggulnya serta Waduk Barian selain Waduk Pamarayan 2. Pendanaan Proyek Waduk Barian akan dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah bersama dengan ADB (Asian Development Bank) 3. Direkomendasikan melalui RENAksi 4. Akan ada waduk baru yaitu Waduk Barian selain Waduk Pamarayan yang sudah ada
--	---	--

Member Check

Kode : I.1-1
Nama : Drs. Adhaq M.Si
Status Informan : KABID Pencegahan Kesiapsiagaan dan Laboratorium
Hari/Tanggal : 4 Desember 2014
Pukul : 11.37 WIB
Tempat : GPBD Kabupaten Serang

- J1: bidang kesiapsiagaan dan laboratorium dimana kasubid pengajaran dan laboratorium, sebutkan laboratorium mana dibangun, kemudian bidang kasubid penyuluhan dan pelatihan, itu setiap tahun kita akan sosialisasi kebancaan kepada masyarakat.
- J2: Desa siapa kencana kita rencanakan tahun depan, disini sudah ada desa siapa kencana tapi bentukkan persiapan
budin di desa-desa jadi di kecamatan-kecamatan, misalkan pada tahun 2012 kita akan sosialisasi kebagian kades - kades selanjutnya untuk sekdes-sekdes, kita akan simulasi tata cara pemadaman api dengan cara sedirahana, jadi mulai dari yang kecil dulu, nanti kalau sudah besar harus telpon ke kesini
- J3: ya FKIPDI, Karang Taruna, PADI, KORPRI, ORARI
- J4: ya asal ada struktur organisasi jangan sampai namanya aja.
- J5: ya tomanak PRAMUSKA juga dilatih
- J6: ya kita piket 24 jam jadi kencana apa pun yang ada informasi laporan dari masyarakat
- J7: informasi dari masyarakat yang terfura melihat kesana dulu anggota TPL

- J8: iya TRC dulu melihat, apakah benar, sambil disitu mendata berapa masyarakat yang harus di evakuasi, di daerah mana, sebab berapa terjadinya, berapa orang, harus ada laporan intervensi ke pak kalaksa, kalau sudah selebar & sepeleka pak kalaksa melapor ke sekda untuk membuat masa tanggap darurat, melapor ke pak bupati segera dibuahkan kontingennya, kemudian kita buatlah struktur organisasinya.
- J9: penguasaan ruwet ya ada, seperti DAMKAR itu penguasaan setiap saat bergantian selama 24 jam, cuma pada masa-masa penghujan dari cekakem sampai Maret setelah itu gak lagi, tetapi kalau piker DAMKAR tetap.
- J10: gak ada tanggung jawab intervensi lapangan masyarakat, kecuali ada penyutuhan bisa. sebelum ada BPBD kita kan ada bantuan tim TRC.
- J11: ya dikasih sosialisasi juga
- J12: ya kalau benar terjadi bencana kita baru berangkat

Keterangan:
 T: tanya
 J: jawab

Serang, _____ 2014



NIP. 196412311993031216.
 Kabid Pencegahan, Komunikasi
 dan Laboratorium.

Member Check

Kode : I.1-2
Nama : IMRON RUBYADI S.SIP, M.Si
Status Informan : KABID Penanggulangan Bencana dan DAMKAR
Hari/Tanggal : 8 Desember 2014
Pukul : 13.30 WIB
Tempat : BPBD Kabupaten Serang.

- 11: sungai Cinjung kan sudah tidak bisa menampung debit air, perlu ada saluran plus pembuatan tanggul, revitalisasi pemukiman yang ada
bisa teknologi untuk penanganan banjir, tidak ada teknologi khusus yang ada pemetaan letak bangunan, jangan sampai ada di bantaran sungai maupun daerah aliran sungai
- 12: 2015 akan dilakukan pembangunan tanggul, normalisasi untuk mengontrolkan daerah sungai Cinjung
kapasitasnya pemerintah harus pembasah sodan sungai, agar sungai itu alirannya lancar dan tidak masuk wilayah pemukiman
- 13: suboh (dibuktikan ukuran) itu kemungkinan balai besar
- 14: kamu bisa lihat kan kanan kiri itu kan bangunan semua disungai Cinjung
selama ini yang menjadi penyebab banjir sungai Cinjung, aliran sekundernya juga harus lancar ada saluran, ada cipratan, gejala macam
- 15: proyek kita maupun prioritas di daerah yang itu akan dibasah masuk banjir, sekarang berkecuali tantoran ada kasus gubiranu sendatukan
- 16: selama ini kan kita terpusat di Pamaragan ketika debit airnya sudah tidak menampung
kamu gak dibasah ya jebek

- 18: Kita mulai dengan dengan proses pembentakan anggaran
- 19: sosialisasi sudah jelas, tidak diperbaiki karena mendeskripsikan bangunan dibantukan sampai, kedua masyarakat harus memiliki rasa memiliki terhadap pintu-pintu air, karena kita dapat lepaskan ada pintu air yang penerapannya hitung, itu kan terbantu dari tembaga.
- falsafah sense of belonging masyarakat juga penting
- 110: pemerintah daerah menyiapkan dana penanggulangan proyek nya mulai mulai ke hulu, termasuk pemadatan masyarakat
- 111: tugas kita kan koordinasi keburan, lingkungan koordinasi ke SDP, lintas instansi. Lintas kabupaten, kita komunikasikan
- 112: alhamdulillah tidak ada, komunikasi sudah baik, kerangka instansi vertikal ya kerangka keaduan semua ditaklukkan
- 113: karena kontrak ada kombinasi sama teman-teman PI, sama-teman Balai Besar
- 114: ada masalah, masalah ini di BPBD sendiri ada PUSDALOPS sampai jam 9 malam, ada informasi keselamatan semua di absen lewat posamat kalau monitoringnya ada dari pagi sampai sore rutin itu, jadi informasi sekecil apa pun itu semua.
- 115: masalah yang terbantu kita itu ada Perda no. 44 tentang penyelenggaraan bencana.
- 116: sumber pendanaan bencana kan ada pengenaan ketika terjadi bencana silahkan dipergunakan dulu karena bencana ini kan juga sangat kajian dulu pemerintah itu ada dana darurat, kalau dari kita nanti tahun 2015 ada dana siap pakai, nanti bisa dipakai untuk dana pemadatan, baik untuk perseorangan maupun masyarakat para korban

J17 : perencanaan bencana itu bukan hanya tanggung jawab pusat tapi juga tanggung jawab daerah, di Banten semua kabupaten Serang yang sudah ready

J18 : Dalam DSP ini pengukurannya tidak mudah khusus pemberian bantuan yang sifatnya kebencanaan tapi alih-alihnya khusus bantuan korban nuklir dari rumah keluarga dan itu pun mekanismenya harus melalui tim lintas dengan surat keputusan bupati, nanti dari PU dititipkan berapa kebutuhannya, berapa rusaknya, mekanismenya agak lama karena butuh jadwal, butuh summary karena dalam penanggungjaban bencana ini dari dana pusat juga

Keterangan:
T: tanya
J: Jawab

Serang, _____ 2014

(Iman Rully, S.P.P. M.H.)

Member Check

Kode : 1.1-3
Nama : H. Rani Aidin Wahim SE.
Status Informan : KABID Sarana Prasarana Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Hari/Tanggal : 4 Desember 2019
Pukul : 18.30 WIB
Tempat : BPBD Kabupaten Serang

- J1 : bencana banjir untuk rehabnya ya itu kepada masalah bangunan, manusianya dipulihkan nanti setelah selesai bencana, seperti banjir kalau ada yang rusak difungsikan kembali, direhabilitasi itu disanatkan untuk dibangun kembali
- J2 : setelah banjir terjadi kita kumpulkan instansi-instansi terkait PU, tata ruang, dinas sosial, jadi setelah kita tunas nanti ditaji dilihat dihitung kalau nanti tidak memungkinkan untuk tidak bisa ditangani lagi dan pemerintah punya dana untuk melakukan pemukiman
- J3 : kita mengkoordinasi, kemudian kita lapor ke bupati nanti sama pak bupati langsung menginstruksikan kepada yang memungutnya
- J4 : aksi ada skala prioritas dan pelaksanaan cara maka nanti kita membangunnya
- J5 : jadi intinya rehab itu melakukan perbaikan dan pemukiman pelayanan publik sampai pada tingkat sebagai suatu fungsinya, bagaimana normalisasi kegiatan masyarakat, rekonstruksi itu pembangunan kembali kebudayaan dan pelayanan masyarakat
- J6 : sekarang ini ada dana ADB nanti kalau memang sesuai dengan kajian setelah direalisasikan akan terhindar dari banjir tadi.

- J7: Kalau tidak tersedia pada anggaran murni nanti akan dicoba pada anggaran 2015 perubahan, karena kita belum bisa merencanakan tahun depan terjadi apa.
- J8: kadang-kadang tempat tinggal itu baik gak rusak karena banjir gak pernah banjir, setelah surut ya merembes langsung kembali
- J9: di Bandung dan Parung belum ada program pemerintah untuk diperbaiki.
- J10: gak ada itu ditrapikan dilakukan ya partisip diberikan pembekuan masyarakatnya, kalau ada dana APBD ada kajian atau dipindah ke masyarakatnya
- J11: BPPD itu tidak melaksanakannya hanya koordinasi seluruh dinas untuk penanggulangan bencana
- J12: nanti kita meeting yang mengaji itu, rumah yang ditertarikan siapa yang kena air deras bila lagi dibangunkannya
- J13: biarannya jangan dilihat dana terus langsung ke dari setiap instansi akan meretas semua, apa aja yang menjadi program dan dilakukan.
- J14: SOP nya belum ada, kalau banjir ya belum selama ini ya begini aja, kalau ada kejadian baru kita relokasi

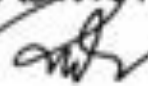
Keterangan:

T: tanya

J: jawab

Serang, 2014

KABID Bidang, Prakeron dan RP



H. Rani Adin

NIP. 195807281985081001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi: 1. Ilmu Administrasi Negara
2. Ilmu komunikasi

Jalan Raya Jakarta KM.4 Phone (0254) 280330 Ext. 228, Fax. 0254-281243 Pakupatan Serang Banten
url: <http://www.fisip-untirta.ac.id>, Email: kontak@fisip-untirta.ac.id

Nomor : 1410 /UN.43.6.1/PG/2014
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ijin Mencari Data

10 Nopember 2014

Kepada Yth.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab.Serang
di
Tempat

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan diselenggarakannya kegiatan riset mahasiswa kami di Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini memberikan tugas kepada mahasiswa berikut ini untuk mencari data yang dibutuhkan,

Nama : Kiswanto
NIM : 6661091659

Semester : 11
Mata Kuliah : Skripsi
Judul : Analisis Manajemen Penanggulangan Bencana
Badan Penanggulangan
Bencana Daerah (BPBD) Kab. Serang
(Studi Kasus Peristiwa Bencana
Banjir)

Data diperlukan : Profil BPBD Kab.Serang
Data Pegawai/ Petugas BPBD Kab.Serang
Surat
Ijin Melakukan Penelitian (MEMO)
Wawancara Kepala Pelaksana BPBD
Kab.Serang
Wawancara Pegawai/ Petugas BPBD Kab.Serang

Untuk itu kami berharap dan memohon kepada Bapak/ Ibu untuk dapat **memberikan izin guna mencari data** yang dibutuhkan mahasiswa tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara

Rahmawati, S.Sos, M.Si
NIP. 197905252005012001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi: 1. Ilmu Administrasi Negara
2. Ilmu komunikasi
3. Ilmu Pemerintahan

Jalan Raya Jakarta KM4 Phone (0254) 280330 Ext. 228, Fax. (0254) 281245 Pakupatan Serang Banten
url: <http://www.fisip-untirta.ac.id>, Email: kontak@fisip-untirta.ac.id

Nomor : 037/UN.43.6.1/PG/2014
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ijin Mencari Data

29 Oktober 2014

Kepada Yth.
Kepala Desa Kantor Desa Koper
Kabupaten Serang Provinsi Banten
di
Tempat

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan diselenggarakannya kegiatan riset mahasiswa kami di Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini memberikan tugas kepada mahasiswa berikut ini untuk mencari data yang dibutuhkan,

Nama : Kiswanto
NIM : 6661091659

Semester : 11
Mata Kuliah : Skripsi
Judul : Manajemen Penanggulangan Bencana BPBD Kabupaten Serang
Studi Kasus Peristiwa Bencana Banjir
Data : Wawancara
diperlukan : Profil Desa

Untuk itu kami berharap dan memohon kepada Bapak/ Ibu untuk dapat memberikan izin guna mencari data yang dibutuhkan mahasiswa tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara



Rina Yulianti, S.IP, M.Si
NIP. 197407052006042011

Latihan Poin

No	Hari, Tgl	Urutan/Catatan Pembimbing	Paraf Dosen
1	6/12 12/12	latihan wawancara R. Dary	<i>[Signature]</i>
	14 Feb 13	latar belg nos. tahun 2010, susunan data, telle riwayat dg kas) dan alam. nngara	<i>[Signature]</i>
	23 Sept 13	latarbelly susunan data bernyaka berflur, cel	<i>[Signature]</i>

Catatan: Jumlah setiap moka mahasiswa dengan masing-masing pembimbing minimal 7 (tujuh) kali/total 14 (empat belas) kali

No	Harf, Tgl	Uraian/Catatan Pembimbing	Paraf Dosen
	3/1/14	Probleme Labor belah ketupat. Probate banyak grafika	
	13/2/14	Probate: gambar, gambar Geri: gambar Geri: gambar	
	20/2/14	Probate: bab 2 Tambahkan USM 20 berbentuk gambar	
	28/2/14	Tambahkan foto perbandingan - tanpa gambar	

Catatan: Jumlah tetap maka mahasiswa dengan masing-masing pembimbing minimal 7 (tujuh) kali total 14 (empat belas) kali

No	Harf, Tgl	Uraian/Catatan Pembimbing	Paraf Dosen
	4/3	Ac proposal	
	6 MARE 14	Kenapa judul sendiri. Sesuai dengan interability di kelas Gedung interability yang ser Gedung Konsistensi warna warna) sehingga bisa ATAU warna. panjang panjang? Lampiran (surplus partikel)	
	14 MARE 14	partikel: interability idm-f. maj → (tidak pernah) Pembimbing: wawancara partikel	
	18 MARE 14	ACC Seminar Proposal	

Catatan: Jumlah tetap maka mahasiswa dengan masing-masing pembimbing minimal 7 (tujuh) kali total 14 (empat belas) kali



No	Hari, Tgl	Uraian/Catatan Pembimbing	Paraf Dosen
	24/9/14	ke rumah 10p dengan	[Signature]

Catatan: Jumlah tatap muka mahasiswa dengan masing-masing pembimbing minimal 7 (tujuh) kali/total 14 (empat belas) kali

CATATAN BIMBINGAN

Praktikum 1

Praktikum 11

NO	TANGGAL	CATATAN DOSEN PEMBIMBING	PARAF DOSEN
	24/11/14	Kec. trans laporan	Dosen
		Acc laporan	Dosen
		ACC LAPORAN	Dosen
21/11	21/11	Perbaiki laporan praktikum. Tambahkan pencahayaan.	Dosen
21/11	21/11	Perbaikan dan Perbaiki penyajian gambar dan skema	Dosen

Uraian: Uraian yang sudah dilaksanakan meliputi: meeting, meeting, penyusunan, wawancara, dan lain-lain. (jika ada)

Indonesian Higher Education Council

hal 12

NO	TANGGAL	CATATAN DOSEN PEMBIMBING	PARAF DOSEN
	24/11	Acc Sidang Abstrak rangkai subter 20.	Dosen
29/11	29/11	Buat hasil Abstrak dan tulis Tabel Ringkasan	Dosen
30/11	30/11	Acc Sidang	Dosen

Uraian: Uraian yang sudah dilaksanakan meliputi: meeting, meeting, penyusunan, wawancara, dan lain-lain. (jika ada)

Indonesian Higher Education Council

hal 13



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TAHUN 2007

TENTANG

PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor nonalam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan nasional;
 - c. bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana yang ada belum dapat dijadikan landasan hukum yang kuat dan menyeluruh serta tidak sesuai dengan perkembangan keadaan masyarakat dan kebutuhan bangsa Indonesia sehingga menghambat upaya penanggulangan bencana secara terencana, terkoordinasi, dan terpadu;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana;
- Mengingat : Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan.....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
2. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
3. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
4. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.
5. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
6. Kegiatan.....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

6. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
7. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
8. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
9. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
10. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
11. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
12. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
13. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.

14. Rawan.....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

14. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
15. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
16. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
17. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
18. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
19. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
20. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
21. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
22. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
23. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

24. Pemerintah.....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

24. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati/walikota, atau perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
25. Lembaga usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
26. Lembaga internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing nonpemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa.

BAB II **LANDASAN, ASAS, DAN TUJUAN**

Pasal 2

Penanggulangan bencana berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

- (1) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berasaskan:
 - a. kemanusiaan;
 - b. keadilan;
 - c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - d. keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
 - e. ketertiban dan kepastian hukum;
 - f. kebersamaan;
 - g. kelestarian lingkungan hidup; dan
 - h. ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yaitu:
 - a. cepat dan tepat;
 - b. prioritas;
 - c. koordinasi.....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- c. koordinasi dan keterpaduan;
- d. berdaya guna dan berhasil guna;
- e. transparansi dan akuntabilitas;
- f. kemitraan;
- g. pemberdayaan;
- h. nondiskriminatif; dan
- i. nonproletisi.

Pasal 4

Penanggulangan bencana bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. menelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
- c. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
- d. menghargai budaya lokal;
- e. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- f. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan
- g. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

BAB III
TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 5

Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 6

Tanggung jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. pengurangan risiko bencana dan pepaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan;

b.perlindungan.....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- c. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- d. pemulihan kondisi dari dampak bencana;
- e. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang memadai;
- f. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai; dan
- g. pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.

Pasal 7

- (1) Wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:
 - a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana selaras dengan kebijakan pembangunan nasional;
 - b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
 - c. penetapan status dan tingkatan bencana nasional dan daerah;
 - d. penentuan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan negara lain, badan-badan, atau pihak-pihak internasional lain;
 - e. perumusan kebijakan tentang penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana;
 - f. perumusan kebijakan mencegah penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam untuk melakukan pemulihan; dan
 - g. pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala nasional.
- (2) Penetapan status dan tingkat bencana nasional dan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat indikator yang meliputi:
 - a. jumlah korban;
 - b. kerugian harta benda;
 - c. kerusakan prasarana dan sarana;
 - d. cakupan luas wilayah yang terkena bencana; dan
 - e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

(3)Ketentuan.....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan status dan tingkatan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 8

Tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- c. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; dan
- d. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai.

Pasal 9

Wewenang pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
- b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
- c. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
- d. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
- e. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; dan
- f. pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala provinsi, kabupaten/kota.

BAB IV.....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

BAB IV KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Pasal 10

- (1) Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- (2) Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Lembaga Pemerintah Nondepartemen setingkat menteri.

Pasal 11

Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) terdiri atas unsur:

- a. pengarah penanggulangan bencana; dan
- b. pelaksana penanggulangan bencana.

Pasal 12

Badan Nasional Penanggulangan Bencana mempunyai tugas:

- a. memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standardisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- c. menyampaikan informasi kegiatan kepada masyarakat;
- d. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Presiden setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan pada setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- e. menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan/bantuan nasional dan internasional;
- f. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

g.melaksanakan.....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- g. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
- h. menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 13

Badan Nasional Penanggulangan Bencana mempunyai fungsi meliputi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien; dan
- b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Pasal 14

- (1) Unsur pengarah penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a mempunyai fungsi:
 - a. merumuskan konsep kebijakan penanggulangan bencana nasional;
 - b. memantau; dan
 - c. mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pejabat pemerintah terkait; dan
 - b. anggota masyarakat profesional.
- (3) Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipilih melalui uji kepatutan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 15

- (1) Pembentukan unsur pelaksana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b merupakan kewenangan Pemerintah.
- (2) Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi koordinasi, komando, dan pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

(3)Keanggotaan.....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- (3) Keanggotaan unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tenaga profesional dan ahli.

Pasal 16

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, unsur pelaksana penanggulangan bencana mempunyai tugas secara terintegrasi yang meliputi:

- a. prabencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pascabencana.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, fungsi, tugas, struktur organisasi, dan tata kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana diatur dengan Peraturan Presiden.

Bagian Kedua

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 18

- (1) Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. badan pada tingkat provinsi dipimpin oleh seorang pejabat setingkat di bawah gubernur atau setingkat eselon Ib; dan
 - b. badan pada tingkat kabupaten/kota dipimpin oleh seorang pejabat setingkat di bawah bupati/walikota atau setingkat eselon IIa.

Pasal 19

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas unsur:
 - a. pengarah penanggulangan bencana; dan
 - b. pelaksana penanggulangan bencana.

(2) Pembentukan.....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- (2) Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Pasal 20

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; serta
- b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Pasal 21

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas:

- a. menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
- f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan

i. melaksanakan.....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Unsur pengarah penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a mempunyai fungsi:
 - a. menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
 - b. memantau; dan
 - c. mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.
- (2) Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pejabat pemerintah daerah terkait; dan
 - b. anggota masyarakat profesional dan ahli.
- (3) Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipilih melalui uji kepatutan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 23

- (1) Pembentukan unsur pelaksana penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b merupakan kewenangan pemerintah daerah.
- (2) Unsur pelaksana penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. koordinasi;
 - b. komando; dan
 - c. pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya.
- (3) Keanggotaan unsur pelaksana penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tenaga profesional dan ahli.

Pasal 24

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), unsur pelaksana penanggulangan bencana daerah mempunyai tugas secara terintegrasi yang meliputi:

- a. prabencana;
- b. saat.....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pascabencana.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, fungsi, tugas, struktur organisasi, dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 26

- (1) Setiap orang berhak:
 - a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
 - b. mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
 - c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana.
 - d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
 - e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
 - f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.
- (2) Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
- (3) Setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi.

Bagian Kedua.....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 27

Setiap orang berkewajiban:

- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. melakukan kegiatan penanggulangan bencana; dan
- c. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana.

BAB VI PERAN LEMBAGA USAHA DAN LEMBAGA INTERNASIONAL

Bagian Kesatu Peran Lembaga Usaha

Pasal 28

Lembaga usaha mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.

Pasal 29

- (1) Lembaga usaha menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Lembaga usaha berkewajiban menyampaikan laporan kepada pemerintah dan/atau badan yang diberi tugas melakukan penanggulangan bencana serta menginformasikannya kepada publik secara transparan.
- (3) Lembaga usaha berkewajiban mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya dalam penanggulangan bencana.

Bagian Kedua.....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Bagian Kedua
Peran Lembaga Internasional

Pasal 30

- (1) Lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah dapat ikut serta dalam kegiatan penanggulangan bencana dan mendapat jaminan perlindungan dari Pemerintah terhadap para pekerjanya.
- (2) Lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan secara sendiri-sendiri, bersama-sama, dan/atau bersama dengan mitra kerja dari Indonesia dengan memperhatikan latar belakang sosial, budaya, dan agama masyarakat setempat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana oleh lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN
BENCANA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 31

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan berdasarkan 4 (empat) aspek meliputi:

- a. sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;
- b. kelestarian lingkungan hidup;
- c. kemanfaatan dan efektivitas; dan
- d. lingkup luas wilayah.

Pasal 32.....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Pasal 32

- (1) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah dapat:
 - a. menetapkan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk pemukiman; dan/atau
 - b. mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan setiap orang atas suatu benda sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berhak mendapat ganti rugi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Tahapan

Pasal 33

Penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap meliputi:

- a. prabencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pascabencana.

Paragraf Kesatu Prabencana

Pasal 34

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a meliputi:

- a. dalam situasi tidak terjadi bencana; dan
- b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

Pasal 35...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Pasal 35

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a meliputi:

- a. perencanaan penanggulangan bencana;
- b. pengurangan risiko bencana;
- c. pencegahan;
- d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
- e. persyaratan analisis risiko bencana;
- f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
- g. pendidikan dan pelatihan; dan
- h. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

Pasal 36

- (1) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a ditetapkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penyusunan perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan.
- (3) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyusunan data tentang risiko bencana pada suatu wilayah dalam waktu tertentu berdasarkan dokumen resmi yang berisi program kegiatan penanggulangan bencana.
- (4) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
 - b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
 - c. analisis kemungkinan dampak bencana;
 - d. pilihan tindakan pengurangan risiko bencana;
 - e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
 - f. alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.

(5) Pemerintah ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- (5) Pemerintah dan pemerintah daerah dalam waktu tertentu meninjau dokumen perencanaan penanggulangan bencana secara berkala.
- (6) Dalam usaha menelaraskan kegiatan perencanaan penanggulangan bencana, Pemerintah dan pemerintah daerah dapat mewajibkan pelaku penanggulangan bencana untuk melaksanakan perencanaan penanggulangan bencana.

Pasal 37

- (1) Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b dilakukan untuk mengurangi dampak buruk yang mungkin timbul, terutama dilakukan dalam situasi sedang tidak terjadi bencana.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
 - b. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
 - c. pengembangan budaya sadar bencana;
 - d. peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana; dan
 - e. penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana.

Pasal 38

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c meliputi:

- a. identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
- b. kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana;
- c. pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana;
- d. penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- e. penguatan ketahanan sosial masyarakat.

Pasal 39...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Pasal 39

Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d dilakukan dengan cara mencantumkan unsur-unsur rencana penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan pusat dan daerah.

Pasal 40

- (1) Rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) ditinjau secara berkala.
- (2) Penyusunan rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan.
- (3) Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi yang menimbulkan bencana dilengkapi dengan analisis risiko bencana sebagai bagian dari usaha penanggulangan bencana sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 41

- (1) Persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e disusun dan ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- (2) Pemenuhan syarat analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dalam dokumen yang disahkan oleh pejabat pemerintah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Badan Nasional Penanggulangan Bencana melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 42

- (1) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf f dilakukan untuk mengurangi risiko bencana yang mencakup pemberlakuan peraturan tentang penataan ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggar.

(2) Pemerintah ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

- (2) Pemerintah secara berkala melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tata ruang dan pemenuhan standar keselamatan.

Pasal 43

Pendidikan, pelatihan, dan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf g dan h dilaksanakan dan ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 44

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b meliputi:

- a. kesiapsiagaan;
- b. peringatan dini; dan
- c. mitigasi bencana.

Pasal 45

- (1) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a dilakukan untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian bencana.
- (2) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
 - b. pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;
 - c. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
 - e. penyiapan lokasi evakuasi;
 - f. penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan
 - g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.

Pasal 46...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Pasal 46

- (1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b dilakukan untuk pengambilan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengamatan gejala bencana;
 - b. analisis hasil pengamatan gejala bencana;
 - c. pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang;
 - d. penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana; dan
 - e. pengambilan tindakan oleh masyarakat.

Pasal 47

- (1) Mitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c dilakukan untuk mengurangi risiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.
- (2) Kegiatan mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pelaksanaan penataan ruang;
 - b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan; dan
 - c. penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.

**Paragraf Kedua
Tanggap Darurat**

Pasal 48

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b meliputi:

- a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
- b. penentuan status keadaan darurat bencana;
- c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;

d. pemenuhan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

- d. pemenuhan kebutuhan dasar;
- e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

Pasal 49

Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a dilakukan untuk mengidentifikasi:

- a. cakupan lokasi bencana;
- b. jumlah korban;
- c. kerusakan prasarana dan sarana;
- d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
- e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

Pasal 50

- (1) Dalam hal status keadaan darurat bencana ditetapkan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai kemudahan akses yang meliputi:
 - a. pengerahan sumber daya manusia;
 - b. pengerahan peralatan;
 - c. pengerahan logistik;
 - d. imigrasi, cukai, dan karantina;
 - e. perizinan;
 - f. pengadaan barang/jasa;
 - g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
 - i. penyelamatan; dan
 - h. komando untuk memerintahkan sektor/lembaga.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 51

- (1) Penetapan status darurat bencana dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan skala bencana.

(2) Penetapan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk skala nasional dilakukan oleh Presiden, skala provinsi dilakukan oleh gubernur, dan skala kabupaten/kota dilakukan oleh bupati/walikota.

Pasal 52

Penyelamatan dan evakuasi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana yang terjadi pada suatu daerah melalui upaya:

- a. pencarian dan penyelamatan korban;
- b. pertolongan darurat; dan/atau
- c. evakuasi korban.

Pasal 53

Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf d meliputi bantuan penyediaan:

- a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- b. pangan;
- c. sandang;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. pelayanan psikososial; dan
- f. penampungan dan tempat hunian.

Pasal 54

Penanganan masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana dilakukan dengan kegiatan meliputi pendataan, penempatan pada lokasi yang aman, dan pemenuhan kebutuhan dasar.

Pasal 55

- (1) Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf e dilakukan dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.

(2) Kelompok ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

- (2) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. bayi, balita, dan anak-anak;
 - b. ibu yang sedang mengandung atau menyusui;
 - c. penyandang cacat; dan
 - d. orang lanjut usia.

Pasal 56

Pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf f dilakukan dengan memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan akibat bencana.

Paragraf Ketiga Pascabencana

Pasal 57

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c meliputi:

- a. rehabilitasi; dan
- b. rekonstruksi.

Pasal 58

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a dilakukan melalui kegiatan:
- a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
 - b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - d. pemulihan sosial psikologis;
 - e. pelayanan kesehatan;
 - f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - g. pemulihan sosial ekonomi budaya;
 - i. pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - j. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
 - k. pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 59...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

Pasal 59

- (1) Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b, dilakukan melalui kegiatan pembangunan yang lebih baik, meliputi:
 - a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
 - b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 - c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
 - d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
 - e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat;
 - f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
 - g. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
 - h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII
PENDANAAN DAN PENGELOLAAN
BANTUAN BENCANA

Bagian Kesatu
Pendanaan

Pasal 60

- (1) Dana penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan pemerintah daerah.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat.

Pasal 61

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana secara memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, huruf f dan Pasal 8 huruf d.

(2) Penggunaan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

- (2) Penggunaan anggaran penanggulangan bencana yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 62

- (1) Pada saat tanggap darurat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana menggunakan dana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f.
- (2) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Pemerintah dalam anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Pasal 63

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengelolaan dana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 62 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 64

Dana untuk kepentingan penanggulangan bencana yang disebabkan oleh kegiatan keantariksaan yang menimbulkan bencana menjadi tanggung jawab negara peluncur dan/atau pemilik sesuai dengan hukum dan perjanjian internasional.

Bagian Kedua Pengelolaan Bantuan Bencana

Pasal 65

Pengelolaan sumber daya bantuan bencana meliputi perencanaan, penggunaan, pemeliharaan, pemantauan, dan pengevaluasian terhadap barang, jasa, dan/atau uang bantuan nasional maupun internasional.

Pasal 66...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

Pasal 66

Pemerintah, pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan pengelolaan sumber daya bantuan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 pada semua tahap bencana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 67

Pada saat tanggap darurat bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengarahkan penggunaan sumber daya bantuan bencana yang ada pada semua sektor terkait.

Pasal 68

Tata cara pemanfaatan serta pertanggungjawaban penggunaan sumber daya bantuan bencana pada saat tanggap darurat dilakukan secara khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi kedaruratan.

Pasal 69

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan bantuan santunan duka cita dan kecacatan bagi korban bencana.
- (2) Korban bencana yang kehilangan mata pencaharian dapat diberi pinjaman lunak untuk usaha produktif.
- (3) Besarnya bantuan santunan duka cita dan kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pinjaman lunak untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah.
- (4) Tata cara pemberian dan besarnya bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- (5) Unsur masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyediaan bantuan.

Pasal 70...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

Pasal 70

Pengelolaan sumber daya bantuan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 69 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
PENGAWASAN

Pasal 71

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahap penanggulangan bencana.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sumber ancaman atau bahaya bencana;
 - b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;
 - c. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana;
 - d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
 - e. kegiatan konservasi lingkungan;
 - f. perencanaan penataan ruang;
 - g. pengelolaan lingkungan hidup;
 - h. kegiatan reklamasi; dan
 - i. pengelolaan keuangan.

Pasal 72

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap laporan upaya pengumpulan sumbangan, Pemerintah dan pemerintah daerah dapat meminta laporan tentang hasil pengumpulan sumbangan agar dilakukan audit.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah dan masyarakat dapat meminta agar dilakukan audit.
- (3) Apabila hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan adanya penyimpangan penggunaan terhadap hasil sumbangan, penyelenggara pengumpulan sumbangan dikenai sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 73...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

Pasal 73

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 74

- (1) Penyelesaian sengketa penanggulangan bencana pada tahap pertama diupayakan berdasarkan asas musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian di luar pengadilan atau melalui pengadilan.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 75

- (1) Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan pembangunan berisiko tinggi, yang tidak dilengkapi dengan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) yang mengakibatkan terjadinya bencana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun atau paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan timbulnya kerugian harta benda atau barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun atau paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(3) Dalam ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun atau paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 76

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dilakukan karena kesengajaan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dilakukan karena kesengajaan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun atau paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) dilakukan karena kesengajaan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) tahun atau paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Pasal 77

Setiap orang yang dengan sengaja menghambat kemudahan akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun atau paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 78...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

Pasal 78

Setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan pengelolaan sumber daya bantuan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, dipidana dengan pidana penjara dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun atau paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Pasal 79

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78.
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
 - a. pencabutan izin usaha; atau
 - b. pencabutan status badan hukum.

BAB XII **KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 80

Pada saat berlakunya undang-undang ini semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan undang-undang ini.

Pasal 81...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

Pasal 81

Semua program kegiatan berkaitan dengan penanggulangan bencana yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 82

- (1) Sebelum Badan Nasional Penanggulangan Bencana dibentuk, Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana tetap dapat melaksanakan tugasnya.
- (2) Setelah Badan Nasional Penanggulangan Bencana dibentuk, Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana dinyatakan dibubarkan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 83

Pada saat berlakunya undang-undang ini, paling lambat 6 (enam) bulan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana sudah terbentuk dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah paling lambat 1 (satu) tahun sudah terbentuk.

Pasal 84

Peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan undang-undang ini harus sudah diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya undang-undang ini.

Pasal 85

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 26 April 2007

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 26 April 2007

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 66



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2007
TENTANG
PENANGGULANGAN BENCANA

I. UMUM

Alenia ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,

Sebagai implementasi dari amanat tersebut dilaksanakan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera yang senantiasa memperhatikan hak atas penghidupan dan perlindungan bagi setiap warga negaranya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki wilayah yang luas dan terletak digaris katulistiwa pada posisi silang antara dua benua dan dua samudra dengan kondisi alam yang memiliki berbagai keunggulan, namun dipihak lain posisinya berada dalam wilayah yang memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang rawan terhadap terjadinya bencana dengan frekwensi yang cukup tinggi, sehingga memerlukan penanganan yang sistematis, terpadu, dan terkoordinasi.

Potensi penyebab bencana diwilayah negara kesatuan Indonesia dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis bencana, yaitu bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial.

Bencana alam antara lain berupa gempa bumi karena alam, letusan gunung berapi, angin topan, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemi, wabah, kejadian luar biasa, dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa.

Bencana nonalam antara lain kebakaran hutan/lahan yang disebabkan oleh manusia, kecelakaan transportasi, kegagalan konstruksi/teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan.

Bencana...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Bencana sosial antara lain berupa kerusuhan sosial dan konflik sosial dalam masyarakat yang sering terjadi.

Penanggulangan Bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yaitu serangkaian kegiatan penanggulangan bencana sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana. Selama ini masih dirasakan adanya kelemahan baik dalam pelaksanaan penanggulangan bencana maupun yang terkait dengan landasan hukumnya, karena belum ada undang-undang yang secara khusus menangani bencana.

Mencermati hal-hal tersebut diatas dan dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana, disusunlah Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana yang pada prinsipnya mengatur tahapan bencana meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

Materi muatan Undang-undang ini berisikan ketentuan-ketentuan pokok sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan wewenang Pemerintah dan pemerintah daerah, yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.
2. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam tahap tanggap darurat dilaksanakan sepenuhnya oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Badan penanggulangan bencana tersebut terdiri dari unsur pengarah dan unsur pelaksana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas dan fungsi antara lain pengkoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana dan terpadu sesuai dengan kewenangannya.
3. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan memperhatikan hak masyarakat yang antara lain mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, mendapatkan perlindungan sosial, mendapatkan pendidikan dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.
4. Kegiatan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan memberikan kesempatan secara luas kepada lembaga usaha dan lembaga internasional.
5. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan pada tahap pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana, karena masing-masing tahapan mempunyai karakteristik penanganan yang berbeda.
6. Pada...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

6. Pada saat tanggap darurat, kegiatan penanggulangan bencana selain didukung dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, juga disediakan dana siap pakai dengan pertanggungjawaban melalui mekanisme khusus.
7. Pengawasan terhadap seluruh kegiatan penanggulangan bencana dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat pada setiap tahapan bencana, agar tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana penanggulangan bencana.
8. Untuk menjamin ditaatinya undang-undang ini dan sekaligus memberikan efek jera terhadap para pihak, baik karena kelalaian maupun karena kesengajaan sehingga menyebabkan terjadinya bencana yang menimbulkan kerugian, baik terhadap harta benda maupun matinya orang, menghambat kemudahan akses dalam kegiatan penanggulangan bencana, dan penyalahgunaan pengelolaan sumber daya bantuan bencana dikenakan sanksi pidana, baik pidana penjara maupun pidana denda, dengan menerapkan pidana minimum dan maksimum.

Dengan materi muatan sebagaimana disebutkan diatas, Undang-Undang ini diharapkan dapat dijadikan landasan hukum yang kuat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sehingga penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dilaksanakan secara terencana, terkoordinasi, dan terpadu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” termanifestasi dalam penanggulangan bencana sehingga undang-undang ini memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia, harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf b...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa setiap materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana tidak boleh berisi hal-hal yang membedakan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keseimbangan kehidupan sosial dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan "asas keselarasan" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keselarasan tata kehidupan dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan "asas keserasian" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keserasian lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas ketertiban dan kepastian hukum" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah bahwa penanggulangan bencana pada dasarnya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama Pemerintah dan masyarakat yang dilakukan secara gotong royong.

Huruf g...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan hidup” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan kelestarian lingkungan untuk generasi sekarang dan untuk generasi yang akan datang demi kepentingan bangsa dan negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal sehingga mempermudah dan mempercepat proses penanggulangan bencana, baik pada tahap pencegahan, pada saat terjadi bencana, maupun pada tahap pascabencana.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prinsip cepat dan tepat” adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip prioritas” adalah bahwa apabila terjadi bencana, kegiatan penanggulangan harus mendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “prinsip koordinasi” adalah bahwa penanggulangan bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung.

Yang dimaksud dengan “prinsip keterpaduan” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerja sama yang baik dan saling mendukung.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “prinsip berdaya guna” adalah bahwa dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Yang...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Yang dimaksud dengan “prinsip berhasil guna” adalah bahwa kegiatan penanggulangan bencana harus berhasil guna, khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “prinsip transparansi” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan “prinsip nondiskriminasi” adalah bahwa negara dalam penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apa pun.

Huruf i

Yang dimaksud dengan ”nonproletisi” adalah bahwa dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi bencana alam, bencana nonalam, dan bencana sosial.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan dana 'siap pakai' yaitu dana yang dicadangkan oleh pemerintah untuk dapat dipergunakan sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

"Pengendalian" dalam pasal ini dimaksudkan sebagai pengawasan terhadap penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang berskala nasional yang diselenggarakan oleh masyarakat, termasuk pemberian ijin yang menjadi kewenangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f

“Pengendalian” dalam Pasal ini dimaksudkan sebagai pengawasan terhadap penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang berskala provinsi, kabupaten/kota yang diselenggarakan oleh masyarakat, termasuk pemberian ijin yang menjadi kewenangan gubernur/bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Ayat (2)

Unsur Pengarah terdiri dari unsur pemerintah dan unsur masyarakat profesional dalam jumlah yang seimbang dan proporsional.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan fungsi koordinasi adalah melakukan koordinasi pada tahap prabencana dan pascabencana, sedangkan yang dimaksud dengan fungsi komando dan pelaksana adalah fungsi yang dilaksanakan pada saat tanggap darurat.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Keanggotaan unsur pengarah mengacu pada keanggotaan unsur pengarah pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g,
Pengendalian dalam ketentuan ini termasuk pemberian izin pengumpulan uang dan barang yang dilakukan oleh gubernur dan bupati/walikota sesuai dengan lingkup kewenangannya.

Huruf h
Cukup jelas

Huruf i
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a,

Yang dimaksud dengan masyarakat rentan bencana adalah anggota masyarakat yang membutuhkan bantuan karena keadaan yang di sandangnya di antaranya masyarakat lanjut usia, penyandang cacat, anak-anak, serta ibu hamil dan menyusui.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Yang dimaksud dengan "analisis risiko bencana" adalah kegiatan penelitian dan studi tentang kegiatan yang memungkinkan terjadinya bencana.

Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana adalah kegiatan pembangunan yang memungkinkan terjadinya bencana, antara lain pengeboran minyak bumi, pembuatan senjata nuklir, pembuangan limbah, eksplorasi tambang, dan pembabatan hutan.

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Yang dimaksud dengan “kegiatan keantariksaan” adalah kegiatan yang berkaitan dengan ruang angkasa yang menimbulkan bencana, antara lain, peluncuran satelit dan eksplorasi ruang angkasa.

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Pasal 81
Cukup jelas

Pasal 82
Cukup jelas

Pasal 83
Cukup jelas

Pasal 84
Cukup jelas

Pasal 85
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4723

-salinan-